



**PEMERINTAH
KABUPATEN
JEPARA**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

**KABUPATEN JEPARA
TAHUN**

2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Penjelasan Umum 1

 B. Perencanaan Pembangunan Daerah 19

 C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 205

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 210

 A. Capaian Kinerja Makro 210

 B. Capaian Kinerja Penyelenggraan Urusan Pemerintahan 210

 C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 399

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 442

 A. Tugas Pembantuan Yang Diterima 442

 B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan (Penugasan) 452

 1. Matriks Capaian Kinerja Tugas Pembantuan yang diterima 453

 2. Matriks Capaian Kinerja Tugas Pembantuan yang diberikan (Penugasan)..... 464

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 466

BAB V PENUTUP 539

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

 1. Indikator Kinerja Kunci Outcome

 2. Indikator Kinerja Kunci Output

 3. SK Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023

 4. Surat Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobilalamin, segala rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridho-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 ini dapat disusun dan disampaikan tepat pada waktunya.

Laporan pertanggungjawaban ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kepada Masyarakat. Laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah. Harapan kami, laporan ini selain bisa memberikan manfaat juga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan *Good Governance*.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pedoman penyusunan LPPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.7/8697/OTDA Tanggal 11 Desember 2023, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang terdiri atas, capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Tentunya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan. Namun dengan semangat Trus Karya Tataning Bumi serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kami sangat berharap bahwa kualitas dan kuantitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin baik dan terus meningkat setiap tahunnya.

Evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai maupun yang belum dalam proses pembangunan. Ini bisa menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang sehingga Pemerintah Daerah bisa mengelola dengan lebih baik lagi untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2023 guna mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif, nyata dan bertanggung jawab.

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita untuk terus membangun Kabupaten Jepara Trus Karya Tataning Bumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jepara, 25 Maret 2024
Pj. BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA., ATD., S.H., M.M

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

A. Penjelasan Umum.

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sehingga dikeluarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Otonomi Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

b. Data Geografis Wilayah Kab. Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara. Secara geograis, Kabupaten Jepara terletak berbatasan langsung dengan laut Jawa disebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati, sebelah barat berbatasan dengan laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Dengan geografis seperti itu, Kabupaten Jepara memiliki wilayah pantai yang cukup panjang. Secara Topografis, Kabupaten Jepara yang merupakan daerah kawasan utara Jawa ini dibagi dalam empat (4) wilayah yaitu : wilayah pantai di bagian tengah dan selatan, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari gunung Muria serta wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan rangkaian kepulauan Karimunjawa.

Dengan kontur wilayah tersebut, Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 meter sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), dengan daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0–2 m dpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0–1.301 m dpl yang merupakan perbukitan.

Tabel
Data Ketinggian dari Permukaan Air Laut
Kabupaten Jepara

No.	Nama Kecamatan	Ketinggian (meter)
1	Kedung	0 – 2
2	Pecangaan	2-17
3	Welahan	2 – 7
4	Mayong	13 - 438
5	Batealit	68 - 378
6	Jepara	0 – 50
7	Mlonggo	0 - 300
8	Bangsri	0 - 594
9	Keling	0 - 1.301
10	Karimunjawa	0 - 100
11	Tahunan	0 – 46
12	Nalumsari	13 - 736
13	Kalinyamatan	2 – 29
14	Kembang	0 - 1.000
15	Pakis Aji	0 - 1.000
16	Donorojo	0 - 619

Sumber : *Jepara Dalam Angka 2023*

Secara administratif luas Kabupaten Jepara adalah 100.413.189 Ha dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan serta 1.015 RW dan 4.766 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling, yaitu 126,31 Km dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 26,08 Km.

1. Letak Geografis.

Kabupaten Jepara secara geografis terletak pada posisi 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan dan 110° 9' 48, 02"

sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timur sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah.

2. Luas Wilayah Kabupaten

Tabel Luas Wilayah Kab. Jepara per kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Luas Wilayah (Ha)
1	Kedung	47,087	4.787
2	Pecangaan	38,62	3.862
3	Welahan	30,43	3.043
4	Mayong	73,64	7.364
5	Batealit	100,28	10.028
6	Jepara	28,16	2.816
7	Mlonggo	49,51	4.951
8	Bangsri	94,63	9.463
9	Keling	126,31	12.663
10	Karimunjawa	48,47	4.847
11	Tahunan	44,46	4.446
12	Nalumsari	57,60	5.760
13	Kalinyamatan	26,08	2.608
14	Kembang	122,68	12.268
15	Pakis Aji	67,93	6.793
16	Donorojo	105,32	10.532

Sumber : Jepara Dalam Angka 2023

Peta Wilayah Kabupaten Jepara



3. Luas Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha . Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 126,31 Km dan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil yaitu Kecamatan Kalinyamatan yaitu 26,08 Km .

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut terbagi atas :

- lahan sawah/wilayah tak terbangun meliputi tambak, pertanian , kawasan perkebunan serta konservasi.
- bukan lahan sawah/tanah kering/*build up area* yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan industri, transportasi .

Lahan sebagaimana dimaksud adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai modal dalam suatu sektor perekonomian. Penggunaan lahan akan cenderung berubah di masa yang akan datang dari lahan persawahan menjadi pemukiman, fasilitas umum dan sebagainya. Hal ini terjadi karena adanya

pertambahan penduduk, pergeseran struktur ekonomi dan kemajuan teknologi.

4. Iklim

Kabupaten Jepara sebagaimana daerah lainnya beriklim tropis terdiri dari musim kemarau dan musim hujan yang silih berganti sepanjang tahun. Musim penghujan di Kabupaten Jepara antara bulan Nopember – April dipengaruhi oleh musim barat sedang musim kemarau antara bulan Mei – Oktober dipengaruhi angin musim timur Besar rata-rata jumlah curah hujan tahunan wilayah Jepara utara adalah 2000-2.500 mm/tahun dan Jepara bagian selatan adalah 2.500-3000 mm/tahun , dengan jumlah hari hujan 102 hari. Suhu udara di Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 ° celcius dan tertinggi pada 33,71 ° celcius, dengan kelembaban udara rata –rata sekitar 84%.

c. Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah tertentu. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu tertentu disebut dengan Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*). Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan dan pendidikan yang berwawasan gender. Berdasarkan jenis kelamin, dari total penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2023 yaitu 1.264.598 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 636.096 orang dan perempuan sebanyak 628.502 orang.

Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

NO.	KECAMATAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	KEDUNG	41.572	41.002	82.574
2.	PECANGAAN	45.251	44.875	90.126

3.	WELAHAN	41.195	40.493	81.688
4.	MAYONG	48.926	48.619	97.545
5.	BATEALIT	45.568	44.997	90.565
6.	JEPARA	42,738	42.413	85.151
7.	MLONGGO	45.335	43.872	89.207
8.	BANGSRI	53.049	52.483	105.532
9.	KELING	33.957	34.090	68.047
10.	KARIMUNJAWA	5.420	5.189	10.609
11.	TAHUNAN	58.558	57.142	115.700
12.	NALUMSARI	40.885	40.749	81.634
13.	KALINYAMATAN	33.022	32.586	65.608
14.	KEMBANG	37.032	37.275	74.307
15.	PAKISAJI	32.349	31.561	63.910
16.	DONOROJO	31.239	31.156	62.395
JUMLAH		636.096	628.502	1.264.598
Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI s.d 31 Desember 2023				

**Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023**

NO.	STRUKTUR USIA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-4	47.061	43.926	90.987
2.	5-9	51.830	48.479	100.309
3.	10-14	53.872	50.901	104.773
4.	15-19	43.162	42.365	85.527
5.	20-24	51.856	50.571	102.427
6.	25-29	48.502	47.108	95.610

NO.	STRUKTUR USIA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
7.	30-34	48.016	46.177	94.193
8.	35-39	48.430	47.555	95.985
9.	40-44	50.205	49.692	99.897
10.	45-49	44.736	44.782	89.518
11.	50-54	40.571	41.260	81.831
12.	55-59	32.739	34.455	67.194
13.	60-64	27.009	28.661	55.670
14.	65-69	19.648	19.106	38.754
15.	70-74	13.280	13.747	27.027
16.	75+	15.179	19.717	34.896
Jumlah		636.096	628.502	1.264.598
Sumber Data : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI s.d 31 Desember 2022				

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Jepara

Secara administratif, Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa dan 11 Kelurahan, 4.766 RT dan 1.015 RW. Jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km .

Jumlah Kecamatan dan Desa Kab. Jepara Tahun 2023

No.	Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	33.20.03	Welahan	15		15
2.	33.20.12	Nalumsari	15		15
3.	33.20.04	Mayong	18		18
4.	33.20.13	Kalinyamatan	12		12
5.	33.20.02	Pecangaan	12		12
6.	33.20.05	Batealit	11		11
7.	33.20.11	Tahunan	15		15

No.	Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
8.	33.20.06	Jepara	5	11	16
9.	33.20.01	Kedung	18		18
10.	33.20.07	Mlonggo	8		8
11.	33.20.15	Pakisaji	8		8
12.	33.20.08	Bangsri	12		12
13.	33.20.14	Kembang	11		11
14.	33.20.16	Donorojo	8		8
15.	33.20.09	Keling	12		12
16.	33.20.10	Karimunjawa	4		4
TOTAL			184	11	195

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Jepara memiliki 42 Perangkat Daerah dan 150 Unit Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebanyak 8.899 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan PPPK.

**Tabel Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah PNS
Kab Jepara Tahun 2023**

No.	Nama OPD	Tipe	Jumlah Unit Kerja
1.	Sekretariat Daerah	B	16
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	A	9
3.	Inspektorat	A	9
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian DanPengembangan Daerah	A	9

5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A	9
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	B	7
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	A	16
8.	Dinas Kesehatan	B	7
9.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	A	9
10.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	C	6
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	A	9
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	A	10
13.	Dinas Lingkungan Hidup	A	8
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A	9
15.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	3
16.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	A	6
17.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	A	9
18.	Dinas Perikanan	A	7
19.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	A	12
20.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	A	10
21.	Dinas Perhubungan	A	14
22.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	B	8
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,	A	10

	Tenaga Kerja DanTransmigrasi		
24.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	A	8
25.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	7
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	8
27.	Kecamatan Kedung	A	9
28.	Kecamatan Pecangaan	A	9
29.	Kecamatan Kalinyamatan	A	9
30.	Kecamatan Welahan	A	9
31.	Kecamatan Mayong	A	9
32.	Kecamatan Nalumsari	A	9
33.	Kecamatan Batealit	A	9
34.	Kecamatan Tahunan	A	9
35.	Kecamatan Jepara	A	9
36.	Kecamatan Mlonggo	A	9
37.	Kecamatan Pakis Aji	A	9
38.	Kecamatan Bangsri	A	9
39.	Kecamatan Kembang	A	9
40.	Kecamatan Keling	A	9
41.	Kecamatan Donorojo	A	9
42.	Kecamatan Karimunjawa	A	9
TOTAL			379

Tabel Jumlah Pegawai Kabupaten Jepara Tahun 2023

No.	Nama OPD	Jumlah Peg.
1.	Sekretariat Daerah	113
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39

No.	Nama OPD	Jumlah Peg.
3.	Inspektorat	43
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	38
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	44
6.	Badan Kepegawaian Daerah	34
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah raga	5.842
8.	Dinas Kesehatan	1.025
9.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	110
10.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	35
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	30
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	19
13.	Dinas Lingkungan Hidup	60
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	60
15.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20
16.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	26
17.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	124
18.	Dinas Perikanan	20
19.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	29
20.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	89
21.	Dinas Perhubungan	61
22.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	28
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	39
24.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	43
25.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	16
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11
27.	Kecamatan Kedung	19
28.	Kecamatan Pecangaan	25

No.	Nama OPD	Jumlah Peg.
29.	Kecamatan Kalinyamatan	18
30.	Kecamatan Welahan	20
31.	Kecamatan Mayong	26
32.	Kecamatan Nalumsari	26
33.	Kecamatan Batealit	19
34.	Kecamatan Tahunan	17
35.	Kecamatan Jepara	65
36.	Kecamatan Mlonggo	19
37.	Kecamatan Pakis Aji	14
38.	Kecamatan Bangsri	18
39.	Kecamatan Kembang	20
40.	Kecamatan Keling	19
41.	Kecamatan Donorojo	13
42.	Kecamatan Karimunjawa	23
43.	RSU RA Kartini	568
T O T A L		8899

Data bersumber dari BKD Kab. Jepara Tahun 2023.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 2.394.171.750.458,-** (Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.343.270.669.976,-** (Dua Triliun Tiga Ratus EMpat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau **97,87%** dengan rincian sebagai berikut:
 - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2023 tercapai sebesar **Rp. 445.914.893.914,-** atau **94,91%** dari target sebesar **Rp. 469.809.745.000,-** (naik sebesar **4,13%** dari penerimaan PAD pada tahun 2022 yang tercapai sebesar **Rp. 427.510.460.021,-**) yang terdiri dari :
 - Pajak Daerah tercapai sebesar **Rp. 180.505.071.994,-** atau **88,82%** dari target **Rp. 203.217.792.000,-**. (naik 1.26%

dibandingkan realisasi pada tahun 2022 yang tercapai sebesar **Rp. 178.236.117,668,-)** .

- Retribusi Daerah tercapai sebesar **Rp. 22.742.111.136,-** atau **73,05%** dari target **Rp. 31.130.301.000,-**. (naik 8,50 % dibandingkan realisasi pada tahun 2022 yang tercapai sebesar **Rp. 20.808,059,031,-)**.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai sebesar **Rp. 13.663.553.883,-** atau **94,73%** dari target **Rp. 14.423.688.000,-**. berasal dari penerimaan deviden BUMD lembaga keuangan yaitu Bank Jateng, BPR Jepara Artha dan BPR BKK serta Perumda Aneka Usaha (naik 5,42% dibandingkan realisasi pada tahun 2022 yang tercapai sebesar **Rp. 12.923.366.443,-)**.
- Lain-lain PAD yang sah tercapai sebesar **Rp. 229.004.156.901,-** atau 103,60% dari target **Rp. 221.037.964.000,-**. (naik 5,88% dibandingkan realisasi pada tahun 2022 yang tercapai sebesar **Rp. 215.542.916.879,-)** merupakan penerimaan dari penjualan kekayaan daerah yg tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, pengembalian lainnya serta pendapatan BLUD.

URAIAN PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PENDAPATAN DAERAH	2.394.171.750.458	2.343.270.669.976
Pendapatan Asli Daerah	469.809.745.000	445.914.893.914
Pajak daerah	203.217.792.000	180.505.071.994
Retribusi Daerah	31.130.301.000	22.742.111.136
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.423.688.000	13.663.553.883
Lain-lain PAD yg sah	221.037.964.000	229.004.156.901
Pendapatan Transfer	1.918.862.005.458	1.892.661.776.062
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.694.211.003.458	1.689.729.005.912
Pendapatan Transfer Antar Daerah	224.651.002.000	202.932.770.150
lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	5.500.000.000	4.694.000.000
Pendapatan Hibah	5.500.000.000	4.694.000.000

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebesar **Rp. 2.534.487.380.917,-** (Dua Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar **2.431.676.307.980,-** (Dua Triliun Empat Ratus Tiga Puluh satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) **atau 95,94%** dengan rincian Belanja sebagai berikut :

URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
BELANJA DAERAH	2.534.487.380.917	2.431.676.307.800
BELANJA OPERASI	1.907.105.618.517	1.824.410.105.589
Belanja Pegawai	972.832.176.687	923.981.817.122
Belanja Barang & Jasa	738.089.913.890	706.442.199.426
Belanja Subsidi	184.086.000	184.086.000
Belanja Hibah	153.151.631.940	151.585.323.041
Belanja Bantuan Sosial	42.847.810.000	42.216.680.000
BELANJA MODAL	229.063.327.150	210.162.398.752
Belanja Modal Tanah	7.800.000.000	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.728.152.759	65.049.862.655
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.790.866.045	55.634.102.147
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	83.185.930.996	79.145.963.772
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.208.377.350	10.012.790.178

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	350.000.000	319.680.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.044.326.250	1.393.576.697
Belanja Tidak Terduga	2.044.326.250	1.393.576.697
BELANJA TRANSFER	396.274.109.000	395.710.226942
Belanja Bagi Hasil	25.741.955.000	25.515.872.914
Belanja Bantuan Keuangan	370.532.154.000	370.194.354.000

3. Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2023

Total Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

- ❖ Penerimaan Daerah dianggarkan sebesar **Rp. 161.815.630.459,-** (Seratus Enam Puluh satu Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh sembilan Rupiah) dengan Realisasi sebesar **Rp. 161.815.630.459,-** (Seratus Enam Puluh satu Trilliun Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh sembilan Rupiah) **atau 100%.**
- ❖ Pengeluaran Daerah dianggarkan sebesar **Rp 21.500.000.000,-** (Dua Puluh satu Milyar Lima Ratus Juta Ribu Rupiah) dengan realisasi **Rp 21.500.000.000,-** (Dua Puluh satu Milyar Lima Ratus Juta Ribu Rupiah) **atau 100%,** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN PEMBIAYAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	161.815.630.459	161.815.630.459
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.815.630.459	141.815.630.459

Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	21.500.000.000	21.500.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	140.315.630.459	140.315.630.459
SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN	-	51.909.992.455

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Seperti moto Kabupaten Jepara yaitu “**Trus Karya Tataning Bumi**”yang artinya terus bekerja keras membangun daerah, diharapkan visi Kabupaten Jepara sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) untuk terus bekerja keras membangun daerah dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

VISI

Visi yang diusung oleh Kabupaten Jepara adalah :
“Mewujudkan Jepara Madani Yang Berkarakter, Maju Dan BerdayaSaing”

MISI

Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan visi pembangunan sebagai upaya mengemban pencapaian visi pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional.

B. Perencanaan Pembangunan Daerah.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 permasalahan strategis Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Derajat dan upaya pelayanan kesehatan belum optimal.

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jepara masih belum optimal pada Tahun 2021. Prevalensi Stunting pada Tahun 2021 masih sebesar 12,91% walaupun sudah di bawah capaian Provinsi Jateng sebesar 20%. Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS tahun sebesar 0,34. Kasus kematian Ibu juga masih tinggi, yaitu sebanyak 19 kasus di Tahun 2021. Rasio tenaga kesehatan belum memenuhi standar SNI dan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan tingkat pratama juga masih belum ideal. Selain itu, adanya pandemi virus secara global yaitu Covid-19 pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2021 menimbulkan permasalahan daerah di bidang kesehatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Persebaran virus yang cepat dengan sarana dan prasarana kesehatan yang belum siap untuk menanggulangi virus tersebut menyebabkan masalah ini belum dapat ditangani secara optimal.

2. Masih Belum Optimalnya infrastruktur di Kabupaten Jepara.

Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Jepara ditandai oleh masih rendahnya rasio jalan dalam kondisi baik dan rendahnya jalan yang memiliki sarana pelengkap. Ruas jalan dengan

kondisi baik baru mencapai 88,06%. Selain itu berkaitan dengan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan tingkat pratama juga masih belum ideal, kondisi ini berdasarkan SNI 03-1733-2004 Jepara masih kekurangan +19 Puskesmas yang tidak mudah dipenuhi karena harus disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Penyediaan infrastruktur layanan dasar untuk akses air bersih, sanitasi layak, dan rumah layak huni serta penanganan sampah juga perlu didorong lebih baik. Karena hal tersebut mempengaruhi taraf kesehatan masyarakat.

3. Persentase penduduk miskin rendah namun jumlah (absolutnya) tinggi.

Angka kemiskinan (P0) di Kabupaten Jepara mengalami fluktuatif setiap tahun dan masih perlu mendapatkan perhatian. Angka kemiskinan pada Tahun 2021 sebesar 7,44% naik dari Tahun 2020 yaitu sebesar 7,17%, namun demikian jumlah absolut penduduk miskin di Kabupaten Jepara masih cukup besar meskipun trennya fluktuatif setiap tahun. Di tahun 2021 dengan adanya bencana nasional mewabahnya Covid-19 di Indonesia, berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang diproyeksikan turun tajam di masa pandemi ini. Hal tersebut mengakibatkan naiknya angka kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran serta pertumbuhan ekonomi juga melambat. Dan jika tidak segera di tangani maka bisa berdampak sosial.

4. Masih terjadinya ketimpangan gender, meskipun IPG tinggi namun IDG rendah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2017-2021, dari 90,39 di Tahun 2017 menjadi 90,99 di Tahun 2020 dan menjadi 91,28 pada tahun 2021. Sementara itu, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Jepara menurun menjadi 55,76% pada Tahun 2020 dari sebelumnya 58,20 pada Tahun 2019. Dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus, Rembang dan Blora IDG Kabupaten Jepara merupakan yang terendah.

5. Pertumbuhan ekonomi melambat yang diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi.

Pada Tahun 2020, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara melambat hingga mencapai -1,94 persen dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 6,02 persen sehingga tidak dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 7%. Kondisi ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia dari akhir Tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 yang menimbulkan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara global.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jepara pada Tahun 2021 turun sebesar 2,47% dari tahun 2020 di angka 6,70% menjadi 4,23%. TPT Kabupaten Jepara lebih baik dibandingkan TPT Nasional (6,49%) dan Provinsi Jawa Tengah 5,95%.

6. Pelestarian lingkungan.

Usaha pelestarian lingkungan di Kabupaten Jepara hingga saat ini masih belum optimal disebabkan masih rendahnya cakupan pelaksanaan penjarangan kualitas air, udara dan tanah. Pada Tahun 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jepara naik dari tahun sebelumnya, yaitu 66,89 di Tahun 2020 menjadi 60,64 di Tahun 2021. Permasalahan sampah juga masih perlu upaya dalam penanganan, karena baru 18,85% dari total produksi sampah di Jepara sebanyak 251.072 ton/tahun. Permasalahan tersebut dikhawatirkan mengakibatkan dampak negative pada daya dukung lingkungan dan umberdaya alam terhadap keberlanjutan pembangunan di Jepara. Akibat dari kurangnya memerhatikan keberlanjutan lingkungan semakin meningkatkan potensi bencana di Jepara. Kejadian bencana yang sering terjadi di Jepara adalah banjir, longsor, kekeringan dan puting beliung.

Berbagai permasalahan yang terkait pelestarian lingkungan ke depan harus ditangani antara lain belum optimalnya kegiatan konservasi rawan longsor dan wilayah potensi kekeringan, perilaku masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan juga perlu di intervensi, mitigasi bencana juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan

koordinasi seluruh komponen masyarakat dalam pengurangan resiko bencana untuk perencanaan pembangunan yang memerhatikan pelestarian lingkungan.

7. Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan antara lain : belum optimalnya pelaksanaan manajemen ASN, pelayanan publik yang belum menjalankan standar pelayanan, belum optimalnya penataan kelembagaan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mendorong pelayanan yang efektif dan efisien, akuntabilitas kinerja pemerintahan juga belum optimal.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan disusun mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implentasi dan evaluasi kinerja yang setiap tahun selalu ada perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu Jepara berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi.

b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah:

1. Tujuan 1: Membangun manusia yang berkualitas dan sejahtera, tujuan ini diarahkan pada sasaran pembangunan meningkatnya kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia
2. Tujuan 2: Meningkatkan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran pembangunan meningkatnya modal sosial masyarakat dan meningkatnya pelestarian budaya masyarakat
3. Tujuan 3: Mewujudkan struktur ekonomi yang tumbuh kuat dan kokoh, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah dengan 1) tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food estate*, 2) berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif, 3)

- menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing, dan 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Tujuan 4: Mewujudkan kota yang maju, modern, dan berkelanjutan dengan sasaran pembangunan tahun 2023 adalah 1) terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan, 2) terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan, 3) terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan, dan 4) meningkatnya penyediaan dan pelayanan Prasarana Sarana Dasar bidang Pekerjaan Umum
 5. Tujuan 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dengan sasaran pembangunan 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik dan 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPD

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. Adapun penyusunan program pembangunan dalam RPD merujuk pada Program yang mengacu kepada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM), serta mendukung pencapaian SDG's, kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan pembangunan nasional. Adapun program pembangunan daerah tahun 2023 sesuai dengan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 Berdasarkan RPD Kabupaten jepara tahun 2023-2026

KODE PROGRAM			PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	INDIKATOR PROGRAM NOMENKLATUR (BAB VI RENSTRA)	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
						2023		
						TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah dalam kondisi baik	persen	89,30	270.965.580.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	persen	89	68.743.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	%	100	88.846.541.000	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	%	85	1.141.969.000	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan indikator yang berlaku	%	90	496.730.000	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Desa Siaga aktif mandiri	%	32	934.837.000	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					

1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya	m/ha	11,02	26.212.908.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Peningkatan akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	%	0,32	16.819.245.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase bangunan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS terbangun	%	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Peningkatan akses Sanitasi yang layak	%	0,11	8.894.559.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	%	15,59	15.135.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	27,92	3.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	%	39,75	19.086.550.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata	%	2,44	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap	%/tahun	0,23	94.201.058.089	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	%/tahun	100	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kecamatan yang memiliki RDTR	%	37,50	2.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					

1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana/Relokasi	%/ tahun	100	485.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%/tahun	0,1116	11.925.886.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH yang ditangani	%/tahun	6,77	10.315.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase cakupan ketersediaan PSU yang aman dan nyaman untuk mendukung fungsi Hunian	%/tahun	100	592.608.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan Kualifikasi Kecil yang telah tersertifikasi dan teregistrasi	%/tahun	100	15.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Frekuensi patroli siaga trantibum	patroli	1,12	621.083.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100	590.500.000	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	91,23	208.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					

1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	1.194.425.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	28.990.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	3.182.835.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	6,19	5.988.953.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	602.560.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	87.475.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	%	2,7	1.721.595.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	%	8,28	361.211.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	%	100	365.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan

								Transmigrasi
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	21	189.000.000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan TPPO	Rasio	2,43	50.000.000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	persentase OPD yang memiliki data pilah gender	%	68	35.000.000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab	%	100	119.000.000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio kekerasan terhadap anak	Rasio	0,009	35.000.000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					

2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pembangunan infrastruktur LPM	persen	100	950.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Konsumsi energi per kapita	persen	100	460.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase wilayah penanganan kerawanan pangan	persen	100	960.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	Persen	80	90.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen tersusun terhadap dokumen yang harus disediakan	%	8	270.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemantauan kualitas air	%	16%	255.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase pemantauan kualitas udara berdasarkan klaster	%	100	Rp 170.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	1.050.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase industri penghasil Limbah B3 yang dilakukan diverifikasi dari jumlah pemohon	%	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	prosentase ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	40	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang mendapat penghargaan adhiyaya tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	%	30	65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase desa yang mendapat penghargaan Proklamasi tingkat kabupaten dari yang dilakukan pembinaan	%	50	65.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perusahaan yang mendapat penghargaan Properda dari yang dilakukan pembinaan	%	25	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	%	13,65	611.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase penanganan sampah	%	34,6	5.503.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP - el	Persen	99,93	28.000.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan KTP - el,		99,63	139.500.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan KIA,		35	139.500.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan KK		99,72	28.000.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil

2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0 -18 Tahun,	Persen	95,35	41.000.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Keseluruhan,		43,45	41.000.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akta Kematian,		90	41.000.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan,		98,8	41.000.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian		94,85	41.000.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Persen	100	605.000.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten / Kota	Persen	100	40.000.000	Dinas Administrasi Kependuduka n dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan desa yang memiliki sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	desa	184	10.879.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama antar desa	%	100	-	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib	%	100	7.160.087.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa

2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang memiliki kelembagaan desa yang aktif	%	100	552.496.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ASFR	%	13,25	212.240.000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	68	5.377.725.000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	rasio	1,08	6.127.257.000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C sesuai aturan	%	55,29	345.618.000	Dinas Perhubungan
				Ketersediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%	65,52%	1.200.000.000	Dinas Perhubungan
				persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	%	100	910.000.000	Dinas Perhubungan

				rasio kendaraan uji dengan kendaraan wajib uji	%	62,92%	400.310.000	Dinas Perhubungan
				ketersediaan trayek angkutan darat	%	100	275.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan sesuai standar	%	81,58%	1.329.000.000	Dinas Perhubungan
				Ketersediaan penunjang keselamatan pelayaran	%	75,5%	106000000	Dinas Perhubungan
				Tersedianya trayek angkutan antar pulau yang tetap dan teratur	%	75	509.086.000	Dinas Perhubungan
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	ketersediaan tanah untuk perluasan bandara	%	48	52.067.000	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	presentase informasi dan komunikasi publik yang dikelola dan ditindaklanjuti	Dokumen	100	1.325.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung jaringan internet yang disediakan oleh Diskominfo	%	61	1.657.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	38	117.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	76	127.150.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas	%	4,6	482.727.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	%	25	120.319.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,52	465.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri	%	1,76	1.471.511.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	%	50	119.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan promosi penanaman modal	%	4	159.490.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pnyeleaian Izin	%	75	612.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM	%	75	499.883.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	%	65	239.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					

2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	%	0,069	1.325.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	%	45,45	2.100.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persen organisasi Pramuka yang aktif	persen	100	600.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persenate titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	35,00	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pertumbuhan jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	%	7,69	930.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Cakupan pembinaan kesenian	%	56,59	15.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pertumbuhan Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	%	25	81.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pertumbuhan jumlah pengunjung museum	%	20	722.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pengembangan Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	5.4 persen	200.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	Persentase	100,00	580.000.000	Diskarpus
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Statis yang dialihmediakan	Persentase	2,13	20.000.000	Diskarpus
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase kelompok nelayan yang terfasilitasi	%	3	3.723.380.000	Dinas Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Prosentase kelompok pembudidaya yang terfasilitasi	%	3	3.998.736.000	Dinas Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase kelompok pengolah dan pemasar serta Kelompok usaha garam yang terfasilitasi	%	3	1.225.000.000	Dinas Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	%	6,67	9.843.980.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah promosi dan event yang diikuti	Kali	6	449.464.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	100	638.980.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pemanfaatan SDG	Persen	0,1	2.720.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian	persen	5	9.404.676.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase angka kesakitan ternak besar	Persen	1,1	255.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase peningkatan pengendalian luasan serangan OPT	Persen	10	210.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelompok Tani	Persen	10	1.789.251.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	persentase jumlah rekomendasi izin usaha	persen	0,11	20.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase peningkatan pemeliharaan sarana perdagangan	persen	0,4	3.184.569.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase koefisien variasi harga antar waktu	persen	0,5	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase kenaikan nilai ekspor	persen	1,9	520.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase peningkatan pelaku usaha tertib ukur	persen	3	4.110.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	persentase peningkatan pemasaran produk pelaku usaha	persen	0,6	330.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan pengembangan sentra industri	persen	0,33	1.549.399.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase pengajuan izin usaha industri	persen	0,54	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rasio peningkatan jumlah transmigran	%	100	180.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tata kelola Pemerintahan yang good governance rumpun di bagian hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase	100,00	41.903.300.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase tata kelola Pemerintahan yang good governance rumpun di bagian Perekonomian, Pembangunan , dan Pengadaan Barang & Jasa	Persentase	100,00	4.685.869.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	02		SEKRETARIAT DPRD					
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan layanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	97,50	12.406.168.000	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	01		PERENCANAAN					

5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPD kedalam RKPD	Persen	100,00	605.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi yang sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100,00	700.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	02		KEUANGAN					
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio realisasi belanja terhadap Anggaran belanja dalam APBD	persen	92,50	448.285.694.200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rasio belanja modal dibanding total belanja daerah	persen	18,93	2.475.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Besaran PAD terhadap seluruh Pendapatan dalam APBD (Realisasi)	Persen	(2,56)	4.589.764.200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN					
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pangkat ASN yang tepat Waktu	%	100,00	4.292.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dapat disusun	Persen	74,00	1.085.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6	01		INSPEKTORAT DAERAH					
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rasio Temuan BPK-RI yang ditindak lanjuti	%	100,00	585.000.000	Inspektorat
				Rasio Temuan Pemeriksaan Internal yang ditindak lanjuti	%	100,00	100.000.000	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rasio Konsultasi dan Assistensi yang tertangani	%	100,00	845.618.000	Inspektorat
7			UNSUR KEWILAYAHAN					
7	01		KECAMATAN					

7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	4.840.000	Kecamatan Mayong
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	9.000.000	Kecamatan Batealit
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	45.000.000	Kecamatan Jepara
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	20.000.000	Kecamatan Nalumsari
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokume n	12,00	12.200.000	Kecamatan Donorojo
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	6.000.000	Kecamatan Kedung
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100,00	6.445.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	100,00	8.000.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	3.570.000	Kecamatan Welahan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	12.000.000	Kecamatan Bangsri

7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	720.304.000	Kecamatan Karimunjawa
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	7.000.000	Kecamatan Pakisaji
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	8.930.000	Kecamatan Kembang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	8.705.000	Kecamatan Keling
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	4.150.000	Kecamatan Tahunan
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100,00	6.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	34.130.000	Kecamatan Mayong
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	30.000.000	Kecamatan Batealit
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	3.223.400.000	Kecamatan Jepara
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	76.950.000	Kecamatan Nalumsari
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	20,00	29.214.000	Kecamatan Donorojo
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	44.000.000	Kecamatan Kedung

7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	33.000.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	26.048.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	20.000.000	Kecamatan Welahan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	40.000.000	Kecamatan Bangsri
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	50.171.000	Kecamatan Karimunjawa
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	40.358.000	Kecamatan Pakisaji
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	35.000.000	Kecamatan Kembang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	26.346.000	Kecamatan Keling
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	40.000.000	Kecamatan Tahunan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	22.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	8.350.000	Kecamatan Mayong
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	12.000.000	Kecamatan Batealit
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	20.000.000	Kecamatan Jepara

7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Unit	100,00	10.000.000	Kecamatan Nalumsari
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	6.080.000	Kecamatan Donorojo
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	6.000.000	Kecamatan Kedung
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	8.500.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	5.000.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	10.000.000	Kecamatan Welahan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	15.000.000	Kecamatan Bangsri
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	36.908.000	Kecamatan Karimunjawa
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	7.000.000	Kecamatan Pakisaji
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	10.065.000	Kecamatan Kembang

7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	6.986.000	Kecamatan Keling
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	9.609.000	Kecamatan Tahunan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persen	100,00	12.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Mayong
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Batealit
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	1,00	-	Kecamatan Jepara
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Nalumsari
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	1,00	5.000.000	Kecamatan Donorojo

7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	-	-	Kecamatan Kedung
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	3.000.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Welahan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	10.000.000	Kecamatan Bangsri
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Karimunjawa
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Pakisaji

7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	12.000.000	Kecamatan Kembang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Keling
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	-	-	Kecamatan Tahunan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	Kecamatan Mlonggo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	46.145.000	Kecamatan Mayong
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	32.500.000	Kecamatan Batealit
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	60,00	85.000.000	Kecamatan Jepara
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Laporan	100,00	25.077.000	Kecamatan Nalumsari
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	67,00	42.500.000	Kecamatan Kedung

7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	60.845.000	Kecamatan Pecangaan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	57.736.000	Kecamatan Kalinyamatan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	46.575.000	Kecamatan Welahan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	57.580.000	Kecamatan Bangsri
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	37.633.000	Kecamatan Karimun Jawa
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	25.895.000	Kecamatan Pakisaji
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja	Persen	70,00	50.101.000	Kecamatan Kembang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	44.424.000	Kecamatan Keling
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	75,00	39.397.000	Kecamatan Tahunan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	70,00	32.000.000	Kecamatan Mlonggo
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	100,00	30.362.000	Kecamatan Donorojo
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					

8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	%	0,17	75.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politk dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase	0,09	1.884.669.190	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	prosentase ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persentase	25	45.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan penyuluhan P4GN pada pelajar	persen	15	54.750.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Keberhasilan dalam pencegahan konflik	opini	berhasil	145.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X			NON URUSAN					
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	2.897.430.000	Kecamatan Kedung
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	640.887.760.210	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	331.193.123.000	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	22.220.798.911	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	6.765.736.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

			KABUPATEN/KOTA					
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2.518.305.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KBUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	7.347.357.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	%	100	7.244.990.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	4.657.366.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	17.590.850.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	15.846.664.000	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	91,18	8.548.595.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	%	100	30.211.964.000	Dinas Perhubungan
				Persentase pengadministrasian Keuangan sesuai Peraturan	%	100		Dinas Perhubungan
				Persentase Pelayanan PD sesuai SOP	%	100		Dinas Perhubungan

X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	5.298.721.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	7.170.025.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	93,5	6.877.417.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	8.318.778.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persenta se	100,00	5.700.020.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	5.373.708.000	Dinas Perikanan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	88	15.194.444.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.858.556.000	Kecamatan Pecangaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	3.105.473.000	Kecamatan Kalinyamatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	3.624.041.000	Kecamatan Welahan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.948.532.000	Kecamatan Mayong

X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Dokume n	100	3.796.093.000	Kecamatan Nalumsari
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.712.776.000	Kecamatan Batealit
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.262.752.000	Kecamatan Tahunan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	1,00	11.358.627.000	Kecamatan Jepara
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.898.090.000	Kecamatan Mlonggo
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.464.943.000	Kecamatan Pakisaji
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.911.664.000	Kecamatan Bangsri
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1, Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.664.257.000	Kecamatan Kembang
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.788.857.000	Kecamatan Keling
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	2.427.832.000	Kecamatan Donorojo
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	4.290.759.000	Kecamatan Karimunjawa

X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tata kelola Pemerintahan yang good governance rumpun di bagian Organisasi, Protokol & Komunikasi Pimpinan, & Umum	Persenta se	100,00	24.904.357.500	SEKRETARIA T DAERAH
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KBUPATEN / KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,00	35.400.224.000	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	6.572.470.000	Badan Perencanaan Pembanguna n, Penelitian dan Pengembanga n Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00	25.965.897.900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100,00	6.660.479.000	Badan Kepegawaian Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	%	100,00	7.275.976.000	Inspektorat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	3.133.582.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								.
			JUMLAH				2.539.397.998. 000	

Sumber: RPD Kab. Jepara Tahun 2023-2026

Tabel Kegiatan Pembangunan Daerah
dalam RKPD Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	867.981.606.610	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	642.984.604.710	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
							Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	636.697.386.380	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	636.077.386.380	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
							Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	620.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.712.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.110.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.602.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.025.718.330	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.218.330	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	225.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.267.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	660.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	224.928.258.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	109.502.864.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	002	2	002	Penambahan Ruang Kelas Baru	660.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	425.650.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
							Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	427.625.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.108.925.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.623.475.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.462.121.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	260.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	160.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	576.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	220.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	014	Pengadaan Mebel Sekolah	516.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	017	Pengadaan Perlengkapan Siswa	300.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	435.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	250.419.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	853.425.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	857.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12.651.604.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	002	2	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	81.465.120.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	150.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.241.772.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	800.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	002	Penambahan Ruang Kelas Baru	690.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	006	Pembangunan Laboratorium	3.402.576.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	364.039.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.296.164.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.285.602.109	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	326.135.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	46.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.717.454.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.755.848.880	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.606.604.311	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	025	Pengadaan Mebel Sekolah	837.112.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	700.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	033	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	331.771.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	350.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.710.490.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	552.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	002	2	038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.200.750.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.480.165.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.643.860.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
							Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	36.007.231.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	101.174.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	202.348.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	750.953.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	010	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	256.332.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	50.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	375.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.523.424.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	410.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	26.238.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33.176.390.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	002	2	009	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	200.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.133.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	26.841.400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	555.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.446.990.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	004			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	68.743.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	004	2		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	68.743.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	004	2	001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	68.743.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.405.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.705.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	002	2		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.325.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	19	002	2	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	700.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	002	2	008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	250.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	002	2	009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	375.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	002	2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	380.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	002	2	002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	380.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.300.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	003	2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.300.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	003	2	002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	471.450.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	003	2	003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	828.550.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	003	2		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	003	2	003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	700.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	003	2	004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	004			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	400.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	004	2		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	400.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	19	004	2	002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	19	004	2	006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	200.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	327.667.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98.057.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.809.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.809.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.216.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.937.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.865.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.414.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.887.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	440.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.447.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.545.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.545.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	229.610.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	229.610.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	029	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	4.550.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	225.060.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	132.823.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.223.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.865.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.865.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.425.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	768.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.057.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.081.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.517.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.293.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.268.300	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.655.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.369.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.140.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.140.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	72.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	72.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	72.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.182.792.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	259.562.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.160.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.160.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.075.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.075.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.534.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.750.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.423.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.321.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.039.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.743.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	485.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.465.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.792.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.050.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Pemeliharaan Mebel	8.250.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	923.230.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	923.230.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	923.230.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	230.320.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.600.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.440.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22.440.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.852.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.852.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.837.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.313.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.523.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.745.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	588.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.156.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.725.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.725.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	159.720.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	159.720.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	159.720.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	864.337.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	145.597.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.124.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.124.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.558.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.558.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.990.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.517.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.840.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.813.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.318.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.123.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	616.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.914.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.592.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Pemeliharaan Mebel	3.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	718.740.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	718.740.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	718.740.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	365.878.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.208.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.306.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.151.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.899.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.455.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.676.300	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.676.300	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.366.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	840.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.289.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.236.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.359.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.359.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	274.670.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	274.670.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	274.670.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.371.590.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	255.970.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.980.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.980.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.298.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.081.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.024.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.613.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.392.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.892.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.115.620.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.115.620.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.115.620.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.111.550.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	212.520.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.440.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.440.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.620.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.983.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.564.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.199.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.024.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.560.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.560.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	968.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.432.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	899.030.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	899.030.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	899.030.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	939.618.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	176.108.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.646.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.177.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.474.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.610.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.614.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.570.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.660.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.660.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.978.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.018.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.223.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.480.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.743.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	763.510.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	763.510.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	763.510.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	745.520.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	158.670.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.778.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.931.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.571.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.213.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.383.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	007	Penyediaan Bahan/Material	3.620.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
							Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.060.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.990.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.990.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.402.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.402.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	586.850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	586.850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	586.850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	992.145.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.445.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.928.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.928.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.720.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.720.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.257.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.147.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.164.300	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.970.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.260.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	007	Penyediaan Bahan/Material	3.715.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.170.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.170.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.070.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.970.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.299.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.195.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.104.300	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	810.700.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	810.700.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	810.700.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	181.114.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.004.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.772.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.772.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.950.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.950.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.226.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.787.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	770.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.669.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.950.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.290.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	990.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.816.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	506.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.310.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110.110.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	110.110.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	110.110.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.253.230.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	218.680.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.140.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	007	Penyediaan Bahan/Material	7.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.760.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.480.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.290.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.034.550.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.034.550.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.034.550.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	829.001.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	168.341.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.059.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.180.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.118.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.761.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.782.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Pemeliharaan Mebel	2.960.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.422.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	660.660.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	660.660.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	660.660.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	299.095.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.565.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.542.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.542.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.926.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.110.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.316.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.660.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	660.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.437.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.437.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	233.530.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	233.530.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	233.530.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.281.186.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	249.056.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.393.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.013.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.593.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.293.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.570.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.570.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.032.130.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.032.130.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.032.130.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.454.239.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	303.529.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.834.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	950.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.264.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.960.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.460.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	885.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.150.710.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.150.710.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.150.710.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.087.097.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	220.737.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.294.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.650.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.081.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.111.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.452.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.943.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	770.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.173.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	866.360.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	866.360.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	866.360.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	984.885.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	193.545.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.550.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.092.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.758.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.595.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.595.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	791.340.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	791.340.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	791.340.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.154.703.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	235.103.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.469.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.437.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.462.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.570.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.034.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.243.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.051.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.740.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Pemeliharaan Mebel	1.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	919.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	919.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	919.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	964.255.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	185.075.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.252.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.354.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.794.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.104.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.093.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.093.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.730.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.730.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	779.180.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	779.180.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	029	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	7.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	771.980.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.283.014.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	242.414.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.025.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.625.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.825.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Pengadaan Mebel	5.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.325.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.643.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.343.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.021.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.021.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.040.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.040.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.040.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	853.710.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	162.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	690.910.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	690.910.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	690.910.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	261.371.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.761.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.092.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.092.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.578.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.578.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.273.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.639.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.494.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.140.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.647.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.815.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.832.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.871.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.047.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.824.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	170.610.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	170.610.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	170.610.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	227.425.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.855.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.080.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34.080.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.455.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.990.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.645.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.020.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.440.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	950.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.490.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.880.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.880.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	141.570.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	141.570.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	141.570.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	924.055.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	182.325.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.928.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.928.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.040.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.040.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.323.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.728.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.942.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.973.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.360.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.120.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.320.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.914.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.914.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	741.730.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	741.730.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	741.730.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	318.351.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	121.121.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.221.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.521.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.700.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	700.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	197.230.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	197.230.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	197.230.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	442.805.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.995.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.928.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.928.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.775.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.775.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.116.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.543.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.853.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.871.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.308.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.300.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.240.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.375.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	655.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.720.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	337.810.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	337.810.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	029	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	5.060.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	332.750.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.331.604.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	251.074.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.727.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.916.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.061.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.438.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.491.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.687.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.047.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.640.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.760.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.760.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.080.530.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.080.530.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.080.530.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.230.702.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	238.502.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.160.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.160.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.565.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.644.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.410.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.953.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.558.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.410.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.410.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.316.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.666.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.151.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.231.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	992.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	992.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	992.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.000.834.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	194.974.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.595.100	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.081.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.390.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.123.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.067.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.067.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.981.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	491.700	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.490.200	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.830.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.757.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.073.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	805.860.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	805.860.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	805.860.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	919.089.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	177.359.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.304.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.425.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.222.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.530.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.168.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.959.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.220.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.720.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.935.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.935.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	741.730.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	741.730.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	741.730.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	999.237.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	204.267.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.060.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.060.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.403.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.857.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.577.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.550.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.419.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.778.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Pengadaan Mebel	4.400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.378.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.620.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.420.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.506.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Pemeliharaan Mebel	4.620.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.886.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	794.970.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	794.970.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	794.970.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	866.023.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.651.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.313.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.106.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.895.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.312.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.196.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.256.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.081.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.859.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.742.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Pemeliharaan Mebel	18.792.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	695.371.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	695.371.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	029	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	8.091.600	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	687.280.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	844.580.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	158.510.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.858.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.180.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.539.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.379.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.560.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.152.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.652.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	686.070.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	686.070.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	686.070.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.279.520.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	253.440.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.620.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.620.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.950.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.950.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.471.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.576.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.755.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.299.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Pemeliharaan Mebel	7.799.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.026.080.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.026.080.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.026.080.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	733.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	158.850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.651.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.651.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.527.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.427.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.672.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.672.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	574.750.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	574.750.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	574.750.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	324.830.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.570.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.520.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.520.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.550.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.120.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.342.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.948.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.140.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	400.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	249.260.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	249.260.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	249.260.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.356.160.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	250.310.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.682.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.700.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.238.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.404.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.340.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.628.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.728.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.105.850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.105.850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	029	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	35.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.070.850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.203.371.900	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	352.292.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.160.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.160.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.433.500	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.148.300	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.862.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.326.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.411.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.950.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.755.800	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.910.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.910.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.289.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	001	2,1	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.189.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	851.079.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	49.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.800.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	801.279.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	58.579.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1	01	002	2	017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	742.700.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	145.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	145.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	145.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	145.000.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	500.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	500.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	500.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	11.612.241.594	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.612.241.594	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.612.241.594	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.582.107.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.728.134.594	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	302.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	242.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	242.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	242.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	019	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	242.000.000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.014.264.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	921.120.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	921.120.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	921.120.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.093.144.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.093.144.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.093.144.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.712.636.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.757.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.757.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.757.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	955.636.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	955.636.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	955.636.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.698.292.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.799.185.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.799.185.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.799.185.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	899.107.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	899.107.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	899.107.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.962.970.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.100.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.100.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.100.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	862.970.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	862.970.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	862.970.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4.291.847.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.371.499.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.371.499.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.371.499.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	920.348.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	920.348.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	920.348.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.987.809.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.155.227.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.155.227.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.155.227.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	832.582.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	832.582.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	832.582.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4.213.895.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.365.400.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.365.400.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.365.400.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	848.495.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	848.495.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	848.495.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5.520.854.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.513.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	4.513.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.513.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.007.854.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.007.854.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.007.854.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4.416.307.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.513.660.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.513.660.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.513.660.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	902.647.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	902.647.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	902.647.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.363.303.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.391.300.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.391.300.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.391.300.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	972.003.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	972.003.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	972.003.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4.873.812.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.896.726.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.896.726.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.896.726.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	977.086.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	977.086.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	977.086.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4.521.249.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.701.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.701.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.701.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	820.249.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	820.249.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	820.249.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4.798.956.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.886.778.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	3.886.778.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.886.778.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	912.178.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	912.178.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	912.178.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.978.636.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.189.022.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.189.022.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.189.022.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	789.614.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	789.614.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	789.614.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.631.503.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.800.140.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.800.140.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.800.140.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	831.363.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	831.363.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	831.363.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.525.666.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.750.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.750.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.750.000.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	775.666.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	775.666.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	775.666.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.301.631.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.444.569.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.444.569.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.444.569.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	857.062.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	857.062.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	857.062.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.107.848.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.262.505.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.262.505.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.262.505.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	845.343.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	845.343.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	845.343.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.012.201.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.104.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.104.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.104.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	908.201.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	908.201.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	908.201.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	4.065.078.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.338.819.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.338.819.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.338.819.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.726.259.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.726.259.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.726.259.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3.193.596.000	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.316.390.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.316.390.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.316.390.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	877.206.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	877.206.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	877.206.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kesehatan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	220.561.509.406	Dinas Kesehatan
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.781.783.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.165.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.845.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	375.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	375.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.110.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.460.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	152.639.537.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	151.962.861.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	676.676.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.299.761.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.905.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	668.006.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	573.850.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.052.200.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.200.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	330.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.692.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.120.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348.500.000	Dinas Kesehatan
1	02	001	2,1	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.620.000	Dinas Kesehatan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61.206.190.406	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.108.941.406	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	002	Pembangunan Puskesmas	7.877.399.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	002	2	006	Pengembangan Puskesmas	0	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.822.784.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	016	Pengadaan Obat, Vaksin	4.408.758.406	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.792.249.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	197.661.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	819.379.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91.290.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	66.040.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43.430.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	194.950.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	151.150.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.885.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.000.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	002	2	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.080.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	38.260.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	85.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.225.363.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	80.530.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	253.596.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	8.830.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.927.695.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	23.070.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	285.000.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36.500.000.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2	029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	388.500.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.253.440.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	002	2	037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	11.100.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	300.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	300.000.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	002	2		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	002	2	003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	5.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.141.969.000	Dinas Kesehatan
1	02	003	2		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	17.140.000	Dinas Kesehatan
1	02	003	2	002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	17.140.000	Dinas Kesehatan
1	02	003	2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	116.687.000	Dinas Kesehatan
1	02	003	2	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	32.335.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	003	2	003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	84.352.000	Dinas Kesehatan
1	02	003	2		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.008.142.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	003	2	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.008.142.000	Dinas Kesehatan
1	02	004			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	496.730.000	Dinas Kesehatan
1	02	004	2		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	56.804.000	Dinas Kesehatan
1	02	004	2	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	56.804.000	Dinas Kesehatan
1	02	004	2		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	406.876.000	Dinas Kesehatan
1	02	004	2	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	406.876.000	Dinas Kesehatan
1	02	004	2		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.250.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	004	2	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	24.250.000	Dinas Kesehatan
1	02	004	2,1		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.800.000	Dinas Kesehatan
1	02	004	2,1	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.800.000	Dinas Kesehatan
1	02	005			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	934.837.000	Dinas Kesehatan
1	02	005	2		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	005	2	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	005	2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	704.837.000	Dinas Kesehatan
1	02	005	2	001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	704.837.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1	02	005	2		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	02	005	2	001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	130.000.000	Dinas Kesehatan
							Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	129.706.578.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.927.432.911	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.735.135	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.776.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.775.135	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.184.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.826.322.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.568.562.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.760.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.862.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61.862.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.817.162	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	388.480.406	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.336.756	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	03	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.953.451.798	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.174.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	648.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	256.097.398	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.035.580.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.483.244.416	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.570.816	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	523.872.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.280.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	656.521.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	32.320.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	002	2		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	002	2	006	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	23.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	002	2	010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	002	2	065	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	03	002	2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.920.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	002	2	001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	002	2	014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	002	2	021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.270.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.092.010.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	003	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.092.010.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	003	2	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	003	2	002	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	292.010.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	003	2	004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.491.440.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	005	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.491.440.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	005	2	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	03	005	2	002	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	416.440.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	005	2	006	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.765.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	006	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.765.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	006	2	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	006	2	005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	12.515.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	006	2	009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	007			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	007	2		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	007	2	001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	008			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.536.550.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	03	008	2		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10.536.550.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	008	2	001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	008	2	002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10.336.550.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	009			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	009	2		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	009	2	003	Penataan Bangunan dan Lingkungan	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	40.174.145.089	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	010	2		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	40.174.145.089	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	010	2	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	010	2	005	Pembangunan Jalan	23.969.145.089	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	010	2	006	Pelebaran Jalan Menuju Standar	3.920.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	010	2	010	Pemeliharaan Berkala Jalan	2.585.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	03	010	2	011	Pemeliharaan Rutin Jalan	8.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	010	2	018	Rehabilitasi Jembatan	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	011			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	011	2		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	011	2	004	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	011	2	006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	145.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	011	2	007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	55.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012	2		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.750.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012	2	002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012	2	004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012	2	003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012	2	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	03	012	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012	2	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012	2	003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	012	2	004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.371.427.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.993.540.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.302.555.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	04	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.128.135.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174.420.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.375.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.395.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.480.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.564.310.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.150.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.491.160.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.300.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.250.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.550.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	662.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	535.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	002	2		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	105.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	04	002	2	001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	002	2	005	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	002	2,1		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	350.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	002	2,1	002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	350.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	002	2,1		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	80.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	002	2,1	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	002	2,1	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	30.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	003			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	11.625.886.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	003	2		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	250.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	003	2	008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	250.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	003	2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	11.375.886.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	003	2	001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	003	2	002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.518.041.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	04	003	2	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	502.845.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	003	2	006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	8.135.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	003	2	007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	120.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	004			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	10.315.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	004	2		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	10.315.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	004	2	001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10.315.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	005			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	887.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	005	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	887.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	005	2	002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	830.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	005	2	003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	57.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	006			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	15.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	04	006	2		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	15.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	006	2	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	15.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.176.440.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.347.357.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
							Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.667.859.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.600.859.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	05	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	65.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.218.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.718.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.209.780.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	05	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.186.280.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.500.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	005	Pemeliharaan Mebel	500.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	621.083.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.283.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	202.883.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2	002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	14.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	05	002	2	003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	105.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2	004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	68.400.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2	005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	226.800.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2	001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	150.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2	002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	62.800.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	002	2	003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	14.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	004			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	208.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	004	2		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	004	2	002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	05	004	2	003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	10.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	004	2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	8.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1	05	004	2	001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	8.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.055.858.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.629.937.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.050.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	550.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.547.407.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	05	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.501.087.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.320.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	871.980.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.080.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	773.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	001	2,1	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	05	003			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	425.921.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2	001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2	002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	167.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2	001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2	002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2	003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	22.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2	005	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2	006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	58.921.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2	003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2	004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	23.921.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2	005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	15.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	003	2		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	05	003	2	006	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	50.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.915.228.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.244.990.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.452.835.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.282.195.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170.640.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	595.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	005	Pengadaan Mebel	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.690.155.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.040.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	06	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.669.115.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	005	Pemeliharaan Mebel	15.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	002			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	784.425.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	002	2		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	784.425.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	002	2	001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	06	002	2	002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	002	2	004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	614.425.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	002	2	005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	35.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	003			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	29.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	003	2		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	29.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	003	2	001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	29.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.717.835.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	06	004	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.044.173.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	001	Penyediaan Permakanan	371.550.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	003	Penyediaan Alat Bantu	226.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.164.291.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	211.732.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	06	004	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	673.662.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	003	Penyediaan Permakanan	300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	004	Penyediaan Sandang	25.825.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	237.837.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	70.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	004	2	014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	40.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	005			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.430.143.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	005	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.430.143.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	005	2	001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	268.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	005	2	002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	005	2	003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.961.893.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	005	2	004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.950.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	006			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	621.360.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	006	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	455.085.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	006	2	001	Penyediaan Makanan	255.085.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	006	2	002	Penyediaan Sandang	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	006	2	003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	006	2	004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	06	006	2	005	Pelayanan Dukungan Psikososial	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	006	2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	166.275.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	006	2	001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	006	2	002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	116.275.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	007			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	87.475.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	007	2		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	87.475.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	06	007	2	002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	87.475.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.592.183.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	002			PROGRAM PENATAAN DESA	10.879.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	002	2		Penyelenggaraan Penataan Desa	10.879.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	13	002	2	006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	10.879.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.160.087.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.160.087.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	32.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	20.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	41.525.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	112.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	77.490.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	20.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	84.822.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	31.650.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	4.000.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	13	004	2	014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	004	2	018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.665.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	005			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	552.496.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	005	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	552.496.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	005	2	002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	63.300.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	005	2	003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	126.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	13	005	2	005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	38.486.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	005	2	006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	63.300.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	005	2	007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	44.310.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	005	2	009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	216.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.145.366.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.657.366.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	08	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.307.069.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.202.069.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	08	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	005	Pengadaan Mebel	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	840.720.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	08	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.620.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	716.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.577.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.447.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.630.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	08	001	2,1	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	002			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	189.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	002	2		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	39.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	002	2	003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	002	2	004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	19.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	002	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	002	2	001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	003			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	08	003	2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	003	2	001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	003	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	003	2	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	005			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	005	2		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	005	2	001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	006			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	119.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	08	006	2		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	49.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	006	2	001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	49.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	006	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	70.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	006	2	001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	006	2	003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	007			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	95.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	007	2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	08	007	2	001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	007	2	004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.757.222.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	002			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	212.240.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	002	2		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	19.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	002	2	002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	002	2	005	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	002	2	009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	14	002	2	013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	4.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	002	2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	193.240.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	002	2	011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	28.940.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	002	2	012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	002	2	013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	136.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.417.725.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.199.315.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	14	003	2	001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	86.315.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	257.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	14	003	2	008	Pengendalian Program KKBPK	84.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	961.300.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	001	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	936.300.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.435.360.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.240.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.188.032.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.145.338.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.750.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	14	003	2	012	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	821.750.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	810.750.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	003	2	004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	11.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.127.257.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	004	2		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.051.257.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	14	004	2	003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	004	2	004	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	004	2	005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.738.480.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	004	2	006	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	65.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	004	2	007	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	82.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	004	2	008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	90.777.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	14	004	2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	76.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	004	2	003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	004	2	004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	36.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	20.139.281.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.709.281.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.431.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.931.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	09	001	2	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.754.703.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.694.703.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	45.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2	001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2	007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.343.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	786.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	09	001	2,1	003	Pengadaan Alat Besar	462.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	005	Pengadaan Mebel	20.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.147.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.147.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	005	Pemeliharaan Mebel	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	001	2,1	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	09	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	950.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	002	2		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	950.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	002	2	001	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	950.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	003			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	440.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	003	2		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	003	2	001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	003	2	005	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	003	2	006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	003	2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	003	2	004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	003	2		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	09	003	2	002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	170.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	003	2	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	004			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	960.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	004	2		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	004	2	001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	004	2		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	930.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	004	2	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	004	2	002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	730.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	005			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	80.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	005	2		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	005	2	005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	12.774.845.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	002			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.405.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	002	2		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	415.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	002	2	001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	415.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	002	2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.990.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	002	2	001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	325.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	002	2	002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	320.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	002	2	003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.345.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.604.676.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2		Pengembangan Prasarana Pertanian	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
3	27	003	2	001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2		Pembangunan Prasarana Pertanian	8.224.676.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2	001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.585.530.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2	002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	190.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2	003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.550.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2	004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2	007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	310.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2	008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.477.546.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2	009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.111.600.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	330.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	003	2	001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	330.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
3	27	004			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	230.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	004	2		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	004	2	001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	004	2		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	004	2	002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	004	2		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	004	2	002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	60.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	004	2	004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	005			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	005	2		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	005	2	001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	007			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.335.169.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	007	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.335.169.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	007	2	001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	495.600.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	007	2	002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	207.569.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	007	2	003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	205.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	007	2	004	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	27	007	2	005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	427.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Lingkungan Hidup
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.248.328.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.103.328.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	11	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.960.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.933.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.933.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.555.395.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.425.395.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	11	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	002			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	375.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	002	2		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	002	2	001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	002	2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	225.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	002	2	001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	225.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
							Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.525.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2	001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
							Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2	001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	11	003	2	003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	004			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	435.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	004	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	435.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	004	2	002	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	004	2	004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	235.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	005			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	005	2		Penyimpanan sementara Limbah B3	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	005	2	002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	005	2		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	005	2	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	005	2	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	15.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	11	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	006	2		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	006	2	001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	006	2	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	008			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
							Dinas Lingkungan Hidup
2	11	008	2		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	008	2	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	008	2	003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	010			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	11	010	2		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	010	2	001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011	2		Pengelolaan Sampah	2.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011	2	003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	011	2	004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Lingkungan Hidup
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	003	2	003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.733.595.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.548.595.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.559.261.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.344.261.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	910.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	580.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	12	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	007	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	943.744.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	005	Pengadaan Mebel	65.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.744.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.590.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.590.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	002			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	335.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	002	2		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	325.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	002	2	002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	325.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	002	2		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	10.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	002	2	002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	003			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	205.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	003	2		Pelayanan Pencatatan Sipil	195.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	003	2	001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	120.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	003	2	002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	75.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	003	2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	12	003	2	004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	10.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	004			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	605.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	004	2		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	500.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	004	2	001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	500.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	004	2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	105.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	004	2	004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	004	2	008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	70.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	005			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	40.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	005	2		Penyusunan Profil Kependudukan	40.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	005	2	001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	005	2	002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	20.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Perhubungan
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	36.866.360.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	15	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.811.964.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.284.133.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.135.813.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148.320.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.946.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	15	001	2,1	005	Pengadaan Mebel	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.946.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.792.385.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.000.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.742.385.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
2	15	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.710.310.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.600.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2	002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.850.000.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
2	15	002	2	004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	750.000.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
2	15	002	2		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	125.000.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	15	002	2	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	400.310.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1	001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.310.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1	004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	250.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1	007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	120.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	255.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1	004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	255.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1	001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	5.000.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1	004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1	002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	15	002	2,1		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1	001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2,1	001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	003			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.844.086.000	Dinas Perhubungan
2	15	003	2		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	003	2	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	325.000.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
2	15	003	2,1		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	106.000.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	15	003	2,1	002	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	106.000.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
2	15	003	2,1		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	184.086.000	Dinas Perhubungan
2	15	003	2,1	003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	184.086.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
2	15	003	2,1		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	400.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	003	2,1	001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	400.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	003	2,1		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	829.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	003	2,1	002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	200.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	003	2,1	003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	534.000.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
2	15	003	2,1	004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	95.000.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
							Dinas Perhubungan
2	15	004			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	1.500.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	004	2		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	1.500.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	004	2	001	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	1.500.000.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Perhubungan
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	345.618.000	Dinas Perhubungan
2	15	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	345.618.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	345.618.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2	003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	45.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	002	2	004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	300.618.000	Dinas Perhubungan
							Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.933.597.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.230.597.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	16	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
							DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.703.351.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.603.311.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.040.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
							DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.866.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.500.000	DInas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	16	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.920.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.946.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	005	Pengadaan Mebel	15.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	983.380.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.700.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	926.680.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	002			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.083.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.083.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2	004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	210.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2	005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	120.000.000	DInas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	16	002	2	006	Pelayanan Informasi Publik	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2	007	Layanan Hubungan Media	600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2	008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	002	2	012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	58.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.620.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	992.640.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2	003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	992.640.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	627.360.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2	004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	207.360.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2	006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2	007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	70.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2	009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	245.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	003	2	010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	20	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	002	2		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	002	2	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	28.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	002	2	002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	90.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	002	2	003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	24.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	002	2	005	Pengembangan Infrastruktur	57.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	002	2		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	002	2	002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.087.806.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.351.595.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	07	003	2		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.210.595.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003	2	001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.210.595.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003	2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003	2	001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003	2		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	16.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003	2	001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	16.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003	2		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003	2	001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	07	003	2,1		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	003	2,1	001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	90.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	361.211.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	175.760.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	14.700.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	002	Pelayanan antar Kerja	10.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	39.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	26.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	005	Perluasan Kesempatan Kerja	86.060.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	07	004	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	97.981.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	10.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	17.981.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	003	Job Fair/Bursa Kerja	70.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	57.470.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	15.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	17.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2	003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	25.470.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	004	2,1		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	07	004	2,1	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	375.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005	2		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	132.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005	2	001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	38.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005	2	002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	34.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005	2	003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	60.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005	2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	243.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	07	005	2	001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005	2	002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005	2	003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	28.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005	2	004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	005	2	005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	11.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.736.297.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	17	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.071.740.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.231.602.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.093.762.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.840.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	17	001	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.244.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.244.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	326.200.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	005	Pengadaan Mebel	76.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.700.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	676.020.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.420.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	534.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
2	17	001	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.674.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.758.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	001	2,1	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.916.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Data Bersumber dari Bappeda Kabupaten Jepara.

C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Latar Belakang

Salah satu tugas Pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat itu sendiri.

Disamping itu fungsinya komponen mempercepat kesejahteraan masyarakat antara lain tingkat daya saing daerah terhadap produk-produk yang dihasilkan serta birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani, transparan dan akuntabel. Oleh karenanya dalam rangka mencapai arah yang jelas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur dengan jelas dan tegas terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, sehingga pada masing-masing tingkatan pemerintahan, sehingga pada masing-masing tingkatan pemerintahan dapat dengan terus melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, tidak terkecuali dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan

oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berpedoman dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

1. Urusan Pendidikan
 2. Urusan Kesehatan
 3. Urusan Pekerjaan Umum
 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 5. Urusan Tramtibum dan Linmas
 6. Urusan Sosial
2. Dasar Hukum

Agar supaya pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat mudah untuk dievaluasi, maka perlu peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

1. **UU No. 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (1) urusan pemerintahan wajib : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial ;
2. **Permendagri Nomor 59 Tahun 2021** tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pasal 21 ayat (2) huruf a, mengkoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati /Walikota yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Kab./Kota ;
3. **PP Nomor 2 Tahun 2018** tentang Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan SPM ini mengatur tentang jenis pelayanan, mutu pelayanan dan penerima pelayanan dasar dan strategi penerapannya ;
4. **Permen Kementerian / Lembaga Teknis**, secara teknis mengatur berkaitan dengan mutu layanan dasar sesuai dengan Bidangnya masing-masing ;

5. Keputusan Bupati Jepara Nomor 100/27 Tahun 2023 tentang
Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jepara 2023-
2025.

3. Kebijakan Umum

Bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Jepara harus ada dalam Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. sehingga diperlukan langkah-langkah penyesuaian agar kegiatan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar bagi masyarakat terakomodir dalam program-program yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Langkah-langkah adaptif yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Organisasi Perangkat Daerah sebagai pendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terutama yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Jepara, meliputi :

a. Pendataan / Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui jumlah dan identitas lengkap warga masyarakat yang berhak memperoleh barang / jasa terhadap kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Langkah Perangkat Daerah melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dimaksudkan agar diketahui selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang / jasa serta sarana dan atau prasarana atas dasar jumlah warga masyarakat penerima pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan standar biaya yang berlaku.

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Setelah dilakukan pengumpulan data terhadap kebutuhan pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasarnya serta sudah diketahui dari penghitungan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, maka tahap selanjutnya adalah Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai penghitungan yang telah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM untuk dimasukkan dalam RKPD, oleh karena itu Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan harus memastikan bahwa program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar telah dimasukkan dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan bahwa anggaran program dan kegiatan terhadap pemenuhan pelayanan dasar sudah masuk dalam APBD.

4. Arah dan Kebijakan

Guna memastikan komitmen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jepara, langkah selanjutnya adalah mengawal program dan kebijakan yang telah masuk pada RKPD untuk dibahas bersama DPRD dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam satu tahun anggaran yang akan datang. Komitmen dari anggota DPRD terutama yang ada di Badan Anggaran sangat menentukan sekali atas realisasi terhadap rencana pemenuhan pelayanan dasar. Apabila dalam pembahasan KUA PPAS dapat disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jepara maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dalam RAPBD Kabupaten Jepara. Didalam pemenuhan kebutuhan jenis pelayanan dasar masyarakat yang diukur dari capaian masing-masing indikator, maka untuk mewujudkannya setiap tahun pada APBD harus melaksanakan kegiatan pada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang telah di SPM-kan sesuai kemampuan anggaran daerah, dan kegiatan-kegiatan tersebut mendasarkan pada program yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Secara umum pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah

Kabupaten Jepara telah berjalan dengan baik dan telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan pemerintah pusat melalui kementerian dan non kementerian terkait.

5. Landasan Penyusunan.

1. Menindaklanjuti hasil Rapat Asistensi dan Supervisi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM se Prov. Jateng tanggal 7 September 2023 bertempat di Syariah Hotel Solo By Lorin Jl. Adi Sucipto No. 47 Kartasura Kab. Sukoharjo, sebagaimana Surat Radiogram Kemendagri Direktorat Jenderal Bina Bangda Nomor 600.4/9384/Bangda tertanggal 28 Agustus 2023 ;
2. Nota Dinas Bagian Pemerintahan Setda Jepara ditujukan kepada Sekda Jepara melalui Bagian Hukum Setda Jepara Nomor 130/314 tanggal 26 September 2023 perihal Usulan Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati Jepara (RANPERBUP) tentang Rencana Aksi Penerapan standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2027.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. Capaian Kinerja Makro

Indikator kinerja makro yang memuat Indeks Pembangunan manusia sampai dengan Rasio Gini, data yang disajikan adalah tahun 2022 dan tahun 2023 yang diambil berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Jepara.

Tabel
Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,15	73,85
2	Angka Kemiskinan	6,88	6,61
3	Angka Pengangguran	4,10	3,35
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,95*	5,17**
5	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah)	28,96**	31,14**
6	Ketimpangan Pendapatan	0,342	0,326

Data BPS Kabupaten Jepara Tahun 2023
*Angka Sementara.
**Angka sangat Sementara.

II. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).

❖ Urusan Pendidikan.

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Untuk urusan pendidikan capaian kinerjanya diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci keluaran, yaitu :

1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta).

- Di Kabupaten Jepara, pada tahun 2023 sejumlah 663 orang
2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Kabupaten Jepara sejumlah 35.959 orang
 3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa), di Kabupaten Jepara sejumlah 290 orang
 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) sebanyak 3.263
 5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta).
Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara memiliki 4.146 orang pendidik.
 6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
Pendidik pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada tahun 2023 sebanyak 2.750 orang pendidik.
 7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di Kabupaten Jepara sebanyak 865 orang.
 8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi.
Sampai dengan tahun 2023, SD dan SMP negeri di Kabupaten Jepara yang terakreditasi sebanyak 578 unit
 9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.
Dari 127.476 peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang ada di Jepara sudah seluruhnya

menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah,

10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah. Dari 57.871 peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, seluruhnya sudah mendapatkan perlengkapan dasar dari Pemkab Jepara.

11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.

sebanyak 80.071 siswa yang bebas biaya pendidikan atau capaiannya sebesar

12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara terdapat 30.880 siswa yang bebas biaya pendidikan

13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).

Kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Jepara sebanyak 6.591 orang.

14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).

Kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebanyak 4.782 orang.

15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar.

Pada tahun 2023 terdapat 7.499 orang pendidik pada jenjang Sekolah Dasar.

16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).

Pada tahun 2023 terdapat 4.066 orang pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, baik negeri maupun swasta.

17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).
Kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak 1.598 orang.
18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).
Kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak 1.100 orang.
19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).
Tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 821 orang.
20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).
Tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebanyak 485 orang.
21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat.
Tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara sebanyak 4.914 orang.
22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.
Tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak 1.965 orang.

23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara terdapat 396 orang kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta), yang sudah memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara terdapat 90 orang kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta), yang sudah memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Terdapat 551 orang tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat

26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Terdapat 294 orang tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) ada yang memiliki ijazah SMA/ sederajat .

27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta).

Di tahun 2023, terdapat 10 PKBM yang sudah terakreditasi

28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah.
terdapat 5.366 peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sudah seluruhnya menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah
29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.
Dari 4.796 siswa paket A dan B yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2023, sejumlah 340 peserta didik menerima pembebasan biaya pendidikan
30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).
Kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sebanyak 225 orang.
31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).
Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) di kabupaten Jepara pada tahun 20223 sebanyak 144 orang.
32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sebanyak 134 orang.
33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
Di tahun 2023, terdapat 1 orang kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1. Sedangkan kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sebanyak 6 orang pada tahun 2023

❖ **Kesehatan**

Memiliki luas wilayah 100.413.189 Ha dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan serta 1.015 RW dan 4.766 RT. Wilayah Jepara memiliki kontur tanah yang beragam, termasuk wilayah perairan atau kepulauan yang terletak cukup jauh dari ibukota kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup padat, masalah kesehatan sudah tentu menjadi masalah yang cukup serius bagi Kabupaten Jepara. Memiliki 1 rumah sakit negeri dan beberapa rumah sakit swasta dan klinik kesehatan dengan tenaga medis yang tersedia, diharapkan mampu mendorong terciptanya kesehatan yang baik bagi masyarakat. Untuk Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Dengan dukungan anggaran serta pegawai, baik PNS maupun THL yang bertugas di berbagai tempat seperti di Puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Jepara, diharapkan mampu melayani kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat Jepara.

Untuk urusan kesehatan capaian kinerjanya diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci Keluaran, yaitu :

1. Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.
Sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Jepara memiliki 6 unit rumah sakit yang sesuai atandar dan 22 Puskesmas.
2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya.
Akreditasi rumah sakit diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu sebuah rumah sakit dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan. Bagi rumah sakit sendiri, akreditasi bisa menjadi cara untuk mengukur kinerja rumah

- sakit. Di Kabupaten Jepara, sampai dengan tahun 2023 ada 6 unit rumah sakit yang sedang dipersiapkan akreditasinya.
3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.
Dukungan logistic kesehatan yang tersedia bagi ibu hamil terdiri dari 23.750 Buku KIA : 20.557 OVM : 120 OVP: 120 ANC Kit: 111 Susu Bumil KEK : 2.842
 4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal
Sampai dengan tahun 2023, ada 204 dokter dan 559 bidan yang menangani pelayanan antenatal.
 5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.
Kabupaten Jepara pada tahun 2022 menyiapkan dukungan logistik yang disediakan untuk pelayanan persalinan sebanyak 231 dengan rincian sebagai berikut : 120 paket PMT ibu nifas dn 111 bidang kit
 6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (dokter dan perawat).
Untuk jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sebanyak 204 Dokter PONED: 599 bidan di puskesmas dan RS
 7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir.
Dukungan logistik yang disediakan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebanyak 27.729 dengann rincian 120 OVM, 120 OVP, 20.557 Buku KIA, 110 KN Kir, 22 Oksimeter, 1.700 Kertas Saring SHK, 1.700 Lancet SHK, 1.700 Alcohol Swab SHK, 1.700 Plastik Klip SHK
 8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar.
Sedangkan untuk SDM yang ada sebanyak 204 Dokter dan 599 bidan.
 9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk kesehatan balita.
Untuk kepentingan kesehatan balita, Pemerintah Kabupaten Jepara menyediakan dukungan logistik sebanyak 9.973 terdiri

dari 1.133 Posyandu, 8.730 sachet formula F 100, dan 110 KN Kit

10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

SDM yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sebanyak 204 dokter 559 bidan 5.752 kader posyandu

11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk anak usia pendidikan dasar.

Untuk tahun 2023 sebanyak 718 paket dengan rincian 22 alat Hb Meter & Pen, 357 Strip Hb, 113 Lancet, 113 Alkohol Swab, dan 113 Handscoon.

12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar.

SDM yang menangani kesehatan anak usia dasar yaitu 1.101 orang terdiri dari 755 Guru UKS SD/MI; 210 Guru UKS SMP/MTs, dan 136 SMA/MA

13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Logistik yang disediakan untuk kategori ini yaitu : 3.110 BMHP Gula Darah, 1.000 BMHP IVA Test, 6.322 BMHP Profil Lipid, 10.000 BMHP Ca Colon, 300 BMHP EKG, dan 24.550 Rapid Duo HIV Sipilis

14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pada tahun 2023 Untuk mendukung kesehatan penduduk usia 15-59 tahun, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki 1.092 orang terdiri dari, 46 Nakes terlatih pandu PTM, 1.022 Programmer PTM, dan 24 Nakes terlatih Pengendalian PPOK dan Asma.

15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Pemerintah Kabupaten Jepara telah memiliki 527 paket terdiri dari, 313 Posyandu lansia, 74 Lansia Kit, 140 buku panduan caregiver bagi lansia.

16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar.

Tersedia Dokter sebanyak 22 orang dokter puskesmas, 22 Programmer Lansia (Perawat/Bidan).

17. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita hipertensi yang tersedia sesuai standar.

Ada 181 Posbindu kit yang disediakan bagi penderita hipertensi pada tahun 2023

18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar.

Ada 46 nakes terlatih pandu PTM.

19. Jumlah dukungan logistik kesehatan penderita DM yang tersedia.

Ada 181 Posbindu kit.

20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar

Ada 22 programer PTM.

21. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita ODGJ berat yang tersedia tahun 2023 sebanyak 29 buku pedoman kesehatan jiwa.

22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita ODGJ berat sesuai standar.

Sedangkan pada tahun 2023 SDM yang bertugas melayani penderita ODGJ berat yaitu sebanyak 46 nakes terlatih keswa.

23. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita TBC yang tersedia sesuai standar pada tahun 2023

Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para penderita penyakit TBC, telah disediakan logistic kesehatan sebanyak 23.765 paket berupa : FDC Kat I = 1.700 paket, FDC Anak = 275 paket, pot sputum = 12.550 buah, kaca slide= 20 buah, reagen Zn= 20 paket catridge TCM TBC = 9.200 tes

24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar.

Untuk mendukung logistic kesehatan yang sudah disediakan, 25 dokter TB terlatih, 25 perawat TB terlatih, 26 Laborat TB Terlatih

25. Jumlah dukungan logistik kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Pada tahun 2023 disediakan 64.280 dengan rincian 6.480 Kondom, 2.500 Lubrikan, 3.075 rapid HIV 2 dan 1.675 rapid HIV, 24.550 Rapid HIV 1/2 Sipilis, 3.000 Rapid Sipilis RPR. Dan 23.000 Masker Bedah.

26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Terdapat 6 dokter, 6 perawat, 6 rekam medis, 5 apoteker, 6 ATLM, 1 Bidan.

❖ **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Jepara berada dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu terkait perijinan.

Capaian kinerja urusan ini diukur melalui Indikator Kinerja Kunci Output sebagai berikut :

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab (ha).

Di Kabupaten Jepara memiliki 97 kewenangan atas kawasan permukiman rawan banjir.

2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab (m).

Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kabupaten Jepara sepanjang 13.050 meter.

3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di Wilayah Sungai kewenangan kab (ha).
Di Kabupaten Jepara memiliki 700 Ha luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten.
4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di Wilayah Sungai kewenangan kab (m).
Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi ada 2.040 M yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kewenangan kab.
Di tahun 2023, Kabupaten Jepara telah memiliki Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kewenangan kabupaten yaitu Keputusan Bupati Jepara No. 520/421 Tahun 2020 tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Kabupaten Jepara.
6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten.
Di tahun 2023, Kabupaten Jepara telah memiliki Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten Wilayah Sungai Kewenangan kabupaten yaitu Keputusan Bupati Jepara No. 520/421 Tahun 2020 tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Kabupaten Jepara.
7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten.
Kabupaten Jepara telah memiliki prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten yaitu berupa Penguat tebing sepanjang 4 yaitu bangunanperkuatan tebing, tanggul sungai, pintu air, dan pompa air
8. Luas kawasan permukiman rawan banjir 97 Ha.
9. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten 13.050

10. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten 700 Ha.
11. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten Jepara 2.040 Meter
12. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten, Kabupaten Jepara sudah memiliki Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025.
13. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten, Kabupaten Jepara sudah memiliki Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025.
14. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten menunjukkan terdapat bangunan perkuatan tebing 7.400 meter, Tanggul sungai 5040 meter, Pintu air : 9 Unit, dan Pompa air : 3 unit.
15. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik.
Dari total panjang jaringan irigasi primer yaitu 10.596 meter, yang dalam kondisi baik sepanjang 4.238,4 meter atau 40%.
16. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik.
Dari total panjang jaringan irigasi sekunder yaitu 1.249.933 meter, yang dalam kondisi baik sepanjang 313.124,88 meter atau 25,05%.
17. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik.
Pada tahun 2023, dari seluruh jaringan irigasi tersier yaitu sepanjang 13.810 meter, yang dalam kondisi baik sebesar 4.143 meter atau 30%.
18. Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten.
Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara sudah memiliki dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten, Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2020

tentang Rencana induk sistem penyediaan air minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040.

19. Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten.

Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara telah menetapkan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten yang berlaku selama Tahun 2020 – 2024.

20. Jumlah BUMD dan atau UPTD kab penyelenggaran SPAM

Di Kabupaten Jepara ada 1 (satu) buah BUMD yang menyelenggarakan SPAM yaitu PDAM.

21. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM.

Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM yaitu sebanyak 8 izin desa.

22. Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.

Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara melakukan kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain tentang rencana induk sistem penyediaan air minum kab. Jepara tahun 2020-2040 melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040.

23. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S.

Di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 terdapat 300.851 rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S.

24. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T.

Sampai dengan tahun 2023, ada 100 unit rumah yang menggunakan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T.

25. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T.

Sedangkan rumah yang menggunakan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T sebanyak 300.951 unit rumah.

26. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja.

Di Kabupaten Jepara pada tahun 2023, rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja sebanyak 210 rumah.

27. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja.

Di Kabupaten Jepara, sebanyak 210 rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja.

28. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik kabupaten jepara tahun 2023 sebanyak 210.

29. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar.

Dari 300.851 rumah di wilayah pengembang SPALD S yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk sebanyak 300.851 rumah dengan capaian 100%.

30. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman.

Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T sebanyak 210 rumah dari total 300.851 rumah di wilayah pengembangan SPALD T. 0,070%

31. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman.

Dari total rumah di wilayah pengembangan SPALD T yaitu 300.851 rumah, sebanyak 100 rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T 0,033%

32. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat

- Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat sebanyak 300.851 rumah, dari 300.851 rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S 100%
33. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia sebanyak 3 sedangkan yang dibutuhkan 3 dengan capaian 100%
34. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja
Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia pada tahun 2023 sebesar 16,61%
35. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD.
Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD sebanyak 100 rumah dari total 100 rumah yang dilayani dengan SPALD-T di Kabupaten Jepara dengan capaian 100%
36. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja.
Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot pada tahun 2023 dalam wilayah pengembangan SPADLD-S sebesar 0,070%.
37. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi.
Dari 118 bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang ada di Jepara hanya 52 yang baik dan fungsi 44,07%
38. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting.
Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan sebanyak 474 izin.
39. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung.
Tahun 2023, Kabupaten Jepara telah memiliki Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung yaitu Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011
40. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung.

Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara telah memiliki Keputusan Bupati tentang penetapan tim ahli bangunan gedung yaitu Keputusan bupati jepara nomor 640/320.

41. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan.

Pada tahun 2023 Kabupaten Jepara memiliki 36 bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan yaitu Keputusan bupati jepara nomor 430/410 tahun 2018.

42. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten.

Pada tahun 2023 Jepara memiliki 163 bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten melalui Perda 14/2018 perangkat daerah dan perbup 1/2018 UPTD.

43. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten.

Ada 163 bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2023 berdasarkan Perda 14/2018 perangkat daerah dan perbup 1/2018 UPTD.

44. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab. yang dipelihara/dirawat.

Sampai dengan tahun 2023, di Kabupaten Jepara ada 163 bangunan yang dipelihara.

45. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten.

Jalan kewenangan kabupaten yang ditetapkan kepala daerah dalam SK adalah sepanjang 854.027 kilometer.

46. Panjang jalan yang dibangun

Pada tahun 2023, panjang jalan yang dibangun adalah 6.431,60 kilometer.

47. Panjang jembatan yg dibangun

Tahun 2023, pembangunan jembatan di kabupaten jepara mencapai 37,00 meter.

48. Panjang jalan yang ditingkatkan.
Ada 24.107,70 kilometer jalan yang ditingkatkan sepanjang tahun 2023.
49. Pada 2023 di Kabupaten Jepara tidak terdapat jembatan yang diganti/dilebarkan.
50. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi.
Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi 17,676,10 kilometer.
51. Panjang jembatan yang direhabilitasi.
Jembatan yang direhabilitasi pada tahun 2023 sepanjang 81,90
52. Panjang jalan yang dipelihara.
Sedangkan jalan yang dilakukan pemeliharaannya sepanjang 28.071,95 kilometer.
53. Panjang jembatan yang dipelihara.
Pada tahun 2023 Panjang jembatan yang dipelihara sepanjang 44,90 meter
54. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten.
Tahun 2023, ada 1 Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten Jepara.
55. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten.
Ada pada tahun 2023 ada 103 tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten Jepara.
56. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten.
Ada 27 orang tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten Jepara.
57. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab yang aktif dengan data termutakhir.
ada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir, terdapat pada SK Kepala DPUPR Nomor 061 tahun 2022
58. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari APBD

Pada tahun 2023, 994 paket data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari APBD yaitu Potensi Pasar Jasa Konstruksi/RUP 2023

59. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN.

Pada tahun 2023 Ada 9 paket data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN yaitu Potensi Pasar Jasa Konstruksi/RUP 2023

60. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari pendanaan lainnya.

Pada tahun 2023 tersedia 244 paket data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari pendanaan lainnya.

61. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala.

Pada tahun 2023 tersedia 1.247 paket data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala.

62. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten.

Kabupaten Jepara memiliki data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten yaitu Perbup SOTK. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2021

63. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.

Tersedia 1 tersedia data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota

yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.

64. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis.

Di Kabupaten Jepara tersedia 30 data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis.

65. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota.

Pada tahun 2023 Di Kabupaten Jepara tersedia 76 data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota.

66. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten.

Tahun 2023 di Kabupaten Jepara tidak tersedia data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten.

67. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.

Tidak tersedia data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.

68. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya. Tidak tersedia data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

69. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.
Untuk data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya di Kabupaten Jepara tersedia dan di kabupaten jepara tidak terjadi kecelakaan kontruksi.
70. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.
Untuk data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tidak tersedia.
71. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten.
Pada tahun 2023 Badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten Jepara sebanyak 570
72. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten.
Pada tahun 2023 tidak ada perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten Jepara.
73. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten.
Pada tahun 2023 ada 304 badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten Jepara.
74. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten.
Pada tahun 2023 tidak ada badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten Jepara.
75. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.

Pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui tidak ada

76. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Tahun 2023 tidak ada pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

77. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.

78. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Tidak ada pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

❖ **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.**

1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya.

Pada tahun 2023, ada 15 kawasan rawan bencana dan direncanakan penanganannya.

2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam.

Rumah yang terkena bencana alam sebanyak 15 unit rumah.

3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam.

Ada 15 orang yang rumahnya terkena bencana alam pada tahun 2023.

4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi.
Dari 15 rumah yang terkena bencana alam, seluruhnya sudah direhabilitasi sesuai rencana aksi.
5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi.
Dari 15 rumah yang terkena bencana alam, seluruhnya sudah dibangun kembali sesuai rencana aksi.
6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi.
Pada tahun 2023 tidak ada
7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.
Terkait dengan bencana alam yang terjadi, di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Jepara tidak menyiapkan rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana.
8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi.
Seluruh korban bencana alam yaitu sebanyak 15 orang telah terfasilitasi.
9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.
Pada tahun 2023, luasan dan lokasi pencadangan lahan pada tahun 2023 tidak ada atau 0
10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
Di tahun 2023, rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM tidak ada
11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM.

- Rumah tangga yang menerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM tidak ada
12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
Rumah tangga yang menerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM tidak ada kegiatannya
13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
Sedangkan rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2023 tidak ada 6
14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
Pada tahun 2023, rumah tangga penerima layanan mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM pada tahun 2023 tidak ada kegiatannya
15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah
Pada tahun 2023 tidak ada kegiatan Pengadaan tanah untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintahan
16. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha.
Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 64,56 ha
17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH
Peningkatan RTLH sebanyak 1.375 unit.
18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh.
Penanganan infrastruktur kawasan kumuh seluas 3,17 hektar.
19. Jumlah rumah di kabupaten.

Jumlah rumah di Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2023 adalah 365.673 rumah.

20. Jumlah unit PK RTLH.

Sedangkan Rumah Tidak Layak Huni, adalah 1.375 unit rumah.

21. Jumlah rumah tidak layak huni.

Pada tahun 2023, di Kabupaten Jepara masih terdapat 9.734 unit rumah yang tidak layak huni.

22. Jumlah rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun).

Rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun) sepanjang tahun 2023 tidak ada.

23. Rasio rumah dan KK

Jumlah KK yang ada yaitu 421.975, sedangkan total rumah yang ada di Jepara yaitu 365.673 unit atau 115,39%.

24. Jumlah rumah pembangunan baru.

pembangunan baru sepanjang tahun 2023 sebanyak tidak ada

25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU

Pada tahun 2023 perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 5 perumahan.

26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum.

Sampai tahun 2023, di Kabupaten Jepara ada 323 rumah yang sudah terfasilitasi air minum.

27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan.

Sebanyak 323

28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site).

Rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) sebanyak 323 rumah.

29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH

Perumahan yang terfasilitasi RTNH pada tahun 2022 sejumlah 7 unit

30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU.

Rumah yang terfasilitasi akses PJU sebanyak 323

31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi.

Pengembang yang tersertifikasi pada tahun 2023 sebanyak 7

32. Jumlah pengembang yang teregistrasi
Pengembang yang teregistrasi sebanyak 7 pada tahun 2023
33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.
Pada tahun 2022, jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan sebanyak 34.

❖ **Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan branded Kota Ukir, Kabupaten Jepara menjadi daerah yang sangat terbuka bagi banyak investor dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, dengan kontur tanah yang beragam, Kabupaten Jepara memiliki potensi resiko bencana yang cukup tinggi, terutama longsor dan banjir. Untuk urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan yang ditangani.
Sepanjang tahun 2023, pelanggaran dan pengaduan trantibum sebanyak 8 dan semuanya telah ditangani dengan capaian 100%
2. Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan
Untuk mendukung kinerja Pemkab dalam urusan ini, sebanyak 2.240 orang Satlinmas yang telah dilantik dan dikukuhkan.
3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan.
Sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Jepara telah memiliki 8 Perda yang telah ditegakkan.
4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS
Di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 sebanyak 3 orang Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS.

5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum
Untuk membantu pelaksanaan dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum, Satpol PP dan Damkar didukung dengan 5 Standar Operasional Pelayanan (SOP).
6. Tersedianya sarana prasarana minimal
Dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum, Satpol PP dan Damkar didukung dengan sarana prasarana minimal.
7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal
Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2023 terdapat 1 dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB)
8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
IKK ini diukur melalui jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi sesuai jenis ancaman bencana yaitu sebanyak 864.234 jiwa dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana yaitu 864.234 jiwa sehingga capaian kinerjanya adalah 100% karena di Kabupaten Jepara informasi kebencanaan dilakukan melalui berbagai cara. Selain melalui sosialisasi tatap muka, informasi juga disampaikan melalui radio Kartini (milik Pemkab) juga melalui media sosial yang dikelola oleh Pemkab Jepara.
9. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah / legal kabupaten jepara tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
10. Persentase penyelesaian dokumen rekon sampai dinyatakan sah kabupaten jepara tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
11. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan

Dari 129.827 penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, sebanyak 620 orang yang telah mengikuti pelatihan.

12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan

Dari 129.827 penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, sebanyak 620 orang yang telah mengikuti pelatihan.

13. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

Dari 1.257.580 jiwa warga negara yang berada di kawasan rawan bencana seluruhnya mendapat layanan pusdalops, jadi capaian kinerjanya mencapai 100%.

14. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan.

Dari 1.257.580 penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana seluruhnya sudah mendapatkan peralatan perlindungan, Jadi capaian kinerja IKK ini adalah 100%.

15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB.

Pada tahun 2023, tidak ada penetapan status KLB.

16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.

Dari total 6 seluruh penetapan kejadian Luar biasa yang ada di Jepara, semuanya telah memenuhi kecepatan respon kurang dari 24 jam utk setiap penetapan darurat bencana. Capaian kinerjanya adalah 100%

17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana

Pada BPBD kab Jepara tahun 2023 terdapat 869 orang petugas dalam penanganan darurat yang terdiri dari PNS BPBD, Tenaga Harian Lepas dan relawan. Semuanya aktif dalam setiap penanganan darurat bencana yang terjadi.

18. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.

- Sepanjang tahun 2023 perkiraan korban keseluruhan bencana 4.759 orang korban dalam kejadian bencana yang seluruhnya berhasil di cari, ditolong dan di evakuasi. Dengan capaian 100%
19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten.
- layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia atau operasi darurat non kebakaran yang ditangani Satpol PP dan Damkar pada tahun 2023 sebanyak 202 layanan.
20. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan.
- Guna mendukung upaya penyelamatan kebakaran, kabupaten Jepara memiliki 3 Pos sektor Damkar dengan sarana dan prasarana lengkap.
21. Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian di kantor kecamatan.
- Untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara di bidang penyelamatan kebakaran, ada 26 aparatur yang selama 24 jam berjaga secara bergantian.
22. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa.
- Sedangkan untuk Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa, di Kabupaten Jepara belum memiliki.
23. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.
- Kabupaten Jepara memiliki 14 jenis sarana dan prasana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran, Kabupaten Jepara memiliki 28 aparatur yang memenuhi standar kualifikasi pemadam.
25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran. Sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Jepara belum memiliki relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Sepanjang tahun 2023, Kabupaten Jepara melalui Satpol PP dan Damkar tidak menyelenggarakan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.

❖ **Sosial**

Kehidupan sosial masyarakat selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman. Dalam proses perubahan ini seringkali muncul berbagai masalah sosial yang bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan sosial masyarakat. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan kriminal serta permasalahan-permasalahan lain kerap kali menjadi masalah berat bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Jepara. Kondisi-kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik tentu akan menjadi polemik dan permasalahan serius bagi pemerintah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terus berupaya dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Keberhasilan urusan sosial diukur dengan indikator kinerja kunci (output) sebagai berikut :

1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki
Untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi, Pemerintah

Kabupaten Jepara menyiapkan 2 (dua) jenis layanan pengaduan yaitu secara online dan offline yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM

Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM yang terdata sebanyak 1.380 anak.

3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terbentuk

Untuk tahun 2023, terdapat 1 Tim Reaksi Cepat belum terbentuk.

4. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dijangkau.

Sebanyak 1.380 orang penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng dapat dijangkau oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2023.

5. Jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki.

Untuk fasilitas kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai akses khusus layanan kedaruratan hanya memiliki 4 (empat) unit. Kedepannya diharapkan fasilitas-fasilitas tersebut akan meningkat.

6. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi.

Pada tahun 2023, sebanyak 1.006 Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng mendapatkan paket permakanan sesuai standar gizi yang diberikan oleh Pemkab Jepara.

7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.

Sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Jepara memiliki 1 (satu) buah shelter atau rumah singgah yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara.

8. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang.
Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang sebanyak 25 orang.
9. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu.
Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu sebanyak 345 orang.
10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter
Alat bantu yang disediakan di rumah singgah/shelter pada tahun 2023 ada 21 paket
11. Jumlah paket perbekalan yang tersedia.
Untuk paket perbekalan, pada tahun 2023 belum tersedia.
12. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.
Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.
13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah/shelter.
Untuk tenaga kesehatan yang dipersiapkan di rumah singgah/shelter, belum tersedia.
14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan.
Pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan sebanyak 39 orang.
15. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik , mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/pusat kesejahteraan sosial.

Sebanyak 256 orang Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dingsos, rumah singgah/shelter dan/pusat kesejahteraan sosial selama tahun 2023.

16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat.

Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat sepanjang tahun 2023 sebanyak 3 paket.

17. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Bagi warga masyarakat, kepemilikan dokumen kependudukan sangat penting untuk bermacam-macam kepentingan. Karena itulah Pemkab Jepara melalui Dinsospermasdes memberikan fasilitas bagi Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Sepanjang tahun 2023, kabupaten jepara tidak ada penyandang distabilitas terlantar lanjut usia terlantar gepeng.

18. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Setiap warga Negara memiliki hak untuk memperoleh akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Pada tahun 2023, terdapat 9 penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses dasar tersebut.

19. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.

Sebanyak 29 orang Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga pada tahun 2023

20. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang direunifikasi dengan keluarga.

Sepanjang tahun 2023, 18 orang Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng berhasil direunifikasikan dengan keluarganya.

21. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk.

Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk ada 12 orang.

22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan.

Pada tahun 2023 ada 159 orang yang mendapatkan makanan.

23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang.

Untuk korban bencana sebanyak tidak ada

24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki.

Kabupaten Jepara tidak memiliki penampungan pengungsi.

25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan.

Untuk kelompok rentan, belum ada paket permakanan khusus.

26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial.

Untuk pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana blm ada.

27. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial sebanyak 31 orang.

❖ **Tenaga Kerja.**

Pada saat pertambahan penduduk semakin meningkat maka persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi masalah yang cukup pelik bagi Negara. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat serta penyerapan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi maupun jenjang pendidikan tentu menjadi kendala tersendiri. Di Kabupaten Jepara urusan tenaga kerja ditangani oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Diskop UKM Nakertrans terus berupaya mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan

dengan tenaga kerja. Tingkat keberhasilan urusan tenaga kerja diukur melalui indikator kinerja output sebagai berikut :

1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki perencanaan tenaga kerja pada tahun 2023
2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.
Untuk akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja, pada tahun 2023 sebesar 81,36%
3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.
Tahun 2023, sebanyak 2 perusahaan
4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster.
Pada tahun 2023 penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi sebanyak 20. Sedangkan keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2023 sebanyak 40, sehingga capaiannya sebesar 50%.
5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.
Dari 9 orang instruktur yang ada di Kabupaten Jepara ada 5 yang telah bersertifikat kompetensi atau 56%.
6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.
Dari 319 peserta pelatihan, instruktur yang tersedia sebanyak 9 orang atau 2,82%.
7. Persentase LPK yang terakreditasi.
Dari 31 LPK yang ada di Jepara, baru ada 9 LPK yang terakreditasi pada tahun 2023 atau 29%.
8. Persentase LPK yang memiliki perizinan.
Dari 31 LPK yang ada di Jepara, semuanya memiliki perizinan pada tahun 2023 atau 100%.
9. Jumlah penganggur yang dilatih.
Jumlah penganggur yang dilatih pada tahun 2023 sebanyak 720 orang.
10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan.
Dari 720 orang yang dilatih pada tahun 2023, semua lulusannya bersertifikat pelatihan. 100%

11. Persentase penyerapan lulusan.

Dari 192 orang yang lulus pada tahun 2023, yang sudah bekerja sebanyak 66 orang atau 34%.

12. Lulusan bersertifikat kompetensi.

Tahun 2023 jumlah lulusan bersertifikat tahun 2023 sebanyak 720 dan yang lulus pelatihan bersertifikat sebanyak 150 sebanyak 21%.

13. Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan.

Dari 303 calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang terdaftar 100% mendapatkan pelatihan.

14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI).

Pada tahun 2023 terdapat 303 orang Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI).

15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas.

Dari 429 perusahaan yang ada di Jepara, baru 5 perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas atau 1,29 %.

16. Data tingkat produktivitas total.

Tingkat produktivitas total di tahun 2023 adalah 5,17%

17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).

Di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 terdapat 429 perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 10 orang. Dari jumlah tersebut, baru 160 perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan.

18. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB.

Dari 24 perusahaan yang memiliki Serikat pekerja/Serikat Buruh, ada 50% perusahaan yang telah memiliki PKB atau sebanyak 12 perusahaan

19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan.
Pada tahun 2023 ada 42 perusahaan.
20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.
Dari 172 perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB), baru 80 yang sudah menyusun struktur dan skala upah. 47%
21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dari 1.653 perusahaan wajib lapor, hanya 1.175 sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. capaian 71%
22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih.
Sepanjang tahun 2023, dari 429 perusahaan yang ada di Kabupaten Jepara, terdapat 97 perusahaan yang berselisih atau sekitar 23%.
23. Jumlah mogok kerja.
Sepanjang tahun 2023, terdapat 3 pemogokan kerja.
24. Jumlah penutupan perusahaan.
Penutupan perusahaan tidak ada pada tahun 2023
25. Jumlah perselisihan kepentingan.
Sedangkan untuk perselisihan kepentingan tidak terdapat perselisihan di tahun 2023
26. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan.
Sementara itu untuk perselisihan antar SP/SB tidak ada.
27. Jumlah perselisihan PHK.
Terkait dengan perselisihan PHK, sepanjang tahun 2023 terdapat 51 perselisihan.
28. Jumlah Pekerja yang ter-PHK.
Pekerja yang terkena PHK sebanyak 292 orang.
29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite.

- Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite ada 28 perselisihan.
30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan.
Kabupaten Jepara terdapat 1 Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan.
31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.
Dari 79 kasus perselisihan yang terjadi, terdapat 79 perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial, capaian 100%
32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten.
Pada tahun 2023, terdapat 12.457 lowongan kerja yang tersedia.
33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten.
Sedangkan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 17.504 orang.
34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten.
Di tahun 2023 terdapat 45 Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten Jepara.
35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam kabupaten.
Terdapat 411 Tenaga Kerja Khusus terdaftar di Kabupaten Jepara di tahun 2023
36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.
Terdapat 2 orang pejabat Fungsional Pengantar Kerja di Kabupaten Jepara.
37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten.
Pada tahun 2023 tidak terdapat Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal di Kabupaten Jepara.
38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten.
Sepanjang tahun 2023, ada 303 perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Jepara.
39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER).

Di tahun 2023, tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) sebanyak 9.967 orang.

40. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.

Dari 303 Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) semuanya sudah mendapatkan sosialisasi di tahun 2023. capaian 100%

41. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.

Terdapat 11 Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.

42. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat fasilitasi kepulangan.

Pada tahun 2023 terdapat 11 Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat fasilitasi kepulangannya.

43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.

Dari 303 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terdapat di Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2023, semuanya mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja, mencapai 100%

44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.

Dari 20 Orang Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya, seluruhnya diberdayakan atau 100% capaian kinerjanya.

45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk.

Kabupaten Jepara tidak memiliki layanan tenaga kerja migran.

❖ **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi point penting dalam pembangunan. Perempuan mempunyai peran yang sangat strategis dalam segala lini kehidupan. Namun demikian, dalam perjalanannya, peran perempuan masih kerap dianggap kurang penting. Untuk menghilangkan marginalisasi terhadap peran perempuan dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang lebih luas.

Di Kabupaten Jepara, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), diharapkan mampu menjawab segala tantangan peran perempuan dalam pembangunan.

Tingkat keberhasilan urusan ini ditentukan dengan beberapa indikator kinerja kunci output sebagai berikut :

1. Jumlah lembaga pemerintah kabupaten yang telah dilatih PUG.
Lembaga pemerintahan yang telah dilatih PUG sebanyak tahun 2023 terdapat 43 lembaga.
2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten.
Program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten pada tahun 2023 terdapat 12 program 81 kegiatan
3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan DP3AP2KB untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak.
Media Massa memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Karena itulah Pemerintah Kabupaten Jepara kerjasama dengan 3 media massa yang ada di Jepara, baik media cetak maupun elektronik.
4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.
Pada tahun 2023, kabupaten Jepara telah memiliki 39 lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.

5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani.
Dari 10 korban kekerasan anak di Kabupaten Jepara, seluruhnya sudah dapat dilayani. Capaian kinerjanya mencapai 100%.
6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan.
Lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan sejumlah 22 puskesmas 6 PPT Kecamatan, 1 P2TP2A, dan 1 Forum anak jepara
7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD).
Sedangkan lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD) baru 2 lembaga yaitu P2TP2A, Forum anak, dan LGNOTA
8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan.
Tahun 2023, tidak ada kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan.
9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih.
Di tahun 2023, Kabupaten Jepara tidak memiliki orang kader perempuan.
10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan.
Tahun 2023, tidak ada lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan.
11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten.
Begitu pula, tidak ada lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten.
12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi.
Kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi

ada 1 kebijakan/program.Perda No 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak

13.Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi.

lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi, sejumlah 1 lembaga yaitu P2TP2A

14.Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.

Dari 15 orang perempuan yang menjadi korban kekerasan, seluruhnya sudah mendapatkan layanan. Capaian kinerjanya sebesar 100%.

❖ Pangan

Urusan pangan ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Capaian kinerja urusan pangan diukur melalui indikator kinerja kunci output sebagai berikut :

1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.

Untuk infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan, kabupaten Jepara memiliki 1 buah gudang yaitu Gudang Cadangan Pangan Kabupaten Jepara.

2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya.

Pada tahun 2023, kabupaten Jepara melaksanakan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya.

3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local. Untuk regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal, tidak tersedia.

4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

Sepanjang tahun 2023, Kabupaten Jepara telah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan
Kabupaten Jepara memiliki peta ketahanan dan kerentanan pangan.
6. Tertanganinya kerawanan pangan.
Pada tahun 2023, di kabupaten Jepara kerawanan pangan sudah tertangani
7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan.
Selama tahun 2023, Kabupaten Jepara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyalurkan cadangan pangan capaian target mencapai
8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar
Kabupaten Jepara pada tahun 2023 telah melaksanakan pengawasan terhadap keamanan pangan segar yaitu melalui bintek Mutu Gizi.

❖ **Pertanahan**

Di Kabupaten Jepara, urusan pertanahan ada pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara untuk beberapa indikator dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara terkait perizinannya, dinas DPUPR, dan BPKAD Bidang Asset Capaian Kinerja urusan pertanahan diukur melalui beberapa indikator kinerja kunci output sebagai berikut :

1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati
Pada tahun 2023, Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun sebanyak 67 buah. Sedangkan izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak tidak ada.
2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Objek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek.

Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek dengan SK Bupati tidak ada.

3. SK Bupati / Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah pada tahun 2023 tidak ada.

4. Dokumen Izin membuka tanah.

Kabupaten Jepara tidak mengeluarkan izin membuka tanah.

5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten.

Dari rencana site lokasi pembangunan fisik sebanyak 167 , jumlah penetapan site lokasi bangunan fisik sebanyak 130 dengan capaian 77,84%.

❖ **Lingkungan Hidup**

Urusan Lingkungan Hidup ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan kabupaten terhadap Indeks kualitas Air, Udara dan Tutupan lahan.

Dari indikator ini kualitas lingkungan di Kabupaten Jepara adalah :

- Indeks kualitas Air (IKA) : 31,00
- Indeks Kualitas Udara (IKU) : 85,54
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan : 54,44

2. Tersedianya data informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten.

Di Kabupaten Jepara informasi penanganan sampah terdiri dari

- Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah
- Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah
- Tersedianya informasi terkait TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan.

Di Kabupaten jepara pada tahun 2023 tentang tersedianya informasi terkait TPST tidak ada , adanya PDU dan TPS3R

3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten
Sepanjang tahun 2023, izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebanyak 27 izin. semua usulan permohonan yang terregistrasi sudah semua .
4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab.
Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten sebanyak 16 izin sedangkan PPLHD ada 2 dengan capaian 0,42%
5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kabupaten.
Pada tahun 2023, di Kabupaten Jepara belum ada Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kabupaten.
6. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.
Sepanjang tahun 2023, tidak ada usulan MHA sehingga tidak ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.
7. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat pada tahun 2023 dari jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat sejumlah 16 sedangkan target lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Jepara 16 capaian 100%
8. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab yang ditangani.
Dari total pengaduan masyarakat yang terintegrasi sebanyak 16 aduan, dan yang sudah ditangani sebanyak 16, jadi realisasi sebesar 100%

❖ **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Capaian kinerja Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Penerbitan akta perkawinan

Dari 8.807 peristiwa perkawinan jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 8.804 dokumen, capaian kinerjanya sebesar 99.97%.

2. Penerbitan akta perceraian

Pada tahun 2023, peristiwa perceraian terjadi sebanyak 2.190, dan akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 1.913 atau 87,35%.

3. Penerbitan akta kematian.

Sepanjang tahun 2023, peristiwa kematian yang terjadi di Kabupaten Jepara cukup banyak yaitu mencapai 9.494 dan semuanya telah diterbitkan akta kematian 100%.

4. Penyajian data kependudukan.

Data kependudukan skala kabupaten yang diterbitkan dalam 1 tahun sebanyak 2 kali, sehingga capaiannya mencapai 100%.

❖ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pembangunan desa menjadi salah satu hal penting dalam percepatan pembangunan, salah satunya adalah pengentasan desa tertinggal urusan ini berada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara.

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.

Pada tahun 2023, ada 11 desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.

2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya.
Pada tahun 2023 tidak ada yang melakukan kerjasama antar desa.
3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.
Tahun 2023 terdapat 6 lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.
4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.
Terdapat 184 desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.

❖ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Karena itulah penting bagi Negara untuk terus berupaya mengendalikan pertambahan penduduk. Melalui program-program Keluarga Berencana diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai. Indikator kinerja kunci urusan ini adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan.
Pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara tidak tersedia dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan.
2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun.

- Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun adalah 22,91%
3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19).
Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 sebesar 4,83%
 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE).
Dari 1.264.598 sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE, masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE sebanyak 420.367 orang atau 33,24%
 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK.
Di Kabupaten Jepara terdapat 18 stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK.
 6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP.
Dari 60 faskes yang ada, terdapat 48 Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP dengan capaian 80%.
 7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Dari 205.185 Pasangan Usia Subur yang ada di Jepara, 145.296 orang menjadi peserta KB aktif atau capaiannya sebesar 70,81%.
 8. Pemerintah Daerah kab yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif.
Kelompok kerja KKBPK sebanyak 69 kelompok.
 9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan
Dari 17.925 orang yang menjadi sasaran peserta KB pasca persalinan, 9.375 atau 52,30% menjadi peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern.
 10. Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah.

Dari total desa 119.757 dengan kepesertaan KB terendah yaitu 58.557 memiliki kepesertaan KB paling rendah yaitu kurang dari 48,91%.

11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dari total keluarga PBI yaitu 195, sebanyak 16 atau 8,21 adalah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI.

❖ **Perhubungan**

Urusan perhubungan di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara. Indikator Kinerja Kunci Output dalam urusan ini adalah :

1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C.

Dari 170 fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan, ada 94 buah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia. Capaian kinerjanya sebesar 55,30%.

2. Terlaksananya pelayanan uji berkala.

Dari total kendaraan wajib uji yaitu 24,974 buah, Sedangkan kendaraan yang sudah menjalani uji kendaraan sebanyak 11.934 kendaraan atau sebesar 47,79%

3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kab, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.

Lintas penyeberangan di Kabupaten Jepara sebanyak 5 lintas yaitu Jepara – Karimunjawa, dan Karimunjawa – Desa Nyamuk. Dan semuanya telah ditetapkan tarifnya. Capaian 100%

4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.

Dari 19.475 perlengkapan jalan kabupaten yang dibutuhkan, sudah terdapat 689 pemasangan perlengkapan jalannya. Capaian kinerjanya adalah 35%.

❖ **Komunikasi dan Informatika.**

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara. Keberhasilan urusan komunikasi dan informatika diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo, dari 42 OPD yang menggunakan jaringan internet Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 33 capaian 78,57%
2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo, dari 42 OPD di Jepara yang menggunakan akses internet berkualitas dari Kominfo sebanyak 33 dengan capaian 78,57%
3. Di kabupaten Jepara ada sistem elektronik komunikasi intra Pemerintah yang disediakan kominfo sebanyak berbasis suara, video, teks, sinyal dll
4. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring 33 dan jumlah kegiatan event perangkat daerah dan pelayanan public pada pmda sebanyak 33 dengan capaian 100%
5. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar.

Dari 42 OPD termasuk kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara semuanya sudah memiliki portal dan situs web yang sesuai standar sebanyak 42 atau capaiannya adalah 100%

6. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari 42 perangkat daerah yang ada di Jepara termasuk kecamatan yang sudah mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 42 dengan capaian 100%.

7. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.

Pada tahun 2023, dari 314 layanan, terdapat 314 yang menggunakan layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik atau 100%.

8. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik.

Dari 314 Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baru 77 yang menggunakan layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik atau 24,52 %.

9. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 314 sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruhnya terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 100%

10. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.

Pada tahun 2023 ada 313 layanan public dan layanan administrasi, semua sudah terintegrasi dengan sistem

penghubung layanan pemerintah sebanyak 313, sehingga capaiannya adalah 100%.

11. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah.

Dari 26 perangkat daerah yang ada di Jepara, hanya semuanya sudah menggunakan layanan pusat data pemerintah 100%.

12. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah.

Pada IKK ini, perangkat daerah yang ada di Jepara yaitu berjumlah 26 (tidak termasuk kecamatan), semuanya sudah menyimpan data di pusat data pemerintah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 100%.

13. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo).

Perangkat daerah yang ada di Jepara yaitu berjumlah 26 (tidak termasuk kecamatan), ada 26 perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo 100%

14. Persentase data yang dapat berbagi pakai.

Dari 71 data yang dimiliki, hanya 39 dapat berbagi pakai atau capainnya 54,93%.

15. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city.

Pada tahun 2023, untuk mendukung program smart city, dari 26 perangkat daerah baru 25 yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city 96,15%. Kecamatan tidak termasuk

16. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara dari 64 ASN Pengelola TIK hanya 5 ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo.

17. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government.

Kabupaten Jepara sudah memiliki Peraturan Bupati yang terkait implementasi e-government yaitu Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City.

18. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten.

Untuk menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten, Pemerintah Kabupaten Jepara telah bermitra dengan komunitas yang ada di masyarakat. Dari 125 komunitas yang ada di masyarakat hanya 125 yang telah menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah 100%.

19. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM).

Pada tahun 2023, 14.744 konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan Pemkab, dan sebanyak 14.744 adalah Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 100%

20. Pada tahun 2023 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan.

Dari 1.753 diseminasi dan layanan Informasi Publik, semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP dengan capaian 100%.

❖ **Koperasi dan UKM**

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Nakertrans.

Keberhasilan capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Sampai dengan tahun 2023, di Kabupaten Jepara terdapat 523 koperasi simpan pinjam yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam. Sedangkan penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan sebanyak 5 atau capaiannya sebesar 0,96%.

2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Pada tahun 2023, ada 1 permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam dan hanya 1 yang diterbitkan. 100%

3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten. Dari 665 total koperasi yang ada, sebanyak 51 koperasi yang sudah diperiksa dan diawasi. 7,45%.

4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada sebanyak 277, dan ada 51 usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya atau 18,41%.

5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Dari jumlah koperasi yang ada yaitu 685, yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 166 koperasi atau 24,23%.

6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab

Dari 163.613 orang anggota koperasi yang ada di Jepara, ada 545 orang yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian. 0,33%

7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab.

Dari total koperasi yang berjumlah 685, di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 baru ada 7 koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan di kabupaten jepara tidak ada.
9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab.

Dari 685 koperasi yang ada di Jepara, semuanya telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya atau capainnya 100%.

10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Jepara jumlah koperasi yang ada 685 dan yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan tidak ada

11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab. Tahun 2022 kab jepara jumlah koperasi sebanyak 685 dan yang mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran sebanyak 3 capaianys 0,44% tidak memberikan dukungan fasilitasi pemasaran.

12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab.

Untuk dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi, ada 169 koperasi yang sudah di fasilitasi dari total koperasi 685. Capaiannya 24,67%

13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah ka dalam 3 (tiga) jumlah koprasi yang ada sebanyak 685 dan yang mendapatkan dukungan fasilitasi kemitraan sebanyak 3 capaian sebesar 0,15%

14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.

Pada tahun 2023, jumlah wirausaha yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 77.683 serta 3.729 adalah pertumbuhan wirausaha baru. Capaian pertumbuhannya sebesar 4,80%.

15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS).

Tahun 2023, Kabupaten Jepara tidak ada usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online ODS

16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra.

Jumlah usaha mikro di tahun 2023 sebanyak 77.683, dan yang bermitra sebanyak 223, atau 0,29%.

17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.

Di Kabupaten Jepara, usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk sebanyak 77.477, sedangkan usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi sebanyak 206

18. Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran.

Usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran di tahun 2023 sebnayak 76.943, sedangkan yang sudah terfasilitasi sebanyak 740.

19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan.

Dari 77.683 usaha mikro yang ada. Sebanyak 4.100 usaha yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihan,

20. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha.

Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara telah memberikan pendampingan kelembagaan dan usaha kepada 914 usaha mikro, dari 77.683 usaha mikro yang ada.

❖ **Penanaman Modal**

Untuk mewujudkan kemajuan dan mendukung pengembangan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah harus memiliki strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya adalah dengan investasi atau penanaman modal. Untuk menarik para investor agar mau berinvestasi ke daerah dibutuhkan iklim usaha yang sehat, mudah serta kejelasan prosedur.

Di Kabupaten Jepara, urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan dukungan para PNS dengan berbagai kualifikasi pendidikan, DPMPTSP dapat mewujudkan kinerja yang cukup baik.

Keberhasilan kinerja urusan penanaman modal diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara telah memiliki Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara.

2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

Pada tahun 2023 DPMPTSP sudah memiliki 10 buah SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yaitu SOP fasilitasi di Bidang Penanaman Modal. SOP Fasilitasi

Kemudahan Perizinan di Kabupaten Jepara, dan SOP FGD Perkembangan Investasi PMA PMDN di Kabupaten Jepara.

3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara terdapat 18 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal, dengan capaian 4 laporan yaitu laoran FGD Perkembangan Investasi PMA PMDN, Laporan Fasilitas Perizinan Penanaman Modal dan Laporan Webinar Central Java Investment Bussines Forum (CJIBF).

4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting.

Kabupaten Jepara, melalui DPMPTSP telah mengikuti kegiatan webinar bisnis, forum one on meeting Central Java Investment Bussines Forum (CJIBF) pada tanggal 9 dan 12 November 2022 oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 kali.

5. Kegiatan pameran penanaman modal.

Pada tahun 2023 Jepara terdapat 104 kegiatan pameran penanaman modal

6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal.

Kabupaten Jepara telah menyelesaikan target bidang Penanaman Modal yaitu kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasaa di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, sosialisasi pelayanan perizinan, pemeliharaan aplikasi system penanaman modal dan promosi investasi 11 kali

7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Sepanjang tahun 2023, Kabupaten Jepara melalui DPMPTSP telah melaksanakan konsultasi perizinan dan non perizinan sebanyak 812

8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Pada tahun 2023 ada 15.804 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

9. Laporan realisasi penanaman modal.

Pada tahun 2023 realisasi penanaman modal 8.928.971.312.243

10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, PNS yang telah mengikuti pelatihan Penanaman Modal sebanyak 25 orang

11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN

Sepanjang tahun 2023, DPMPTSP telah melaksanakan pembinaan penanaman modal kepada 753 perusahaan yang ada di Jepara.

12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Pada tahun 2023 ada 17 (satu) instansi yang mengajukan layanan permintaan data.

❖ **Pemuda dan Olahraga**

Pemuda sebagai masa depan bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri akan membantu pemuda dalam melanjutkan estafet pembangunan. Urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara. Disdikpora melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pemuda. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu dengan mengadakan pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda. Kesuksesan capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan.

Pada tahun 2023, di Kabupaten Jepara terdapat 200 orang pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan.

2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan.

Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan kewirausahaan kepada 200 orang.

3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda.
Di Kabupaten Jepara Pada Tahun 2023 terdapat 1.058 pemuda yang mendapat pelatihan.
4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan.
Pada tahun 2023 terdapat 958 penduduk yang berusia 16-30 tahun pengelola organisasi
5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan.
Dari 63 orang yang menjadi pelatih olahraga di Kabupaten Jepara, sebanyak 63 pelatih yang memiliki kompetensi
6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah.
Karena pada tahun 2023, setelah masa pandemi Covid-19 maka event olahraga prestasi hanya sempat dilaksanakan sebanyak 9 kali.

❖ **Statistik**

Urusan statistik dilaksanakan oleh Diskominfo. Capaian kinerja urusan ini di ukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Tersedianya buku profil daerah.
Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara melalui Diskominfo telah menerbitkan 3 buah buku profil daerah yaitu Jepara Dalam Angka, PDRB dan Statistik Sektorial Kabupaten Jepara
2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan
Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara tidak melakukan survei sektoral
3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan.
Di tahun 2023, kompilasi statistik sektoral yang dilakukan oleh Diskominfo sebanyak 239 kali.
4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS.

Pada tahun 2023, Diskominfo tidak melaksanakan survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS.

5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 239 kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS.

6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistic.

Pada tahun 2023 jumlah kegiatan statistic sektoral sebanyak 239 dan yang memiliki metadata kegiatan statistik sektoral sebanyak 91 dengan capaian 38,08%.

7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral

Dari 95 metadata statistic sektoral semuanya sudah menggunakan indikator statistik sektoral. Dengan capaian 100%

❖ **Persandian**

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kbaupaten Jepara

1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.

Pada tahun 2023, dari 10 kegiatan strategis yang dilaksanakan, semuanya sudah diamankan.

2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah.

Dari 314 buah SE yang ada di Jepara, sebanyak 290 SE sudah menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian dengan capaian 100%

3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.

Dari 314 SE yang ada, semuanya telah diaudit dengan resiko kategori rendah dengan capaian 100%.

4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi
Pada tahun 2023 dari 52 titik pada PHKS, semua titik sudah diamankan.

❖ **Kebudayaan**

Sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku dan ras, Indonesia memiliki ragam budaya dengan keunikan dan kekhasannya masing-masing. Setiap daerah memiliki potensi budaya dan cagar budaya yang berbeda-beda. Menjadi kewajiban setiap daerah untuk mengenali, menjaga dan melestarikan budaya yang ada di daerahnya masing-masing, karena cagar budaya adalah warisan leluhur dimana kita dapat belajar banyak dari hal tersebut. Dengan menjaga dan melestarikan kebudayaan dan cagar budaya, khususnya kebudayaan local, akan membangun rasa nasionalisme sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap terjaga. Di Kabupaten Jepara, urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Capaian urusan kebudayaan diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi).
Di tahun 2023 di Kabupaten Jepara ada 32 obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi.
2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman).
Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara ada 7 kali melaksanakan kegiatan obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.

3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat).
Obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2023 ada 32 Obyek.
4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola.
Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara memiliki 14 orang SDM yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola.
5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan).
TAhun 2023, Kabupaten Jepara melaksanakan register cagar budaya sebanyak 5
6. Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran).
Sampai dengan tahun 2023, Jepara memiliki 3 cagar budaya yang dilindungi.
7. Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kota dengan dukungan data.
Pada tahun 2023 Kabupaten Jepara tidak melaksanakan Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kota dengan dukungan data.
8. Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi).
Sepanjang tahun 2023, Kabupaten Jepara tidak melaksanakan pengembangan cagar budaya.
9. Pemanfaatan cagar budaya kab (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata).

Kabupaten Jepara memiliki 5 buah cagar budaya yang dimanfaatkan untuk kepentingan dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum.

Museum Kartini yang dimiliki Kabupaten Jepara terletak di pusat kota yaitu di sebelah utara alun-alun I Jepara. Museum Kartini memiliki 612 koleksi yang bisa dinikmati oleh pengunjung.

11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum.

Dengan 612 koleksi yang dimiliki, Museum Kartini sepanjang tahun 2023 ada 30.114 pengunjung. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2023 karena sudah mulai dibuka tempat-tempat wisata setelah masa pppm akibat covid-19

12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum ada 15

13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya.

Kabupaten Jepara telah membentuk 1 Tim pendaftaran cagar budaya.

14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten

Kabupaten Jepara telah membentuk 1 Tim ahli cagar budaya

15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya

Tahun 2023 Dinas Pariwisata dan kebudayaan melaksanakan tidak ada fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya.

16. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman

SDM yang menangani Cagar budaya dan permuseuman sebanyak 9 orang.

17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman.

Sepanjang tahun 2023, Disparbud melaksanakan tidak ada kegiatan peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman.

18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman.

Sarana dan prasarana untuk pendaftaran cagar budaya dan permuseuman ada 38 unit yang dimiliki.

19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat.

Pada tahun 20223, Disparbud telah mengadakan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat sebanyak 15 event.

❖ **Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar. Perpustakaan terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Meskipun pada era digital seperti sekarang, segala macam informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, namun peran buku dan perpustakaan masih belum bisa tergantikan. Di Kabupaten Jepara, urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara. Pada saat ini, perpustakaan Jepara bukanlah sekedar tempat membaca dan meminjam buku saja, namun perannya sudah semakin luas dalam memberikan berbagai fasilitasi kegiatan masyarakat. Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskarpus, diantaranya ada Akademi Menulis Jepara yaitu wadah bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap dunia tulis menulis, komunitas Bahasa Inggris dan berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan lainnya.

Capaian kinerja urusan perpustakaan diukur melalui beberapa indikator kinerja kunci yaitu :

1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk

Dengan jumlah penduduk kabupaten Jepara sebanyak 1.264.598 jiwa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara memiliki koleksi buku sebanyak 620.975 eksemplar. 49,10%

2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat.

Sedangkan untuk jumlah pengunjung yang memanfaatkan keberadaan perpustakaan sepanjang tahun 2023 sebanyak 39.232 orang dari jumlah penduduk kabupaten Jepara 1.264.598 atau 3,10%.

3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk.
Untuk melayani masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan, Diskarpus memiliki 967 orang petugas untuk melayani 1.264.598 orang. 0,08%
4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
Kabupaten Jepara memiliki 20 buah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan. Sedangkan jumlah total perpustakaan yang ada sebanyak 915 perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa. 2,19%
5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat.
Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya mendekatkan diri pada masyarakat dengan berbagai kegiatan. Pada tahun 2023 sebanyak 1.342 kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara telah melakukan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat melalui kegiatan Perpustakaan keliling 1.346 kali, Lomba dalam rangka minat baca dan lomba perpustakaan 3 kali, sosialisasi gemar membaca 1 kali.
6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya.
Kabupaten Jepara tidak memiliki naskah kuno.
7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa
Kabupaten Jepara tidak memiliki naskah kuno yang dialih aksara dan alih bahasakan.
8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)
koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar sebanyak 214 eksemplar.

❖ Kearsipan

Arsip memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan pemerintahan. Selain berisi berbagai informasi, arsip juga berperan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah. Maka bisa dikatakan bahwa arsip memegang peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Karena itulah arsip akan memberikan manfaat yang optimal ketika dikelola dengan baik dan tertib. Namun sayangnya, masyarakat, organisasi/lembaga bahkan pemerintah masih banyak yang tidak sadar arsip sehingga banyak persoalan yang muncul karena pengelolaan arsip yang tidak baik.

Di Kabupaten Jepara, urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara.

Capaian kinerja output urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip.

Arsip yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebanyak 142.937 dan terdapat 96.870 arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip. Capaian kinerjanya adalah 67,77%.

2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip.

Dari seluruh arsip inaktif yaitu 1803.056 arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebanyak 225.113 atau 81,32%.

3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik.

Sedangkan jumlah arsip statis sudah 100% dibuatkan sarana bantu temu balik atau sebanyak 93.835

4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Dari 462.885 arsip dinamis yang ada, yang sudah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN sebanyak 1.781 atau 0,38 %

5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK

Tahun 2022 sebanyak 2.039 Arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK.

6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK.

Sedangkan untuk perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK tidak ada.

7. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK di kabupaten.

Pada tahun 2023 ada 64 penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK.

8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK.

Kabupaten Jepara telah melakukan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK sebanyak 4.087

9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian.

Pada tahun 2023 ada 4 arsip dalam status pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian.

10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab yang sesuai NSPK.

Kabupaten Jepara tidak mengeluarkan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab yang sesuai NSPK.

URUSAN PILIHAN

❖ Kelautan dan Perikanan

Menjadi daerah yang memiliki wilayah perairan cukup luas, penduduk Kabupaten Jepara yang berprofesi sebagai nelayan cukup banyak. Dengan panjang pantai kurang lebih 72 kilometer memiliki potensi perikanan yang cukup luar biasa. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Dinas Perikanan telah melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir. Selain itu dengan 10 buah Tempat Pelelangan Ikan yang

tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara, diharapkan bisa mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang ada di Jepara. Keberhasilan urusan kelautan dan perikanan diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP).

Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) sebanyak 339 orang

2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional

Sampai dengan tahun 2023, dari 10 TPI yang ada di Kabupaten Jepara Kabupaten, terdapat 6 buah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah memenuhi minimal standar operasional yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Jepara , dengan capaian 60%

3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Jepara telah menerbitkan 41 buah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan.

4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan).

Pada tahun 2023, Pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) sebanyak 551 orang/pembudidaya.

5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi.

Sepanjang tahun 2023, benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi baik melalui usaha rakyat maupun Balai Benih sebanyak 433.777.985 ekor.

❖ **Pariwisata.**

Sektor pariwisata memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Demikian juga dengan Kabupaten Jepara. Jepara yang memiliki destinasi wisata yang lengkap, dari wisata alam (pantai dan gunung), wisata budaya dan wisata religi tentu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Jepara. Bahkan salah satu tempat wisata menjadi destinasi internasional, yaitu Karimunjawa. Eksotika Karimunjawa sudah diakui okeh dunia. Keindahan pantai serta keelokan bawah laut, mampu menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Jepara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Karimunjawa.

sektor pariwisata mulai ada peningkatan terutama

Di Jepara, urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Bisa dikatakan sektor pariwisata menjadi unggulan di Kabupaten Jepara. Capaian kinerja urusan pariwisata diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi.

Pada tahun 2023, terdapat 24 entitas destinasi di Jepara.

2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

Untuk semakin menarik perhatian wisatawan, selain terus meningkatkan destinasi, Disparbud juga senantiasa memenuhi Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. Tahun 2023 ada 169 sarana prasarana yang dibangun.

3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten.

Sepanjang tahun 2023, ada 2.394 tanda daftar usaha pariwisata (TUDP) per sub jenis usaha

4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.

Setelah masa pandemic pada tahun 2023, ada 15.251 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jepara.

5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri.
Sepanjang tahun 2023, Disparbud telah melaksanakan 17 kali event dalam negeri.
6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten.
Untuk event luar negeri, pada tahun 2023 Kabupaten Jepara tidak mengikuti.
7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri.
Pada tahun 2023, ada 12 industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri.
8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi.
Dari 1.445 tenaga kerja pariwisata, 68 orang sudah tersertifikasi.
Capaian kinerjanya mencapai 1,3%
9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan.
Dari 310 orang yang menjadi sasaran pembekalan sector pariwisata semuanya sudah terlaksana sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.
10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat.
Lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat sebanyak 30 lokasi.

❖ **Pertanian**

Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 100.413,189 ha. Dari keseluruhan wilayah tersebut merupakan lahan sawah/wilayah tak terbangun yang meliputi tambak, lahan pertanian, kawasan perkebunan serta konservasi. Sedangkan yang termasuk bukan lahan/sawah kering/build up area terdiri dari pemukiman, perkantoran dan jasa, kawasan industri serta transportasi. Seiring dengan terjadinya pertambahan penduduk mengakibatkan pergeseran fungsi lahan. Selain itu, pergeseran struktur ekonomi dan kemajuan teknologi juga menjadi factor perubahan fungsi lahan. Di Kabupaten Jepara, urusan pertanian dilaksanakan oleh

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Capaian kinerja urusan pertanian di ukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan 128 unit sarana

Pertanian dan 126 unit prasarana pertanian buah sarana dan prasarana pertanian.

2. Prasaran pertanian yang digunakan.

Pada tahun 2023, prasarana pertanian yang digunakan sebanyak 67 unit, capaian 100%

3. Penerbitan izin usaha pertanian.

Sepanjang tahun 2023, Pemkab Jepara tidak memberikan fasilitasi penerbitan izin usah pertanian.

4. Persentase Prasarana pertanian yang digunakan.

Dari 67 prasarana pertanian yang ada, seluruhnya dipergunakan, sehingga capaian kerjanya adalah 100%.

5. Persentase jumlah izin usaha pertanian Kabupaten Jepara Tidak ada usulan usaha pertanian telah memiliki izin.

6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana

Dari 99,42 ha luas area yang terkena bencana, seluruhnya bisa ditanggulangi yaitu sawah puso akibat banjir yang diintervensi

❖ **Kehutanan**

Urusan kehutanan sudah menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

❖ **Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)**

Kabupaten Jepara tidak melaksanakan urusan ESDM.

❖ **Perdagangan.**

1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Untuk izin Pusat Perbelanjaan di kabupaten Jepara untuk Toko swalayan sebanyak 84 izin.

2. Persentase penerbitan TDG.
Pada tahun 2023 dari 84 permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang masuk, semuanya dapat diterbitkan kurang dari 5 hari, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
3. Persentase gudang yang tidak memiliki TDG
Penerbitan TDG sepanjang tahun 2023 sebanyak 31. Sedangkan gudang yang ada di Jepara sebanyak 31 gudang, capaian 100%
4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu.
Untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan waralaba luar negeri, Kabupaten Jepara tidak ada.
5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten.
Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten tidak melaksanakan pemeriksaan sedangkan sepanjang tahun 2023 tidak ada permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer.
6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu.
Pada tahun 2023, penerbitan SPKA sudah menjadi kewenangan provinsi.
7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya adalah 50%.
8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu.
Dari 76 komoditi yang dimiliki Kabupaten Jepara, persentase komoditinya adalah 954,62 atau 13%.
9. Di Kabupaten Jepara Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan pada tahun 2023 sebesar 3,56%
10. Persentase alat-alat ukur timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan pada tahun 2023 jumlah

UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan sejumlah 3.022 dengan capaian 100%

11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku. pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara jumlah sampel BDKT yang diawasi 8 dari total BDKT 8 dengan capaian 100%

❖ **Perindustrian**

Urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Capaian kinerja urusan perindustrian di ukur dari indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industry (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten.

Kabupaten Jepara tidak menerbitkan zin usaha kawasan industri (IUKI) Karena tidak ada kawasan industri.

2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda.

Terkait dengan dokumen RPIK, sampai saat ini belum ditetapkan menjadi Perda. Sudah tersusun naskah dan draft ranperda atau capaiannya sebesar 50%.

3. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan.

Dari 10.551 permohonan atau pengajuan izin yang masuk, seluruhnya telah diterbitkan izinnya atau capaiannya adalah 100%.

4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan.

Untuk pengajuan izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil, pada tahun 2023 tidak ada izin yang diterbitkan

5. Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten.

Total populasi perusahaan industri besar & perusahaan kawasan industri di kabupaten jepara adalah 10.551, sedangkan jumlah perusahaan industri kecil & perusahaan kawasan industri di kabupaten di SIINas sebanyak 10.551 capaian 100%.

❖ **Transmigrasi**

Urusan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Capaian kinerja urusan ini di ukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya yaitu Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara tidak terdapat warga / masyarakat yang ikut program Transmigrasi.

Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Output

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	663	663	Disdikpora
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35.959	35.959	Disdikpora
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa)	290	290	Disdikpora
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	3.263	3.263	Disdikpora
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri	4.146	4.146	Disdikpora

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dan Swasta)			
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	2.750	2.750	Disdikpora
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	865	865	Disdikpora
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	578	578	Disdikpora
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	127.476	127.476	Disdikpora
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	57.871	57.871	Disdikpora
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan	80.071	80.071	Disdikpora

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	30.880	30.880	Disdikpora
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	6.591	6.591	Disdikpora
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.782	4.782	Disdikpora
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	7.499	7.499	Disdikpora
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.066	4.066	Disdikpora
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.598	1.598	Disdikpora
		18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.100	1.100	Disdikpora
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	821	821	Disdikpora

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	485	485	Disdikpora
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat	4.914	4.914	Disdikpora
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.965	1.965	Disdikpora
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	396	396	Disdikpora
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	90	90	Disdikpora

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	551	551	Disdikpora
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Disdikpora SMA/ sederajat	294	294	Disdikpora
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10	10	Disdikpora
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah	5.366	5.366	Disdikpora
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	340	340	Disdikpora
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	225	225	Disdikpora
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	144	144	Disdikpora
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan	134	134	Disdikpora

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	1	1	Disdikpora
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	6	6	Disdikpora
2.	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kab yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	28 Unit Rumah Sakit : 6 Puskesmas : 22	28 Unit Rumah Sakit : 6 Puskesmas : 22	Dinkes
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	6 unit RS	Dinkes
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	23.750 Paket Buku KIA : 20.557 OVM : 120 OVP: 120 ANC Kit: 111 Susu Bumil KEK :	23.750 Paket Buku KIA : 20.557 OVM : 120 OVP: 120 ANC Kit: 111 Susu Bumil KEK : 2.842	Dinkes

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			2.842		
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang	Dinkes
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (rekap sarana operasional dan contoh foto)	231 paket PMT Ibu Nifas : 120 Bidang Kit : 111	231 paket PMT Ibu Nifas : 120 Bidang Kit : 111	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (dokter dan perawat)	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang	Dinkes
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	27.729 Paket OVM : 120 OVP: 120 Buku KIA : 20.557 KN Kit : 110 Oksimeter : 22 Kertas Saring SHK : 1.700 Lancet SHK : 1.700 Alcohol Swab SHK : 1.700 Plastik Klip SHK : 1.700	27.729 Paket OVM : 120 OVP: 120 Buku KIA : 20.557 KN Kit : 110 Oksimeter : 22 Kertas Saring SHK : 1.700 Lancet SHK : 1.700 Alcohol Swab SHK : 1.700 Plastik Klip SHK : 1.700	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk	763 orang Dokter :	763 orang Dokter : 204	Dinkes

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		elayanan neonatal esensial sesuai standar	204 orang Bidang : 559 orang	orang Bidang : 559 orang	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9.973 paket Posyandu : 1.133 unit Formula F 100 : 8.730 KN Kit : 110	9.973 paket Posyandu : 1.133 unit Formula F 100 : 8.730 KN Kit : 110	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	6.515 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang Kader : 5.752 orang	6.515 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang Kader : 5.752 orang	Dinkes
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	718 paket Hb Meter & Pen : 22 Strip Hb : 357 Lancet : 113 Alkohol Swab : 113 Handscoon : 113	718 paket Hb Meter & Pen : 22 Strip Hb : 357 Lancet : 113 Alkohol Swab : 113 Handscoon : 113	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.101 orang Guru UKS SD/MI : 755 Guru UKS SMP/MTs : 210 Guru UKS SMA/MA : 136	1.101 orang Guru UKS SD/MI : 755 Guru UKS SMP/MTs : 210 Guru UKS SMA/MA : 136	Dinkes
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	45.282 paket BMHP Gula Darah : 3.110 BMHP IVA Test : 1.000 BMHP Profil Lipid : 6.322 BMHP Ca Colon : 10.000 BMHP EKG : 300 Rapid Duo HIV Sipilis : 24.550	45.282 paket BMHP Gula Darah : 3.110 BMHP IVA Test : 1.000 BMHP Profil Lipid : 6.322 BMHP Ca Colon : 10.000 BMHP EKG : 300 Rapid Duo HIV Sipilis : 24.550	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.092 orang Nakes terlatih pandu PTM : 46 Programmer PTM : 1.022 Nakes terlatih Pengendalian PPOK dan Asma : 24	1.092 orang Nakes terlatih pandu PTM : 46 Programmer PTM : 1.022 Nakes terlatih Pengendalian PPOK dan Asma : 24	Dinkes
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		527 paket Posyandu Lansia : 313 Lansia Kit : 74 Buku Caregiver : 140	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan		44 orang Dokter : 22 Prpgrammer Lansia : 22	Dinkes

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar			
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	181 paket posbindu kit	181 paket posbindu kit	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	46 orang nakes terlatih pandu PTM	46 orang nakes terlatih pandu PTM	Dinkes
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	181 paket posbindu kit	181 paket posbindu kit	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	22 orang programmer PTM	22 orang programmer PTM	Dinkes
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	29 Buku	29 Buku	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak	46 orang nakes terlatih	46 orang nakes terlatih	Dinkes

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		usia pendidikan dasar sesuai standar	keswa	keswa	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	23.765 paket FDC kategori I : 1.700 FDC Anak : 275 POT SPOTUM : 12.550 Kaca Slide : 20 Reagen Zn : 20 Catridge TCM TBC : 9.200	23.765 paket FDC kategori I : 1.700 FDC Anak : 275 POT SPOTUM : 12.550 Kaca Slide : 20 Reagen Zn : 20 Catridge TCM TBC : 9.200	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	76 orang Dokter : 25 Perawat TBC : 25 Laborat TBC : 26	76 orang Dokter : 25 Perawat TBC : 25 Laborat TBC : 26	Dinkes
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.	64.280 orang Kondom : 6.480 Lubrikan : 2.500 Rapid HIV 2 : 3.075 Rapid HIV 3 : 1.675 Rapid HIV ½ Sipilis : 24.550 Rapid Sipilis RPR : 3.000	64.280 orang Kondom : 6.480 Lubrikan : 2.500 Rapid HIV 2 : 3.075 Rapid HIV 3 : 1.675 Rapid HIV ½ Sipilis : 24.550 Rapid Sipilis RPR : 3.000 Masker : Bedah :	Dinkes

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			3.000 Masker Bedah : 23.000	23.000	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar.	29 orang Dokter : 6 Perawat : 6 Rekam Medis : 6 Apoteker : 5 ATLM : 6 Bidan : 1	29 orang Dokter : 6 Perawat : 6 Rekam Medis : 6 Apoteker : 5 ATLM : 6 Bidan : 1	Dinkes.
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab (ha)	Ha	97	DPU-PR
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab (m)	M	13.050	DPU-PR
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)	Ha	700	DPU-PR
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab (m)	M	2.040	DPU-PR
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab	Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab	Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	DPU-PR
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab	Jumlah	1. Bangunan perkotaan tebing : 7.400 meter 2. Tanggul sungai : 5040 meter 3. Pintu air : 9 Unit 4. Pom	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				pa air : 3 unit	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten				
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	Sudah cukup jelas	97	DPU-PR
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab (m)	Sda	13.050	DPU-PR
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	Sda	700	DPU-PR
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	Sda	2.040	DPU-PR
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	Ada/tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Ada/tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	DPU-PR
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	Jumlah	5. Bangunan perkuatan tebing : 7.400 meter 6. Tanggul sungai : 5040 meter 7. Pintu air : 9 Unit 4. Pompa air : 3 unit	DPU-PR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	4.238,4 ----x 100% 10.596	40	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	313.124,88 ---x 100% 1.249.933	25,05	DPU-PR
		3. Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	4.143 -----100% 13.810	30	DPU-PR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten			
		1. Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kab	Ada/Tidak	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040	DPU-PR
		2. Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten	Ada/Tidak	Dokumen Jakstrada berlaku Tahun 2020 – 2024	DPU-PR
		3. Jumlah BUMD dan atau UPTD kab penyelenggaran SPAM	Ada/Tidak	1 PDAM	DPU-PR
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Izin	8 Desa	DPU-PR
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat	Kerjasama	1 {Embung Kalimati (Peratura	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dan Pemerintah daerah lain		n Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaa n Air Minum Kabupate n Jepara Tahun 2020-2040}}	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
		1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	300.851	300.851	DPU-PR
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	100	100	DPU-PR
		3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan	300.951	300.951	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	210	210	DPU-PR
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	210	210	DPU-PR
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	210	210	Disperkim
		7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akese dasar	300.851 ---- X 100 300.851	100%	Disperkim
		8. Kinrja penyediaan pelayanan SPALD S akes aman	210 ----X 100 3000851	0,070%	Disperkim
		9. Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD S T akses dasar	100 ---- X 100 300.851	0,033%	DPU-PR
		10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	300.851 ---- X 100 300.851	100%	DPU-PR
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	3 ---- X 100 3	100%	DPU-PR
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan	14,25 ---- X 100 85,792	16,61%	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		lumpur tinja			
		13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100 ---- X 100 (2X50)	100%	DPU-PR
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	210 ---- X 100 300.851	0,070%	DPU-PR
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten			
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	52 ---- X 100 118	44,07%	DPU-PR
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	474	474	DPMPTSP
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Peraturan daerah kabupaten jepara nomor 26 tahun 2011	Ada	DPU-PR
		4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Keputusan bupati jepara nomor 640/320	Ada	DPU-PR
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Keputusan bupati jepara nomor 430/410 tahun 2018	36	DPU-PR
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh	Perda 14/2018 perangkat	163	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab	daerah dan perbup 1/2018 UPTD		
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten	Perda 14/2018 perangkat daerah dan perbup 1/2018 UPTD	163	DPU-PR
		8. Jumlah bangunan gedung Negara milik pemerintah kab. yang dipelihara/ dirawat	Perda 14/2018 perangkat daerah dan perbup 1/2018 UPTD	163	DPU-PR
		Tingkat kemantapan jalan			
		1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	Nomor 620/295 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten Jepara	854,027 Km	DPU-PR
		2. Panjang jalan yang dibangun	6.431,60	6.431,60 M	DPU-PR
		3. Panjang jembatan yg dibangun	37,00	37,00M	DPU-PR
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan	24.107,70	24.107,70M	DPU-PR
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	-	-	DPU-PR
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau Direhabilitasi	17.676,10	17.676,10M	DPU-PR
		7. Panjang jembatan	81,90	81,90M	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang direhabilitasi			
		8. Panjang jalan yang dipelihara	28.071,95	28.071,95 M	DPU-PR
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	44,90	44,90M	DPU-PR
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli			
		1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli konstruksi di wilayah kab	Ada	1	DPU-PR
		2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab	103	103	DPU-PR
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab	27	27	DPU-PR
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab yang aktif dengan data termutakhir	SK Kepala Dinas DPUPR Nomor 061 Tahun 2022	Ada	DPU-PR
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBD kabupaten	994 Paket	Ada	DPU-PR
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN	9 Paket	Ada	DPU-PR
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di	244 Paket	Ada	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		wilayah kab yang bersumber dari pendanaan lainnya			
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1247 paket	Ada	DPU-PR
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten	Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2021	Ada	DPU-PR
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	1	Ada	DPU-PR
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja	30	Ada	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis			
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	76	Ada	DPU-PR
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	0	Tidak ada	DPU-PR
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Tidak ada	DPU-PR
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Tidak ada	DPU-PR
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan	0	Ada	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Tidak ada	DPU-PR
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	570	570	DPU-PR
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten	0	0	DPU-PR
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	304	304	DPU-PR
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	0	0	DPU-PR
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	0	DPU-PR
		23. Jumlah pengawasan	0	0	DPU-PR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0	DPU-PR
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0	DPU-PR
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.				
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab			
		1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15	Disperkim.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15	Disperkim
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15	Disperkim
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15	Disperkim
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15	Disperkim
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Surat Keterangan	0	Disperkim
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban	Surat Keterangan	0	Disperkim

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Bencana			
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang Terfasilitasi	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15	Disperkim
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Surat Keterangan	0	Disperkim
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten			
		1. Jumlah RT penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Surat Keterangan	0	Disperkim
		1. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Surat Keterangan	0	Disperkim
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Surat Keterangan	0	Disperkim
		3. Jumlah rumah	SK Kepala Dinas	6	Disperkim

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov Jawa Tengah N0 130/XI/2023 Tentang Penerima Bansos Stimulan Material/ Bahan Bangunan Pada Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah TA 2023		
		4. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Surat Keterangan	0	Disperkim
		5. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Surat Keterangan	0	Disperkim
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani			
		1. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh< 10 Ha	Update Data Baseline Kawasan kumuh tahun 2023	64,56	Disperkim
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Dok. Data Unit RTLH Bidang	1.375	Disperkim

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			Permukiman TA 2023		
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Update Data Baseline Kawasan kumuh tahun 2023	3,17	Disperkim
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
		1. Jumlah rumah di kab/kota	Data Base Bappeda tahun 2022	365.673	Disperkim
		2. Jumlah unit PK RTLH	Dok. Data Unit RTLH Bidang Permukiman TA 2023	1.375	Disperkim
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	Dok. Data Unit RTLH Bidang Permukiman TA 2023	9.734	Disperkim
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun)	Surat Keterangan	0	Disperkim
		5. Rasio rumah dan KK	421.975 -- x 100% 365.673	115,39%	Disperkim
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	0	0	Disperkim
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	5	Disperkim
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323	Disperkim
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun	323	Disperkim

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Lingkungan	2023		
		4. Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323	Disperkim
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	7	Disperkim
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323	Disperkim
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	7	Disperkim
		8. Jumlah pengembang yang teregistrasi.	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	7	Disperkim
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	34	Disperkim
5.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	8	8 Kejadian	Satpol PP & Damkar
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2.240	2.240	Satpol PP & Damkar
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8	8	Satpol PP & Damkar
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai	3	3	Satpol PP & Damkar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		PPNS			
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	5	5	Satpol PP & Damkar
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Ada	Satpol PP & Damkar
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	1	BPBD
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{864.234}{864.234} \times 100\%$	100%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Tidak melaksan akan	0	BPBD
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Tidak melaksan akan	0	BPBD
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{620}{129.287} \times 100\%$	0,05%	BPBD
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{620}{129.287} \times 100\%$	0,05%	BPBD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	1.257.580 --- x 100% 1.257.580	100 %	BPBD
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	1.257.580 -- x 100% 1.257.580	100 %	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Tidak ada suatus KLB		BPBD
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	6 --x 100% 6	100 %	BPBD
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	869 ---x 100% 869	100 %	BPBD
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	4.759 ----x 100% 4.759	100 %	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non	202	202	Satpol PP & Damkar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten			
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	3	3 Srpras	Satpol PP & Damkar
		3. Tersedianya aparaturnya selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian di kantor kecamatan	26	26 Orang	Satpol PP & Damkar
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	0	Satpol PP & Damkar
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	14	14 sarpras	Satpol PP & Damkar
		6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009	28	28 orang	Satpol PP & Damkar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	0	Satpol PP & Damkar
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	0	Satpol PP & Damkar
6	SOSIAL				
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			
		1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2	2	Dinsos permasdes
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1.380	1.380	Dinsos permasdes
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terbentuk	1	1	Dinsos permasdes
		4. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dijangkau	1.380	1.380	Dinsos permasdes
		5. Jumlah kendaraan roda 4 yang akses	4	4	Dinsos permasdes

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		khusus layanan kedaruratan yang dimiliki			
		6. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1006	1006	Dinsos permasdes
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	1	Dinsos permasdes
		8. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang	25	25	Dinsos permasdes
		9. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu	345	345	Dinsos permasdes
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	21	21	Dinsos permasdes
		11. jumlah paket perbekalan yang tersedia	0	0	Dinsos permasdes
		12. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	0	Dinsos permasdes
		13. Jumlah tenaga kesehatan yang	0	0	Dinsos

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		disediakan di rumah singgah/shelter			permasdes
		14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan	39	39	Dinsos permasdes
		15. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik , mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/ pusat kesejahteraan sosial	256	256	Dinsos permasdes
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	3	3	Dinsos permasdes
		17. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	0	Dinsos permasdes
		18. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang	9	9	Dinsos permasdes

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehata dasar			
		19. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	29	29	Dinsos permasdes
		20. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	18	18	Dinsos permasdes
		21. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk	12	12	Dinsos permasdes
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan Makanan	159	159	Dinsos permasdes
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang	0	0	Dinsos permasdes
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang Dimiliki	0	0	Dinsos permasdes

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		4. Jumlah paket permakanaan khusus bagi kelompok Rentan	0	0	Dinsos permasdes
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	0	Dinsos permasdes
		6. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang Tersedia	31	31	Dinsos permasdes
7	Tenaga Kerja				
		Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja			
		1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kab	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Jepara Tahun 2021-2026	Ada	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	81,36%	81,36%	Diskop UKM Nakertrans
		3. Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	2	2	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan	20 ----x100% 40	50%	Diskop UKM Nakertrans

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kualifikasi klaster			
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	5 ---x 100% 9	56%	Diskop UKM Nakertrans
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	9 ---x 100% 319	2,82%	Diskop UKM Nakertrans
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	9 --- x 100% 31	29%	Diskop UKM Nakertrans
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	31 ----x 100% 31	100%	Diskop UKM Nakertrans
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	720 orang	720	Diskop UKM Nakertrans
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	720 ----x100% 720	100%	Diskop UKM Nakertrans
		8. Persentase penyerapan lulusan	66 ---x 100% 192	34%	Diskop UKM Nakertrans
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	150 ---x 100% 720	21%	Diskop UKM Nakertrans
		10. Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	303 --- x 100% 303	100%	Diskop UKM Nakertrans
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	303 orang	303	Diskop UKM Nakertrans
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan	5 ---x 100% 429	1,29	Diskop UKM Nakertrans

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		program peningkatan produktivitas			
		2. Data tingkat produktivitas total	5,17%	5,17%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS			
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	160 ---X 100% 429	37,30%	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	12 ---X 100% 24	50%	Diskop UKM Nakertrans
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di Perusahaan	42	42	Diskop UKM
		4. Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	80 ---x 100% 172	47%	Diskop UKM Nakertrans
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	1.175 ---x 100% 1.653	71%	Diskop UKM Nakertrans
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	97 --- x 100% 429	23%	Diskop UKM Nakertrans
		7. Jumlah mogok kerja	3	3	Diskop UKM

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
					Nakertrans
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0	0	Diskop UKM Nakertrans
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	0	0	Diskop UKM Nakertrans
		10. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0	0	Diskop UKM Nakertrans
		11. Jumlah perselisihan PHK	51	51	Diskop UKM Nakertrans
		12. Jumlah Pekerja yang ter-PHK	292	292	Diskop UKM Nakertrans
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	28	28	Diskop UKM Nakertrans
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	ada	ada	Diskop UKM Nakertrans
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	79 ----x 100% 79	100	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten			
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab	12.457	12.457	Diskop UKM Nakertrans
		2. Jumlah pencari kerja yang	17.504	17.504	Diskop UKM Nakertrans

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		terdaftar di kab/kota			
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	45	45	Diskop UKM Nakertrans
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam Kab	411	411	Diskop UKM Nakertrans
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	2	Diskop UKM Nakertrans
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	0	Diskop UKM Nakertrans
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota	303	303	Diskop UKM Nakertrans
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	9.967	9.967	Diskop UKM Nakertrans
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.	303 ----x 100% 303	100%	Diskop UKM Nakertrans
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	303	303	Diskop UKM Nakertrans

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang terdata.			
		11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	11 ----x 100% 11	100	Diskop UKM Nakertrans
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	303 --- x 100% 303	100%	Diskop UKM Nakertrans
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.	20 ----x 100% 20	100	Diskop UKM Nakertrans
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0 ---x 100% 0	0	Diskop UKM Nakertrans
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD.			
		1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang telah dilatih PUG		43 OPD	DP3AP2KB
		2. Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten		12 Program / 81 Kegiatan	DP3AP2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		terkait kab			
		1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3 media masa	3	DP3AP2KB
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	39 lembaga	39	DP3AP2KB
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{10}{10} \times 100\%$	100%	DP3AP2KB
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat Pelatihan.		22 (P2TP2A kab Jepara , Forum Anak Jepara (FAJAR) , Disdikpora , Satpol PP dan Damkar Dishub, Disperkim, DPMPTSP, Disperindag, DPUPR, Bappeda, Diskominfo, Disparbud, Kesbangpol, DLH, Polres, Diskopukmn akertrans, Dinsosperma des,BPBD,Dis karpus,Dinke s, Forum Genre Jepara, Jepara Volunteer)	DP3AP2KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD kab)	P2TP2A dan Forum Anak Jepara	2	DP3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak			
		1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan	0 organisasi	Tidak ada kegiatan	DP3AP2KB
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih	0 orang	Tidak ada kegiatan	DP3AP2KB
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0 Lembaga	Tidak ada kegiatan	DP3AP2KB
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten	0 Lembaga	Tidak ada kegiatan	DP3AP2KB
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat	1 perda (No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda no. 5 tahun 2014	1	DP3AP2KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		daerah yang sudah dievaluasi	tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak)		
		6. Jumlah lemb penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah Terstandardisasi	1 Lembaga (P2TP2A)	1	DP3AP2KB
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{15}{15} \times 100\%$	100%	DP3AP2KB
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Gudang Cadangan Kab. Jepara	DKPP
		2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	Ada	DKPP
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Tidak ada	DKPP
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Ada	DKPP
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	1 dokumen	DKPP
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	ada	DKPP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	ada	DKPP
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Ada	DKPP
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	67	67	DPMPTSP, Pertanahan ,DPUPR Dan Bagpem
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	1/1 X 100	Tdi	DPMPTSP, Pertanahan ,DPUPR Dan Bagpem
		3. SK Bupati/Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah	1/1 X 100	Tdi	DPMPTSP, Pertanahan ,DPUPR Dan Bagpem
		4. Dokumen Izin membuka tanah	1/1 X 100	Tdi	DPMPTSP, Pertanahan ,DPUPR Dan Bagpem
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten	130/167 x100%	77,84%	DPMPTSP, Pertanahan ,DPUPR Dan Bagpem
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil Perhitungan kabupaten terhadap : a. Indeks Kualitas Air,(IKA) b. Indeks Kualitas Udara	IKA = 31,00 IKU = 85,54 IKTL = 54,44	a) IKA = 31,00 b) IKU = 85,54 c) IKTL = 54,44	DLH

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		(IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab	Di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 tentang tersedianya informasi terkait TPST TIDAK ADA. Adanya PDU dan TPS3R	Di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 tentang tersedianya informasi terkait TPST TIDAK ADA. Adanya PDU dan TPS3R	DLH
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	27 ---x100% 27	100 %	DLH
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD)di kab terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab	2 --- x 100% 16	0,42	DLH
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kab	0 ---x 100% 0	tdi	DLH
		Terfasilitasinya	0		DLH

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kegiatan peningkatan pengetahuan dan 6. ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	--- x 100% 0	tdi	
		7. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab yang ditangani	16 ---x 100% 16	100 %	DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan.	8.804 --x 100% 8.807	99,97%	Disdukcapil
		2. Penerbitan akta perceraian	1.913 --x 100% 2.190	87,35%	Disdukcapil
		3. Penerbitan akta kematian	9.494 --- x 100% 9.494	100%	Disdukcapil
		4. Penyajian data kependudukan	2 ---x 100% 2	100%	Disdukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.	11	11	Dinsosperm ades
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa	0	0	Dinsosperm ades

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		tahun sebelumnya			
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	6	6	Dinsospermades
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	184	184	Dinsospermades
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	-	-	DP3AP2KB
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,8	22.91%	DP3AP2KB
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)		4,83 %	DP3AP2KB
		4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	420 367 ---x100% 1 264 598	33,24%	DP3AP2KB
		5. Jumlah stakeholders/pem	18	18	DP3AP2KB

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		angku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
		1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	48 ---x100% 60	80%	DP3AP2KB
		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	145.26 ----x100% 205.185	70,81%	DP3AP2KB
		3. Pemerintah Daerah kab yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		69 kelompok	DP3AP2KB
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	9375 ----x100% 17.925	52,30%	DP3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
		1. Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah	58.557 ---x100% 119.757	48,91 %	DP3AP2KB
		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	16 ----x100% 195	8,21%	DP3AP2KB
15.	Perhubungan				
		Rasio konektivitas			
		1. Persentase	94	55,30	Dishub

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	--- x 100% 170		
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	11,934 ---x 100% 24,974	47,79	Dishub
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kab, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.	5 --- x 100% 5	100	Dishub
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab	689 --- x 100% 19.745	35	Dishub
16.	Komunikasi dan Informatika				
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		1. Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	33 ---x 100% 42	78,57 %	Diskominfo
		2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan	33 ----x 100 42	78,57 %	Diskominfo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo			
		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	ADA	Data dukung terlampir	Diskominfo
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi			
		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yg dimanfaatkan secara daring dg memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	$\frac{33}{33} \times 100\%$	100	Diskominfo
		2. Persentase perangkat daerah	42	100	Diskominfo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	---x100% 42		
		3. Persentase perangkat daerah yang pengimplementasi kan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	42 ---x100% 42	100	Diskominfo
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	314 ---x100% 314	100 %	Diskominfo
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	77 ---x100% 314	24,52 %	Diskominfo
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	314 ---x100% 314	100 %	Diskominfo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	313 ---x100% 313	100 %	Diskominfo
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	26 ---x100% 26	100 %	Diskominfo
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	26 ---x100% 26	100 % (Kecamatan tidak termasuk)	Diskominfo
		10. Persentase perangkat daerah yg memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo)	26 ---x100% 26	100 % (Kecamatan tidak termasuk)	Diskominfo
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	39 ---x100% 71	54,92 %	Diskominfo
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	25 ---x100% 26	96,15 % (Kecamatan tidak dihitung)	Diskominfo
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	5 ---x100% 64	7,81 %	Diskominfo
		14. Tersedianya peraturan daerah	ad	1. Peraturan Bupati	Diskominfo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	a	Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kabupaten Jepara 2. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Jepara 3. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	
		Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Pemerintah Daerah			
		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab	125 --- x 100% 125	100 %	Diskominfo
		2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	14.744 ---x 100% 14.744	100 %	Diskominfo
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	1.753 -- x 100% 1.753	100 %	
17.	Koperasi dan UKM				
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas			
		1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kab	5 -- x 100% 523	0,96%	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin	1 --- x 100% 1	100%	Diskop UKM Nakertrans

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab			
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	51 ---x 100% 685	7,45%	Diskop UKM Nakertrans
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	51 ---x 100% 277	18,41%	Diskop UKM Nakertrans
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	166 ---x 100% 685	24,23%	Diskop UKM Nakertrans
		6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	545 --- x 100% 163.613	0,33%	Diskop UKM Nakertrans
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan	7 --- x 100% 685	1,02%	Diskop UKM Nakertrans

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab			
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Tidak diisi	Diskop UKM Nakertrans
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	685 --x 100% 685	100%	Diskop UKM Nakertrans
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab	0 ---x 100% 685	0	Diskop UKM Nakertrans
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab	3 ---x 100% 685	0,44%	Diskop UKM Nakertrans
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah	169 ---x 100% 685	24,67%	Diskop UKM Nakertrans

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		keanggotaan daerah kab			
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah ka dalam 1 (satu) daerah kab	1 ---x 100% 685	0,15%	Diskop UKM Nakertrans
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha			
		1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3.729 --- x 100% 77.683	4,80%	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0 ----x 100% 77.683	0	Diskop UKM Nakertrans
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	223 ---x 100% 77.683	0,29%	Diskop UKM Nakertrans
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	206 --- x 100% 77.477	0,27%	Diskop UKM Nakertrans
		5. Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	740 ---x 100% 76.943	0,96%	Diskop UKM Nakertrans
		6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	4.100 ----x 100% 77.683	5,28%	Diskop UKM Nakertrans
		7. Persentase usaha mikro yang diberikan	914 ---x 100% 77.683	1,18	Diskop UKM Nakertrans

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pendampingan kelembagaan dan usaha			
18	Penanaman Modal				
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten			
		1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	1	1	DPMPTSP
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	10	10	DPMPTSP
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	4	4	DPMPTSP
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2	2	DPMPTSP
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	104	104	DPMPTSP
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	11	11	DPMPTSP
		7. Konsultasi	812	812	DPMPTSP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		perizinan dan non perizinan penanaman modal			
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	15.804	15.804	DPMPTSP
		9. Laporan realisasi penanaman modal	8.928.971 .312.243	8.928.971.31 2.243	DPMPTSP
		10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab.	25	25	DPMPTSP
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	753	753	DPMPTSP
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kab	17	17	DPMPTSP
19	Pemuda dan Olahraga				
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
		1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	200	200	Disdikpora
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	200	200	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			
		1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader			Disdikpora

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1.058	1.058	
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	958	958	Disdikpora
		Peningkatan Prestasi Olahraga			
		1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	63	63	Disdikpora
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	9	9	Disdikpora
20	Statistik				
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		1. Tersedianya buku profil daerah	ADA	1. Jepara Dalam Angka 2. PDRD 3. Statistik Sektoral Kab. Jepara	Diskominfo
		2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	(data dukung terlampir)	Diskominfo
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	239	(data dukung terlampir)	Diskominfo
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	(data dukung terlampir)	Diskominfo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	239	(data dukung terlampir)	Diskominfo
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	91 ---100% 239	38,08 %	Diskominfo
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	95 --- x 100% 95	100 %	Diskominfo
21	Persandian				
		Tingkat keamanan informasi pemerintah			
		1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	10 --x100% 10	100 %	Diskominfo
		2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah	314 --x100% 314	100 %	Diskominfo
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	314 --x100% 314	100 %	Diskominfo
		4. Persentase titik yang	52	100 %	Diskominfo

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang ditetapkan	--x100% 52		
22	Kebudayaan				
		Terlestarikannya Cagar Budaya			
		1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	32	32	Disparbud
		2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian,penayaan keberagaman)	7	7	Disparbud
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatka n ketahanan budaya,dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat)	32	32	Disparbud
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata	14	14	Disparbud

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	5	5	Disparbud
		6. Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	3	3	Disparbud
		7. Layanan perizinan membawa cagar budaya kotake luar kota dengan dukungan data	-	-	Disparbud
		8. Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	-	-	Disparbud
		9. Pemanfaatan cagar budaya kab (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	5	5	Disparbud
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	612	612	Disparbud
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	30.114	30.114	Disparbud
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	15	15	Disparbud
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	1	Disparbud

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupatwn	1	1	Disparbud
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	-	-	Disparbud
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	9	9	Disparbud
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-	-	Disparbud
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	38	38	Disparbud
		19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	15	15	Disparbud
23	Perpustakaan				
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			
		1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	620.975 --- x 100% 1.264.598	49,10 %	Diskarpus
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	39.232 ----x 100% 1.264.598	3,10%	Diskarpus
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	967 ---x 100% 1.264.598	0,08%	Diskarpus
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	20 ----x 100% 915	2,19%	Diskarpus
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di	1.346	Pelayanan Perpustakaa n Keliling :	Diskarpus

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		masyarakat		1.342 kali Lomba dalam rangka Minat Baca dan Lomba Perpustakaan : 3 kali Sosialisasi Gemar Membaca : 1 kali Jumlah Total : 1.346 kali	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
		1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Surat Keterangan	Diskarpus
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Surat Keterangan	Diskarpus
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya (item)	214	214	Diskarpus
24	Kearsipan				
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	96.870 ----- x 100 142.937	67,77%	Diskarpus

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkandaftar arsip	183.056 ----- x 100 225.113	81,32%	Diskarpus
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	93.835 ----x 100 93.835	100 %	Diskarpus
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1.781 ---- x 100 462.885	0,38%	Diskarpus
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
		1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2.039	2.039	Diskarpus
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibatbencana yang sesuai NSPK	0	0	Diskarpus
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK di kabupaten	64	64	Diskarpus
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yangsesuai NSPK	4.087	4.087	Diskarpus
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang	4	4	Diskarpus

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dalam bentuk daftar pencarian			
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipandaerah kab yang sesuai NSPK	0	0	Diskarpus
URUSAN PILIHAN					
25	Kelautan dan Perikanan				
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)			
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	339	339 RT	Dinas Perikanan
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	6 ----x 100% 10	60%	Dinas Perikanan
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	41	41	Dinas Perikanan
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ke mitraan usaha/ kemudahan akses	551	551	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	433.777.985	433.777.985	Dinas Perikanan
26	Pariwisata				
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			
		1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	24	24	Disparbud
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	169	169	Disparbud
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	2.394	2.394	Disparbud
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	15.251	15.251	Disparbud
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	17	17	Disparbud
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	-	-	Disparbud
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	12	12	Disparbud
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	68 ---X 100 % 1.445	4,70	Disparbud
		9. Persentase SDM	310	100	Disparbud

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		peserta pembekalan sectorkepariwisataan	--X 100% 310		
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha Masyarakat	30	30	Disparbud
27	Pertanian				
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
		1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Unit.	Cultivator : 4 Traktor Roda2 : 36 Pompa Air : 5 APPO : 3 Hand Sprayer : 10 Power Thresher : 3 JUT : 34RJIUT : 36 EMBUNG : 1 SUMUR DALAM : 4	DKPP
		2. Prasaran pertanian yang digunakan	65	JUT : 36 RJIUT : 26 EMBUNG : 1 SUMUR DALAM: 4	DKPP
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	0	0	DKPP
		4. Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	65 --- x 100% 65	67 ----- x 100% 67	DKPP
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertaniankabupate n	0 --- x 100% 0	0 ----- -- x 100% 0	DKPP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	1.723 --- x 100% 1.733	1.723 ha ----- x 100% 1.733 ha.	DKPP
28	Kehutanan (tidak menyelenggarakan urusan kehutanan)				
		1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		Tdi	
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		Tdi	
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura		Tdi	
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		Tdi	
29	ESDM (Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten)				
		1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panasbumi dalam daerah kab			Tidak ada
30	Perdagangan				
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
		1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	84 --- x 100% 84	100 %	Disperindag
		2. Persentase penerbitan TDG	84 --- x 100% 84	100%	Disperindag
		3. persentase gudang yang tidak memiliki	31 --- x 100% 31	100%	Disperindag

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		TDG			
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Tidakada penerbitan STPW	Surat Keterangan Disperindag	Disperindag
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Disperindag
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	SPKA sudah menjadi kewenangan provinsi	Disperindag
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = \frac{a+b}{x} \times 100$ $= \frac{(0,5 + 0,5)}{1} \times 100$ $= 100 \%$	100 %	Disperindag
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	$\frac{954,62}{76} \times 100\%$	13 %	Disperindag
		9. Jumlah pupuk dan pestisida yang	$a = 19.369.5$	3,56 %	Disperindag

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		tersalurkan	$\frac{72,97}{b = 90\% \times 24.568.315} = \frac{22.111.483,5}{x = a / (b \times c) \times 100\%}$ $= \frac{19.369.572,97}{(22.111.493,5 \times 24.568.315) \times 100\%} = 3,56\%$		
		10. Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTPP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{3022}{---} \times 100\% = \frac{3022}{3022}$	100%	disperindag
		11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{8}{--} \times 100\% = \frac{8}{8}$	100%	Disperindag
31	Perindustrian				
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab			
		1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab		Tidak menerbitkan IUKI	DPMPTSP
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan iPersentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	a+b+c+d+e 30+20+0+0+0 = 50	50 %	Disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	10551 ---- x100% 10551	100 %	Disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1. Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan	0/0 x 100%	0 izin	Disperindag
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
		1. Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten	10551 --- x100% 10551	100 %	Disperindag
31	Transmigrasi				
		1. Jumlah kawasan transmigrasi yang	surat keputusa	0	Diskop UKM

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		difasilitasi penetapannya	n Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah		Nakertrans
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengemb	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			alasan Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah		
		3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau	0	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
			u Provinsi Kalimantan Tengah		

B. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

❖ **Urusan Pendidikan**

Urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, tingkat keberhasilan atau capaian kinerjanya diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.
 Dari 39.032 anak yang berusia 5-6 tahun, ada 35.959 anak yang sudah tamat maupun sedang belajar di satuan PAUD selama tahun 2023 atau capaiannya sebesar 92,13%.
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
 Pada Tahun 2023, anak usia 7-12 tahun, dari 124.508 total anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten Jepara semuanya sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar, dengan capaian 100%.
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.
 Pada tahun 2023, di Kabupaten Jepara terdapat dari total anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Jepara yaitu 62.110 anak usia 13-15, terdapat 54.567 anak yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama atau sebesar 87,86%.
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
 Dari total 3.094 anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten

Jepara, 2.688 belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan 86,88%

❖ **Urusan Kesehatan**

Indikator kinerja kunci untuk urusan kesehatan adalah :

1. Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.
Jumlah penduduk Kabupaten Jepara terbilang cukup besar. Sampai dengan tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1.264.598 jiwa. Sedangkan daya tampung rumah sakit rujukan yang ada adalah 1.186 atau capaiannya baru sebesar 0,94%.
2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi.
Untuk melayani kesehatan masyarakat, di Jepara sudah ada 6 buah rumah sakit dan jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi sebanyak 6 dengan capaian 100%.
3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2023.
Pada tahun 2023 jumlah ibu hamil yang ada di Jepara mencapai 19.557 orang, dan semuanya sudah mendapatkan pelayanan kesehatan capaiannya sebesar 100%
4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.
Dari 17.925 ibu bersalin yang ada di Jepara 100% sudah mendapatkan pelayanan persalinan.
5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
Bayi yang lahir pada tahun 2023 sebanyak 17.905 dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%.
6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.
Pada tahun 2023, balita di kabupaten Jepara sebanyak 93.257 anak dan semuanya sudah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%.

7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Pada tahun 2023, dari anak usia pendidikan dasar yang berjumlah 41.818 anak, yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 40.293 anak atau capainnya 96,35 %
8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Penduduk usia 15-59 tahun yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 799.047 orang, dan yang sudah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 760.850 orang atau 95,22%
9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Jumlah orang warga negara usia 60 tahun keatas di kabupaten Jepara sebanyak 148.084, sedangkan mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sejumlah 143.685 orang 97,03%
10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Penderita hipertensi yang ada di Jepara sebanyak 361.730 orang. Sedangkan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 339.375 orang dengan capaian 93,82%
11. Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%
Penderita Diabetes Mellitus yang ada di Jepara sebanyak 30.570 orang. Semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.
Penderita ODGJ yang ada di Jepara sebanyak 2.454 orang. Sedangkan penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar sebanyak 2.419 orang dengan capaian 98,57%

13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.

Penderita TBC yang ada di Jepara sebanyak 9.020 orang. Dan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 8.900 dengan capaian 98,67%.

14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang ada di Jepara sebanyak 22.994 orang dan yang sudah seluruhnya mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar dengan capaian 100%.

❖ **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, di kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk data IMB-nya. Capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten

Di Kabupaten Jepara luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah sungai sejumlah 97 (ha) dan semuanya telah terlindungi oleh infrastuktur pengendalian banjir di wilayah sungai dengan capaian 100%.

2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten.

Di Kabupaten Jepara, luas kawasan permukiman sepanjang rawan abrasi di wilayah sungai ada 3.069 dan telah terlindungi oleh infrastuktur pengaman patai di wilayah sungai sepanjang 2.375, capaian 77,39%

3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 28.247, dan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun 2023 sepanjang 12.281 atau 45%

4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.

Dari total rumah tangga di Kabupaten Jepara adalah 384.405 rumah, dan semuanya mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi 100%

5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic.

Dari seluruh kab jepara jumlah rumah yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu 300.851 dan semuanya telah memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dengan capaian 100%

6. Rasio kepatuhan IMB kabupaten.

Dari 474 Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku semuanya sudah sesuai pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya. Dengan capaian 100%

7. Tingkat Kemantapan jalan.

Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten Jepara adalah 854.027 km, dan yang kondisi mantap sepanjang 746,992 km atau capaiannya sebesar 87,47%.

8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

Dari 650 kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten Jepara, ada 103 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten Jepara yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis 15,85%.

9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.

Dari total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya sebanyak 1.247 semuanya tidak terjadi kecelakaan konstruksi.

❖ **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten.

Total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2023 sebanyak 15 dari 15 unit yang direncanakan dengan capaian sebesar 100%

2. Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah.

Pada tahun 2023 kabupaten Jepara dari jumlah total rumah tangga terkena relokasi terdapat semuanya telah menerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dengan capaian 100%

3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani.

Luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang ada di Kabupaten Jepara adalah 67,73 hektar, 3,15 hektar sudah ditangani sehingga target 4,68%

4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Dari jumlah total seluruh unit rumah di Kabupaten Jepara yaitu 365.673 unit, ada 9.734 unit rumah yang tidak layak huni. Dengan capaian 2,66%

5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

Dari total rumah yang ada di Jepara yaitu 323 unit, Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 323 unit. Dengan capaian 100%

❖ **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.
Dari 8 pengaduan pelanggaran yang masuk pada tahun 2023 semuanya bisa diselesaikan.
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 8 Perda dan seluruhnya memuat sanksi yang ditegakkan.
3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
Dari seluruh target penduduk Kabupaten Jepara, yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana yaitu sebanyak 864.234 orang, dan seluruhnya sudah mendapatkan layanan informasi rawan bencana dengan capaian 100%.
4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Jumah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan rawan benecana sebanyak 620 sedangkan yang berada di kawasan rawan bencana sebanyak 129.237
5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Dari 4.759 yang menjadi korban bencana dan semuanya telah memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 4.759 orang. capaian 100%
6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
Dari 72 kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2023, yang dapat dijangkau dan ditangani

sampai padam sebanyak 58 kejadian sehingga capainnya sebesar 80,55%.

7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.

Response time penanganan kebakaran adalah 12,01 menit.

❖ **Urusan Sosial**

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.380 orang, sedangkan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 1.380 orang atau capaiannya sebesar 100%

2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.

Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebanyak 159, dan seluruh korban bencana alam dan sosial sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga capaian kinerjanya 100%.

❖ **Tenaga Kerja**

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

Pada tahun 2023 dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten jepara sebanyak 11 dan semuanya telah mengacu pada RTKD , capaian 100%.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebanyak 147.461 orang, dan yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 966 orang atau 0,66%.

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebanyak 147.461 orang. Sedangkan PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 24.451.039.,80 sehingga capaiannya adalah 16581,36%.

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar).

Pada tahun 2023, perusahaan yang ada di Jepara berjumlah 429. Perusahaan sudah menerapkan tata kelola kerja yang baik sebanyak 273 bperusahaan atau 63,64%.

5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah.

Dari 17.504 pencari kerja yang terdaftar, ada 9.697 pencari kerja yang ditempatkan atau 56,94%.

❖ **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD.

Belanja langsung APBD Kab. Jepara pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 916.604.892.178 sedangkan Jumlah ARG pada belanja langsung APBD sebesar Rp. 84.795.658.697 atau 9,251%.

2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten.

Pada tahun 2023, di Kabupaten Jepara terdapat 10 anak (berusia kurang dari 18 tahun) yang menjadi korban kekerasan dan semuanya sudah ditangani capaian 100%.

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).

0,002 % atau 15 orang dari 628.502 orang perempuan yang ada di Kabupaten Jepara mengalami kekerasan.

❖ Pangan

1. Persentase cadangan pangan.

Pada tahun 2023, jumlah cadangan pangan 145.958 ton.

❖ Pertanian.

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara dari 62.454.825 M2 luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) seluruhnya sudah sesuai sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum pada tahun 2023 tidak ada pembangunan untuk fasilitas umum.

3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Jepara dari luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan seluas 62.454.825 M2, semuanya sudah sesuai peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Pada tahun 2023 tidak tersedia Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

5. Tersedianya tanah untuk masyarakat.

Tidak tersedia tanah untuk rakyat.

6. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.

Kabupaten Jepara dari 2 permasalahan sengketa tanah semuanya sudah ditangani capaian 100%

❖ **Lingkungan Hidup.**

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten.

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 58,22
- Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%) : 31,00
- Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%) : 85,54
- Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%) : 54,44

2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten.

Pada saat ini, persoalan sampah menjadi masalah di semua wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Jepara dari 154.571,51 timbunan sampah, baru 54,71 % atau 84.569,,38 timbunan sampah yang dapat tertangani.

3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023, ada 12 Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dan baru 12 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten Jepara. dengan capaian 87%.

❖ **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

1. Perekaman KTP Elektronik

Pada tahun 2023, dari jumlah penduduk usia 17 tahun keatas yaitu 934.138 orang, terdapat 933.475 orang 17 tahun keatas yang sudah melakukan perekaman dan memiliki ktp-el capaiannya 97,90%.

2. Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.

Dari 330.861 anak di tahun 2023 yang ada di Jepara, sebanyak 202.385 atau 61.17 anak sudah memiliki KIA.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran.

Dari jumlah penduduk 0-18 tahun, dari 337.898 jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 331.691 orang atau 98,16%.

4. Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Dari 25 Perangkat Daerah (kecamatan tidak termasuk), yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sebanyak 13 PD dengan capaian 52%

❖ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Persentase pengentasan desa tertinggal.

Pada tahun 2023, tidak terdapat desa yang masuk kategori desa tertinggal, yaitu Desa Parang Kecamatan Karimunjawa. Dan Desa Parang ini belum memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun persentase peningkatan status desa mandiri.

2. Persentase peningkatan status desa mandiri.

Pada tahun 2023, terdapat 81 desa yang berstatus sebagai desa berkembang dan terdapat 23 desa yang termasuk kategori desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun.

❖ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

Angka kelahiran total di kabupaten Jepara adalah 2,04

2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR).

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2023 sebanyak 205.163 PUS dan yang menjadi peserta KB aktif Modern sebanyak 70,81% atau sebanyak 145.296 PUS.

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need).

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2023 sebanyak 205.185 PUS, dan yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani sebanyak 19.515 PUS atau 9,511%.

❖ **Perhubungan**

1. Rasio konektivitas kabupaten

Rasio konektivitas kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ yaitu $0,977 + 0,64 / 2 = 0,81$ trayek/ lintas Kinerja lalu lintas kabupaten.

2. V/C ratio di jalan kabupaten Jepara adalah 0,21%.

❖ **Komunikasi dan Informatika**

1. Persentase Perangkat Organisasi Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

Dari 33 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Jepara, OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 42 PD atau 78,57%.

2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Mediator Hubungan Industrial.

Dari 23 Layanan Publik yang ada baru 16 yang sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan capaian 69,57%.

3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Jepara tahun sebanyak 868.828 jiwa, yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Jepara sebanyak 813.679 jiwa. 93,65%

❖ **Koperasi dan UKM**

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas.

Di Tahun 2023, total koperasi yang ada di Jepara sebanyak 685 koperasi, dan yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset sebanyak 175 buah. 25,55%

2. Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha.

Dari 77.683 usaha kecil yang ada di Jepara, ada 3.729 usaha kecil yang menjadi wirausaha atau 4.80%.

❖ **Penanaman Modal.**

1. Jumlah investasi kabupaten jepara tahun 2023 sebesar 8.928.971.312.243 dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 9.585.327.105.644 dengan Persentase peningkatan investasi di kabupaten Realisasi investasi tahun 2023 adalah -6,84%

❖ **Kepemudaan dan Olahraga**

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
Pada tahun 2023, di kabupaten Jepara terdapat 282.762 pemuda (umur 16-30 tahun) dan sejumlah 23.268 orang berwirausaha. 8,23%
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
Dari total 282.762 pemuda (umur 16-30 tahun) di tahun 2023, terdapat 95.197 orang yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi. 33,67%
3. Peningkatan prestasi olahraga
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2023 sebanyak 48 medali dari berbagai cabang olahraga.

❖ **Statistik**

1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Dari 26 Perangkat Daerah (ermasuk kecamatan) yang ada di kabupaten Jepara, sudah 26 yang telah menggunakan data

statistik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan capaian 100%.

2. Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Dari 26 Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Jepara, baru 26 yang telah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan capaian 100%.

❖ **Persandian.**

1. Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Jepara

Pada tahun 2023, di kabupaten jepara jumlah nilai per area keamanan informasi 537 sedangkan area penilaian sebanyak 645 dengan capaian 83,26%.

❖ **Kebudayaan**

1. Terlestarikannya Cagar Budaya.

Kabupaten Jepara memiliki 40 cagar budaya sampai tahun 2023. Semuanya merupakan cagar budaya dilestarikan. Dengan capaian 100%

❖ **Perpustakaan**

1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

survey kajian kegemaran membaca kabupaten jepara katagori baik dengan capaian sebesar 62,25%.

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

survey Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) Kabupaten Jepara sebesar 58,78%

❖ **Kearsipan**

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahanakuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43.

Capaian indikaor kinerja kunci ini diukur melalui $T = (a + i + s + j)/4$ Capaiannya 62,37%.

2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Capaian indikaor kinerja kunci ini diukur melalui rumus $T = (m + b + g + a + c + i)/6$. Capainnya 66,67%.

URUSAN PILIHAN

❖ Kelautan Perikanan

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP).

Dari target produksi perikanan (tangkap dan bididaya) di Kabupaten Jepara 58.315,647 ton , dan total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) sebanyak 59.040,925 ton dengan capaian 101,24 %

❖ Pariwisata

1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.

jumlah wisatawan mancanegara yang datang pada tahun 2023 sebanyak 15.521 orang, jumlah yang datang pada tahun 2022 sebanyak 5.310, persentasenya meningkat drastis yaitu 187,31%

2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara per kebangsaan.

Tahun 2022 wisatawan yang berkunjung ke Jepara sebanyak 1.787.208 orang, sedangkan di tahun 2023 sebanyak 1.964.135 orang, persentasenya 9,90%.

3. Tingkat hunian akomodasi.

Dari 387.265 jumlah kamar yang tersedia, pada tahun 2023 terdata ada 146.374 kamar yang terjual atau 37,80%.

4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.
Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah) 38.023.267 jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah) 1.693.329 atau 4,45.
5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.
Realisasi PAD tahun 2023 sebesar 445.914.893.914 , sedangkan realisasi PAD dari sektor pariwisata tahun 2023 sebesar 21.274.384.283 dengan capaian 4,77%.

❖ **Pertanian**

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun.
Produktivitas pertanian di tahun 2023 adalah 9,29 ton/hektar.
2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.
Kejadian/kasus penyakit hewan menular yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 29.815, sedangkan di tahun 2022 sebanyak 27.166 peningkatan kasus capaian sebesar 9,79%, sehingga tidak terjadi penurunan kasus penyakit hewan menular.

❖ **Kehutanan**

Kabupaten Jepara tidak melaksanakan urusan kehutanan.

❖ **ESDM**

Kabupaten Jepara tidak ada perusahaan yang memanfaatkan panas bumi.

❖ **Perdagangan**

1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Pada tahun 2023, terdapat 84 pelaku usaha perdagangan, dan seluruhnya sudah memiliki izin sesuai ketentuan sebanyak 84 dengan capaian 100%
2. Persentase kinerja realisasi pupuk.

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) sebanyak 24.568.315, sedangkan realisasinya sebesar 19.369.572,97 atau 78,8%.

3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Jepara adalah 3.022, seluruhnya merupakan UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun 2023.

❖ **Perindustrian**

1. Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.
Jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2023 sebanyak 13136, sedangkan tahun 2022 sebanyak 21585. capaian kinerja untuk urusan perindustrian adalah 39,14%.

2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten), Perda RPIK Masih dalam Proses Pembahasan sehingga belum dapat dihitung.

3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Dari 10.551 izin yang dikeluarkan seluruhnya dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, sehingga capaiannya sebesar 100%.

4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan pada tahun 2023 tidak ada.

5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.

- Pada tahun 2023, Kabupaten Jepara tidak menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini.
- Sampai dengan tahun 2023, informasi industri secara lengkap terkini ada 3 yaitu : keterkinian informasi industri, kelengkapan informasi industri, dan nilai akhir adalah akumulasi dari kekinian informasi industri.

❖ **Transmigrasi**

Pada Tahun 2023 sudah tahapan sudah dilaksanakan terdapat surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi tidak terdapat warga yang di berangkatkan ke Kabupaten tersebut

Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	35.959 -- x 100 % 39.032	92,13%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	124.508 ---x 100 % 124.508	100%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	54.567 -- x 100 % 62.110	87,86%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang	2.688 ---x 100 % 3.094	86,88%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.			Disdikpora
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.	1.186 ---x 100 1.264.598	0,94%	Dinkes
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	6 ----x 100 6	100 %	Dinkes
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	19.557 ----- x 100 19.557	100%	Dinkes
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	17.925 ----- x 100 17.925	100%	Dinkes
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	17.905 ----- x 100 17.905	100%	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	93.257 ----- x 100 93.257	100	Dinkes
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	40.29 3 ----- ----- x 100 41.81 8	96,35	Dinkes
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	760.850 -----x 100 799.047	95,22 %	Dinkes
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	143.685	97,03 %	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	----- x 100 148.084		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	339.375 -----x 100 361.730	93,82 %	Dinkes
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.570 -----x 100 30.570	100%	Dinkes
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.419 ---- x 100 2.454	98,57 %	Dinkes
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	8.900 -----x 100 9.020	98,67 %	Dinkes
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	22.994 -----x 100 22.994	100%	Dinkes
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab.	97 ---X 100% 97	100%	DPUPR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	2.375 ---X 100% 3.069	77,39%	DPUPR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.	12.821 -- X 100% 28.247	45%	DPUPR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.	384.405 ---X 100% 384.405	100%	DPUPR.
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	300.851 ---X 100% 300.851	100%	DPUPR
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	474 -- X 100% 474	100%	DPUPR
		Tingkat Kemantapan jalan.	746,992 ---X 100% 854,027	87,47%	DPUPR
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.	103 --x 100% 650	15,85%	DPUPR
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	1.247 ---X 100% 1.247	100	DPUPR
4.	Perumahan Rakyat	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.	15 -- x 100% 15	100%	Disperkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	6 -- x 100% 6	100%	Disperkim
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	3,17 -- x 100% 67,73	51,24%	Disperkim
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9.734 -- x 100% 365.673	15,23%	Disperkim
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	323 -- x 100% 323	0,38%	Disperkim
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.	8 --x 100 8	100%	Satpol PP & Damkar
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	8 --x 100 8	100%	Satpol PP & Damkar
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	864.234 --x 100 864.234	100%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	620 --- x 100 129.237	0,05%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.759 --- x 100 4.759	100 %	BPBD
		Persentase pelayanan	58	80,55%	Satpol PP &

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	----- 72		Damkar
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	12,01 Menit	Satpol PP & Damkar
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.380 ---x 100% 1.380	100	Dinsos Permasdes
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.	159 --- x 100% 159	100	Dinsos Permasdes
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	11 -- x 100% 11	100%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	966 -- x 100% 147.461	0,66%	Diskop UKM Nakertrans
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.	24.451.03 9,80 --x 100% 147.461	16581,36	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar.	273 --x 100% 429	63,64%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	9.697 -- X 100% 17.504	56,94%	Diskop UKM Nakertrans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	84.795. 658.69 7 x 100% 916.604.8 92.178	9,251%	DP3AP2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	10 -x100% 10	100%	DP3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15 ---100% 628.50 2	0,002%	DP3AP2KB
9.	Pangan	Persentase cadangan pangan	145.958 ---x 100% 100 ton	145.958 %	DKPP
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	62.454.82 5 M2 ---x 100% 62.454.82 5 M2	100	DPMPTSP
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0 -- X 100% 1	Tdi	Bag. Pem BPKAD Bid. Asset.
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	62.454.82 5 M2 ---x 100% 62.454.82 5 M2	100	DPMPTSP
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 --x100% 1	Tdi	Bag. Pem Dan Pertanahan
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 ----x 100% 1	Tdi	Bag. Pem Dan Pertanahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	2 ----x 100% 2	Tdi	Bag. Pemt. Dan BPKAD Bid Asset
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	IKLH = 58,22 IKA = 31,00 IKU = 85,54 IKTL = 54,44	IKLH = 58,22 IKA = 31,00 IKU = 85,54 IKTL = 54,44	DLH
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	84.569,38 ---x100% 154.571,51	54,72 %	DLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	12 -- x 100% 16	100 %	DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	933.475 ----x 100% 934.138	99,93	Disdukcapil
		Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.	202.385 ---- x100% 330.861	61,17	Disdukcapil
		Kepemilikan Akta Kelahiran.	331.691 --x 100% 337.898	98,16	Disdukcapil
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	13 --- x 100% 25	56 (Kecamatan tidak termasuk)	Disdukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal.	0 --- x 100% 0	tdi	Dinsos Permasdes
		Persentase peningkatan	23 --- x 100%	28,40	Dinsos

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		status desa mandiri	81		Permasdes
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,04	2.04	DP3AP2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR).	145.296 ----x100% 205.185	70,81 %	DP3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19.515 ---x100% 205.185	9,511%	DP3AP2KB
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota.	$\frac{0,977 + 0,64}{2}$	0,81 trayek/ lintas	Dishub
		Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0,21	0,21	Dishub
16	Komunikasi dan Informatika.	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	33 ---x 100% 42	78,57 %	Diskominfo
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Mediator Hubungan Industrial.	16 ---x 100 23	69,57%	Diskominfo
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	813.679 ---x100% 868.828	93,65	Diskominfo
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	175 --x 100% 685	25,55%	Diskop UKM Nakertrans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha	3.729 -- x 100% 77.683	4,80%	Diskop UKM Nakertrans
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	8.928.971. 312.243 – 9.585.327. 105.644 ----- x100% 9.585.327. 105.644	-6,84%	DPMPPTSP
19	Pemuda dan Olahraga.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	23.268 -- X 100% 282.762	8,23%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	95.197 --X 100% 282.762	33,67%	Disdikpora
		Peningkatan prestasi olahraga.	48	48 medali	Disdikpora
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	26 --x100% 26	100%	Diskominfo
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.	26 ---x100% 26	100%	Diskominfo
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah.	537 ---x100% 645	83,26%	Diskominfo
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya.	40 ---x100% 40	92,5%	Disparbud
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.	62,25%.	62,25%	Diskarpus
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	58,78%	5878%	Diskarpus
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat	T (a + l + s + j)/4 a = 62%	(67,75%+81 ,31%+100% +0,32%) / 4	Diskarpus

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43	$I = 77\%$ $S = 100\%$ $J = 0,13198\%$	$= 62,37\%$	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	$(m + b + g + a + c + i) / 6$ $m = 100\%$ $b = 0\%$ $g = 100\%$ $a = 100\%$ $c = 100\%$ $i = 0\%$	$(100\% + 0\% + 100\% + 100\% + 0\%) = 66,67\%$	66,67% Diskarpus
25	Kelautan Perikanan.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP).	59.040,925 to ---x100 % 58.315,647 ton	101,24	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.	9.941 $---x100\%$ 5.310	187,21%	Disparbud
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten.	1176.927 $---x100\%$ $1,787.208$	9.90%	Disparbud
		Tingkat hunian akomodasi.	146.374 $---x100\%$ 387.265	37,34%	Disparbud
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku .	$1.693.329$ $--x 100\%$ $38.023.267$	4,45	Disparbud dan BPS
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$21.274.384.283$ $---x 100\%$ $445.914.893.914$	4,77%	Disparbud

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun.	586.787,6 ton ---x 100% 63.142,1 Ha	9,29 ton/ha	DKPP
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	29.553-27.165 --- x 100% 27.166	8,79	DKPP
28	Kehutanan			Tidak melaksanakan	
29	ESDM			Tidak melaksanakan	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	84 --x 100% 84	100%	Disperindag
		Persentase kinerja realisasi pupuk	19.369.572,97 --- X100% 24.568.315	78,8%	Disperinda g
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku).	3022 --- x 100% 3022	100 %	Disperindag
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.	13136 ---x 100% 21585	39,14 %	Disperindag
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk	1.(X20%) = 0 2.(X20%) = 0 3.(X20%	Tdi Perda RPIK Masih Dalam	Disperindag

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	) = 0 4.(X20%) = 0 5.(X20%) = 0	Proses	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.	$\frac{10551}{10551} \times 100$	100 %	DPMPTSP
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0 %	DPMPTSP
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0 %	Disperindag
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	$= (1+2) = (50\% + (10\% + 10\% + 10\% + 10\%))$	100 %	Disperindag
32	Transmigrasi..	Pengembalian Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	Diskop UKM Nakertrans

C. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

❖ **Perencanaan Dan Keuangan**

1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan.
Jumlah realisasi APBD 2023 sebesar Rp. 2.431.676.307.980 sedangkan realisasi jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan adalah 899.983.843.033 dengan capaian 0,37%
2. Rasio PAD.
Jumlah PAD Kabupaten Jepara di tahun 2023 sebesar 445.914.893.914, sedangkan jumlah PDRB Non Migas sebesar 2.343.270.669.976 Rasio PAD-nya sebesar 19,3%.
3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP, Kabupaten Jepara adalah level 3,621
4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP, Kabupaten Jepara level 3,1
5. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures).
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Jepara sebesar Rp. 2.431.676.307.980 Sedangkan belanja urusan pemerintahan sebesar dikurangi transfer Expenditures sebesar Rp. 1.825.803.682.286. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum sebesar 75,08%
6. Opini Laporan Keuangan.
Kabupaten Jepara, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 Opini Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk tahun 2023 belum keluar, karena masih proses.

❖ **Pengadaan**

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.

Kontrak konstruksi keseluruhan di tahun 2023 adalah 103 sedangkan kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023 tidak ada.

2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.

Pada tahun 2023, di Kabupaten Jepara, pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif sejumlah 5.850 paket. Sedangkan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebanyak 4.587 paket, capaian kinerjanya sebesar 78,41%.

3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

Pada tahun 2023, total belanja operasi dan modal Kabupaten Jepara sebesar Rp. 706.442.199.426 sedangkan Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan Rp. 419.180.295.364,37 , sehingga capaiannya sebesar 59,33%.

4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, pada tahun 2023 jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri sebesar Rp. 398.245.000.000,00 sedangkan jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri produk umkm dan koperasi tahun 2022 sebesar Rp. 150.859.000.000,00. Dengan capaian 37,88%

❖ **Kepegawaian**

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Pada tahun 2023 Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2023 sebanyak 2.051 orang. Sedangkan pegawai

menurut Pendidikan PT ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 1.267 orang. Rasionya adalah 61,77%.

2. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Pada tahun 2023 Jumlah seluruh PNS (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 2.051 orang. Sedangkan jumlah PNS Fungsional sebanyak 403 orang dengan capaian 19,65%

3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Pegawai Fungsional yang ada di Jepara pada tahun 2023 sebanyak 403 orang dan yang sudah bersertifikat kompetensi sebanyak 369 dengan capaian 91,56%.

❖ **Manajemen Keuangan**

1. Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD.

Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan) : 2.504.847.603.917 Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi : 2.431.676.307.980 Budget execution sebesar 2,92%.

2. Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan) adalah 469.809.745.000 Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi adalah 445.914.893.914 Revenue mobilization : 5,09%.

3. Jumlah Asset Managemen Assets management
7.767.526.944.102

- Daftar asset tetap : Ada
- Manual untuk menyusun daftar asset tetap : Ada
- Proses inventarisasi asset tahunan : Ada
- Nilai asset tercantum dalam laporan anggaran : Ya

4. Cash Management: Rasio
Total Belanja Anggaran tahun 2023 2.429.312.218.030
sebesar nilai Realisasi SILPA : 51.909.992.455 Rasionya :
2,14%.

❖ **Transparansi Dan Partisipasi Publik**

1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units).
Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda sejumlah 42
Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda sejumlah 32 dengan capaian 100%
2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information).
Total jumlah dokumen yang telah dirinci sebanyak 12 dokumen. Sedangkan yang sudah dipublikasikan di website Pemda sebanyak 12 dokumen.

**Matriks Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan**

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perencanaan Dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan.	899.983.843.033 ---x 100% 2.431.676.307.980	0,37%	BPKAD
		Rasio PAD.	445.914.893.914 ---x 100% 2.343.270.669.976	19,03%	BPKAD
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,261	3,261	Inspektorat

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Pemerintah (SPIP)			
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,1	3,1	Inpektorat
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	1.825.803 .682.286 ---x 100% 2.431.676 .307.980	75,08%	BPKAD
		Opini Laporan Keuangan	Bukti piagam WTP (tahun 2013–2023)	WTP. (Tahun 2023 masih proses)	BPKAD
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.	0 ---x100% 103	0	Bag. PBJ
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	4.587 --- x 100% 5.850	78,41%	Bag. PBJ
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.	419.180.2 95.364,37 -- X 100% 706.442.1 99.426	59,33%	Bag. PBJ
		Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa. pemerintah daerah	150.859.0 00.000,00 -- X 100% 398.245.0 00.000,00	37,88%	Bag. PBJ
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.267 -- x 100% 2.051	61,77%	BKD.
		Rasio pegawai Fungsional		19,65%	

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	403 --x 100% 2.051.		BKD
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	369 ---x 100% 403	91,56%	BKD
4	Manajemen Keuangan.	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2.431.676 .307.980 --1x 100% 2.504.847 .603.917	2,92%	BPKAD
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	445.914.8 93.914 --1x 100% 469.809.7 45.000	5,09%	BPKAD
		Assets management	7.767.526 .944.102 Ya Ya Ya Ya Ya		BPKAD
		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	51.909.99 2.455 -- x 100% 2.429.312 .218.030	2,14%	DPKAD
5	Transparansi Dan Partisipasi Publik).	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	42 ---x 100% 42	100%	BPKAD
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	12 ---x 100% 12	100%	BPKAD

III. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Jepara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Hal ini dikarenakan RPJMD Kabupaten Jepara berakhir di tahun 2022 dan kepala daerah baru akan terpilih setelah diadakan Pilkada tahun 2024 mendatang.

Dalam pengukuran capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Jepara.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pengukuran Capaian Kinerja

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI
1.	100 % lebih	BAIK SEKALI (A)
2.	> 75 % s/d100 %	Baik (B)
3.	>55 % s/d75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (D)

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026, maka dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- Terdapat 5 Tujuan, 13 Sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama;

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Sasaran, diketahui bahwa sebanyak 26 indikator sasaran atau 75,86% bermakna Baik Sekali, 1 indikator sasaran atau 3,44 % bermakna baik, 1 indikator sasaran bermakna kurang, dan 1 indikator sasaran belum ada data capaian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar **139,73 %**, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 134,15 %. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2023 bermakna Baik Sekali dan naik sebesar 5,58 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen perencanaan Rencana pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Dokumen RPD 2023-2026 terdapat beberapa perubahan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2022.

a. **Target kinerja dalam perjanjian kinerja**

Perjanjian Kinerja Penjabat Bupati Jepara Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun pertama dari pelaksanaan RPD 2023-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Jepara. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam tahun 2023:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bupati Jepara Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET

1.	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,03
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,78
		Umur Harapan Hidup (UHH)	76,03
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,32
2.	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial 0,8	52,72
3.	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	32,14
4.	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan <i>food estate</i>	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6348
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,0 - 4,0
5.	Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata lama Mengginap	Wisman: 2 Wisnus: 1,5
		Rasio wirausaha	4,25 - 4,75
6.	Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi daerah	3.000,00
		LPE Industri Pengolahan	5,0 - 5,5
		LPE Sektor Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0 - 4,5
7.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	3,85
8.	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	22,58
		Indeks SPBE	3,15

9.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,54
		Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,54
10.	Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	90,58
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,5675
11.	Meningkatnya penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase Prasarana sarana Daerah (PSD) bidang PU dalam kondisi baik	59,89
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	82
13.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat daerah	Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
		capaian Nilai SAKIP	B
		SPIP Terintegrasi	2,8
		IPKD	B
		Indeks Merit Sistem	Kurang
		Indeks Profesionalitas ASN	Sedang

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,03	8,26
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,78	12,85

		Umur Harapan Hidup (UHH)	76,03	76,04
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,32	91,44
2.	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial 0,8	52,72	60,32
3.	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	32,14	120
4.	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan <i>food estate</i>	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6348	0,6976
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,0 - 4,0	0,03
5.	Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata lama Mengginap	Wisman: 2 Wisnus:1,5	Wisman: 2,12 Wisnus: 1,71
		Rasio wirausaha	4,25 - 4,75	15,57
6.	Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi daerah	3.000,00	2.103,74
		LPE Industri Pengolahan	5,0 - 5,5	4,57
		LPE Sektor Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0 - 4,5	4,62
7.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	3,85	3,35
8.	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	22,58	22,58
		Indeks SPBE	3,15	3,63
9.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,54	58,22

		Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,54	0,50
10.	Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	90,58	90,89
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,5675	99,67
11.	Meningkatnya penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase Prasarana Sarana Daerah (PSD) bidang PU dalam kondisi baik	59,89	63,28
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	82	85,11
13.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat daerah	Tinggi	Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif
		capaian Nilai SAKIP	B	B
		SPIP Terintegrasi	2,8	3,261
		IPKD	B	B
		Indeks Merit Sistem	Kurang	Kurang
		Indeks Profesionalitas ASN	Sedang	Sedang Proses Evaluasi

c. **Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,09	8,26
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,77	12,85
		Umur Harapan Hidup	75,97	76,04

		(UHH)		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,44	91,44
2.	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial 0,8	61,41	60,32
3.	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	-	120
4.	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan <i>food estate</i>	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6725	0,6976
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,40	0,03
5.	Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata lama Mengginap	Wisman:2,06 Wisnus: 1,44	Wisman: 2,12 Wisnus: 1,71
		Rasio wirausaha	4,19	15,57
6.	Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi daerah	8.687,71	2.103,74
		LPE Industri Pengolahan	3,75	4,57
		LPE Sektor Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,63	4,62
7.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	4,10	3,35
8.	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	6,45	22,58
		Indeks SPBE	3,14	3,63
9.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,7	58,22

		Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,57	0,50
10.	Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	84,77	90,89
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	0,988	99,67
11.	Meningkatnya penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase Prasarana sarana Daerah (PSD) bidang PU dalam kondisi baik	58,97	63,28
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	83,15	85,11
13.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat daerah	Tinggi	Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif
		capaian Nilai SAKIP	B	B
		SPIP Terintegrasi	3,214	3,261
		IPKD	B	B
		Indeks Merit Sistem	Kurang	Kurang
		Indeks Profesionalitas ASN	Sedang	Sedang Proses Evaluasi

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	% CAPAIAN TERHAD AP TARGET AKHIR RPD
1.	Meningkatnya Kualitas dan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,26	98,45

	Kesejahteraan SDM	(RLS)		
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85	100,15
		Umur Harapan Hidup (UHH)	76,04	99,78
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,44	99,77
2.	Meningkatnya modal sosial masyarakat	Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial $\geq 0,8$	60,32	99,10
3.	Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	120	354,5
4.	Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan <i>food estate</i>	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,6976	108,94
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,97
5.	Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif	Rata-rata lama Mengginap	Wisman: 2,20 Wisnus: 1,32	Wisman: 110 Wisnus: 88
		Rasio wirausaha	15,57	346
6.	Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing	Nilai Investasi daerah	2.103,74	65,1
		LPE Industri Pengolahan	4,57	87,88
		LPE Sektor Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,62	110
7.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	3,35	92,53
8.	Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan	Persentase ketersediaan akses internet publik	22,58	27,45
		Indeks SPBE	3,63	95,52

9.	Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,22	101,76
		Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah terhadap Bencana	0,50	83,3
10.	Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan	Persentase RLH (Rumah Layak Huni)	90,89	99,52
		Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	99,67	100,09
11.	Meningkatnya penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU	Persentase Prasarana sarana Daerah (PSD) bidang PU dalam kondisi baik	63,28	100,97
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	85,11	100,12
13.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat daerah	Tinggi	Sangat tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	87,14
		capaian Nilai SAKIP	B	82,11
		SPIP Terintegrasi	3,261	105,19
		IPKD	B	96,45
		Indeks Merit Sistem	Kurang	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	Sedang Proses Evaluasi	Tinggi

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Analisis efisiensi didasarkan pada capaian kinerja dan besaran sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila sasaran dapat dicapai, dilihat dari

realisasi indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang direncanakan. Dari tiga belas sasaran, terdapat 12 (dua belas) sasaran strategis yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target karena ada 1 (satu) sasaran strategis yang indikator kinerjanya belum ada data capaian kinerja, dengan tingkat efisiensi yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia, kinerja mencapai 100,89% dengan efisiensi anggaran sebesar 4,8 %.
- 2) Meningkatnya modal sosial masyarakat, kinerja mencapai 114,42% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,45%.
- 3) Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat, kinerja mencapai 333,35% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,63 %.
- 4) Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan *food estate*, kinerja mencapai 55,44 %.
- 5) Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif, kinerja mencapai 196,90 % dengan efisiensi anggaran sebesar 3,55 %.
- 6) Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing, kinerja mencapai 168,18% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,23 %.
- 7) Meningkatnya pendapatan masyarakat, kinerja mencapai 112,99% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,06 %.
- 8) Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan, kinerja mencapai 107,61% dengan efisiensi anggaran sebesar 8,37 %.
- 9) Terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan, kinerja mencapai 102,42% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,67%
- 10) Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan, kinerja mencapai 100,33% dengan efisisensi anggaran sebesar 3,76%
- 11) Meningkatnya penyediaan dan pelayanan PSD bidang PU, kinerja mencapai 105,66% dengan efiseinsi anggaran sebesar

8,6%

- 12) Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerja mencapai 103,66% dengan efisiensi anggaran sebesar 3,4%
- 13) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kinerja mencapai 102,74 dengan efisiensi anggaran sebesar 5,3%.

Efisiensi anggaran diperoleh antara lain dari : sisa lelang, perjalanan dinas dan realisasi menyesuaikan harga riil di lapangan. Disamping hal-hal tersebut, efisiensi anggaran juga didorong oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengalokasikan anggaran dengan standar belanja berbasis program.

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

- 1. Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Masyarakat** dengan 4 (empat) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,89 % dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Masyarakat disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas dan Kesejahteraan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1	Rata – Rata Lama Sekolah	7,36	8,09	109,91	8,03	8,26	102,86	98,45
2	Harapan Lama Sekolah	12,34	12,77	103,48	12,78	12,85	100,54	100,15

3	Umur Harapan Hidup (UHH)	75,73	75,97	100,31	76,03	76,04	100,01	99,78
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,39	91,44	97,91	91,32	91,44	100,13	99,77
	Rata-Rata Capaian			102,9			100,89	

Sumber : BPS Kabupaten Jepara 2023

1.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara mencapai 7,77 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Seiring dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara tahun 2022 sudah mencapai 8,09 tahun. Dan naik lagi di tahun 2023 menjadi 8,26. Angka ini menunjukkan bahwa rata– rata penduduk Kabupaten Jepara sudah mengenyam pendidikan sampai dengan Kelas 2 SMP. Hal ini diperkuat dengan tingginya persentase penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Jepara yang hanya menamatkan pendidikan tertingginya sampai dengan jenjang SD/MI.

Pembangunan pendidikan sebagai salah satu kunci dari pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Secara makro dari ukuran rata- rata lama sekolah penduduk tersebut menunjukkan semakin meningkatnya rata- rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Jepara juga mengalami perubahan pada tahun 2022 dan 2023 yakni sebesar 0,17 tahun sehingga mencapai 8,26 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah Jawa Tengah hanya mencapai 7,93 tahun 2022 dan 8,01 tahun pada

tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target kinerja di akhir periode RPD atau pada tahun 2026 yang sebesar 8,39, capaian kinerja pada tahun 2023 ini sudah mencapai 98,45%.

Konsistensi dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara ini tidak lepas dari beberapa kebijakan yang mendukung tercapainya kinerja tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan mutu serta kualitas pendidikan pada jenjang PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs;
2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas input, proses dan output pendidikan;
3. Meningkatkan kemasyarakatan dan prestasi kegiatan pemuda, olahraga dan seni;
4. Meningkatkan kemandirian pengelolaan pendidikan non formal (PNF) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

Namun demikian, jumlah sumber daya pendidik dari unsur PNS perlu mendapat perhatian serius mengingat jumlahnya yang semakin tidak proporsional dengan jumlah siswa/kelas yang ada saat ini. Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kabupaten Jepara telah berhasil meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah dan berdampak pada meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan salah satu sub komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Jepara. Pada indikator ini terlihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara periode tahun 2022-2023 mengalami perubahan cukup baik yakni bertambah 0,17 tahun, sementara peningkatan rata-rata lama sekolah

Jawa Tengah yang mencapai 0,08 tahun. Sedangkan jika dibandingkan dengan RLS Kabupaten Kudus, pada tahun 2023 Kabupaten Jepara lebih rendah 1,08 tahun. RLS Kabupaten Kudus menempati posisi tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 9,34 tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kabupaten Jepara memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang semakin meningkat.

1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 terealisasi 12,85 dari target sebesar 12,78 sehingga capaiannya adalah sebesar 100,54%. Realisasi kinerja ini naik jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing sebesar 12,76 dan 12,77. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jepara diharapkan minimal lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 ini sudah mencapai 100,15 % bila dibandingkan dengan target di akhir periode RPD yang sebesar 12,83.

Capaian ini apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten di sekitar masih jauh. Untuk Kabupaten Kudus Harapan lama sekolahnya mencapai 13,26, Kabupaten Pati 12,96, dan Kabupaten Demak 13,34.

Pencapaian ini tidak terlepas dari beberapa upaya yang sudah dilakukan antara lain.

- 1) Meningkatkan kualitas kegiatan diklat dan pelatihan mutu guru dan kepala sekolah;
- 2) Peningkatan mutu guru kelas akhir melalui kegiatan KKG SD dan MGMP SMP;

- 3) Pemberian tunjangan kesejahteraan GTT/PTT dan guru non sertifikasi;
- 4) Pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu baik pendidikan formal dan non formal; dan
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

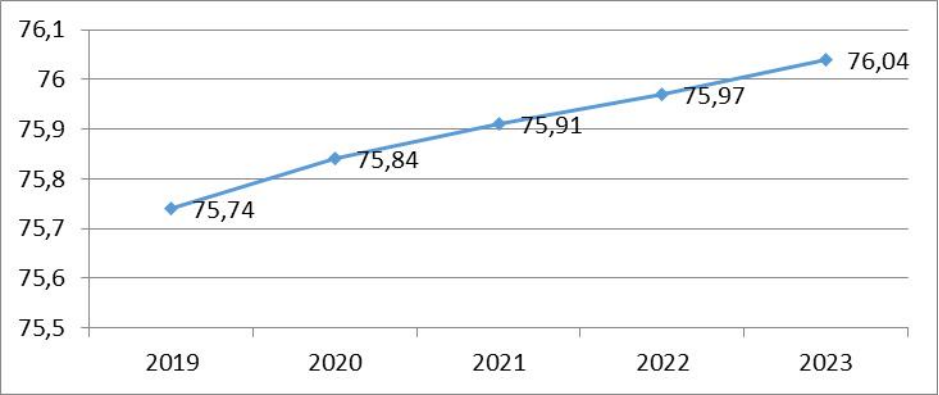
1.3 Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Umur Harapan Hidup seseorang tergantung pada berbagai variable penting diantaranya gaya hidup, akses ke fasilitas kesehatan, dan status ekonomi. Namun, seseorang bisa saja bertahan hidup lebih lama atau lebih sebentar dari yang diharapkan karena angka tersebut hanya dihitung berdasarkan rata-rata standar harapan hidup di wilayah sendiri.

UHH mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. UHH merupakan pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kualitas hidup masyarakat dalam suatu wilayah. Umur Harapan hidup (UHH) di Kabupaten Jepara secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Terhitung sejak tahun 2021, angka harapan hidup di Kabupaten Jepara mencapai 75,91 kemudian naik menjadi 75,97 pada tahun 2022, tahun 2023 angkanya mencapai 76,04, persentase capaian terhadap target akhir RPD sebesar 99,77%.

Jika dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Indonesia tahun 2023 yang mencapai angka 72,13 maka capaian Umur Harapan Hidup di Kabupaten Jepara lebih tinggi 3,91 tahun. Umur Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir

Grafik Umur Harapan Hidup Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data BPS Kab. Jepara Tahun 2019-2023

1.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variable yang sama seperti IPM, namun mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG menunjukkan rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Semakin mendekati 100 maka semakinmkecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2022, IPG Kabupaten Jepara tercatat sebesar 91,44 sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 91,28. Angka ini menunjukkan bahwa IPM perempuan 91,44 persen dari IPM laki-laki, yaitu 70,47 IPM perempuan disbanding dengan 77,07 IPM laki-laki. Untuk realisasi IPG tahun 2023 belum release dari BPS, jadi masing menggunakan realisasi tahun 2022

2. Meningkatnya Modal Sosial Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Modal Sosial Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **114,42%** dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Modal Sosial Masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Modal Sosial Masyarakat

	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
No								
		Tar get	Realis asi	Capai an (%)	Tar get	Realisas i	Capai an (%)	
1.	Persenta se Desa dengan Indeks Ketahan an Sosial ≥0,8	-	61,41	100	52, 72	60,32	114,4 2	99,10
	Rata-Rata Capaian			100			114, 42	

Sumber : *idm.kemendesa.go.id*

2.1 Persentase Desa dengan Indeks Ketahanan Sosial $\geq 0,8$

Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru dalam dokumen RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Dengan angka realisasi kinerja di tahun 2023 sebesar 60,32%, ada penurunan realisasi dari tahun 2022 sebesar 1,09%

3. Meningkatnya Pelestarian Budaya Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran Strategis **Meningkatnya Pelestarian Budaya Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 333,35% dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelestarian Budaya Masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pelestarian Budaya Masyarakat

	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET
No								
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	

				(%)			(%)	AKHIR RPD (%)
1.	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya	-	-	-	32,14	107,14	333,35	354,5
	Rata-Rata Capaian			-			333,35	

Sumber : Disparbud Kab.Jepara, 2023

3.1. Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pelestarian Seni Budaya

Indikator kinerja ini juga merupakan indicator kinerja baru dalam RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 karena dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya belum menjadi indikator kinerja. Meskipun demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 333,35%. Dari target kinerja sebesar 32,14% dan realisasi sebesar 107,14%. Berarti banyak masyarakat Kabupaten Jepara yang menerima penghargaan seni budaya

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2023 :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang melestarikan dan mengembangkan seni budaya.
2. Berkembangnya kelompok seni/pelaku seni yang menyelenggarakan pertunjukan untuk masyarakat.
3. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap gelaran seni pada setiap perhelatan yang diadakan secara mandiri oleh masyarakat

4. Tumbuhnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan *Food Estate*

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Tumbuhnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan *Food Estate* dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 55,44 % dengan predikat **“Cukup”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Tumbuhnya Pusat-Pusat

Pertumbuhan Ekonomi Baru dan *Food Estate* disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Tumbuhnya Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan *Food Estate*

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	-	-	-	0,6348	0,6976	109,89	108,94
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	3,40	100	3,0-4,0	0,03	1	0.97
Rata-Rata Capaian				100			55,44	

Sumber : Bappeda Kabupaten Jepara Tahun 2023

4.1. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten jepara Tahun 2023-2026 indikator kinerja IKE ini merupakan indikator baru, jadi pada tahun 2022 belum ada target kinerjanya.

Ketahanan ekomoni adalah dinamika kehidupan finansial suatu negara yang tangguh dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, rintangan, hambatan, serta tantangan yang berasal dari uar negeri maupun dalam negeri demi menjamin kemakmuran bangsa dan negara.

Adapun upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi adalah dengan menggerakkan roda ekonomi melalui ekonomi kreatif yang mengusung konsep ekonomi baru dengan meningkatkan kreativitas berupa ide dan gagasan yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian.

Secara umum ketahanan ekonomi nasional saat ada pandemic melanda dunia menjadi turun drastic karena roda ekonomi seolah-olah berhenti. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Jepara. Namun mulai tahun 2022, ketahanan ekonomi kabupaten Jepara mulai meranjak naik meskipun tidak secara signifikan. Indeks ketahanan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2023 mencapai 0,6976. Angka ini lebih dari yang ditargetkan yaitu 0,6348. Dengan begitu nilai capaian kinerja pada indikator ini sebesar 109,89%. Realisasi IKE ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar 0,6725. Jika dibandingkan dengan capaian hingga akhir masa RPD IKE tahun 2023 mencapai 108,95%

4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Indikator kinerja ini pada tahun 2022 belum merupakan indikator kinerja, jadi belum ada target yang akan dicapai. Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 0,03 dengan capaian kinerja 1%. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam menginterpretasikan angka realisasi kinerja dengan target kinerja.

Ekonomi Jawa Tengah tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,98%, melambat dibandingkan capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,31%. Sedangkan pertumbuhan di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,49%. Sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Jepara tahun 2023 mencapai 0,03

5. Berkembangnya Pariwisata Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Berkembangnya Pariwisata Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 196,90% dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Berkembangnya Pariwisata Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Berkembangnya Pariwisata Ramah Lingkungan dan Ekonomi Kreatif

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Rata-rata lama Menginap	-	Wisman: 2,06 Wisnus: 1,44	100	Wisman: 2 Wisnus: 1,5	Wisman: 2,12 Wisnus: 1,71	Wisman: 106 Wisnus: 114	Wisman: 110 Wisnus: 88
2.	Rasio Wirausaha	-	3,40	100	4,25-4,75	15,57	370,71	346
	Rata-Rata Capaian			100			196,90	

Sumber : Disparbud Kab. Jepara dan BPS Kab. Jepara Tahun 2023

5.1 Rata-rata lama Menginap

Indikator kinerja ini merupakan indicator kinerja yang baru dalam dokumen perencanaan daerah yang tahun sebelumnya belum menjadi indikator kinerja.

5.2 Rasio Wirausaha

Berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2022, wirausaha adalah orang yang menjalankan, menciptakan, dan/atau mengembangkan suatu usaha.

Perpres itu membedakan wirausaha menjadi dua jenis, yaitu "wirausaha pemula" dan "wirausaha mapan".

"Wirausaha pemula" adalah pelaku usaha yang berusaha sendiri, serta pelaku usaha yang dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar.

Kemudian "wirausaha mapan" adalah pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Lampiran I Perpres No. 2 Tahun 2022 juga menetapkan tata cara penghitungan rasio kewirausahaan dengan rumus berikut:

- Rasio Wirausaha Pemula = $\frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} \times 100\%$

- $\text{Rasio Wirausaha Mapan} = \frac{\text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} \times 100\%$

Jika dihitung dengan rumus ini, menggunakan data ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2023 rasio wirausaha pemula di Indonesia mencapai 35,21% dari total angkatan kerja.

Kemudian rasio wirausaha mapan pada Agustus 2023 mencapai 3,04% dari total angkatan kerja.

Dibanding sedekade lalu, rasio wirausaha pemula tercatat meningkat dari 32,02% (Februari 2013) menjadi 35,21% (Agustus 2023)

6. **Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing**

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing** dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 168,18% dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Nilai Investasi Daerah	1.092	8.687,716	795,57	3.000,00	8.928,97	297,63	65,1
2.	LPE Industri Pengolahan	-	3,75	100	5,0-5,5	4,57	91,40	87,88
3.	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	3,63	100	4,0-4,5	4,62	115,50	110
	Rata-Rata			331,85			168,18	

	Capaian						

Sumber : Bappeda Kab. Jepara dan BPS Kab. Jepara, 2023

6.1. Nilai Investasi Daerah

Penanaman modal adalah suatu proses pemberian permodalan usaha yang berasal dari perseorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi merupakan salah satu elemen pokok pembangunan daerah Kabupaten Jepara, baik Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

(PMDN/PMA) Investasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara, peningkatan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Adapun faktor pendukung tercapainya target realisasi Investasi di Kabupaten Jepara antara lain:

- a. Terkait dengan implementasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha, BKPM sendiri sudah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Diharapkan dengan adanya dua peraturan BKPM baru tersebut akan lebih memberikan kejelasan, kepastian dan kecepatan dalam menyusun berbagai perizinan yang terkait investasi termasuk pelaporan dan pengawasannya baik di BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten, yang tujuannya adalah agar terjadinya peningkatan minat dan juga realisasi investasi.
- b. Kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri, salah satunya dikarenakan adanya efek penetapan aturan tax amnesty. Tax Amnesty akan menarik dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri dan dengan pertambahan dana yang ada maka tingkat investasi akan naik.
- c. Kemudahan perizinan dan dengan dibukanya MPP (Mall Pelayanan Publik) :

Selain itu ada juga faktor kendala tercapainya realisasi investasi yang ditargetkan, yaitu antara lain:

- a Kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).
- b Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Jepara yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Jepara.
- c Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya investasi. Hal ini dikarenakan faktor masyarakat Indonesia yang cenderung ingin mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat tapi risiko yang diterima relatif kecil. Dukungan terhadap faktor ini berasal dari gaya hidup masyarakat kita yang cenderung konsumtif, lebih nyaman dengan keadaan saat ini meskipun tahu bahwaproduk yang dikonsumsi merupakan barang impor.

Langkah tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Jepara menghadapi beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- a. Segera membentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha di Jepara. Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Jepara telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Jepara dengan Keputusan Bupati Jepara No. 500/38 Tahun 2018 sebagai implementasi PP Nomor 91/2017 yang berfungsi antara lain akan membantu mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya. Mengadakan sosialisasi tentang investasi.

6.2 LPE Industri Pengolahan

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Industri pengolahan Kabupaten Jepara mencapai 5,17,dan menurun di tahun 2022 menjadi 3,75. Kemudian pada tahun 2023 naik lagi menjadi 4,57. Capaian pada tahun 2023 dibandingkan dengan target hanya tercapai sebesar 91,40%.

6.3 LPE Sektor Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tercapai sebesar 7,05, dan pada tahun 2022 turun menjadi 3,63. Hal ini terjadi dikarenakan efek dari pandemic covid-19 yang melanda di seluruh belahan dunia tidak terkecuali di kabupaten Jepara. Kemudian di tahun 2023 secara perlahan laju pertumbuhan ekonomi sector ini naik menjadi 4,62. Meskipun begitu masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan capaian kinerjanya.

Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPD 2023-2026, realisasi tahun 2023 ini tercapai sebesar 115,50%

7. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 114,92 % dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pendapatan Masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00	4,10	73,17	3,85	3,35	114,92	92,53
	Rata-Rata Capaian			73,17			114,92	

Sumber : BPS Kabupaten Jepara, 2023

7.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan padahal sudah berusaha dengan maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2014-2021 berfluktuatif dan terus menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 TPT Kabupaten Jepara sebesar 4,23% terus menurun menjadi 4,10% pada tahun 2022. Angka ini di bawah angka pengangguran nasional yang mencapai 5,86% dan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 5,57%. Apabila dibandingkan dengan 3 (tiga) Kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Kudus (3,21%), Kabupaten Pati (4,45%) dan Kabupaten Demak (6,11%).Walaupun mengalami penurunan tetapi belum dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,00%.

8. Terwujudnya Infrastruktur Digital dan Konektivitas Jaringan

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Terwujudnya Infrastruktur Digital dan Konektivitas Jaringan** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 107,61% dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis **Terwujudnya Infrastruktur Digital dan Konektivitas Jaringan** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Terwujudnya Infrastruktur Digital dan Konektivitas Jaringan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik	-	-	-	22,58	22,58	100	27,45
2.	Indeks SPBE	3,05	3,14	102,95	3,15	3,63	115,23	95,52

	Rata-Rata Capaian		102,9 5			107,61	

Sumber: Diskominfo Kabupaten Jepara, 2023

8.1 Persentase Ketersediaan Akses Internet Publik

Dalam menghadapi tantangan jaman yang serba digital saat ini, masyarakat dihadapkan dengan kebutuhan penggunaan akses internet yang luar biasa. Akan tetapi ketersediaan akses internet ini belum merata di setiap daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 66,48% penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas sudah pernah mengakses internet pada tahun 2022.

Proporsi tersebut tumbuh pesat disbanding dengan sedekade lau. Namun sampai sekarang tingkat penetrasi internet belum merata secara nasional. Pada tahun 2022 tercatat hanya 67,73% penduduk Provinsi Jawa Tengah berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet.

Dalam upaya meningkatkan dan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk lebih mudah mengakses internet, maka Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan peningkatan jumlah titik akses internet publik dari hanya 5 titik pada tahun 2022 menjadi 14 titik pada tahun 2023. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 35,71%.

Faktor yang mendukung pencapaian indicator kinerja ini adalah:

1. Adanya dukungan kebijakan dan anggaran
2. Sudah terpasangnya jaringan fiber optic (FO) di seluruh OPD wilayah Kabupaten Jepara
3. Terpasangnya jaringan fiber optic (FO) memudahkan pemasangan free wifi sebagai sarana untuk akses internet publik
4. Koordinasi yang optimal antar OPD dalam proses mempercepat

Meskipun begitu masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Kurangnya kestabilan daya listrik di OPD-OPD mengakibatkan seringnya perangkat jaringan menjadi tidak berfungsi secara maksimal
2. Terjadinya putus jaringan FO diakibatkan karena tertarik oleh kendaraan dengan ketinggian yang melebihi standar serta terkena pohon yang roboh

- 3 Kurangnya SDM baik secara kualitas dan kuantitas, sehingga mengakibatkan penanganan trobel jaringan yang agak terlambat

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dengan OPD terkait agar ada harmonisasi dan kolaborasi dalam percepatan pemasangan free wifi publik
2. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapangan untuk dilakukan solusi dan penanganan

8.2 Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang emmanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manjemen system pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi system pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemrintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan angkauan pelayanan public kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan system pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2022 telah dievaluasi oleh KemenPANRB dengan nilai 3,14 dan tahun 2023 naik menjadi 3,63. Hasil ini sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 3,15. Hal ini tidak lepas dari berbagai upaya untuk meningkatkan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Jepara.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Indeks SPBE sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara intensif baik secara horizontal (Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SBPE) maupun koordinasi secara vertikal (tingkat provinsi maupun pusat)
2. Melaksanakan percepatan penerapan SPBE di sektor layanan administrasi pemerintahan dan sektor layanan publik
3. Perluasan digital melalui penambahan jaringan internet di pemerintahan dan aera publik untuk meningkatkan layanan
4. Optimalisasi literasi digital melalui berbagai kegiatan, seperti : pelatihan dan sosialisasi di lingkup pemerintahan dan masyarakat
5. Pemenuhan bukti dukung yang relevan pada indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian / evaluasi SPBE

Meskipun demikian masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Jepara antara lain:

1. Implementasi kebijakan SPBE yang belum optimal.
2. Pelaksanaan tata kelola SPBE yang belum optimal.
3. Masih ada bukti dukung yang belum relevan dengan tingkat kematangan pada indicator evaluasi SPBE.

Untuk itu perlu adanya langkah-langkah dalam mengatasi hambatan yang ada antara lain:

1. Perlunya meningkatkan intensitas koordinasi dari Tim Koordinasi SPBE.
2. Perlunya sosialisasi tentang kebijakan dan tata kelola SPBE.
3. Perlunya meningkatkan literasi digital terkait dengan manajemen SPBE.

Penggunaan sumber dana keuangan untuk pencapaian indicator sasaran ini adalah sebesar Rp. 67.125.500,- atau sebesar 95,89 % dari total pagu sebesar

Rp. 70.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,11 % dari pagu yang ditentukan

9. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 106,41% dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis **Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari dan Mitigasi Kebencanaan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	63,79	-	55,54	58,22	104,82	101,76
2.	Indeks kapasitas/Ketahanan Daerah terhadap Bencana	-	0,57	100	0,54	0,50	108	83,3
	Rata-Rata Capaian			102,95			106,41	

Sumber : DLH Kabupaten Jepara, 2023

10. Terwujudnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman Layak dan Berkelanjutan

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Terwujudnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman Layak dan Berkelanjutan** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,22% dengan predikat **“Sangat Baik”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran

strategis **Terwujudnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman Layak dan Berkelanjutan** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Terwujudnya Penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman Layak dan Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	81,25	84,77	104,33	90,58	90,89	100,34	99,52
2.	Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	-	0,988	100	99,5675	99,67	100,1	100,09
Rata-Rata Capaian		102,95			100,22			

Sumber : Disperkim Kab. Jepara,2023

10.1. Persentase Rumah Layak Huni

Realisasi kinerja persentase rumah layak huni di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 mencapai 104,33 % melampaui sebesar 0,05% dari target 2021 sebesar 104,28%. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 104,33% telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang sebesar 104,33 %. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,05% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 104,28%. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD yang sebesar 81,25, maka realisasi capaian kinerja pada tahun 2022 ini sudah mencapai 104,33%.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani sebanyak 9.734 unit. Memiliki arti bahwa jumlah Rumah Layak Huni pada tahun 2023 mengalami enambahan sebesar 2.157 unit, sehingga total unit Rumah Layak Huni sampai dengan tahun 2022 menjadi 9.734 unit, dari jumlah keseluruhan unit rumah diKabupaten Jepara sebesar 365.673 unit. Capaian kinerja persentase Rumah Laya Huni pada tahun 2023 sebesar 90,89%, telah

terjadi kenaikan sebesar 0,72% jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 84,77%.

10.2. Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan

Pada indikator yang ini realisasi kinerja tahun 2023 tercapai sebesar 99,67%. Jika dibandingkan dengan target kinerja 99,5675%, capaian kinerja sebesar 100,1%. Hal ini naik jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 0,988

11. Meningkatnya Penyediaan dan Pelayanan Prasarana Sarana Daerah (PSD) Bidang Pekerjaan Umum

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Penyediaan dan Pelayanan Prasarana Sarana Daerah (PSD) Bidang PU** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 105,66 % dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Penyediaan dan Pelayanan Prasarana Sarana Daerah (PSD) Bidang PU** disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11
Meningkatnya Penyediaan dan Pelayanan Prasarana Sarana Daerah (PSD)
Bidang PU

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1	Persentase Prasarana sarana Daerah (PSD) Bidang PU dalam kondisi baik	-	58,97	100	59,89	63,28	105,66	100,97
	Rata-Rata Capaian			100			105,66	

Sumber : Sumber DPUPR Kabupaten Jepara, 2023

11.1. Persentase Prasarana Sarana Daerah (PSD) Bidang PU dalam Kondisi Baik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satu indikator keberhasilan adalah tersedianya prasarana sarana daerah dalam kondisi baik, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan optimal. Hal ini juga mendorong pertumbuhan sosial ekonomi suatu daerah. Prasarana sarana daerah di bidang Pekerjaan Umum (PU) yang dimaksud disini meliputi jalan kondisi mantap, bangunan gedung dalam kondisi baik, akses air minum layak, akses sanitasi layak, irigasi dalam kondisi baik, dan bendung dalam kondisi baik. Indikator PSD bidang PU ini merupakan indikator baru dalam dokumen RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yang dalam dokumen perencanaan sebelumnya yaitu RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2017-2022 belum menjadi indikator kinerja. Realisasi kinerja persentase PSD bidang PU dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 63,28%, hal ini berarti bahwa capaian kinerjanya sebesar 105,66% dari target sebesar 59,89%. Capaiannya ini didukung oleh:

1. Persentase jalan kondisi mantap sebesar 87,47%
2. Persentase Gedung dalam kondisi baik sebesar 59%
3. Persentase akses air minum layak sebesar 98,46%
4. Persentase akses sanitasi layak sebesar 73,98%
5. Persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 25,77%
6. Persentase bendung dalam kondisi baik sebesar 35%

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung setiap pencapaian indikator kinerja.
2. Komitmen dari pimpinan untuk menyediakan prasarana sarana daerah untuk mendukung kegiatan masyarakat agar kegiatan social ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik.
3. Ditetapkannya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan prasarana sarana daerah.

Langkah-langkah Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja:

1. Mengoptimalkan seluruh sumber daya baik dana maupun SDM sehingga dapat meningkatkan lagi kinerja tahun yang akan datang.
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur berdasarkan berdasarkan skala prioritas dan berdampak luas terkait dengan keterbatasan anggaran infrastruktur.
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi kawasan permukiman.
- Peningkatan kompetensi SDM pada masing-masing bidang

12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 103,79 % dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	76	83,15	109,4	82	85,11	103,79	100,12
	Rata-Rata Capaian			109,4			103,79	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Jepara, 2023

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Survey kepuasan masyarakat pada tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 83,15, sehingga capaiannya sebesar 106,6 %. Pada Tahun 2022 Kabupaten Jepara telah menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat pada semua organisasi perangkat daerah (42) dan 11 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyusun nilai kepuasan masyarakat sebagai salah satu parameter penyelenggaraan pemerintahan khusus pada aspek kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima dengan mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara.
4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pola Perijinan Terpadu Penanaman Modal.
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik.
7. Keputusan Bupati Jepara Nomor 502/4 tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Perijinan Kabupaten Jepara.
8. Keputusan Bupati Jepara Nomor 700/92 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pegaduan Permasalahan Perijinan Penanaman Modal Kabupaten Jepara Tahun 2015.
9. Mulai tahun 2012 telah diterapkan Sistem Standar Mutu ISO 9001: 2008 hingga akhir tahun 2015 di Jepara.
10. Penyelenggaraan lomba pelayanan publik yang dilaksanakan tiap tahun

13. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan** dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 102,74 % dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13

Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat daerah	-	Tinggi	100	Tinggi	Tinggi	100	100,12
2.	Indeks Inovasi Daerah				Inovatif	Inovatif	100	
3.	Capaian Nilai SAKIP		B		B	B	100	
4.	SPIP Terintegrasi		3,214		2,8	3,261	116,46	105,19
5.	IPKD		75,2284		B	Belum release	-	-
6.	Indeks merit Sistem		Kurang		Kurang	Kurang	100	
7.	Indeks Profesionalitas ASN		Sedang		Sedang	Sedang	100	
	Rata-Rata Capaian						102,74	

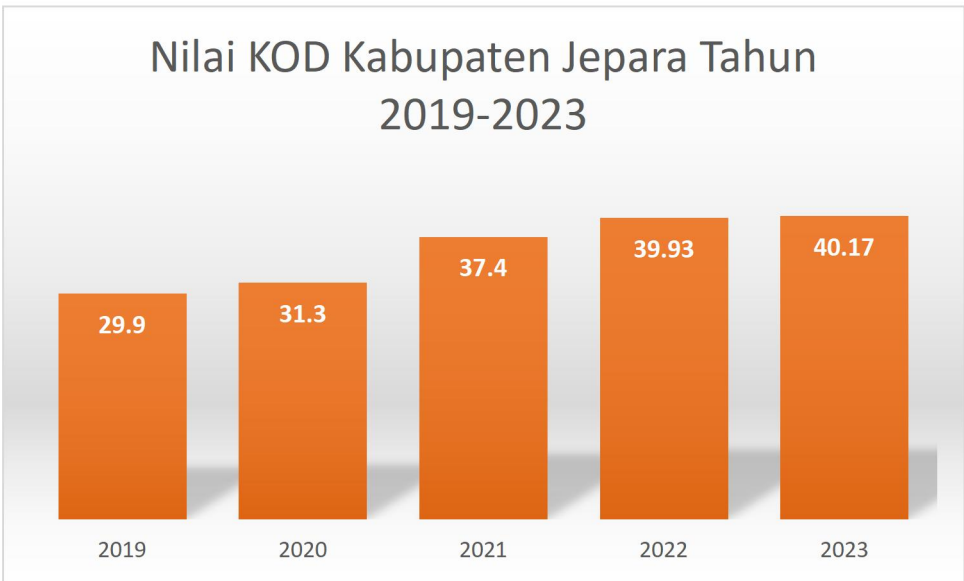
Sumber : Bappeda Kabupaten Jepara, 2023

13.1 **Tingkat kematangan Organisasi Perangkat Daerah**

Untuk menghasilkan kinerja perangkat daerah yang optimal sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah menetapkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 untuk mengukur sejauhmana tingkat kematangan perangkat daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan yang tinggi bahkan sangat tinggi mengindikasikan bahwa perangkat daerah tersebut telah melaksanakan tata kelola manajemen organisasi yang baik dan kinerja yang dihasilkan sudah optimal. Ada 11 (sebelas)

variable yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan perangkat daerah yaitu: perencanaan, monitoring dan pengendalian, penjaminan mutu layanan, standar operasional prosedur, pendidikan dan pelatihan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, manajemen sumber daya yang terukur, manajemen risiko, pengukuran kinerja, pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. Nilai dari masing-masing variable tersebut sangat menentukan sejauhmana tingkat kematangan perangkat daerah.

Dalam perkembangannya nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOD) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dari tahun 2019 dengan nilai 29,9 kategori Sedang naik menjadi 31,3 kategori Sedang pada tahun 2020. Dan naik lagi pada tahun 2021 menjadi 37,4 kategori Tinggi, tahun 2022 menjadi 39,93 kategori Tinggi, dan terakhir di tahun 2023 naik lagi menjadi 40,17 kategori Tinggi. Kenaikan nilai KOD Kabupaten Jepara dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:



Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam upaya peningkatan nilai KOD antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam pemenuhan kecukupan data dukung.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan manajemen pemerintahan di semua perangkat daerah.
3. Menjadikan tingkat kematangan perangkat daerah sebagai indikator kinerja dalam sasaran strategis perangkat daerah sebagai bentuk komitmen

Pemerintah Daerah untuk selalu meningkatkan perbaikan pelaksanaan manajemen pemerintahan.

13.2 Indeks Inovasi Daerah

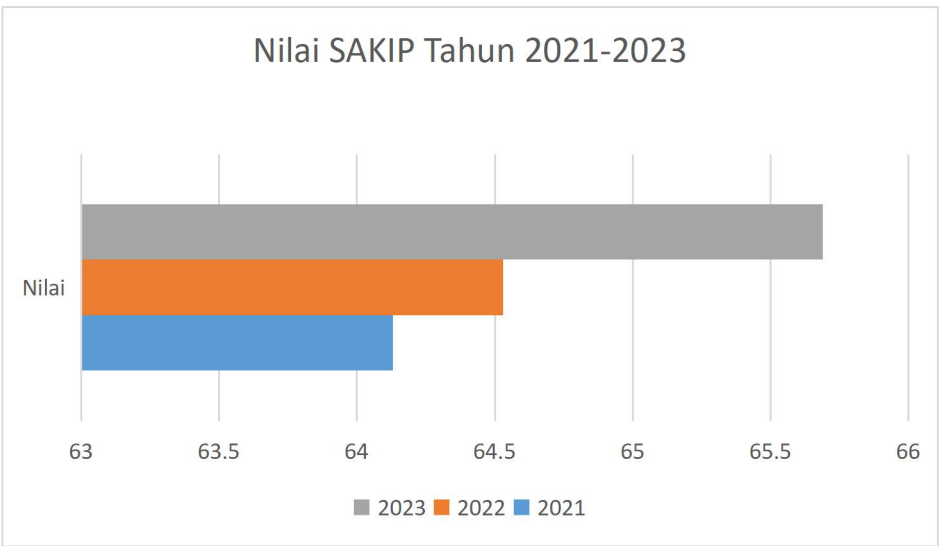
Kegiatan penilaian inovasi daerah ini dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diwujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pengukuran ini dilakukan oleh Badan strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2021 Indeks Inovasi daerah yang diperoleh Kabupaten Jepara sebesar 46,52 dengan kategori Inovatif. Nilai ini turun 0,08 poin pada tahun 2022 menjadi 46,44. Dan pada tahun 2023 menjadi.....

Jika dibandingkan dengan pencapaian dari daerah di sekitar, Kabupaten Jepara termasuk masih rendah. Pada tahun 2021 kabupaten Kudus nilai IID nya sebesar 42,51, tetapi kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 51,73.

13.3 Capaian Nilai SAKIP

Secara umum nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami tren peningkatan yang positif. Dari tahun 2021 nilai SAKIP Kabupaten Jepara 64,13 dengan kategori B dan naik 0,40 poin menjadi 64,53 pada tahun 2022. Tahun 2023 memperoleh nilai 65,69 dengan kategori B. Perkembangan nilai LKjIP Kabupaten Jepara secara lebih jelas terlihat dalam diagram berikut :



Area akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai sarana untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk di dalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proses bisnis yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai dengan : (1) Perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; (2) Penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; (3) Belanja aparatur yang semakin proporsional; (4) Belanja Publik yang semakin dominan; serta (5) Perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan dan partisipatif.

Dalam rangka meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kabupaten Jepara secara serius melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya. Dengan belajar dari periode RPJMD sebelumnya, pada periode RPD 2023-2026 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara meneliti dengan seksama dokumen – dokumen perencanaan lainnya sehingga bisa selaras antara RPD serta penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang "SMART".
- 2) Membangun sistem aplikasi E-SAKIP Kabupaten Jepara guna pencapaian akuntabilitas kinerja yang lebih baik.
- 3) Membangun komitmen dari pimpinan dalam upaya mengimplementasikan SAKIP mulai dari tingkat Unit Kerja, Perangkat Daerah, sampai ke tingkat Pemerintah Daerah. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara pemberi amanah dengan penerima amanah.

- 4) Melakukan peningkatan kapasitas petugas perencana dan penyusun dokumen SAKIP dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek), workshop, pendampingan, dan peer teaching bagi perangkat daerah.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi atas target kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

13.4 SPIP Terintegrasi

Mulai tahun 2016 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disibukkan lagi dengan pekerjaan baru yaitu menilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada instansinya masing-masing. Hal ini dipicu oleh target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2014-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indikator kinerja berupa “tingkat kematangan implementasi SPIP” ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai instansi pembina SPIP telah menetapkan pedoman melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk Kabupaten Jepara sendiri nilai yang diperoleh mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada level 2, kemudian pada kurun waktu tahun 2018/2019 berdasarkan Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor LQA-88/PW11/3.1/2018 Tanggal 18 Maret 2019 perihal Laporan Pelaksanaan Reviuatas Hasil *Self Assessment* Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Jepara, nilai Maturitas SPIP Kabupaten Jepara bisa mencapai level 3 dengan nilai 3,1489, namun karena ada penurunan sub unsur kepemimpinan yang kondusif dari level 5 ke level 2, dengan pertimbangan bahwa implementasi terkait kepemimpinan yang kondusif belum memadai yang ditunjukkan dengan adanya permasalahan hukum kepala daerah yang ditangani KPK terkait penetapan Bupati Jepara sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Hakim Pengadilan Negeri

Semarang maka level maturiti SPIP Kabupaten Jepara kembali turun ke level 2, yaitu dengan nilai 2,9625.

Meski demikian, Kabupaten Jepara secara konsisten akan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga nilai SPIP menjadi skala 4 pada akhir periode RPJMD akan tercapai.

13.5 IPKD

IPKD atau Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu aturan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang akan membuat tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan daerah yang benar akan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Terdapat 6 (enam) dimensi yang digunakan yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Mulai tahun 2020 nilai IPKD Kabupaten Jepara sebesar 69,1369 dan pada tahun 2021 naik menjadi 74,0002. Pada tahun 2022 naik lagi menjadi 75,2284 dengan kategori B. Untuk tahun 2023 IPKD ditargetkan B. Hal ini dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD 2023-2026. Realisasi IPKD pada tahun 2023 tercapai dengan kategori B.

13.6 Indeks Merit Sistem

Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai. Mulanya, merit sistem banyak diterapkan di organisasi sektor swasta, yang kemudian belakangan mulai berkembang dan diadaptasi juga oleh sektor publik.

Pada tahun 2022 Pemerintah kabupaten Jepara memperoleh nilai "Kurang". Dan pada tahun 2023 masih bertahan dengan kategori yang sama. Walaupun target kinerjanya tercapai, tetapi indeks yang diperoleh masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh belum tersusunnya standar kompetensi

jabatan yang baru yang sudah disesuaikan dengan nomenklatur jabatan terbaru dan beberapa indikator dalam penilaian Indeks merit Siste

13.7 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.

Kategori tingkat IP ASN ≤ 60 kategori rendah, 61-70 kategori rendah, 71-80 kategori sedang, 81-90 kategori tinggi, dan 91-100 kategori sangat tinggi

Pada tahun 2022 Kabupaten Jepara dalam penilaian IP ASN memperoleh kategori Sedang. Ditahun 2023 juga menargetkan sedang. Tetapi hasil penilaian IP ASN tahun 2023 belum keluar.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

I. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

A. Urusan Pertanian dan Urusan Pangan (DKPP Kabupaten Jepara)

- **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

- a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

- **Dasar Pelaksanaan Tugas**

- a. SP DIPA – 018.08.1.633656/2023 tanggal 26 Januari 2023
 - b. SP DIPA-125.01.3.690701/ 2023 15 Agustus 2023
 - c. SP DIPA-125.01.3.690701/ 2023 15 Agustus 2023
 - d. SP DIPA.018.08.4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022
 - e. SP DIPA.018.08.4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022
 - f. SP DIPA.018.08.4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022
 - g. SP DIPA.018.08.4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022
 - h. SP DIPA.018.08.4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022
 - i. SP DIPA.018.08.4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022
 - j. SP DIPA - 018.03.4.039151/2023
 - k. SP DIPA – 018.08.1.633656/2023 tanggal 30 November 2022
 - l. SP DIPA – 018.08.1.633656/2023 tanggal 30 November 2022
 - m. SP DIPA – 018.08.1.633656/2023 tanggal 30 November 2022
 - n. SP DIPA – 018.08.1.633656/2023 tanggal 26 Januari 2023
 - o. SP DIPA – 018.08.1.633656/2023 tanggal 26 Januari 2023

A. Program dan Kegiatan

Pembangunan Embung Pertanian (Geomembran).

Rincian Kegiatan :

- 1) Lokasi : Poktan Manunggal Tani I Desa Tulakan, Donorojo

Anggaran : Rp 115.000.000

Realisasi : Rp 115.000.000

Capaian Kegiatan : 100%.

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

- 2) Lokasi : Gapoktan Sido Dadi Desa Kunir, Keling

Anggaran : Rp 115.000.000

Realisasi : Rp 115.000.000

Capaian Kegiatan : 100%

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

- 3) Lokasi :Gapoktan Tengguli Desa Tengguli, Bangsri

Anggaran : Rp 115.000.000

Realisasi : Rp 115.000.000

Capaian Kegiatan : 100%

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

- 4) Lokasi :Poktan Suka Maju II Desa Semat, Kedung

Anggaran : Rp 115.000.000

Realisasi : Rp 115.000.000

Capaian Kegiatan : 100%

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

- 5) Lokasi :Poktan Sido Mulyo VII Desa Tanjung, Pakis Aji

Anggaran : Rp 115.000.000

Realisasi : Rp 115.000.000

Capaian Kegiatan : 100%

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

• **Program dan Kegiatan**

Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian (Jalan Usaha Tani)

Irigasi Pertanian dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

Rincian Kegiatan :

- 1) Lokasi :Poktan Karya Mukti 5 Desa Gelang, Keling

Anggaran : Rp 100.000.000

Realisasi : Rp 100.000.000

Capaian Kegiatan : 100%.

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

- 2) Lokasi :Poktan Sumber Muria Desa Gelang, Keling.

Anggaran : Rp 100.000.000

Realisasi : Rp 100.000.000

Capaian Kegiatan : 100%

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

- 3) Lokasi : Poktan Desa Tanjung, Pakis Aji.

Anggaran : Rp 150.000.000

Realisasi : Rp 150.000.000

Capaian Kegiatan : 100%

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

- 4) Lokasi : Poktan Desa Tempur dan Keling

Anggaran : Rp 100.000.000

Realisasi : Rp 100.000.000

Capaian Kegiatan : 100%

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

B. Program dan Kegiatan

Registrasi Keamanan Pangan Segar

Rincian Kegiatan :

- 1) Lokasi : Kabupaten Jepara

Anggaran : Rp 32.327.000

Realisasi : Rp 32.327.000

Capaian Kegiatan : 100%

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

C. Program dan Kegiatan

Pengawasan Keamanan Pangan Segar

- 1) Lokasi : Kabupaten Jepara

Anggaran : Rp 16.729.400

Realisasi : Rp 16.729.400

Capaian Kegiatan : 100%

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

Program dan Kegiatan

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

- 2) Lokasi : Desa Tunahan, Desa Tengguli dan Desa Dorang

Anggaran : -

Realisasi : -

Capaian Kegiatan : Pemanfaatan Pekarangan

Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena sudah terlaksana sesuai target

D. Program dan Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian:

1) Lokasi : Kabupaten Jepara

Anggaran : Rp 10.000.000

Realisasi : Rp 10.000.000

Capaian Kegiatan : 100% Monitoring dan Pengawasan Pemanfaatan Bantuan Alsintan

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

E. Program dan Kegiatan

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Jepara

Rincian Kegiatan :

1) Lokasi : Kabupaten Jepara

Anggaran : Rp 17.700.000

Realisasi : Rp1 17.330.000

Capaian Kegiatan : 97,9 Monitoring dan Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Jepara

Capaian telah mencapai 97,7 sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

F. Program dan Kegiatan

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (E-RDKK)

Rincian Kegiatan :

1) Lokasi : Kabupaten Jepara

Anggaran : Rp 3.200.000

Realisasi : Rp 3.200.000

Capaian Kegiatan : 100%, Pendataan Petani Penerima Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 di Kabupaten Jepara.

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

G. Program dan Kegiatan

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (E-VERVAL)

Rincian Kegiatan :

- 1) Lokasi : Kabupaten Jepara
Anggaran : Rp34.936.000
Realisasi : Rp 34.936.000
Capaian Kegiatan : 100% Pendataan Penyaluran Pupuk Bersubsidi setiap Bulan
Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

H. Program dan Kegiatan

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (AOTP)

Rincian Kegiatan :

- 1) Lokasi : Kabupaten Jepara
Anggaran : Rp16.048.000
Realisasi : Rp16.008.000
Capaian Kegiatan : 99,8%, Sosialisasi kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) , Pendataan Petani pendaftar AOTP).
Capaian telah mencapai 99,8% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

I. Program dan Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP

Rincian Kegiatan :

- 1) Lokasi : DKPP Kab. Jepara
Anggaran : Rp 56.175.000
Realisasi : Rp 52.970.000
Capaian Kegiatan : 94,3 Penunjang kegiatan untuk kegiatan APBN Ditjen PSP
Capaian telah mencapai 94,3% sehingga tidak ada permasalahan yang timbulhanya saja terkendala dengan waktu kegiatan

J. Program dan Kegiatan

Pengawasan, Pembinaan, Monev Sarana Pascapanen TP

Rincian Kegiatan :

- 1) Lokasi : Ds. Tengguli, Ds. Dermolo dan Ds. Tubanan
Anggaran : Rp. 7.600.000
Realisasi : Rp. 7.300.000
Capaian Kegiatan : 96%, Penunjang kegiatan untuk kegiatan APBN Ditjen TP

- Capaian telah mencapai 96% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul hanya saja terkendala dengan waktu pelaksanaan
- 2) Kegiatan Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Lokasi : 242 Poktan di Kabupaten Jepara
Anggaran : Rp. 129.464.000
Realisasi : Rp. 129.464.000
Capaian Kegiatan : 96%, Bantuan Alsintan Pascapanen Tanaman Pangan. Capaian telah mencapai 96 % sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
- 3) Penyediaan Saprodi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Lokasi : 12 Kelompok Tani di Kab. Jepara
Anggaran : Rp. 421.440.000
Realisasi : Rp. 421.440.000,
Capaian : 100%, Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair/Pupuk Organik Padat/Pupuk Hayati Padat/Pembenah Tanah
Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
- 4) Kegiatan Bantuan Lingkup Alat Mesin Pertanian Pra-Panen
Lokasi : Gapoktan Sido Makmur, Desa Tempur Kec. Keling
Anggaran : Rp. 136.580.000
Realisasi : Rp. 136.580.000
Capaian : 100%, Bantuan Alsintan Pra-Panen (4 Unit Traktor Roda 2, 3 Unit Pompa Air dan 10 Unit Hand Sprayer)
Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
- 5) Penyuluhan pertanian
Lokasi : Poktan Tani Makmur II Desa Kecapi Kec. Tahunan
Anggaran : Rp. 10.000.000
Realisasi : Rp. 10.000.000
Capaian : 100%, Pelatihan Budidaya Tembakau
Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul
- 6) Fasilitasi Prasarana Pascapanen Hortikultura
Lokasi : KWT Mukti Rahayu Desa Kelet Kec. Keling
Anggaran : Rp. 210.000.000

Realisasi : Rp. 210.000.000

Capaian : 100%, Bangsal Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura

Capaian telah mencapai 100% sehingga tidak ada permasalahan yang timbul

7) Fasilitas Prasarana Pascapanen Hortikultura

Lokasi : Kabupaten Jepara

Anggaran : Rp. -

Realisasi : Rp. -

Capaian : Bantuan Solar Dryer 1 unit

Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena bantuan sudah tersalurkan.

8) Sikomandan

Lokasi : Kabupaten Jepara

Anggaran : Rp. -

Realisasi : Rp. -

Capaian : Pelayanan Inseminasi Buatan (Sikomandan), Target : 16.700 ekor; Realisasi : 13.424 ekor

Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai target.

9) Penandaan Ternak

Lokasi : Poktan Sido Mukti Desa Geneng Kec. Batealit

Anggaran : Rp. -

Realisasi : Rp. -

Capaian : Pendataan dan Penandaan Ternak Sapi dan Kerbau

Target : 18.000 ekor; Realisasi : 18.000 ekor (100 %)

Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai target

10) Rawat Ratoon Tebu

Lokasi : Poktan Sido Makmur III Desa Tempur Kec. Keling

Anggaran : Rp. -

Realisasi : Rp. -

Capaian : Bantuan Pupuk ZA 1,3 Ton

Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai target

11) Alat Pengolahan Kopi

- Lokasi : Poktan Sido Makmur III Desa Tempur Kec. Keling
Anggaran : Rp. -
Realisasi : Rp. -
Capaian : Bantuan Alat Roasting, Grinder, dan Sealer
Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai target
- 12) Alat Barista Kopi
Lokasi : Poktan Kabupaten Jepara
Anggaran : Rp. -
Realisasi : Rp. -
Capaian : Bantuan Alat Barista 1 Paket
Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai target
- 13) Benih Padi
Lokasi : Poktan Kabupaten Jepara
Anggaran : Rp. -
Realisasi : Rp. -
Capaian : Bantuan Benih Padi 225 Hektar
Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai target
- 14) Benih Padi
Lokasi : Poktan Kabupaten Jepara
Anggaran : Rp. -
Realisasi : Rp. -
Capaian : Bantuan Benih Padi 599 Hektar
Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai target
- 15) Benih Padi
Lokasi : Poktan Kabupaten Jepara
Anggaran : Rp. -
Realisasi : Rp. -
Capaian : Bantuan Benih Padi 3000 Hektar
Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai target
- 16) Optimalisasi Peningkatan Produksi
Lokasi : Poktan Kabupaten Jepara

Anggaran : Rp. -

Realisasi : Rp. -

Capaian :Bantuan Benih Padi 740 Hektar

Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai target

17) Benih Jagung

Lokasi : Poktan Kabupaten Jepara

Anggaran : Rp. -

Realisasi : Rp. -

Capaian :Bantuan Benih Jagung 1000 Hektar

18) Optimalisasi Peningkatan Produksi

Lokasi : Poktan Sumber Muria Desa Gelang Kec. Keling

Anggaran : Rp. -

Realisasi : Rp. -

Capaian :Bantuan Benih Jagung 350 Hektar: 10 Unit

Tidak terdapat permasalahan yang timbul karena kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai target

K. Program dan Kegiatan

Kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan berupa jalan usaha tani
Tahun Anggaran 2023

Rincian Kegiatan :

1) Lokasi : Poktan Karya Mukti V Desa Gelang Kec. Keling

Anggaran : 100.000.000,-

Realisasi : 100.000.000

Kegiatan : 100%, Pembangunan Jalan Usaha Tani

capaian sudah mencapai 100% sehingga tidak terjadi permasalahan yang timbul

L. Program dan Kegiatan

Kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan berupa jalan usaha tani
Tahun Anggaran 2023

Rincian Kegiatan :

1) Lokasi : Poktan Ngudi Rejeki II Desa Tunggul Pandean Kec.
nalumsar

Anggaran : 100.000.000

Realisasi : 100.000.000

Capaian Kegiatan : 100%, Pembangunan Jalan Usaha Tani
capaian sudah mencapai 100% sehingga tidak terjadi permasalahan
yang timbul

M. Program dan kegiatan

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Rincian Kegiatan :

- 1) Lokasi : Poktan Sido Mulyo I Ds. Tanjung Kec. Pakis Aji
Anggaran : 75.000.000
Realisasi : 75.000.000
Capaian Kegiatan : 100%, Rehabilitasi Jaringan Irigas Tersier
capaian sudah mencapai 100% sehingga tidak terjadi permasalahan
yang timbul

N. Program dan kegiatan

Kegiatan Irigasi pertanian dan pembangunan bangunan konservasi dan
antisipasi anomali iklim

Rincian Kegiatan :

- 1) Lokasi : Poktan Sido Mulyo I Ds. Tanjung Kec. Pakis Aji
Anggaran : 150.000.000
Realisasi : 150.000.000
Capaian Kegiatan : 100%, irigasi perpompaan
capaian sudah mencapai 100% sehingga tidak terjadi permasalahan
yang timbul

O. Program dan kegiatan

Kegiatan Irigasi pertanian dan pembangunan bangunan konservasi dan
antisipasi anomali iklim.

- 1) Rincian Kegiatan :
Lokasi : Poktan Sido Mulyo I Ds. Tanjung Kec. Pakis Aji
Anggaran : 100.000.000
Realisasi : 100.000.000
Capaian Kegiatan : 100%, pembangunan dam parit
capaian sudah mencapai 100% sehingga tidak terjadi
permasalahan yang timbul

II. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasades Kabupaten Jepara)

➤ Bantuan Keuangan Khusus Desa

- Dasar Pelaksanaan Tugas.
Perbup Nomor 61 Tahun 2018
- Program :
Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kegiatan :
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sub Kegiatan :
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
- Sumber Dana : APBD Kabupaten
- Jumlah Anggaran : Rp. 398.318.435.250
- Realisasi : Rp. 397.103.803.639
- Permasalahan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tidak terserap 100% di karenakan:
 - 1) Karena ada beberapa desa yang tidak ada pencairan
 - 2) ada beberapa desa yang tidak sesuai dengan menu Perbup 61 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa, sehingga tidak bisa di cairkan
 - 3) Ada beberapa Desa yang tidak sesuai dengan lokasi pembangunan drainase yang bersumber dari Dana Bantuan Keuanagan APBD, sehingga tidak bisa di cairkan
- Solusi:
 - 1) lebih intens melakukan sosialisasi terhadap Petinggi
 - 2) bersurat Kepada Petinggi terkait pengajuan pencairan kalau sudah sesuai dengan Program di Disa tersebut
 - 3) lebih intens melakukan komunikasi melalui Kecamatan.

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH
DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023
(DKPP Kabupaten Jepara)**

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	(DKPP) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	SP DIPA – 018.08.1.633 656/2023 tanggal 26 Januari 2023	Pembangunan Embung Pertanian (Geomembran)	Poktan Manunggal Tani I Desa Tulakan, Donorojo. Gapoktan Sido Dadi Desa Kunir, Keling. Gapoktan Tengguli Desa Tengguli, Bangsri. Poktan Suka Maju II Desa Semat, Kedung. Poktan Sido Mulyo VII Desa Tanjung, Pakis Aji.	Rp 115.000.000 Rp 115.000.000 Rp 115.000.000 Rp 115.000.000 Rp 115.000.000	Rp 115.000.000 Rp 115.000.000 Rp 115.000.000 Rp 115.000.000	100	Bantuan pembangunan embung pertanian (geomembran) 1 paket	100	Tidak ada
			Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian (Jalan Usaha Tani) Irigasi Pertanian	Poktan Karya Mukti 5 Desa Gelang, Keling. Poktan Sumber Muria Desa Gelang, Keling. Desa Tanjung, Pakis Aji.	Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 150.000.000	Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 150.000.000	100 100 99,6	2 paket JUT 1 paket irigasi perpompaan	100	Tidak ada Tidak

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	Desa Tempur, Keling.	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000		1 paket pembangunan DAM Parit	100	ada
		SP DIPA- 125.01.3.690 701/ 2023 15 Agustus 2023	Registrasi Keamanan Pangan Segar	Kabupaten Jepara	Rp 32.327.000	Rp 32.198.991	99,9	Sosialisasi, Fasilitasi uji Laboratorium dan registrasi PSAT	100	Tidak ada
		SP DIPA- 125.01.3.690 701/ 2023 15 Agustus 2023	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kabupaten Jepara	Rp 16.742.000	Rp 16.729.400	100	Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100	Tidak ada
			Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Desa Tunahan, Desa Tengguli dan Desa Dorang Kabupaten Jepara	-	-		Pemanfaatan Pekarangan	100	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SP DIPA.018.08. 4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	Kabupaten Jepara	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100	Monitoring dan Pengawasan Pemanfaatan Bantuan Alsintan	100	Tidak ada
		SP DIPA.018.08. 4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Rp 17.700.000	Rp 17.330.000	97,9	Monitoring dan Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Jepara	97,9	Tidak ada
		SP DIPA.018.08. 4.039158 / 2023 Tanggal	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (E-RDKK)	Kabupaten Jepara	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000	100	Pendataan Petani Penerima Pupuk Bersubsidi Tahun 2024 di Kabupaten	100	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa- lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30 November 2022						Jepara		
		SP DIPA.018.08. 4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (E- VERVAL)	Kabupaten Jepara	Rp 34.936.000	Rp 34.936.000	100	Pendataan Penyaluran Pupuk Bersubsidi setiap Bulan	100	Tidak ada
		SP DIPA.018.08. 4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (AUTP)	Kabupaten Jepara	Rp 16.048.000	Rp 16.008.000	99,8	Sosialisasi kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) , Pendataan Petani pendaftar AUTP	100	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SP DIPA.018.08. 4.039158 / 2023 Tanggal 30 November 2022	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP	Kabupaten Jepara	Rp 56.175.000	Rp 52.970.000	94,3	Penunjang kegiatan untuk kegiatan APBN Ditjen PSP	100	Tidak ada
		SP DIPA - 018.03.4.039 151/2023	Pengawasan, Pembinaan, Monev Sarana Pascapanen TP	Ds. Tengguli, Ds. Dermolo dan Ds. Tubanan	Rp 7.600.000	Rp 7.300.000	96	Penunjang kegiatan untuk kegiatan APBN Ditjen TP	100	Tidak ada
			Kegiatan Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	242 Poktan di Kabupaten Jepara	Rp 129.464.000	Rp 129.464.000	100	Bantuan Alsintan Pascapanen Tanaman Pangan	100	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa- lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyediaan Saprodi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	12 Kelompok Tani di Kab. Jepara	Rp 421.440.000	Rp 421.440.000	100	Pupuk Organik Cair/Pupuk Hayati Cair/Pupuk Organik Padat/Pupuk Hayati Padat/Pembenah Tanah	100	Tidak ada
			Kegiatan Bantuan Lingkup Alat Mesin Pertanian Pra- Panen	Gapoktan Sido Makmur, Desa Tempur Kec. Keling	Rp 136.580.000	Rp 136.580.000	100	Bantuan Alsintan Pra- Panen (4 Unit Traktor Roda 2, 3 Unit Pompa Air dan 10 Unit Hand Sprayer)	100	Tidak ada
			Penyuluhan pertanian	Poktan Tani Makmur II Desa Kecapi Kec. Tahunan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100	Pelatihan Budidaya Tembakau	100	Tidak ada
			Fasilitasi Prasarana Pascapanen Hortikultura	KWT Mukti Rahayu Desa Kelet Kec. Keling	Rp 210.000.000	Rp 210.000.000	100	Bangsai Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	100	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Fasilitasi Prasarana Pascapanen Hortikultura	Kabupaten Jepara	-	-	-	Bantuan Solar Dryer 1 unit	100	Tidak ada
			Sikomandan	Kabupaten Jepara	-	-	-	Pelayanan Inseminasi Buatan (Sikomandan), Target : 16.700 ekor; Realisasi : 13.424 ekor	80,3 8	Tidak ada
			Penandaan ternak	Poktan Sido Mukti Desa Geneng Kec. Batealit	-	-	-	Pendataan dan Penandaan Ternak Sapi dan Kerbau Target : 18.000 ekor; Realisasi : 18.000 ekor (100 %)	100	Tidak ada
			Rawat Ratoon Tebu	Poktan Sido Makmur III Desa Tempur Kec. Keling	-	-	-	Bantuan Pupuk ZA 1,3 Ton	100	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Alat Pengolahan Kopi	Poktan Sido Makmur III Desa Tempur Kec. Keling	-	-	-	Bantuan Alat Roasting, Grinder, dan Sealer	100	Tidak ada
			Alat Barista Kopi	Poktan Kabupaten Jepara	-	-	-	Bantuan Alat Barista Kopi 1 Paket	100	Tidak ada
			Benih Padi	Poktan Kabupaten Jepara	-	-	-	Bantuan Benih Padi 225 Hektar	100	Tidak ada
			Benih Padi	Poktan Kabupaten Jepara	-	-	-	Bantuan Benih Padi 599 Hektar	100	Tidak ada
			Benih Padi	Poktan Kabupaten Jepara	-	-	-	Bantuan Benih Padi 3000 Hektar	100	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Optimalisasi Peningkatan Produksi	Poktan Kabupaten Jepara	-	-	-	Bantuan Benih Padi 740 Hektar	100	Tidak ada
			Benih Jagung	Poktan Kabupaten Jepara	-	-	-	Bantuan Benih Jagung 1000 Hektar	100	Tidak ada
			Optimalisasi Peningkatan Produksi	Poktan Sumber Muria Desa Gelang Kec. Keling	-	-	-	Bantuan Benih Jagung 350 Hektar: 10 Unit	100	Tidak ada
		SP DIPA – 018.08.1.633 656/2023 tanggal 30 November 2022	Kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan berupa jalan usaha tani Tahun Anggaran 2023.	Poktan Karya Mukti V Desa Gelang Kec. Keling	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	100	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SP DIPA – 018.08.1.633 656/2023 tanggal 30 November 2022	Kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan berupa jalan usaha tani Tahun Anggaran 2023	Poktan Ngudi Rejeki II Desa Tunggul Pandean Kec. nalumsari	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	100	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100	Tidak ada
		SP DIPA – 018.08.1.633 656/2023 tanggal 30 November 2022	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Poktan Sido Mulyo I Ds. Tanjung Kec. Pakis Aji	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	100	Rehabilitasi Jaringan Irigas Tersier	100	Tidak ada
		SP DIPA – 018.08.1.633 656/2023 tanggal 26	Kegiatan Irigasi pertanian dan pembangunan	Poktan Sido Mulyo I Ds. Tanjung Kec. Pakis Aji	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	100	Irigasi Perpompaan	100	Tidak ada

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasa lahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Januari 2023 SP DIPA – 018.08.1.633 656/2023 tanggal 26 Januari 2023	bangunan konservasi dan antisipasi anomali iklim Kegiatan Irigasi pertanian dan pembangunan bangunan konservasi dan antisipasi anomali iklim		Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	100	Pembangunan Dam Parit	100	Tidak ada

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN (PENUGASAN)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes Kabupaten Jepara)

No	URUSAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian kegiatan	lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan & solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINSOSPERMADES (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Jepara.	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 Nomor: DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2023	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.	Lokasi : Kabupaten Jepara	398.318.435.250 370.532.154.000 312.659.404.000 57.872.750.000	397.103.803.639 370.194.354.000 312.659.404.000 57.534.950.000	99,97 99,99 100,00 99,42			Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tidak terserap 100% di karenakan Bantuan keuangan khusus desa (Sarpras) sebesar Rp 300.000.000,- yg

										terdiri dari desa karimun jawa, desa Sumanding dan desa teluk wetan dan Bantuan keuangan khusus desa(RT/RW) sebesar Rp 37.800.000,- tidak mengajukan pencairan

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan SDM sesuai dengan standar teknis yang diberikan bobot sebesar 20%. Sementara capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja yang diberikan bobot 80%. Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

1. Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia)
2. Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP SPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

$\text{IP SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{BP})$

Keterangan:

IP SPM	=	Indeks pencapaian SPM di masing–masing jenis SPMsesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
Persentase mutu Minimal layanan dasar	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.
Persentase pencapaian penerima layanan dasar	=	Persentase pencapaian yang diperoleh melaluiindikator dengan target yang ditetapkan di dalam lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
BM	=	Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
BP	=	Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Dengan adanya indeks pencapaian ini, memberikan kategori terhadap pencapaian SPM, yaitu: Tuntas Paripurna, Tuntas Utama, Tuntas Madya, Tuntas Pratama, Tuntas Muda dan Belum Tuntas sesuai ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah yang dijabarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)

NO.	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2.	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3.	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4.	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5.	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6.	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang PenerapanSPM

Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Urusan Sosial.

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar
- Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;

b. Pendidikan Dasar;

c. Pendidikan Kesetaraan.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
- Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berikut merupakan tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM Pendidikan tahun 2023. Berdasarkan tabel dibawah ini, target (jumlah orang yang akan terlayani) juga mendapatkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarnya.

Tabel
Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Urusan PendidikanKabupaten Jepara
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	35.959	Desember 2023	Angka partisipasi sekolah	35.959	Desember 2023	36.199.379.100
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	465	Desember 2023	
					Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	1.830	Desember 2023	
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	17	Desember 2023	
					Kecukupan formasi guru ASN	23	Desember 2023	
					Indeks distribusi guru	3.777	Desember 2023	
					Proporsi PTK bersertifikat	948	Desember 2023	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Proporsi PTK penggerak	23	Desember 2023	
					Pengalaman pelatihan guru	23	Desember 2023	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasa	186.140	Desember 2023	SD			161.093.364.018
					Angka partisipasi kasar	124140	Desember 2023	
					Angka partisipasi sekolah	124140	Desember 2023	
					Angka partisipasi murni	124140	Desember 2023	
					Kemampuan literasi	73,52	Desember 2023	
					Kemampuan numerasi	58,56	Desember 2023	
					Perbedaan Skor Literasi	6,66	Desember 2023	
					Perbedaan Skor numerasi	18,23	Desember 2023	
					Indeks iklim keamanan	69,27	Desember 2023	
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	70,2 & 56,07	Desember 2023	
					Kecukupan formasi guru ASN	4509	Desember 2023	
					Indeks distribusi guru	4509	Desember 2023	
					Proporsi PTK bersertifikat	2643	Desember 2023	
					Proporsi PTK penggerak	55	Desember 2023	
					Pengalaman pelatihan guru	4509	Desember 2023	
					SMP		Desember 2023	
					Angka partisipasi kasar	62000	Desember 2023	
					Angka partisipasi sekolah	62000	Desember 2023	
					Angka partisipasi murni	62000	Desember 2023	
					Kemampuan literasi	73,35	Desember 2023	
					Kemampuan numerasi	52,80	Desember 2023	
					Perbedaan skor literasi	9,08	Desember 2023	
					Perbedaan skor numerasi	8,59	Desember 2023	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Indeks iklim keamanan	66,6	Desember 2023	
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	67,59 & 55,41	Desember 2023	
					Kecukupan formasi guru ASN	1190	Desember 2023	
					Indeks distribusi guru	1190	Desember 2023	
					Proporsi PTK bersertifikat	859	Desember 2023	
					Proporsi PTK penggerak	49	Desember 2023	
					Pengalaman pelatihan guru	1190	Desember 2023	
3 .	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.799	Desember 2023	Angka partisipasi kasar	4.797	Desember 2023	56.437.406.000
					Angka partisipasi sekolah	4.797	Desember 2023	
					Angka partisipasi murni	4.797	Desember 2023	
					Kemampuan literasi	36.16	Desember 2023	
					Kemampuan numerasi	33.88	Desember 2023	
					Indeks iklim keamanan	66.07	Desember 2023	
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	63.08 & 54.55	Desember 2023	
					Kecukupan formasi guru ASN	39	Desember 2023	
					Indeks distribusi guru	39	Desember 2023	
					Proporsi PTK bersertifikat	22	Desember 2023	
					Proporsi PTK penggerak	-	Desember 2023	
					Pengalaman pelatihan guru	39	Desember 2023	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2023

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan PendidikanKabupaten Jepara

Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	325.704.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	99.143.100
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	126.338.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	623.566.000
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	256.332.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	60.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	113.952.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.523.424.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	410.000.000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	26.560.920.000
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0
2.	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	667.012.980
		Penambahan Ruang Kelas Baru	746.000.000
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	270.597.000
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	623.000.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.597.563.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	10.144.479.138
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	811.672.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	160.000.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	879.041.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	220.000.000
		Pengadaan Mebel Sekolah	877.790.000
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	300.000.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	674.750.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.300.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	435.425.500
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	680.500.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12.651.604.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	90.000.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.547.160.000

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.000.000
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.301.146.000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		Penambahan Ruang Kelas Baru	1.290.000.000
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.087.674.600
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.326.695.400
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	551.046.300
		Pembangunan Laboratorium	8.099.345.400
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	364.039.000
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.908.965.800
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.400.430.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	210.308.600
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	298.429.300
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	752.895.600
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.158.428.900
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.640.923.000
		Pengadaan Mebel Sekolah	1.360.365.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	800.000.000
		Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	331.771.500
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	450.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	500.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	335.200.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.142.750.000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.480.165.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	77.000.000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.364.190.000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	45.000.000
3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	118.660.000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.003.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	24.106.916.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	555.000.000
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.481.330.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.172.500.000

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara,

4. Dukungan Personil
- Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Guna tercapainya pelayanan Pendidikan dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.4
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Jepara Tahun 2023

NO	BIDANG	Jenis Kelamin		TOTAL (Orang)
		L	P	
1	Sekretariat	11	5	16
2	PAUD dan PNF	4	5	9
3	SD	5	3	8
4	SMP	4	4	8
5	Pemuda dan Olahraga	5	2	7
6	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	2	9
7	Satkordikcam	26	17	43
8	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (dinas)	7	1	8
9	Fungsional Tertentu / Pengawas / Penilik (satkor)	43	9	52
10	Guru PAUD , SD, SMP & Kesetaraan	2.429	7.669	10.098
JUMLAH		2.572	7.735	10.307

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2023

5. Hasil capaian
- Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan PendidikanKabupaten Jepara Tahun
2023

N o	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisa si	Capaia n (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)

1.	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	35.959	35.959	100%	36.199.379.100	36.145.654.440	99,71%
2.	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	186.140	186.140	100%	161.093.364.018	156.928.790.358	97,41%
3.	Jumlah penduduk usia 7– 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.797	4.797	100%	56.437.406.000	55.706.019.722	98,70%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2023

Pencapaian SPM dihitung dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian penerima pelayanan dasar diperoleh dari target dan indikator kinerja, sedangkan capaian mutu pelayanan dasar diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Adapun perhitungan IP SPM dan rekapitulasinya diuraikan pada Tabel 3.1.5.1 dan 3.1.5.2 sebagai berikut :

Tabel 3.1.5.1 Indeks Pencapaian (IP) SPM Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten Jepara Tahun 2023

1. Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yg harus dilayani (Orang)	Jumlah yg terlayani (Orang)		
1.	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	35.959	35.959	100,00	80,00

2.	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	186.140	186.140	100,00	80,00
3.	Jumlah penduduk usia 7– 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.797	4.797	100,00	80,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2023

2. Capaian Mutu Layanan Dasar

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yg Tersedia		
1	Pendidikan Dasar Usia Dini				
	Angka partisipasi sekolah	35.959	35.959	100,00%	20,00%
	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	465	465	100,00%	20,00%
	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	1.830	1.830	100,00%	20,00%
	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	17	17	100,00%	20,00%
	Kecukupan formasi guru ASN	23	23	100,00%	20,00%
	Indeks distribusi guru	3.777	3.777	100,00%	20,00%
	Proporsi PTK bersertifikat	948	948	100,00%	20,00%
	Proporsi PTK penggerak	23	23	100,00%	20,00%
	Pengalaman pelatihan guru	23	23	100,00%	20,00%
2	Pendidikan Dasar				
	SEKOLAH DASAR				
	Angka partisipasi kasar	124.140	122.943	99,04%	19,81%
	Angka partisipasi sekolah	124.140	124.140	100,00%	20,00%
	Angka partisipasi murni	124.140	123.553	99,53%	19,91%
	Kemampuan literasi	74	74	100,00%	20,00%
	Kemampuan numerasi	59	59	100,00%	20,00%
	Perbedaan Skor Literasi	7	7	100,00%	20,00%
	Perbedaan Skor numerasi	18	18	100,00%	20,00%
	Indeks iklim keamanan	69	69	100,00%	20,00%
	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	70,2 & 56,07	70,2 & 56,07	100,00%	20,00%
	Kecukupan formasi guru ASN	4.509	4.509	100,00%	20,00%
	Indeks distribusi guru	4.509	4.509	100,00%	20,00%
	Proporsi PTK bersertifikat	2.643	2.643	100,00%	20,00%
	Proporsi PTK penggerak	55	55	100,00%	20,00%
	Pengalaman pelatihan guru	4.509	4.509	100,00%	20,00%

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				
Angka partisipasi kasar	62.000	57.581	92,87%	18,57%
Angka partisipasi sekolah	62.000	62.000	100,00%	20,00%
Angka partisipasi murni	62.000	54.567	88,01%	17,60%
Kemampuan literasi	73	73	100,00%	20,00%
Kemampuan numerasi	53	53	100,00%	20,00%
Perbedaan skor literasi	9	9	100,00%	20,00%
Perbedaan skor numerasi	9	9	100,00%	20,00%
Indeks iklim keamanan	67	67	100,00%	20,00%
Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	67,59 & 55,41	67,59 & 55,41	100,00%	20,00%
Kecukupan formasi guru ASN	1.190	1.190	100,00%	20,00%
Indeks distribusi guru	1.190	1.190	100,00%	20,00%
Proporsi PTK bersertifikat	859	859	100,00%	20,00%
Proporsi PTK penggerak	49	49	100,00%	20,00%
Pengalaman pelatihan guru	1.190	1.190	100,00%	20,00%
3 . Pendidikan Kesetaraan				
Angka partisipasi kasar	4.797	4.797	100,00%	20,00%
Angka partisipasi sekolah	4.797	4.797	100,00%	20,00%
Angka partisipasi murni	4.797	4.797	100,00%	20,00%
Kemampuan literasi	36.16	36.16	100,00%	20,00%
Kemampuan numerasi	33.88	33.88	100,00%	20,00%
Indeks iklim keamanan	66.07	66.07	100,00%	20,00%
Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	63.08 & 54.55	63.08 & 54.55	100,00%	20,00%
Kecukupan formasi guru ASN	39	39	100,00%	20,00%
Indeks distribusi guru	39	39	100,00%	20,00%
Proporsi PTK bersertifikat	22	22	100,00%	20,00%
Pengalaman pelatihan guru	39	39	100,00%	20,00%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2023

Tabel
Rekapitulasi Indeks
Pencapaian (IP) SPM
Bidang Pendidikan
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	100	Tuntas Paripurna
2.	Pendidikan Dasar	99,85	Tuntas Tuntas Utama
3.	Pendidikan Kesetaraan	100	Tuntas Paripurna
	IP SPM Bidang Pendidikan	99,95%	Tuntas Utama

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, 2023

6. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Jepara

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden years) masih rendah. 2. Akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. 3. Masih ada desa yang kurang proporsional dalam jumlah lembaga PAUD dibanding masyarkat yang dilayaninya.	1. Pembentukan Lembaga PAUD holistik integratif (PAUD HI), 2. penguatan kelembagaan penyelenggara PAUD. 3. peningkatan kualitas pendamping atau guru yang terlibat dalam proses pembelajaran Anak Usia Dini; 4. peningkatan kualitas bahan pembelajaran bagi anak usia dini 5. peningkatan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PAUD.
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1. belum maksimalnya capaian program wajib belajar sembilan tahun masih tinggi 2. masih relatif rendahnya angka partisipasi murni SMP/MTs/KPB dan angka melanjutkan dari SD/MI/KPA ke SMP/MTs/KPB atau sederajat	1. Membuat Peraturan Bupati Jepara tentang Wajib Belajar 12 Tahun sebagai pedoman teknis penyelenggaraan wajib belajar 12 2. Pencegahan anak putus sekolah, penyelenggaraan Paket C vokasi terintegrasi
3.	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Naiknya Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	Disusun rencana aksi daerah, yang melibatkan OPD terkait, pemerintah desa, penyusunan peraturan bupati tentang wajib belajar dua belas tahun, dan pembentukan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan yang diberi tugas dan kewenangan menangani ATS.

B. URUSAN KESEHATAN

1. Jenis pelayanan dasar

Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berikut merupakan tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM Kesehatan tahun 2023. Berdasarkan tabel dibawah ini, target (jumlah orang yang akan terlayani) juga mendapatkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarnya.

Target Dan Indikator Kinerja
Pencapaian SPM Bidang Urusan
Kesehatan Kabupaten Jepara
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan	19.557	Desember 2023	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	19.557	Desember 2023	2.210.109.060
					2 . Tablet tambah darah	19.557		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		an antenatal sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun			3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	19.557		
					4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	19.557		
					5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Golongan Darah	19.557		
					6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	19.557		
					7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	19.557		
					8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	19.557		
					9 . Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan	313		
					10 . Bidan	724		
					11 . Perawat	1.485		
					12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali	19.557		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					pada trimester ketiga)			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran ibu bersalin yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	17.925	Desember 2023	1 . Formulir Partograf	17.925	Desember 2023	617.227.110
					2 . Kartu ibu (rekam medis)	17.925		
					3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	17.925		
					4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	313		
					5 . Bidan	724		
					6 . Perawat	1.463		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran bayi baru lahir yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu	17.905	Desember 2023	1 . Vaksin Hepatitis B0	17.905	Desember 2023	351.479.410
					2 . Vitamin K1 injeksi	17.905		
					3 . Salep/tetes mata antibiotik	17.905		
					4 . Formulir bayi baru lahir	17.905		
					5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	17.905		
					6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	17.905		
					7 . Dokter/dokter spesialis Anak	311		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		tahun			8 . Bidan	724		
					9 . Perawat	1.485		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran balita yang akan dilayani di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	93.257	Desember 2023	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	93.257	Desember 2023	478.063.360
					2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	93.257		
					3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	93.257		
					4 . Vitamin A Biru	22.163		
					5 . Vitamin A Merah	71.904		
					6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	93.257		
					7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	23.314		
					8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	15.543		
					9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	23.314		
					10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	23.314		
					11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	11.657		
					12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	11.657		
					13 . Vaksin imunisasi lanjutan :	23.314		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					DPT -HB - Hib			
					14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	11.657		
					15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	11.657		
					8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	93.257		
					9 . Peralatan Anafilaktik	93.257		
					10 . Dokter	301		
					11 . Bidan	724		
					12 . Perawat	1.485		
					13 . Ahli Gizi	70		
					14 . Kader Kesehatan	5.978		
					15 . Guru PAUD	3.777		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar yang akan dilayani di wilayah kerja	41.818	Desember 2023	1 . Buku raport kesehatan ku	41.818	Desember 2023	408.273.640
					2 . Buku pemantauan kesehatan	41.818		
					3 . Kuesioner skrining kesehatan	41.818		
					4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	41.818		
					5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan	41.818		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		dalam kurun waktu satu tahun			kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah			
					6 . Dokter/Dokter gigi	380		
					7 . Bidan	724		
					8 . Perawat	1.485		
					9 . Ahli Gizi	70		
					10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	93		
					11 . Kader Kesehatan	5.978		
					12 . Guru	6.594		
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran usia 15-59 tahun yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	799.904	Desember 2023	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	799.904	Desember 2023	468.426.020
					2 . Alat ukur berat badan	634		
					3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	634		
					4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	634		
					5 . Alat : Tensimeter	634		
					6 . Alat : Glukometer	31.962		
					7 . Alat : Tes strip gula darah	799.904		
					8 . Alat : Lancet	799.904		
					9 . Alat : Kapas alkohol	799.904		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					10 . Alat : KIT IVA Tes	799.904		
					11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	799.904		
					12 . Dokter	301		
					13 . Bidan	724		
					14 . Perawat	1.485		
					15 . Ahli Gizi	70		
					16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	93		
					17 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	915		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran usia 60 tahun ke atas yang akan dilayani dalam kurun	148.084	Desember 2023	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	5.923	Desember 2023	332.944.735
2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	148.084							

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		waktu satu tahun			3 . Buku kesehatan lansia	148.084		
					4 . Dokter	301		
					5 . Bidan	724		
					6 . Perawat	1.485		
					7 . Ahli Gizi	70		
					8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	93		
					9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih	915		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita hipertensi yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	361.730	Desember 2023	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	361.730	Desember 2023	34.208.510
					2 . Tensimeter	634		
					3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	361.730		
					4 . Dokter	301		
					5 . Bidan	724		
					6 . Perawat	1.485		
					7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	93		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan	30.570	Desember 2023	1 . Alat : Glukometer	1.223	Desember 2023	57.752.120
					2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	30.570		
					3 . Alat : Kapas	30.570		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita DM yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun			Alkohol			
					4 . Alat : Lancet	30.570		
					5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	30.570		
					6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	30.570		
					4 . Dokter	301		
					5 . Bidan	724		
					6 . Perawat	1.485		
					7 . Ahli Gizi	70		
					8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	93		
					10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat		
					2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	2.454		
					3 . Penyediaan formulir	2.454		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		tahun			pencatatan dan pelaporan			
					4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2.454		
					1. Dokter	26		
					2. Perawat terlatih jiwa	1		
					3. Tenaga kesehatan lainnya	1		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah penderita TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran penderita TB yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun	9.020	Desember 2023	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	9.020	Desember 2023	794.936.415
					2 . Reagen Zn TB	1.804		
					3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	9.020		
					4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	9.020		
					5 . Catridge tes cepat molekuler	9.020		
					6 . Formulir pencatatan dan	9.020		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					pelaporan			
					7 . Pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP)	82		
					8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	315		
					9 . Perawat	1.485		
					10 . Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	166		
					11 . Penata Rontgen	40		
					12 . Tenaga kesehatan masyarakat	93		
					13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	915		
12	Pelayanan Kesehatan pd Orang Berisiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah sasaran	26.022	Desember 2023	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	22.994	Desember 2023	742.262.000
					2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	22.994		
					3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester,	22.994		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		orang berisiko terinfeksi HIV yang akan dilayani dalam kurun waktu satu tahun			Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			
					4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	22.994		
					5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	408		
					6 . Perawat	1.485		
					7 . Bidan	724		
					8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	166		
					9 . Tenaga kesehatan masyarakat	93		
					10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	915		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2023 terdiri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Alokasi Anggaran
Pemenuhan SPM Bidang
KesehatanKabupaten
Jepara Tahun 2023

No	Jenis PelayananDasar	Anggaran			
		APBD	DAK	BLUD	Total
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	137.550.000	1.680.522.100	2.210.109.060	2.210.109.060
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	115.982.000	170.680.000	617.227.110	617.227.110
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91.290.000	-	351.479.410	351.479.410
4	Pelayanan Kesehatan Balita	66.040.000	223.800.000	478.063.360	478.063.360
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	43.430.000	241.062.000	408.273.640	408.273.640
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	88.510.000	127.650.000	468.426.020	468.426.020
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	51.150.000	136.010.000	332.944.735	332.944.735
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.885.000	-	34.208.510	34.208.510
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.000.000	-	57.752.120	57.752.120
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	24.080.000	89.800.000	182.511.405	182.511.405
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	38.260.000	647.630.000	794.936.415	794.936.415
12	Pelayanan Kesehatan pd Orang Berisiko Terinfeksi HIV	85.000.000	420.000.000	747.262.000	747.262.000
JUMLAH		765.177.000	3.737.154.100	2.180.862.685	6.683.193.785

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

Alokasi anggaran pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Jepara Tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.683.193.785. Sumber anggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang urusan Kesehatan pada tahun 2023 berasal dari APBD, DAK, dan BLUD.

4. Dukungan Personil

Guna tercapainya pelayanan kesehatan dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Dukungan Personil SPM Bidang
KesehatanKabupaten Jepara Tahun
2023

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Jepara	Puskemas	22	Dokter spesialis kebidanan	12
		Rumah Sakit	6	Dokter spesialis paru	2
		Klinik	64	Dokter spesialis penyakit dalam	12
				Dokter spesialis kulit dan kelamin	5
				Dokter speasialis anak	10
				Dokter	301
				Dokter Gigi	79
				Perawat	1.485
				Bidan	721
				Ahli Gizi	70
				Tenaga Kemas	93
				Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	166
				Penata Rontgen	40
				Kader Kesehatan	5.978

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar

Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Jepara Tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.557	19.557	100,00	2.210.109.060	1.844.993.700	83,48
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	17.925	17.925	100,00	617.227.110	350.973.830	56,86
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	17.905	17.905	100,00	351.479.410	222.049.980	63,18
4	Pelayanan Kesehatan Balita	93.257	93.257	100,00	478.063.360	553.742.120	115,83
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	41.818	40.293	96,35	408.273.640	313.448.690	76,77
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	799.047	760.850	95,22	468.426.020	424.889.040	90,71
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	148.084	143.685	97,03	332.944.735	229.740.805	69,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	361.730	339.375	93,82	34.208.510	33.791.900	98,78
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30.570	30.570	100,00	57.752.120	57.361.150	99,32
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	2.454	2.419	98,57	182.511.405	145.710.450	79,84

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.020	8.900	98,67	794.936.415	332.318.890	41,80
12	Pelayanan Kesehatan pd Orang Berisiko Terinfeksi HIV	22.994	22.994	100,00	747.262.000	722.775.976	96,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

Pencapaian SPM dihitung dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian penerima pelayanan dasar diperoleh dari target dan indikator kinerja, sedangkan capaian mutu pelayanan dasar diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis. Adapun perhitungan Capaian Indeks IP SPM diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel 3
Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM
Pelayanan Kesehatan
Ibu Hamil

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan KesehatanIbu Hamil	19.557	19.557	100	80
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			100	20

1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1.996	1.996	100	
2 . Tablet tambah darah	19.557	19.557	100	
3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	19.557	19.557	100	
4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	19.557	19.557	100	
5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Golongan Darah	19.557	19.557	100	
6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	19.557	19.557	100	
7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	19.557	19.557	100	
8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	19.557	19.557	100	
9. Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan	313	313	100	
10. Bidan	724	724	100	
11. Perawat	1.485	1.485	100	
12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	19.557	19.557	100	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel
Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM
Pelayanan Kesehatan
Ibu Bersalin

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan KesehatanIbu Bersalin	17.925	17.925	100	80
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			100	20
	1. Formulir Partograf	17.925	17.925	100	
	2. Kartu ibu (rekammedis)	17.925	17.925	100	
	3. Buku Kesehatan Ibudan Anak (KIA)	17.925	17.925	100	
	4. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	313	313	100	
	5. Bidan	724	724	100	
	6. Perawat	1.485	1.485	100	

3. Pelayanan Kesehatan bayi baru Lahir

Tabel

Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM
Pelayanan Kesehatan
bayi baru Lahir

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan bayi baru Lahir	17.905	17.905	100	80
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase(4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan bayi baru Lahir			100	20
	1 . Vaksin Hepatitis B0	17.905	17.905	100	
	2 . Vitamin K1 injeksi	17.905	17.905	100	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	17.905	17.905	100	
	4 . Formulir bayi baru lahir	17.905	17.905	100	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	17.905	17.905	100	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	17.905	17.905	100	
	7. Dokter/dokter spesialis Anak	311	311	100	
	8. Bidan	724	724	100	
	9. Perawat	1.485	1.485	100	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel

Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM
Pelayanan Kesehatan
Balita

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan KesehatanBalita	93.257	93.257	100	80
	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu

NO.		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Balita			100	20
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	93.257	93.257	100	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	93.257	93.257	100	
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	93.257	93.257	100	
	4 . Vitamin A Biru	22.163	22.163	100	
	5 . Vitamin A Merah	71.094	71.094	100	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	93.257	93.257	100	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	23.314	23.314	100	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	15.543	15.543	100	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	23.314	23.314	100	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	23.314	23.314	100	
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	11.657	11.657	100	
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	11.657	11.657	100	
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	23.314	23.314	100	
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	11.657	11.657	100	
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	11.657	11.657	100	
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	93.257	93.257	100	
	17 . Peralatan Anafilaktik	93.257	93.257	100	
	18. Dokter	301	301	100	
	19. Bidan	724	724	100	
	20. Perawat	1.485	1.485	100	
	21. Ahli Gizi	70	70	100	
	22. Kader Kesehatan	5.978	5.978	100	
	23. Guru PAUD	3.777	3.777	100	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Tabel
Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM
Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Pendidikan
Dasar

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase(4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia PendidikanDasar	41.818	40.293	96,35	77,08
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase(4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasayang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			98,48	19,70
	1 . Buku raport kesehatanku	41.818	40.293	96,35	
	2 . Buku pemantauan kesehatan	41.818	40.293	96,35	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	41.818	40.293	96,35	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	41.818	40.293	96,35	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	41.818	40.293	96,35	
	6. Dokter/Dokter gigi	380	380	100	
	7. Bidan	724	724	100	
	8. Perawat	1.485	1.485	100	
	9. Ahli Gizi	70	70	100	
	10.Tenaga Kesehatan Masyarakat	93	93	100	
	11. Kader Kesehatan	5.978	5.978	100	
	12. Guru	6.594	6.594	100	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Tabel

Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM
Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Produktif

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan KesehatanPada Usia Produktif	799.047	799.047	95.22	76.18
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			98,03	19,61
1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	799.904	760.580	95,22	
2 . Alat ukur berat badan	634	634	100	
3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	634	634	100	
4 . Alat : Alat ukur lingkar perut	634	634	100	
5 . Alat : Tensimeter	634	634	100	
6 . Alat : Glukometer	31.962	30.434	95,22	
7 . Alat : Tes strip gula darah	799.904	760.580	95,22	
8 . Alat : Lancet	799.904	760.580	95,22	
9 . Alat : Kapas alkohol	799.904	760.580	95,22	
10 . Alat : KIT IVA Tes	799.904	760.580	95,22	
11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	799.904	760.580	95,22	
12. Dokter	301	301	100	
13. Bidan	724	724	100	
14. Perawat	1.485	1.485	100	
15. Ahli Gizi	70	70	100	
16. Tenaga Kesehatan Masyarakat	93	93	100	
17.Tenaga Non Kesehatan Terlatih	915	915	100	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Tabel

Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM

Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Usia Lanjut

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan KesehatanPada Usia Lanjut	148.084	143.685	97,03	77,62
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			99,01	19,80
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	5.923	5.747	97,03	
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated	148.084	143.685	97,03	

Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)			
3 . Buku kesehatan lansia	148.084	143.685	97,03
4. Dokter	301	301	100
5. Bidan	724	724	100
6. Perawat	1.485	1.485	100
7. Ahli Gizi	70	70	100
8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	93	93	100
9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	915	915	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tabel 3.2.5.8

Indeks Pencapaian

(IP) Target SPM

Pelayanan

Kesehatan Penderita

Hipertensi

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	361.730	339.375	93.82	75.06
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			97,68	19,54
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	361.730	339.375	93,82	
	2 . Tensimeter	634	634	100	
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	361.730	339.375	93,82	
	4. Dokter	301	301	100	
	5. Bidan	724	724	100	
	6. Perawat	1.485	1.485	100	
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	93	93	100	
	8. Obat Hipertensi	361.730	339.375	93,82	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tabel
Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM
Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase(4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	30.570	30.570	100	80
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase(4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			100	20
	1 . Alat : Glukometer	1.223	1.223	100	
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	30.570	30.570	100	
	3 . Alat : Kapas Alkohol	30.570	30.570	100	
	4 . Alat : Lancet	30.570	30.570	100	
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	30.570	30.570	100	
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	30.570	30.570	100	
	7. Dokter	301	301	100	
	8. Bidan	724	724	100	
	9. Perawat	1.485	1.485	100	
	10. Ahli Gizi	70	70	100	
	11.Tenaga Kesehatan Masyarakat	93	93	100	
	12.Obat Diabetes Melitus	30.570	30.570	100	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Tabel
Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM
Pelayanan
Kesehatan Orang
Dengan Gangguan
Jiwa Berat

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2.454	2.419	98,57	78,86
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			99,19	19,84
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2.454	2.419	98,57	
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	2.454	2.419	98,57	
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2.454	2.419	98,57	
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2.454	2.419	98,57	
	5. Dokter	26	26	100	
	6. Perawat terlatih jiwa	1	1	100	
	7. Tenaga kesehatan lainnya	1	1	100	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2023

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel

Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM
Pelayanan
Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.020	8.900	98,67	78,94
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			99,39	19,88
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	9.020	8.900	98,67	
	2 . Reagen Zn TB	1.804	1.780	98,67	

3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	9.020	8.900	98,67	
4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	9.020	8.900	98,67	
5 . Catridge tes cepat molekuler	9.020	8.900	98,67	
6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	9.020	8.900	98,67	
7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	82	82	100	
8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	315	315	100	
9. Perawat	1.485	1.485	100	
10. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	166	166	100	
11. Penata Rontgen	40	40	100	
12. Tenaga kesehatan masyarakat	93	93	100	
13. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	915	915	100	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

12. Pelayanan Kesehatan pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV

Tabel

Indeks Pencapaian
(IP) Target SPM
Pelayanan
Kesehatan pada
Orang Berisiko
Terinfeksi HIV

NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasayang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	22.994	22.994	100	80
NO.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks PencapaianMutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasayang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Kesehatan pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV			100	20
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	22.994	22.994	100	
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	22.994	22.994	100	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang	22.994	22.994	100	

sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai				
4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	22.994	22.994	100	
5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	408	408	100	
6. Perawat	1.485	1.485	100	
7. Bidan	724	724	100	
8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	166	166	100	
9. Tenaga kesehatan masyarakat	93	93	100	
10. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	915	915	100	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 2023

Tabel
 Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANANDASAR	IP Layanan(%)	IP Mutu(%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80	20	100	Tuntas Paripurna
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80	20	100	Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80	20	100	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	80	20	100	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	77,08	19,70	96,78	Tuntas Utama
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaProduktif	76,18	19,61	95,78	Tuntas Utama
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	77,62	19,80	97,43	Tuntas Utama
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	75,06	19,54	94,59	Tuntas Utama
9.	Pelayanan KesehatanPenderita Diabetes Melitus	80	20	100	Tuntas Paripurna
10.	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	78,86	19,84	98,70	Tuntas Utama
11.	Pelayanan Kesehatan OrangTerduga Tuberkulosis	78,94	19,88	98,81	Tuntas Utama
12.	Pelayanan Kesehatan pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	80	19,74	100	Tuntas Paripurna

NO.	JENIS PELAYANANDASAR	IP Layanan(%)	IP Mutu(%)	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
BIDANG URUSAN KESEHATAN				98,51	Tuntas Utama

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang kesehatan tahun 2023 sebesar 98,51% dengan kategori Tuntas Utama. Indeks Pencapaian SPM dihitung dari capaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% ditambah dengan penyediaan mutu layanan dasar dengan bobot 20%. Terdapat 12 (dua belas) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, yang mencapai target 100% ada 6 (enam) indikator, yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan pada balita, pelayanan kesehatan pada penderita DM, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Adapun yang mempunyai capaian kurang dari 100% ada 6 (enam) indikator yaitu pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang dengan terduga TB.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM bidang kesehatan baik permasalahan eksternal maupun internal adalah sebagai berikut:

Tabel Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan Kabupaten JeparaTahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
INTERNAL			

		1. Belum optimalnya kelengkapan data dan ketepatan waktu pelaporan 2. Terdapat perubahan beberapa data sasaran, dimana pada awalnya data sasaran menggunakan data estimasi, sedangkan pada akhir tahun diubah menjadi angka riil. 3. Sulitnya menghitung kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. 4. Tenaga pelaksana pelayanan SPM masih merangkap pekerjaan lain dan terkadang berganti-ganti.	1. Penguatan komitmen dalam pelaporan data SPM. 2. Adanya SK perubahan data sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhir tahun berjalan. 3. Adanya pelatihan perhitungan kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi. 4. Pembagian tupoksi yang jelas dan pelatihan rutin pada sumber daya yang melaksanakan SPM.
EKSTERNAL			
		1. Belum ada pilah anggaran spesifik untuk SPM dari anggaran BLUD 2. Belum ada monitoring dan evaluasi rutin penerapan SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten	1. Integrasi anggaran BLUD spesifik untuk SPM 2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala penerapan SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2023

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel Target dan Indikator Kinerja
Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan
Umum Kabupaten Jepara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Presentase rumah tangga yang terlayani air minum layak	384,405	Desember 2023	Presentase rumah tinggal yang dapat mengakses air bersih	384,405	Desember 2023	14,871,116,000
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Presentase rumah tangga yang terlayani sanitasi	300,851	Desember 2023	Presentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	300,851	Desember 2023	15,805,830,000

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2023

Target yang disampaikan pada data diatas merupakan target yang diharapkan dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2023 dan anggaran yang disampaikan merupakan anggaran perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu sebesar Rp. 14,871,116,000 dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp. 15,805,830,000.

3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Jepara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Penyusunan, Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	458.000.000
2		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	292.010.000
3		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	14.121.106.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
4	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Penyusunan, Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	275.000.000
5		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	416.440.000
6		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	15.114.390.000

Alokasi anggaran yang disampaikan merupakan alokasi anggaran perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yaitu sebesar Rp. 14,871,116,000 dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp. 15,805,830,000

4. Dukungan Personil

Guna tercapainya pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya manusia, dengan rincian sebagai berikut:

Dukungan Personil Pemenuhan SPM

Bidang Urusan Pekerjaan UmumKabupaten
Jepara Tahun 2023

NO	Jenis Tenaga	Jumlah (Orang)
	Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Jepara	
1.	Kepala Bidang dan Sub Koordinator	3
2.	Staf	30
4.	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	21
	J U M L A H	54

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2023

Personil yang disampaikan pada tabel diatas merupakan karyawan ASN maupun Non ASN dan Tenaga Fasilitator Lapangang (TFL) di bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.

5. Hasil Capaian

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Realisasi Capaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan
UmumKabupaten Jepara
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Targe t	Realisa si	Capaia n (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi	Capaia n (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	384,405	384,405	100	18.558.724. 229	14,871,116,000	95,34
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	300,851	300,851	100	8.658.223 . 000	15,805,830,000	99,09

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2023

Capaian layanan dasar urusan Bidang Pekerjaan Umum dalam hal ini Air Minum dan Sanitasi merupakan data capain Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten Jepara hingga tahun 2023 dengan asumsi penerima layanan yaitu Jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten Jepara yang di targetkan terlayani tuntas. Adapun perhitungan Capaian Indeks IP SPM sampai dengan tahun 2023 diuraikan pada berikut :

Tabel
Indeks Pencapaian (IP) SPM
Layanan Dasar dan Mutu Layanan
Dasar Kabupaten Jepara Tahun 2023

1. Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yg harus dilayani (KK)	Jumlah yg terlayani (KK)		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	384,405	384,405	100	80
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	300,851	300,851	100	80

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2023

2. Capaian Mutu Layanan Dasar

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yg dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yg Tersedia		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	384,405	384,405	100	20
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	300,851	300,851	100	20

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2023

Tabel
Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100	Tuntas Paripurna

2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	Tuntas Paripurna
	IP SPM Bidang Pekerjaan Umum	100 %	Tuntas Paripurna

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2023

6. Permasalahan dan Solusi
- Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum, antara lain :

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Jepara Tahun 2023

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Eksternal	Kurang koordinasi antar stakeholder dapat menimbulkan data yang kurang valid	Antara Stakeholder pelaksana SPM harus lebih intens dalam melaksanakan koordinasi hingga ke tingkat desa.
2	Internal	Perhitungan jumlah target yang disampaikan merupakan target pada tahun berjalan. Juga target berdasarkan jumlah KK diseluruh Kab. Jepara apabila ada penambahan KK maka target akan bertambah dan penambahan ini belum di update pada data	Target yang digunakan harus dipakati oleh semua pihak.
3	Eksternal	dikarenakan keterbatasan anggaran maka belun bisa mencapai target Air Minum dan Sanitasi 100% dari total seluruh KK yang ditargetkan	Pemerintah Daerah maupun pusat harus bekerjasama guna pemerataan pembangunan khususnya yang terkait pelaksanaan SPM.
4	Internal	Tenaga pelaksana pelayanan SPM masih merangkap pekerjaan lain dan terkadang berganti-ganti sehingga dalam pengumpulan data juga ditemui kendala karena keterbatasan petugas SPM	
5	Eksternal	Dikarenakan belum adanya rapat koordinasi rutin terkait pengisian SPM, petugas SPM terkadang terkendala terkait teknis pengisian SPM di Website hingga pelaporan SPM	Perlu dilaksanakan pertemuan OPD pengampu SPM guna keberhasilan pelaksanaan hingga pelaporan SPM

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2023

D. **BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

1. Jenis Pelayanan Dasar
- Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/ kota terdiri atas:

1. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :
 - a. Pada saat masa pasca bencana;
 - b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
 - c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.
 - d. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara adalah 100%. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.2 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
 Urusan Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp.000)
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	15 Orang (100%)	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan Jasa	15 Orang (100%) (sesuai dengan jumlah warga negara yang korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	255.000
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	6 Orang (100%)	Setiap Tahun	Jumlah Barang Dan Jasa	6 Orang (100%) (Sesuai dengan jumlah warga negara yang korban bencana yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	210.000

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2023

Tabel
 Identifikasi Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan
 Bidang Perumahan
 dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IDENTIFIKASI PELAKSANAAN SPM PERUMAHAN RAKYAT 2023			
		URAIAN		PELAKSANAAN (SUDAH/BELUM)	BENTUK PELAKSANAAN
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Pengumpulan Data	SUDAH (100%)	
		2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	SUDAH (100%)	
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	SUDAH (100%)	
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	SUDAH (100%)	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pengumpulan Data	-	
		2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	-	
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	-	
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	SUDAH (100%)	Penyediaan rumah layak huni

Pelaksanaan Penyediaan & rehab rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten sebanyak 15 unit (100%) yang pelaksanaannya di Tahun 2023 (tahun berjalan) melalui Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di BPKAD Kabupaten Jepara. Sedangkan untuk pelaksanaan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten sebanyak 6 unit/orang dengan melalui bantuan dari Disperkim Provinsi Jawa Tengah

3. Alokasi Anggaran
- Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM perumahan rakyat pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten Jepara sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta

rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara Tahun 2023 dan Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari Disperkim Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.4.3
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	KEGIATAN LAYANAN	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
					TAHUN 2023		
					APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rehabilitasi	15	255.000.000	255.000.000		
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan rumah layak huni	6	210.000.000			210.000.000
Jumlah *)			21	465.000.000	255.000.000		210.000.000

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2023

4. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebanyak 14 orang dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan RakyatKabupaten Jepara Tahun 2023

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Magister	2 Orang
2	Sarjana	9 Orang

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
3	Sekolah Menengah	3 Orang

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2023

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2023

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp. 000)		
		TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N (100%)	APBD	REALISAS I	CAPAIA N (100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15	15	100	255.000	255.000	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6	6	100	210.000	210.000	100

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2023

Tabel Indeks Pencapaian (IP) SPM Layanan Dasar dan Mutu Layanan Dasar Kabupaten Jepara Tahun 2023

1. Capaian Layanan Dasar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (5 x 80%)
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6

1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60	60	100	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15	15	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					100

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2023

2. Capaian Mutu Layanan Dasar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (5 x 80%)
		JUMLAH YANG HARUS DILAYANI (ORANG)	JUMLAH YANG TERLAYANI (ORANG)		
1	2	3	4	5	6
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	24	24	100	80
NO	MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR		PERSENTASE (4:3 x 100%)	INDEKS PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (5 x 20%)
		JUMLAH MUTU BARANG/JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG/JAS A YANG TERSEDIA		
1	2	3	4	5	6

2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6	6	100	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR					100

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2023

Tabel itulasi Indeks Pencapaian (IP)
SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2023
Rekapi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	KATEGORI INDEKS SPM
1	2	3	4
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Program Pemerintah Daerah	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara,

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang
Urusan Perumahan Rakyat antara lain :

Tabel Permasalahan dan Solusi SPM
Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten
Jepara Tahun 2023

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	INTERNAL	
1	Bencana yang terjadi pada skala kecil misalnya kebakaran, rumah roboh karena angin puting beliung	dilakukan penanganan dengan menggunakan dana BTT dan bisa tuntas ditahun terjadinya bencana
II	EKSTERNAL	

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Belum ada mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah untuk tingkat nasional, Kabupaten	Perlu adanya mekanisme dan tata cara penetapan status bencana untuk tingkat Kabupaten
2.	Perlu penyamaan indikator dan tatacara penerapan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Rakor bersama stakeholder terkait untuk merumuskan indikator dan tatacara penerapan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten
3.	Belum adanya data landbanking yang dapat digunakan sebagai tempat relokasi	Melaksanakan pendataan atau pencarian lahan yang sesuai dengan peruntukannya

Sumber: Disperkim Kabupaten Jepara, 2023

E. BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasarnya adalah Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator pencapaian :

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten Jepara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum, meliputi :
 - Standar Operasional Satpol PP;
 - Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
 - Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
 - Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- b. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, mutu sub urusan kebencanaan meliputi :

- Prosedur Operasional Penanggulangan Bencana;
 - Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
 - Peningkatan kapasitas Personil/ Sumber Daya Manusia
 - Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- c. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, mutu sub urusan kebakaran meliputi :
- Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan;
 - Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
 - Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
 - Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran
 - Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang berdampak kebakaran

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah 100%. Sedangkan target capaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.5.2

Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Jepara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Rancangan APBD Tahun 2023
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan perkara	2 orang	Setiap Tahun	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	1 orang	setahun	888.166.750
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1 orang	setahun	
					Standar Operasional Prosedur (SOP)	6 jenis	setahun	
					Standar Sarana Prasarana Satpol PP	28 unit	setahun	
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Linmas	37 orang	setahun	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1,192,811 orang	Setiap Tahun	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Resiko Bencana	1 Dokumen	setahun	374,000,000
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di Kawasan rawan bencana	1192811 Orang	setahun	
					Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	1192811 Orang	setahun	

					Peengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public per jenis bencana	34 unit	setahun	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	620 orang	Setiap Tahun	Sarana prasarana penanggulangan bencana	163 unit	setahun	342.415.000
					Peningkatan kapasitas personil//Sumber Daya Manusia	40 orang	setahun	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.130 orang	Setiap Tahun	Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	1 Posko	setahun	62,099,500
					Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	4759 orang	setahun	
					Melakukan respon cepat darurat bencana	2 dokumen	setahun	
					Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit, KLB Wabah zoonosis prioritas	0 layanan	setahun	
					Pelaksanaan, Pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	12 Layanan	setahun	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	58 orang	Setiap Tahun	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 meniit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15 menit	setahun	133.920.000
					Prosedur Operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2 jenis	setahun	

					Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	41 unit	setahun	
					Kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/SDM	31 orang	setahun	

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2023

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 1.870.186.250,- dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Alokasi Anggaran Pemenuhan
SPM Bidang Urusan
Trantibumlinmas Kabupaten
Jepara Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)		
		APBN	APBD	Sumber lain yang sah
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum		888.166.750	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		374,000,000	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiaposiagaan terhadap Bencana		412,000,000	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana		62,099,500	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran		133.920.000	

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2023

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang. Sedangkan personil yang mendukung urusan sub kebencanaan daerah sebanyak 25 orang, dan untuk personil yang mendukung sub urusan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

sebanyak 31orang. Personil BPBD Kabupaten Jepara pada tahun 2023 yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana daerah sebanyak 40 orang.

Rincian personil pendukung penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel Dukungan Personil
Pemenuhan SPM Bidang Urusan
Trantibumlinmas Kabupaten
Jepara Tahun 2023

No	Pendidikan	Jumlah
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	S2	2 orang
2.	S1/D4	17 orang
3.	SMA	2orang
Urusan penyelamatan dan evakuasi kebakaran		
1.	S2	1 orang
2.	S1/D4	8 orang
3.	SMA	21 orang
Urusan Bencana Daerah		
1.	S2	1 orang
2.	S1/D4	17 orang
3.	D3	2 orang
4.	SMA	20 orang
	JUMLAH	109 orang

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2023

5. Hasil Capaian

Untuk realisasi capaian penerapan SPM dan realisasi mutu pelayanan SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Realisasi Capaian Penerapan SPM
Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp.000)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2		4	5	6	7	8
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	2 orang	2 orang	100	888.166.750	827.953.437	93.8
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1,192,811 orang	1,192,811 orang	100	374.000.000	372.333.000	99,55

NO	JENIS PELAYANAN	PENERIMA LAYANAN DASAR			ANGGARAN (Rp.000)		
3.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	620 orang	620 orang	100	412.000.000	404.406.880	98,16
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	4,759 orang	4,759 orang	100	62.099.500	57.273.154	92,23
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	58 orang	58 orang	100	133.920.000	132.855.200	99.2

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2023

Tabel Indeks Pencapaian (IP) SPM
 Layanan Dasar dan Mutu Layanan
 Dasar Kabupaten Jepara Tahun
 2023

1. Capaian Layanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x80%)
		Jumlah yang harus dilayani (orang)	Jumlah yang terlayani (orang)		
1.	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	2 orang	2 orang	100	80
2	Pelayanan informasi rawan bencana.	1,192,811 orang	1,192,811 orang	100	80
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	620 orang	620 orang	100	80
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4,759 orang	4,759 orang	100	80
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	58 orang	58 orang	100	80

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2023

2. Capaian Layanan Dasar

No.	Mutu minimal pelayanan dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100 %)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa yang tersedia		
1.	2	3	4	5	6
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material	1	1	100	20
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	100	20

No.	Mutu minimal pelayanan dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100 %)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa yang tersedia		
1.	2	3	4	5	6
3.	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	1	1	100	20
4.	Standar Sarana prasarana Satpol PP	28	28	100	20
5.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota linmas	37	37	100	20
1.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	100	20
Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)					100
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100	20
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1,192,811	1,192,811	100	20
3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	1,192,811	1,192,811	100	20
4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	34	34	100	20
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana (Kebencanaan)					100
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	163	163	100	20
2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	40	40	100	20
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana (Kebencanaan)					100
1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	1	100	20
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	4,759	4,759	100	20
3.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	2	100	20

No.	Mutu minimal pelayanan dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3x100 %)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5x20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa yang tersedia		
1.	2	3	4	5	6
4.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0	0	100	20
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	12	12	100	20
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)					100
1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15 menit	15 menit	100	20
2.	Prosedur Operasional penangan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	100	20
3.	Sarana prasarana pemadam kebakareran, penyelamatan dan evakuasi	41	41	100	20
4.	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	31	31	100	20

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2023

Tabel Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan dasar	Indeks SPM (Ip layanan + Ip Mutu)	Katagori Indeks SPM
1.	2.	3.	4.
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan informasi rawan bencana.	100	Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2023

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2023 mencapai sebesar 100% dengan kategori Tuntas Paripurna. Indeks Pencapaian SPM dihitung dari capaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% ditambah dengan penyediaan mutu layanan dasar dengan bobot 20%. Untuk 5 (lima) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

semuanya mencapai target 100%.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, baik permasalahan eksternal maupun internal, antara lain :

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang
Trantibumlinmas Kabupaten Jepara Tahun
2023

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1.	Internal	kesulitan dalam mengumpulkan data dasar warga Negara dan belum memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana	Perlu pemetaan daerah rawan bencana
2.	Internal	Anggota Satpol PP belum semuanya memiliki sertifikat diklat dasar Satpol PP dan Petugas Damkar belum memiliki sertifikat Pemadam 1 yang dikeluarkan Permendagri	-peningkatan kapasitas anggota satpol melalui diklat teknis dasar satpol pp -peningkatan kapasitas petugas damkar sesuai Permendagri
3.	Internal	anggaran penanggulangan bencana yang tidak memadai sehingga Standar Pelayanan Minimal masih banyak yang belum dilaksanakan dan dipenuhi	Mengusulkan anggaran yang tersedia
4.	Internal	Cakupan wilayah pemadam kebakaran tidak sebanding dengan sarana prasarana yang memadai	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia
5.	Internal	Kurangnya pemahaman dalam pengisian laporan SPM , sehingga untuk perbidang urusan perlu adanya penyatuan presepsi dalam penyusunan pelaporan SPM	Rakor terkait penyamaan presepsi dalam penyusunan laporan SPM

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Jepara, 2023

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar di bidang sosial yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan danPengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana

Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk
Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Jepara sebagai berikut:

Target dan Indikator Kinerja
Pencapaian SPM Bidang Urusan
Sosial Kabupaten Jepara
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	489	Desember 2023	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	489	Desember 2023	519.003.200
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	823	Desember 2023	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	823	Desember 2023	244.736.200
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	269	Desember 2023	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	269	Desember 2023	71.835.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	27	Desember 2023	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	27	Desember 2023	7.812.500

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	159	Desember 2023	Penyediaan Perumahan	159	Desember 2023	155.000.000

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2023

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Alokasi Anggaran Pemenuhan
SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Jepara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran
1. Program Rehabilitasi Sosial			
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti			
	Penyediaan permakanan	23.250.000	
	Penyediaan alat bantu	313.777.000	
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	32.290.000	
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	143.686.200	
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3.000.000	
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3.000.000	
Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti			
	Penyediaan permakanan	151.125.000	
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	49.500.000	
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	36.111.200	
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	4.000.000	
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4.000.000	
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
	Penyediaan permakanan	11.625.000	
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	20.680.000	
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia	35.530.000	

	terlantar	
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2.000.000
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2.000.000
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
	Penyediaan permakanan	5.812.500
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1.000.000
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1.000.000
2. Program Penanganan Bencana		
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana		
	Penyediaan makanan	155.000.000

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2023

4. Dukungan Personil

Guna tercapainya pelayanan sosial dalam penerapan Stándar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh sumber daya sosial, dengan rincian sebagai berikut:

Dukungan Personil
Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Jepara
Tahun 2023

NO	Jenis Tenaga	Jumlah	
		L	P
1.	Bidang Rehabilitasi Sosial	8	7
2.	TKSK	10	6
3.	PKH	64	82
4.	Tagana	25	7
J U M L A H		209	

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2023

5. Hasil Capaian

Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Sosial tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Jepara
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran		
		Targ et	Realis asi	Capa ian	Alokasi	Realisasi	Capai an

				(%)			(%)
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	489	489	100,0 0	519.003.20 0	519.003.20 0	100,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	823	823	100,0 0	244.736.20 0	244.736.20 0	100,00
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	269	269	100,0 0	71.835.000	71.835.000	100,00
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	27	27	100,0 0	7.812.500	7.812.500	100,00
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	159	159	100,0 0	155.000.00 0	155.000.00 0	100,00

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2023

Tabel Indeks Pencapaian (IP) SPM
 Layanan Daasar dan Mutu
 Layanan Dasar Kabupaten Jepara
 Tahun 2023

1. Capaian Layanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yg harus dilayani (Orang)	Jumlah yg terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	489	489	100,00	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	823	823	100,00	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	269	269	100,00	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	27	27	100,00	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	159	159	100,00	

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2023

2. Capaian Mutu Layanan Dasar

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		489	489	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang			
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang			
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	100	100	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang			
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	150	150	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang			
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	150	150	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	83	83	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang			
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	3	3	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3	3	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang			
	13 . Layanan rujukan	Orang			
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		823	823	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %

	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang			
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang			
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	650	650	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang			
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	150	150	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang			
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	15	15	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang			
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang			
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4	4	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4	4	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang			
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		269	269	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang			
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang			
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	50	50	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang			
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang			
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang			
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	150	150	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	65	65	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang			
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang			
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2	2	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang			

4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		27	27	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang			
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang			
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	25	25	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang			
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang			
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang			
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang			
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang			
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang			
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang			
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		159	159	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	159	159	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang			
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit			
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang			
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang			

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2023

Tabel
 Rekapitulasi Indeks Pencapaian (IP)
 SPM Bidang Sosial Tahun
 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100,00	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	100,00	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100,00	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100,00	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	100,00	Tuntas Paripurna
	IP SPM Bidang Sosial	100,00%	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinsos Kabupaten Jepara, 2023

6. Permasalahan dan Solusi
- Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Sosial, antara lain:

Permasalahan dan Solusi SPM Bidang
 Sosial Kabupaten Jepara Tahun
 2023

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Internal	Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS dapat tertangani dikarenakan	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sector untuk penanganan PMKS lebih lanjut
		jumlahnya yang sangat besar serta beragamnya jenis PMKS.	Peningkatan kualitas PSKS yang ada agar pelayanan dan penanganan terhadap PMKS lebih optimal Bantuan alat bantu untuk disabilitas yang belum bisa mencukupi semua kategori disabilitas
2		Keterbatasan anggaran/pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu	Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3		Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota sehingga pelayanan tidak berjalan optimal	Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS
1	Eksternal	1. Bantuan alat bantu untuk disabilitas yang belum bisa mencakupi semua kategori disabilitas 2. Bantuan pelatihan ketrampilan untuk menunjang usaha disabilitas yang masih kurang	Dilakukannya proses pendataan, identifikasi dan pembuatan database penyandang disabilitas untuk perencanaan mencakupi bantuan alat bantu dan menunjang pemberian bantuan pelatihan sesuai kebutuhan kategori disabilitas
2		Data anak terlantar dalam bantuan sosial (kebutuhan dasar dan penambahan gizi) banyak yang tidak lagi memenuhi persyaratan pada tahun pencairan bantuan tersebut	Dilakukannya proses verifikasi dan validasi pada awal pengusulan atau pada saat data masuk untuk menjadi dasar perencanaan pencairan bantuan pada tahun dimaksud, sehingga pemberian bantuan dapat maksimal antara volume bantuan dengan jumlah valid penerima bantuan
3		1. Data lanjut usia dalam bantuan sosial (kebutuhan dasar dan penambahan gizi) banyak yang tidak lagi memenuhi persyaratan pada tahun pencairan bantuan tersebut 2. Masih terdapat lanjut usia terlantar yang membutuhkan bantuan pelayanan Panti atau Balai Rehabilitasi yang belum terjangkau	1. Dilakukannya proses verifikasi dan validasi pada awal pengusulan atau pada saat data masuk untuk menjadi dasar perencanaan pencairan bantuan pada tahun dimaksud, sehingga pemberian bantuan dapat maksimal antara volume bantuan dengan jumlah valid penerima bantuan 2. Melakukan koordinasi dengan PSM dan Panti atau Balai Rehabilitasi untuk dapat melakukan proses penjangkauan tersebut

4		1. Masih adanya permasalahan dalam akses Panti atau Balai Rehabilitasi yang dapat menerima PM (gelandangan dan pengemis) setiap waktu tanpa pengecualian 2. Belum tersedianya bantuan sosial atau fisik yang dapat menunjang pengentasan tuna sosial tersebut, hanya tersedia fasilitas untuk membantu proses reunifikasi	1. Adanya keterbukaan dan kemudahan untuk menerima PM (gelandangan dan pengemis) 2. Dilakukannya proses pendampingan assessment secara berkala dan tepat sasaran yang kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pemberian bantuan sosial yang mampu untuk pengentasan tuna sosial tersebut
5		1. Terbatasnya ketrampilan kesiap siagaan bencana bagi SDM kebencanaan/relawan. 2. Keterbatasan sarpras. pendukung kebencanaan.	1. Perlu adanya peningkatan pelatihan SDM kebencanaan. 2. Perlu adanya perawatan dalam pendukung kebencanaan.

BAB V

PENUTUP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jepara. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta tugas-tugas lain dari Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah yaitu kewajiban melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa penyampaian tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah merupakan gambaran capaian kinerja selama 1 (satu) tahun berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA Tanggal 11 Desember 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. Buku ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan capaian kinerja maupun seluruh permasalahan yang menghambat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jepara adalah tanggungjawab bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah di dalam koordinasi Kepala Daerah.

Buku yang disusun ini memuat tentang Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selain itu, LPPD juga memuat tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan tugas pembantuan kepada desa.

Selain itu, buku LPPD ini juga memuat tentang Capaian Kinerja Makro, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah yang memuat antara lain ; target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target rencana pembangunan daerah , analisis efisien penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai dan analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Harapan kami, LPPD ini bisa menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara obyektif dan menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah. Semoga, hasil evaluasi tersebut bisa memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tahun-tahun mendatang.

Jepara, 25 Maret 2024

Pj. BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA., ATD., S.H., M.M

**INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME
LPPD TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
1.	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD. ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan.	%	35.959 -----x 100 % 39.032	92,13
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar. ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan.	%	124.508 ----- x 100 % 124.508	100
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan	%	54.567 ----- x 100 % 62.110	87,86
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam.	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	%	2.688 ----- x 100 % 3.094	86,88

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			pendidikan kesetaraan.	menengah pada kabupaten/Kota yang bersangkutann			
2.	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten ----- x 1000 % Jumlah Penduduk kabupaten/Kota.	%	1.186 ----- x 1000 264.598	0,94
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS kabupaten/Kota	%	6 ----- x 100 6	100
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten/Kota	%	19.557 ----- x 100 19.557	100
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten/Kota	%	17.925 ----- x 100 17.925	100
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/Kota.	%	17.905 ----- x 100 17.905	100
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten/Kota	%	93.257 ----- x 100 93.257	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{40.293}{41.818} \times 100$	96,35
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{760.850}{799.047} \times 100$	95,22
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/Kota}} \times 100\%$	%	$\frac{143.685}{148.084} \times 100$	97,03
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{339.375}{361.730} \times 100$	93,82
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{30.570}{30.570} \times 100$	100
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{2.419}{2.454} \times 100$	98,57

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{8.900}{9.020} \times 100\%$	98,67
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/Kota.}} \times 100\%$	%	$\frac{22.994}{22.994} \times 100\%$	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab.	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten /Kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten /Kota (ha)}} \times 100 \%$	%	$\frac{97}{97} \times 100\%$	100
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten (WS)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten / Kota (ha)}} \times 100 \%$	%	$\frac{2.375}{3.069} \times 100\%$	77,39

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten / Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100 % Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/Kota	%	12.821 ----- X 100% 28.247	45
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ----- x 100 % Jumlah Proyeksi total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.	%	384.405 ----- X 100% 384.405	100
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten	%	300.851 ----- X 100% 300.851	100
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota.	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	%	474 ----- X 100% 474	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		25	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota.	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{746,992}{854,027} \times 100\%$	87,47
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{103}{650} \times 100\%$	15,85
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.	$\frac{\text{jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$	%	$\frac{1.247}{1.247} \times 100\%$	100
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2023}} \times 100 \%$	%	$\frac{15}{15} \times 100 \%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	%	$\frac{0 + 0 + 6}{6} \times 100 \%$	100
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani.	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	%	$\frac{3,17}{67,73} \times 100 \%$	4,68
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni -----x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	%	$\frac{9.734}{365.673} \times 100 \%$	2,66
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU -----x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota	%	$\frac{323}{323} \times 100 \%$	100
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang di tangani -----x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	%	$\frac{8}{8} \times 100 \%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi.}} \times 100\%$	%	$\frac{8}{8} \times 100\%$	100
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	%	$\frac{864.234}{864.234} \times 100\%$	100
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{620}{129.287} \times 100\%$	0,5
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.}} \times 100\%$	%	$\frac{4.759}{4.759} \times 100\%$	100
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	$\frac{58}{72} \times 100\%$	80,55

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/Kota			
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah total waktutanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun ----- x 100 % Jumlah seluruh kejadian kebakaran .	Menit	$\frac{865}{72} \text{ menit}$	12,01 menit
6.	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	%	$\frac{1.380}{1.380} \times 100\%$	100
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten /Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan	%	$\frac{159}{159} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota.			
7.	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{11}{11} \times 100\%$	100
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100 \%$	%	$\frac{966}{147.461} \times 100\%$	0,66
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) $\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100 \%$	%	$\frac{24.451.039,80}{147.461} \times 100\%$	16581,36
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak $\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100 \%$	%	$\frac{273}{429} \times 100\%$	63,64
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan $\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100 \%$	%	$\frac{9.967}{17.504} \times 100\%$	56,94

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional APBD}} \times 100 \%$	%	$\frac{84.795.658.697}{916.604.892.178} \times 100\%$	9,251
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100 \%$	%	$\frac{10}{10} \times 100\%$	100
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan.}} \times 100 \%$	%	$\frac{15}{628.502} \times 100\%$	0,002
9.	Pangan.	50	Persentase ketersediaan cadangan pangan.	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Pemerintah kabupaten / Kota}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota.}} \times 100 \%$	%	$\frac{145.985 \text{ ton}}{145.985 \text{ ton}} \times 100\%$	100 (45,985 merupakan kelebihan cadangan pangan Kab. Jepara)
10.	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Luas seluruh peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100 \%$	%	$\frac{62.454.825 \text{ M}^2}{62.454.825 \text{ M}^2} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.	seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)			
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. $\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100 \%$	%	$\frac{0}{1} \times 100\%$	tdi
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) $\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan}} \times 100\%$	%	$\frac{62.454.825 \text{ M2}}{62.454.825 \text{ M2}} \times 100\%$	100
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente.	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; $\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform.}} \times 100 \%$	%	$\frac{0}{1} \times 100\%$	tdi
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah $\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah}}{\text{Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{1} \times 100\%$	tdi

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	%	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100
11.	Lingkungan Hidup.	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%) Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%).	%	IKLH = 58,22 IKA = 31,00 IKU = 85,54 IKTL = 54,44	IKLH = 58,22 IKA = 31,00 IKU = 85,54 IKTL = 54,44
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total Vol sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{84.569,38}{154.571,51} \times 100\%$	54,71
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan Pemeriksaan.}} \times 100 \%$	%	$\frac{12}{12} \times 100\%$	100
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	%	$\frac{933.475}{934.138} \times 100\%$	99,93

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100 \%$	%	$\frac{202.385}{330.861} \times 100\%$	61,17
		62	Kepemilikan Akta Kelahiran.	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 Tahun yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100 \%$	%	$\frac{331.691}{337.898} \times 100\%$	98,16
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	%	$\frac{13}{25} \times 100\%$	52 (Kecamatan tidak termasuk)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	64	Persentase pengentasan desa tertinggal.	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri.	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100 \%$	%	$\frac{23}{81} \times 100\%$	28,40

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$.		2,04	2,04
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur.}} \times 100\%$		$\frac{145.296}{205.185} \times 100\%$	70,81
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur.}} \times 100\%$		$\frac{19.515}{205.185} \times 100\%$	9,511
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten/kota.	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).	Trayek / Lintas	$\frac{0,977 + 0,64}{2}$	0.81 trayek/ lintas
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota.	V/C ratio di jalan kabupaten/Kota	LoS	0,21	0,21
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	$\frac{\text{Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{33}{42} \times 100\%$	78,57

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik.}} \times 100\%$	%	$\frac{16}{23} \times 100\%$	69,57
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten.	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya}}{\text{Jumlah penduduk usia 15-64}} \times 100\%$	%	$\frac{813.679}{864.234} \times 100\%$	94,15
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi.}} \times 100\%$	%	$\frac{175}{685} \times 100\%$	25,55
		75	Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha.	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	%	$\frac{3.729}{77.683} \times 100\%$	4,80
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	$\frac{\text{(Jumlah investasi tahun 2023 - jumlah investasi tahun 2022) di kabupaten.}}{\text{Jumlah investasi tahun 2022}} \times 100\%$	%	$\frac{8.928.971.312.243 - 9.585.327.105.644}{9.585.327.105.644} \times 100\%$	-6,84

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah investasi tahun 2022 di kabupaten).		9.585.327.105.644.	
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten.}} \times 100.000$	%	$\frac{23.268}{282.762} \times 100\%$	8,23
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{95.197}{282.762} \times 100\%$	33,67
		79	Peningkatan prestasi olahraga.	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	medali	48	48 medali
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	%	$\frac{537}{645} \times 100\%$	83.26

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya.	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata.}} \times 100\%$	%	40 -----x 100% 40	100
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat.		$\text{TGM} = (\text{FM} + \text{DM} + \text{JBB} + \text{FAI} + \text{DAI}) / 5$ FM : Frekuensi Membaca DM : Durasi Membaca JBB : Jumlah Bahan Bacaan FAI : Frekuensi Akses Internet DAI : Durasi Akses Internet $\text{TGM} = \frac{61,51 + 59,17 + 58,37 + 69,09 + 63,12}{5} = 62,25$	62,25 Baik

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM).		$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1) + Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)+ Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) + Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)+ Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)+ Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) + Jumlah Pemustaka (UPLM7) x 100 / 7 (0,4911+0,4183+0,0734 +0,3101+1,0000+0,8220 +1,0000) x 100 / 7 <u>411.49/7 = 58.78</u>	58.78 Sedang

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
24	Kearsipan.	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43.	$T = (a + i + s + j)/4.$	%	$T = \frac{67,77\% + 81,32\% + 100\% + 0,389}{4}$ $= 62,37$	62,37
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	%	$T = \frac{100\% + 0\% + 100\% + 100\% + 100\% + 0\%}{6}$ $= 66,67$	66,67
Urusan Pilihan.							
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data: one data KKP).	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten $\frac{\text{Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten}}{\text{Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan}} \times 100$	%	59.040,925 ton ----- 100 % 58.315,647 ton	101,244

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun 2023} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2022})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2022}} \times 100\%$	%	$\frac{15.251 - 5.310}{5.310} \times 100\% = 9.941$	187.21
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten.	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun 2023} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2022})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2022}} \times 100\%$	%	$\frac{1.964.135 - 1.787.208}{1.787.208} \times 100\% = 176.927$	9.90
		91	Tingkat hunian akomodasi.	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	%	$\frac{146.374}{387.265} \times 100\%$	37.80
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)}}{\text{Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)}} \times 100\%$	%	$\frac{1.693.329}{38.023.267} \times 100\%$	4,45
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.	$\frac{\text{Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2023}}{\text{Realisasi PAD Tahun 2023}} \times 100\%$	%	$\frac{21.274.384.283}{445.914.893.914} \times 100\%$	4,77

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton) ----- x 100% Luas Panen (ha).	Ton/ha	586.787,6 ton ----- x 100% 63.142,1Ha	9,29 ton/ha
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2023) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2022) ----- x 100 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2022)	%	29.553-27.165 ----- x 100% 27.165	8,79
28	Kehutanan.						Tidak Ada
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kota.	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin. ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi.		0 ---- x 100% 1	Tdi
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan. ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten.	%	84 ----- x 100% 84	100
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk.	Realisasi ----- x 100% RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).	%	19.369.572,97 ----- x100% 24.568.315	78,8

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku)	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten	%	3022 ----- x 100% 3022	100
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2023 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2022) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023	%	21585-13136 ----- x 100% 21585	64,3
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	pencapaian Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal	%	1.(0 X20%) =0 2.(0 X20%) =0 3.(0 X20%) =0 4.(0 X20%) =0 5.(0 X20%) =0	Tdi Perda RPIK Masih Dalam Proses

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				sebesar 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 30\%) = 30\%$; Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 30\%) = 27\%$; jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 30\%) = 24\%$; dst 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 30\%) = 30\%$; Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 30\%) = 27\%$; jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 30\%) = 24\%$; dst 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan			

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 15\%) = 15\%$; Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 15\%) = 13,5\%$; jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 15\%) = 12\%$; dst 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 5%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 5\%) = 5\%$; Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 5\%) = 4,5\%$; jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 5\%) = 4\%$;			

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				dst 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ; jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ; dst			
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) bagi industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan.	%	10551 ----- x 100% 10551	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	%	0	0
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	%	0	0
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	- Keterkinian informasi industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0 – 6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7 – 12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) - Kelengkapan informasi industri meliputi - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	$=(1+2)$ $=(50\%+(10\%+10\%+10\%+10\%10\%))$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				3. Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 +2).			
32	Transmigrasi				kk	surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	tdi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
33	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi) ----- x 100% Jumlah APBD (realisasi)	%	899.983.843.033 ----- x 100% 2.431.676.307.980	37,01
		2	Rasio PAD.	Jumlah PAD ----- x 100% Jumlah Pendapatan pada APBD	%	445.914.893.914 ----- x 100% 2.343.270.669.976	19,03

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.	Level	3,261	3,261
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.	Level	3,1	3,1
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi) ----- x 100% Jumlah belanja APBD (realisasi)	%	1.825.803.682.286 ----- x 100% 2.431.676.307.980	75,08
		6	Opini Laporan Keuangan.	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir).	10 kali.	Bukti piagam WTP (tahun 2013– 2023)	WTP. (Tahun 2023 masih proses)
34	PENGADAAN	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023 ----- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023	%	0 ----- x100% 103	0
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif ----- x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode Kompetitif	%	4.587 ----- x 100% 5.850	78,41

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Rasio Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$	%	$\frac{419.180.295.364,37}{706.442.199.426} \times 100\%$	59,33
		10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah PBJ yang menggunakan produk dalam negeri UMKM dan Koperasi Tahun (n) – Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri UMKN dan Koperasi tahun (n-1)}}{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri umkm dan koperasi}} \times 100\%$	%	$\frac{150.859.000.000,00}{398.245.000.000,00} \times 100\%$	37,88
35	KEPEGAWAIAN	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT Keatas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai}} \times 100\%$	%	$\frac{1.267}{2.051} \times 100\%$	61,77
		12	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	$\frac{\text{Jumlah Pegawai PNS Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah seluruh pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	%	$\frac{403}{2.051} \times 100\%$	19,65
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).}} \times 100\%$	%	$\frac{369}{403} \times 100\%$	91,56

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
36	MANAJEMEN KEUANGAN	14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD.	$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right] - 1 \times 100\%$	%	2.431.676.307.980 ----- - 1 x 100% 2.504.847.603.917	2,92
		15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.	$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right] - 1 \times 100\%$	%	445.914.893.914 ----- - 1 x 100% 469.809.745.000	5,09
		16	Assets management.	Jumlah Asset Manajemen. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak).		7.767.526.944.102 Ya Ya Ya Ya Ya	
		17	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ----- X 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)	%	51.909.992.455 ----- x 100% 2.429.312.218.030	2,14
37	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units).	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. ----- X 100% Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	%	42 ----- x 100% 42	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda. ----- X 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	%	$\frac{12}{12} \times 100\%$	100

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT LPPD TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
1.	Pendidikan						
		Pendidikan PAUD					
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah PAUD terakreditasi	Orang	663	663
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah siswa PAUD yg mendapatkan Perlengkapan Dasar	Orang	35.959	35.959
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa)	Jumlah siswa PAUD yg bebas biaya pendidikan	Orang	290	290
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	3.263	3.263
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	4.146	4.146

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah pendidik PAUD yg memiliki ijazah S1 PAUD	Orang	2.750	2.750
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah PAUD yg memiliki ijazah S1 PAUD	Orang	865	865
		Pendidikan Dasar					
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD+SMP terakreditasi	Orang	578	578
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	Jumlah siswa SD yg mendapatkan Perlengkapan Dasar	Orang	127.476	127.476
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah siswa SMP yg mendapatkan Perlengkapan Dasar	Orang	57.871	57.871

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah siswa SD yg bebas biaya pendidikan	Orang	80.071	80.071
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah siswa SMP yg bebas biaya pendidikan	Orang	30.880	30.880
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	6.591	6.591
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	4.782	4.782
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	7.499	7.499
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	4.066	4.066
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	1.598	1.598
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.100	1.100
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	821	821
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	485	485

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat		Orang	4.914	4.914
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1.965	1.965
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah SD yg memiliki ijazah S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	396	396
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah SMP yg memiliki ijazah S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	90	90
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang SD yg memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	551	551

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang SMP yg memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	294	294
		Pendidikan Kesetaraan					
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah PKBM terakreditasi	Lembaga	10	10
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah	Jumlah siswa Paket A+B+C yg mendapatkan Perlengkapan Dasar	Siswa	5.366	5.366
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah siswa paket A+B+C yg bebas biaya pendidikan	Siswa	340	340
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	225	225
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	144	144
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	134	134

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1, Sertifikat Pendidik Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah		Orang	1	1
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	6	6
2	Kesehatan						
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan					
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai Standar.	Unit	28 Unit Rumah Sakit : 6 Puskesmas : 22	28 Unit Rumah Sakit : 6 Puskesmas : 22	Unit
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	6	6 unit RS
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia.			23.750 Paket Buku KIA : 20.557 OVM : 120 OVP: 120 ANC Kit: 111 Susu Bumil KEK : 2.842	23.750 Paket Buku KIA : 20.557 OVM : 120 OVP: 120 ANC Kit: 111 Susu Bumil KEK : 2.842

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Antenatal		Orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (rekap sarana operasional dan contoh foto)			231 paket PMT Ibu Nifas : 120 Bidang Kit : 111	231 paket PMT Ibu Nifas : 120 Bidang Kit : 111
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (dokter dan perawat)		Orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			27.729 Paket OVM : 120 OVP: 120 Buku KIA : 20.557 KN Kit : 110 Oksimeter : 22 Kertas Saring SHK : 1.700 Lancet SHK : 1.700 Alcohol Swab SHK : 1.700 Plastik Klip SHK : 1.700	27.729 Paket OVM : 120 OVP: 120 Buku KIA : 20.557 KN Kit : 110 Oksimeter : 22 Kertas Saring SHK : 1.700 Lancet SHK : 1.700 Alcohol Swab

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
							SHK : 1.700 Plastik Klip SHK : 1.700
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			9.973 paket Posyandu : 1.133 unit Formula F 100 : 8.730 KN Kit : 110	9.973 paket Posyandu : 1.133 unit Formula F 100 : 8.730 KN Kit : 110
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Orang	6.515 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang Kader : 5.752 orang	6.515 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang Kader : 5.752 orang
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.			718 paket Hb Meter & Pen : 22 Strip Hb : 357 Lancet : 113 Alkohol Swab : 113	718 paket Hb Meter & Pen : 22 Strip Hb : 357 Lancet : 113

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Handscoon : 113	Alkohol Swab : 113 Handscoon : 113
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	1.101 orang Guru UKS SD/MI : 755 Guru UKS SMP/MTs : 210 Guru UKS SMA/MA : 136	1.101 orang Guru UKS SD/MI : 755 Guru UKS SMP/MTs : 210 Guru UKS SMA/MA : 136
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			45.282 paket BMHP Gula Darah : 3.110 BMHP IVA Test : 1.000 BMHP Profil Lipid : 6.322 BMHP Ca Colon : 10.000 BMHP EKG : 300 Rapid Duo HIV Sipilis : 24.550	45.282 paket BMHP Gula Darah : 3.110 BMHP IVA Test : 1.000 BMHP Profil Lipid : 6.322 BMHP Ca Colon : 10.000 BMHP EKG : 300 Rapid Duo HIV Sipilis : 24.550
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	1.092 orang Nakes terlatih pandu PTM : 46 Programmer PTM : 1.022	1.092 orang Nakes terlatih pandu PTM : 46 Programmer PTM : 1.022

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Nakes terlatih Pengendalian PPOK dan Asma : 24	Nakes terlatih Pengendalian PPOK dan Asma : 24
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			527 paket Posyandu Lansia : 313 Lansia Kit : 74 Buku Caregiver : 140	527 paket Posyandu Lansia : 313 Lansia Kit : 74 Buku Caregiver : 140
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	44 orang Dokter : 22 Prpgrammer Lansia : 22	44 orang Dokter : 22 Prpgrammer Lansia : 22
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			181 paket posbindu kit	181 paket posbindu kit
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	46 orang nakes terlatih pandu PTM	46 orang nakes terlatih pandu PTM	Orang
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia		181 paket posbindu kit	181 paket posbindu kit	181 paket posbindu kit
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		22 orang programmer PTM	22 orang programmer PTM	22 orang programmer PTM
		Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			29 Buku	29 Buku
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	46 orang nakes terlatih keswa	46 orang nakes terlatih keswa
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia.			23.765 paket FDC kategori I : 1.700 FDC Anak : 275 POT SPOTUM : 12.550 Kaca Slide : 20 Reagen Zn : 20 Catridge TCM TBC : 9.200	23.765 paket FDC kategori I : 1.700 FDC Anak : 275 POT SPOTUM : 12.550 Kaca Slide : 20 Reagen Zn : 20 Catridge TCM TBC : 9.200
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	76 orang Dokter : 25 Perawat TBC : 25 Laborat TBC : 26	76 orang Dokter : 25 Perawat TBC : 25 Laborat TBC : 26

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD		
						Elemen Data	Capaian Kinerja	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia.			64.280 orang Kondom : 6.480 Lubrikan : 2.500 Rapid HIV 2 : 3.075 Rapid HIV 3 : 1.675 Rapid HIV ½ Sipilis : 24.550 Rapid Sipilis RPR : 3.000 Masker Bedah : 23.000	64.280 orang Kondom : 6.480 Lubrikan : 2.500 Rapid HIV 2 : 3.075 Rapid HIV 3 : 1.675 Rapid HIV ½ Sipilis : 24.550 Rapid Sipilis RPR : 3.000 Masker Bedah : 23.000	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	29 orang Dokter : 6 Perawat : 6 Rekam Medis : 6 Apoteker : 5 ATLM : 6 Bidan : 1	29 orang Dokter : 6 Perawat : 6 Rekam Medis : 6 Apoteker : 5 ATLM : 6 Bidan : 1	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.							
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir						
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab (ha).	Sudah cukup jelas	Ha	97	97	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab (m).	Sda	M	13.050	13.050	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)	Sda	Ha	700	700
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab (m)	Sda	M	2.040	2.040
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab	Ada/tidak	Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	Ada
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab	Ada/tidak	Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	Ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab	Jumlah	Jumlah	1. Bangunan perkuatan tebing : 7.400 meter	4

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						2. Tanggul sungai : 5040 meter 3. Pintu air : 9 Unit 4. Pompa air : 3 unit	
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten							
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	Sudah cukup jelas	Ha	97	97
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab (m)	Sda	M	13.050	13.050
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	Sda	Ha	700	700
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	Sda	M	2.040	2.040
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	Ada/tidak	Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata	Ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Ada/tidak	Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	Ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	Jumlah	Jumlah	5. Bangunan perkuatan tebing : 7.400 meter 6. Tanggul sungai : 5040 meter 7. Pintu air : 9 Unit 4. Pompa air : 3 unit	4
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi					
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)	%	4.238,4 ----- x 100% 10.596	40

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dlm kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)	%	313.124,88 ----- x 100% 1.249.933	25,05
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik.	Panjang jaringan irigasi Tersier dlm kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi Tersier (m)	%	4.143 ----- x 100% 13.810	30
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten					
		1	Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kab		Ada/Tidak	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040	Ada
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten		Ada/Tidak	Dokumen Jakstrada berlaku Tahun 2020 – 2024	Ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kab penyelenggaraan SPAM		Ada/Tidak	1 PDAM	Ada
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	8 Desa	Ada
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	1 {Embung Kalimati (Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040)}	Ada
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	300.851	300.851
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	100	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T.		Rumah	300.951	300.951
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	210	210
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	210	210
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic.		Rumah	210	210
		7	Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ----- x 100 % Jumlah Rumah di wil pengembang SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	%	300.851 ----- X 100 300.851	100
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Jumlah lumpur tinjanya telah diolah di IPLT -----X100 Rumah di wilayah pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun>25 jiwa/Ha	%	210 ----- X 100 3000851	0,070

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T ----- x 100% rumah di wilayah pengembangan SPALD T	%	100 ----- X 100 300.851	0,033
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat ----- x 100% jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	%	300.851 ----- X 100 300.851	100
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia ----- x 100% jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	%	3 ---- X 100 3	100
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia ----- x 100% jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten/kota	%	14,25 ----- X 100 85,792	16,61
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambuungan rumah yang	%	100	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				tersambung dengan IPALD ----- x 100% jumlah rumah yang dilayani @dengan SPALD-T pada kab/kota		----- X 100 (2X50)	
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot ----- x 100% jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S	%	210 ----- X 100 300.851	0,070
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten					
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku -----X100 Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	%	52 ----- X 100 118	44,07
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	474	474

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada/tidak	Peraturan daerah kabupaten jepara nomor 26 tahun 2011	Ada
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada/tidak	Keputusan bupati jepara nomor 640/320	Ada
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Jumlah	Keputusan bupati jepara nomor 430/410 tahun 2018	36
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten		Jumlah	Perda 14/2018 perangkat daerah dan perbup 1/2018 UPTD	163
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten		Jumlah	Perda 14/2018 perangkat daerah dan perbup 1/2018 UPTD	163
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab. yang dipelihara/dirawat		Jumlah	Perda 14/2018 perangkat daerah dan perbup 1/2018 UPTD	163
		Tingkat kemantapan jalan					
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten			Nomor 620/295 Tahun 2023 Tentang	854,027

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
					Km	Penetapan Status Jalan Kabupaten Jepara	
		2	Panjang jalan yang dibangun		M	6.431,60	6.431,60
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	37,00	37,00
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		M	24.107,70	24.107,70
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	-	-
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau Direhabilitasi		M	17.676,10	17.676,10
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	81,90	81,90
		8	Panjang jalan yang dipelihara		M	28.071,95	28.071,95
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	44,90	44,90
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli					
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kab		Kali	Ada	1
		2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab		Orang	103	103
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten		Orang	27	27

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab yang aktif dengan data termutakhir.		Ada/tidak	SK Kepala Dinas DPUPR Nomor 061 Tahun 2022	Ada
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBD kabupaten		Ada/tidak	994 Paket	Ada
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN		Ada/tidak	9 Paket	Ada
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/tidak	244 Paket	Ada
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/tidak	1247 paket	Ada
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten		Ada/tidak	Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2021	Ada
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi		Ada/tidak	1	Ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.				
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/tidak	30	Ada
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ada/tidak	76	Ada
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		Ada/tidak	0	Tidak ada
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/tidak	0	Tidak ada
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/tidak	0	Tidak ada
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/tidak	0	Ada
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan		Ada/tidak	0	Tidak ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.				
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten		Jumlah	570	570
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten		Jumlah	0	0
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten		Jumlah	304	304
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		Jumlah	0	0
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Jumlah	0	0
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya.		Jumlah	0	0
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.		Jumlah	0	0
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya.		Jumlah	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.						
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		unit	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam.		Orang	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		unit	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		unit	Surat Keterangan	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban Bencana		Unit	Surat Keterangan	0
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang Terfasilitasi		orang	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		ha	Surat Keterangan	0
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	Surat Keterangan	0
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	Surat Keterangan	0
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	Surat Keterangan	0
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov Jawa Tengah NO 130/XI/2023 Tentang	6

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						PenerimaBansos Stimulan Material/Bahan Bangunan Pada Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah TA 2023	
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	Surat Keterangan	0
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	Surat Keterangan	0
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	Update Data Baseline Kawasan kumuh tahun 2023	64,56
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	Dok. Data Unit RTLH Bidang Permukiman TA 2023	1.375
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh		Ha	Update Data Baseline Kawasan kumuh tahun 2023	3,17
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	Data Base Bappeda tahun 2022	365.673
		2	Jumlah unit PK RTLH		Rumah	Dok. Data Unit RTLH Bidang Permukiman TA	1.375

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						2023	
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	Dok. Data Unit RTLH Bidang Permukiman TA 2023	9.734
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun)		Rumah	Surat Keterangan	0
		5	Rasio rumah dan KK.	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100\%$	%	$\frac{421.975}{365.673} \times 100$	115,39 %
		6	Jumlah rumah pembangunan baru			Dok. Data Unit RTLH Tahun 2023	0
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	5
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan Lingkungan		Rumah	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	7
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	7
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi		Pengembang	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	7
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.		Pengembang	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	34
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.						
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani.		Jumlah.	8	8
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan.		Orang	2.240	2.240
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda/Perkada	8	8
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Orang	3	3
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		SOP	5	5
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		Sarpras	Ada	Ada
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	%	1 ----- x 100% 1	100
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100% Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	864.234 ----- x 100% 864.234	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen RPB yg lengkap dan sudah disahkan	%	Tidak melaksanakan	Tdi
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah	%	Tidak melaksanakan	Tdi

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan}} \times 100\%$	%	$\frac{620}{129.287} \times 100\%$	0,05
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{620}{129.287} \times 100\%$	0,05
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{1.257.580}{1.257.580} \times 100\%$	100
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{1.257.580}{1.257.580} \times 100\%$	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	%	Tidak Ada Penetapan status KLB	Tdi
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam utk setiap penetapan darurat bencana ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	%	6 ----- x 100% 6	100
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- x 100% Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	%	869 ----- x 100% 869	100
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- x 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	%	4.759 ----- x 100% 4.759	100
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten		Layanan	202	202
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	3	3
		3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian di kantor kecamatan		orang	26	26
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	0	0
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	14	14
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		orang	28	28
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.		Orang	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam Kebakaran.		kegiatan	0	0
6	SOSIAL.						
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		jenis	2	2
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Anak	1.380	1.380
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terbentuk		Unit	1	1
		4	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dijangkau		orang	1.380	1.380
		5	Jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Unit	4	4
		6	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Orang	1006	1006
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		shelter	1	1
		8	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang		Orang	25	25

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Orang	345	345
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.		paket	21	21
		11	jumlah paket perbekalan yang tersedia		paket	0	0
		12	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		orang	0	0
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah/shelter.		orang	0	0
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan		Orang	39	39
		15	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik , mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/ pusat kesejahteraan sosial		Orang	256	256
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat.		paket	3	3

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		17	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		orang	0	0
		18	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.		Orang	9	9
		19	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Orang	29	29
		20	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Orang	18	18
		21	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk		Orang	12	12
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten					
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan Makanan		Orang	159	159
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang		Orang	0	0
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang Dimiliki			0	0
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok Rentan		Paket	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	0	0
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang Tersedia		Orang	31	31
7	TENAGA KERJA						
		Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kab.		Ada/Tidak	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Jepara Tahun 2021-2026	Ada
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		%	Data satkernas dan proyeksi RTKD	81,36
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		Jumlah	2	2
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun 2023 ----- x 100% keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster	%	20 ----- x 100% 40	50

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				pada tahun 2023			
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2023 ----- x 100% jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2023	%	5 ----- x 100% 9	56
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	Jumlah instruktur tahun 2023 ----- x 100% jumlah peserta pelatihan pada tahun 2023	%	9 ----- x 100% 319	2,82
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2023 ----- x 100% jumlah seluruh LPK pd th 2023	%	9 ----- x 100% 31	29
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2023 ----- x 100% jumlah LPK yang terdata pada tahun 2023	%	31 ----- x 100% 31	100
		6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	720 orang	720
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan ----- x 100% Jumlah orang yang dilatih	%	720 ----- x 100% 720	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				pada tahun 2023			
		8	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2023}}{\text{jumlah lulusan pada tahun 2023}} \times 100\%$	%	$\frac{66}{192} \times 100\%$	34
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2023}} \times 100\%$	%	$\frac{150}{720} \times 100\%$	21
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	%	$\frac{303}{303} \times 100\%$	100
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		orang	303 orang	303
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2023}}{\text{-----}} \times 100\%$	%	$\frac{5}{429} \times 100\%$	1,29

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				jumlah perusahaan pada th 2023			
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan Modal + pertumbuhan tenaga kerja).	%	5,17	5,17
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2022 ----- x 100% Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	%	160 ----- X 100% 429	37,30
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020 ----- x 100% Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh	%	12 ----- X 100% 24	50
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di Perusahaan		SP/SB	42	42
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan	%	80 ----- x 100%	47

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				skala Upah ----- x 100% Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		172	
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ----- x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	%	1.175 ----- x 100% 1.653	71
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun 2023	%	97 ----- x 100% 429	23
		7	Jumlah mogok kerja		jumlah	3	3
		8	Jumlah penutupan perusahaan		jumlah	0	0
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		jumlah	0	0
		10	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		jumlah	0	0
		11	Jumlah perselisihan PHK		jumlah	51	51
		12	Jumlah Pekerja yang ter-PHK		Orang	292	292

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		jumlah	28	28
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang Diberdayakan		Ada/tidak	ada	ada
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$	%	$\frac{79}{79} \times 100\%$	100
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten					
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab		jumlah	12.457	12.457
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		orang	17.504	17.504
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		jumlah	45	45
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam Kab		orang	411	411
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	2	2
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		jumlah	0	0
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota.		jumlah	303	303

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER).		Orang	9.967	9.967
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI/CTKI}} \times 100\%$	%	303 ----- x 100% 303	100
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.		Orang	303	303
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan.	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	%	11 ----- x 100% 11	100
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$	%	303 ----- x 100% 303	100
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	%	20 ----- x 100% 20	100
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk.	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong}} \times 100\%$	%	0 ----- x 100% 0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				PMI/TKI.			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.						
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang telah dilatih PUG		Lembaga	43 OPD	43 OPD
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten.		Program/kegiatan	12 Program / 81 Kegiatan	12 Program / 81 Kegiatan
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab					
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Media Massa	3 Media massa	3 Media massa
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.		lembaga	39 lembaga	39 lembaga
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani.	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- x 100% jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten		10 -----x100% 10	100
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat Pelatihan		lembaga	22 (P2TP2A kab Jepara , Forum Anak Jepara (FAJAR) , Disdikpora ,	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Satpol PP dan Damkar Dishub, Disperkim, DPMPTSP, Disperindag, DPUPR, Bappeda, Diskominfo, Disparbud, Kesbangpol, DLH, Polres, Diskopukmnakertrans, Dinsospermades,BPBD, Diskarpus,Dinkes, Forum Genre Jepara, Jepara Volunteer)	
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD kab)		Lembaga	P2TP2A dan Forum Anak Jepara	2
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab yang mendapatkan pelatihan		organisasi	0	Tidak ada kegiatan
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kab yang sudah dilatih		Orang	0	Tidak ada kegiatan
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		lembaga	0	Tidak ada kegiatan

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten		Lembaga	0	Tidak ada kegiatan
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/ program	1 perda (No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda no. 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak) Dan Perbup Nomor 42 Tahun 2017 tentang SOP Penyelenggaraan Perlindungan anak dan perempuan (PPAP)	
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah Terstandardisasi		Lembaga	1 Lembaga (P2TP2A)	
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	%	$\frac{15}{15} \times 100\%$	100
9	Pangan.						

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase Ketersediaan Pangan					
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada/Tidak	Foto gudang dan cadangan pangan pemerintah	Ada
		2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	Foto penyerahan simbolis beras cadangan pangan pemerintah (CPP) pada daerah rawan pangan	Ada
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	Surat Keterangan Kepala Dinas terkait belum tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal di Kabupaten Jepara	Tdi
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	DPA Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ada
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	Foto cover buku Peta FSVA 2023	Ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Tertanganinya kerawanan pangan.	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Foto BAST dan simbolis penyerahan bantuan daerah rawan pangan	Ada
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan.	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Foto BAST dan penyerahan simbolis beras cadangan pangan pada daerah rawan pangan	Ada
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar.	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	Foto kegiatan/ hasil pengawasan keamanan pangan segar	Ada
10	Pertanahan.						
		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati / walikota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya). ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun.	%	$\frac{67+0}{67} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek.	Jumlah penerbitan sk penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absente ----- x 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	%	Suket Bag. Pemerintahan Dan BPN Kab. Jepara.	0
		3	SK Bupati /Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absente.	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum absentee ----- x 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek.	%	Suket Bag. Pemerintahan Dan BPN Kab. Jepara	0
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + dokumen izin membuka tanah yang ditolak ----- x 100% Jumlah dokumen izin	%	Surat keterangan	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				membuka tanah yang dimohon dalam 1 Tahun			
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- x 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 th	%	130 ----- x 100% 167	77,84
11	Lingkungan Hidup						
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten					
		1	Hasil Perhitungan kabupaten terhadap : a) Indeks Kualitas Air,(IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			a) IKA = 31,00 b) IKU = 85,54 c) IKTL = 54,44	a) IKA = 31,00 b) IKU = 85,54 c) IKTL = 54,44
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten					
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab.	- Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah thd volume timbunan sampah - Tersedianya iformasi terkait kapasitas TPA thd volume timbunan sampah - Tersedianya informasi terkait		Di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 tentang tersedianya informasi terkait TPST TIDAK ADA. Adanya PDU dan TPS3R	Di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 tentang tersedianya informasi terkait TPST TIDAK ADA. Adanya PDU dan TPS3R

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan			
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten					
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten ----- x 100% jumlah usulan permohonan yang teregestrasi.	%	27 ----- 100% 27	100
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab.	Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100% Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin ingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab	%	2 ----- x 100% 16	12,5
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kab.	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda ----- x 100% Jumlah usulan MHA	%	0 ----- x 100% 0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada.	%	0 ----- x 100% 0	0
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- x 100% Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	%	0 ----- x 100% 0	0
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab yang Ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	%	16 ----- x 100% 16	100
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
			Perekaman KTP Elektronik				
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	%	8.804 ----- x 100% 8.807	99,97

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan	%	1.913 ----- x 100% 2.190	87,35
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan	%	9.494 ----- x 100% 9.494	100
		4	Penyajian data kependudukan.	Jumlah Penyajian data kependudukan skala kab dalam 1 tahun. ----- x 100% 2 semester	%	2 ----- x 100% 2	100
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		desa	11	11
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun Sebelumnya.		desa	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		lembaga	6	6
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan Pemberdayaan		desa	184	184
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
			TFR				
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada/Tidak	-	-
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun.	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	%	22,91	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	bi $ASFR_i = f \times k$	Per 1000	4,83%	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				<i>pi</i> ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun			
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE ----- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE	%	420 367 -----x100% 1.264.598	33,24
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Stakeholder	18	18
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ----- x 100% Jumlah faskes	%	48 -----x100% 60	80,00
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	Jumlah Peserta KB Aktif ----- x 100% Jumlah PUS	%	145.296 -----x100% 205.185	70,81

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Pemerintah Daerah kab yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		kelompok	69 Kelompok	69 Kelompok
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern) ----- x 100% jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	%	9.375 -----x100% 17.925	52,30
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		1	Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah	Jumlah desa yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kab ----- x 100% Jumlah desa dalam kab	%	58.577 -----x100% 119.757	48,91
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI ----- x 100% Jumlah Keluarga PBI	%	16 -----x100% 195	8,21
15	Perhubungan.						
		Rasio konektivitas					
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C.	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang	%	94 ----- x 100% 170	55,30

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				angkutan jalan Tipe C yang tersedia ----- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan			
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala.	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- x 100 % Jumlah kendaraan wajib uji	%	11,934 ----- x 100% 24,974	47,79
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kab, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.	Jumlah penetapan tariff lintas penyeberangan ----- x 100% Juml lintas penyebngdlm kab	%	5 ---- x 100% 5	100
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan kota.	%	689 ----- x 100% 19.745	35
16	Komunikasi dan Informatika.						

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100% Jumlah Perangkat Daerah.		$\frac{33}{42} \times 100\%$	78,57 %
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100% Jumlah Perangkat Daerah		$\frac{33}{42} \times 100\%$	78,57 %
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak)	Ada/tidak	ADA	Data dukung terlampir

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi						
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015) ----- x 100% Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pd Pemda	%	$\frac{33}{33} \times 100\%$	100
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	$\frac{42}{42} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Persentase perangkat daerah yang pengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ----- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah	%	$\frac{42}{42} \times 100\%$	100
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- x 100% Jumlah layanan	%	$\frac{314}{314} \times 100\%$	100
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik.	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- x 100% Jumlah layanan	%	$\frac{77}{314} \times 100\%$	24,52

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	%	$\frac{314}{314} \times 100\%$	100
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$	%	$\frac{313}{313} \times 100\%$	100
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100 (Kecamatan tidak termasuk)
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100 % (Kecamatan tidak

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja termasuk)
				----- x 100% Jumlah perangkat daerah			
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- x 100% Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	%	39 ----- x 100% 71	54,92
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	%	25 ----- x 100% 26	96,15 % (Kecamatan tidak dihitung)
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo ----- x 100% Jumlah ASN Pengelola TIK	100%	5 ----- x 100% 64	7,81 %
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government.		Ada/tidak	ADA	1. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kabupaten

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
							Jepara 2. Peraturan Bupati Nomor62 Tahun 2020 Tentang Penyelengga raan Sistem Pemerintaha nBerbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Jepara 3. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pedoman TataKelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah					
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab	$\frac{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemda}} \times 100\%$	%	$\frac{125}{125} \times 100\%$	100 %
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\Sigma \text{ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemkab}} \times 100\%$	%	$\frac{14.744}{14.744} \times 100\%$	100 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP ----- x 100% Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik	%	1.753 ----- x 100% 1.753	100 %
17	Koperasi dan UKM						
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kab	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	%	5 ---- x 100% 523	0,96

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	1 ----- x 100% 1	100
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	51 ----- x 100% 685	7,45
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	%	51 ----- x 100% 277	18,41
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100%	%	166 ----- x 100% 685	24,23

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah koperasi yang ada			
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{545}{163.613} \times 100\%$	0,33
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{7}{685} \times 100\%$	1,02
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan.				Tidak diisi
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{685}{685} \times 100\%$	100
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{685} \times 100\%$	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	3 ----- x 100% 685	0,44
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	169 ----- x 100% 685	24,67
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab dalam 1 (satu) daerah kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	1 ----- x 100% 685	0,15
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha					
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- x 100% Jumlah wirausaha yang ada	%	3.729 ----- x 100% 77.683	4,80
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data	%	0 ----- x 100%	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				online (ODS) ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada		77.683	
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra.	Jumlah usaha mikro yang bermitra ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	223 ----- x 100% 77.683	0,29
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	%	206 ----- x 100% 77.477	0,27
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	%	740 ----- x 100% 76.943	0,96
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihan ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	4.100 ----- x 100% 77.683	5,28

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	914 ----- x 100% 77.683	1,18
18	Penanaman Modal						
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota yang bisa diberikan kepada investor	Ada/Tidak	1	1
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Ada/Tidak	10	10
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Jumlah laporan	4	4
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan	2	2
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan	104	104

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan	11	11
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi	812	812
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	Jumlah perizinan dan non perizinan	15.804	15.804
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi	8.928.971.312.243	8.928.971.312.243
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Jumlah aparatur	25	25
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan	753	753
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kab	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	Ada	17	17
19	Pemuda dan Olahraga						
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	200	200
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	200	200
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan	Orang	1.058	1.058
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah Pengelola Organisasi	Orang	958	958
		Peningkatan Prestasi Olahraga					
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih yang memiliki kompetensi.	Orang	63	63
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		kali	9	9
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak	Ada/tidak	ADA	1. Jepara DalamAngka 2. PDRD 3. Statistik

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
							Sektoral Kab. Jepara
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	Ada/tidak	0	(data dukung terlampir)
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang dilakukan	Ada/tidak	239	(data dukung terlampir)
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Ada/tidak	0	(data dukung terlampir)
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Ada/tidak	239	(data dukung terlampir)
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	%	$\frac{91}{239} \times 100\%$	38,08
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	%	$\frac{95}{95} \times 100\%$	100
21	Persandian.						
			Tingkat keamanan informasi pemerintah				

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan .	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----- x 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada	%	10 ----- x 100% 10	100 %
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah.	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- x 100% Jumlah SE yang ada.	%	314 ----- x 100% 314	100 %
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- x 100% Jumlah SE yang ada	%	314 ----- x 100% 314	100 %
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah titik teramankan ----- x 100% Jumlah titik pada PHKS	%	52 ----- x 100% 52	100 %
22	Kebudayaan						
		Terlestarikannya Cagar Budaya					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	obyek	32	32
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	obyek	7	7
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	Obyek	32	32
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	Tim	14	14
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	Obyek	5	5
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	obyek	3	3

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kota ke luar kota dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	Cagar Budaya	-	-
		8	Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	Cagar Budaya	-	-
		9	Pemanfaatan cagar budaya kab (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	Cagar Budaya	5	5
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	koleksi	612	612
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	Orang	30.114	30.114
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum		15	15
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	Tim	1	1
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	Tim	1	1
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Tim	-	-
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	orang	9	9

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	Orang	-	-
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB +Museum)	Unit	38	38
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	15	15
23	Perpustakaan						
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	%	620.975 ----- x 100% 1.264.598	49,10
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya	%	39.232 ----- x 100% 1.264.598	3,10
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di Wilayahnya	%	967 ----- x 100% 1.264.598	0,08

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)			
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- x 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	%	20 ----- x 100% 915	2,19
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		kali	Pelayanan Perpustakaan Keliling : 1.342 kali Lomba dalam rangka Minat Baca dan Lomba Perpustakaan : 3 kali Sosialisasi Gemar Membaca : 1 kali Jumlah Total : 1.346 kali	1.346
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya.		Jumlah	Surat Keterangan	0
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Jumlah Naskah kuno	Surat Keterangan	0
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di		Jumlah Budaya	214	214

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			wilayahnya (item)		etnis		
24	Kearsipan						
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dibagi jumlah seluruh arsip x 100%	%	$\frac{96.870}{142.937} \times 100$	67,77
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip dibagi Jumlah seluruh arsip inaktif kali 100%	%	$\frac{183.056}{225.113} \times 100$	81,32
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu Balik dibagi Jumlah seluruh arsip Statis kali 100%	%	$\frac{93.835}{93.835} \times 100$	100
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kota kali	%	$\frac{1.781}{462.885} \times 100$	0,38

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				100%			
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah	2.039	2.039
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Jumlah	0	0
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK di kabupaten		Jumlah	64	64
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK.		jumlah	4.087	4.087
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai dengan NSPK.		Jumlah	4	4
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab yang sesuai NSPK.		Jumlah	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
URUSAN PILIHAN							
25	Kelautan dan Perikanan.						
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)					
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		Orang/RT	339	339 RT
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional.	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional ----- X 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten	%	6 ---- x 100% 10	60%
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan		Jumlah.	41	41
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan).		orang	551	551

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi.		ekor	433.777.985	433.777.985
26	Pariwisata						
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan					
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		24	24
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		169	169
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	TUDP	2.394	2.394
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Orang	15.251	15.251
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Kegiatan	17	17
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten.	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Orang	-	-
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Industi	12	12

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi.	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$	%	$\frac{68}{1.445} \times 100 \%$	4,70
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor Kepariwisataan.	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	%	$\frac{310}{310} \times 100\%$	100
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha Masyarakat.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	30	30
27	Pertanian						
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Unit.	Cultivator : 4 Traktor Roda2 : 36 Pompa Air : 5 APPO : 3 Hand Sprayer : 10 Power Thresher : 3 JUT : 34RJIUT : 36 EMBUNG : 1 SUMUR DALAM : 4	128

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Prasaran pertanian yang digunakan		Unit	JUT : 36 RJIUT : 26 EMBUNG : 1 SUMUR DALAM: 4	67
		3	Penerbitan izin usaha pertanian.		dokumen	0	0
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- x 100% Jumlah prasarana yang dibangun.	%	67 ----- x 100% 67	100%
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kabupaten/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi ----- x 100% Jumlah usulan usaha pertanian	%	0 ----- x 100% 0	tdi
		6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yg ditanggulangi ----- x 100 Luas area yg terkena bencana Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan	%	1.723 ha ----- x 100% 1.733 ha.	99,42

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				bencana penyakit hewan menular.			
28	Kehutanan (tidak menyelenggarakan urusan kehutanan)						
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan. Tahura			Surat keterangan	Tdi
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			Surat keterangan	Tdi
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura.			Surat keterangan	Tdi
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			Surat keterangan	Tdi
29	ESDM (Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten)						
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab./kota		Surat keterangan	Tdi
30	Perdagangan						
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan.	Jumlah izin took swalayan yang di terbitkan < 5 hari kerja Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya	%	84 ----- x 100% 84	100 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				sudah lengkap dan benar			
		2	Persentase penerbitan TDG.	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$	%	84 $\frac{\text{-----}}{84} \times 100\%$	100%
		3	persentase gudang yang tidak memiliki TDG	Jumlah penerbitan TDG $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab kabupaten}} \times 100\%$	%	31 $\frac{\text{-----}}{31} \times 100\%$	100%
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :				
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar $\text{-----} \times 100\%$	%	0	0 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlahpermohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri			
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	%	0	0%
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan	%	0	0 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				dari waralaba luar negeri			
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab.	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah ----- x 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer	%	0 ----- x 100% 0	0%
		6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu.	Jumlah SPKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam ----- x 100% Jumlah permohonan penerbitan SPKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	%	0	SPKA sudah menjadi kewenangan provinsi
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan	%	K= (a+b) x 100 = (0,5 + 0,5) x 100 = 100 %	100 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)			
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Jumlah prosentase komoditi ----- x 100% Jumlah komoditi	%	954,62 ----- x 100% 76	13 %
		9.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a / (b \times c) \times 100\%$ X = persentase jumlah pupuk yang disalurkan A= jumlah pupuk yang disalurkan B= target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (kp3) di tngkat kota sebesar (90% dar RDKK) C= rdkk (rencana definitive kebutuhan pokok)	%	a =19.369.572,97 b = 90% *24.568.315 =22.111.485,5 c = 24.111.483,5 $x = a / (b \times c) \times 100\%$ =19.369.572,97 / (22.111.493,5 x 24.568.315) x 100 % = 3,56 %	3,56 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		10.	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan.	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab kota	%	3022 ----- x 100% 3022	100%
		11.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- x 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	%	8 ----- x 100% 8	100%
31	Perindustrian						
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab.	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	0 ----- x 100 % 0	0
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					
		1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan iPersentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK: a. tercapainya nakah akademik (30%) b. tersusunnya draft Raperda RPIP (20%) c. Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi kementerian perindustrian (25%) d. Persetujuan draf Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25 %) e. Penetapan Perda	%	a+b+c+d+e 30+20+0+0+0 = 50	50 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				RPIP (10%)			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	10551 ----- x 100% 10551	100 %
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil yang diterbitkan.	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	0 ----- x 1-00% 0	0
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten.	Jumlah data perusahaan industri kecil & perusahaan kawasan industri di kab di SIINas ----- x 100% Total populasi perusahaan industri besar & perusahaan kawasan industri di kab.	%	10551 ----- x 100% 10551	100 %
31	Transmigrasi.						
		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi. Penetapannya.	Kawasan	jumlah	surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Kalimantan Tengah	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya.	pemukiman	jumlah	surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	0
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.	Pemukiman	jumlah	surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	

**INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME
LPPD TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
1.	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD. ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan.	%	35.959 -----x 100 % 39.032	92,13
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar. ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan.	%	124.508 ----- x 100 % 124.508	100
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/Kota yang bersangkutan	%	54.567 ----- x 100 % 62.110	87,86
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam.	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	%	2.688 ----- x 100 % 3.094	86,88

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			pendidikan kesetaraan.	menengah pada kabupaten/Kota yang bersangkutann			
2.	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten ----- x 1000 % Jumlah Penduduk kabupaten/Kota.	%	1.186 ----- x 1000 264.598	0,94
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS kabupaten/Kota	%	6 ----- x 100 6	100
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten/Kota	%	19.557 ----- x 100 19.557	100
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten/Kota	%	17.925 ----- x 100 17.925	100
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/Kota.	%	17.905 ----- x 100 17.905	100
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten/Kota	%	93.257 ----- x 100 93.257	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{40.293}{41.818} \times 100$	96,35
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{760.850}{799.047} \times 100$	95,22
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/Kota}} \times 100\%$	%	$\frac{143.685}{148.084} \times 100$	97,03
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{339.375}{361.730} \times 100$	93,82
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{30.570}{30.570} \times 100$	100
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{2.419}{2.454} \times 100$	98,57

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten/Kota	%	8.900 ----- x 100% 9.020	98,67
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/Kota.	%	22.994 ----- x 100% 22.994	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab.	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten /Kota (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten /Kota (ha)	%	97 ----- X 100% 97	100
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten (WS) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten / Kota (ha)	%	2.375 ----- X 100% 3.069	77,39

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten / Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100 % Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/Kota	%	12.821 ----- X 100% 28.247	45
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ----- x 100 % Jumlah Proyeksi total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.	%	384.405 ----- X 100% 384.405	100
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten	%	300.851 ----- X 100% 300.851	100
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota.	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	%	474 ----- X 100% 474	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		25	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota.	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{746,992}{854,027} \times 100\%$	87,47
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{103}{650} \times 100\%$	15,85
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.	$\frac{\text{jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$	%	$\frac{1.247}{1.247} \times 100\%$	100
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	28	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2023}} \times 100 \%$	%	$\frac{15}{15} \times 100 \%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	%	$\frac{0 + 0 + 6}{6} \times 100 \%$	100
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani.	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	%	$\frac{3,17}{67,73} \times 100 \%$	4,68
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni -----x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	%	$\frac{9.734}{365.673} \times 100 \%$	2,66
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU -----x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota	%	$\frac{323}{323} \times 100 \%$	100
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang di tangani -----x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	%	$\frac{8}{8} \times 100 \%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi.}} \times 100\%$	%	$\frac{8}{8} \times 100\%$	100
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	%	$\frac{864.234}{864.234} \times 100\%$	100
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{620}{129.287} \times 100\%$	0,5
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.}} \times 100\%$	%	$\frac{4.759}{4.759} \times 100\%$	100
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	$\frac{58}{72} \times 100\%$	80,55

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/Kota			
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah total waktutanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun ----- x 100 % Jumlah seluruh kejadian kebakaran .	Menit	$\frac{865}{72} \text{ menit}$	12,01 menit
6.	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	%	$\frac{1.380}{1.380} \times 100\%$	100
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten /Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan	%	$\frac{159}{159} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten / Kota.			
7.	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{11}{11} \times 100\%$	100
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100 \%$	%	$\frac{966}{147.461} \times 100\%$	0,66
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100 \%$	%	$\frac{24.451.039,80}{147.461} \times 100\%$	16581,36
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100 \%$	%	$\frac{273}{429} \times 100\%$	63,64
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100 \%$	%	$\frac{9.967}{17.504} \times 100\%$	56,94

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional APBD ----- x 100 % Jumlah seluruh belanja operasional APBD	%	84.795.658.697 ----- x 100% 916.604.892.178	9,251
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi ----- x 100 % umlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	%	10 -----x100% 10	100
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100 % Jumlah penduduk perempuan.	%	15 -----x100% 628.502	0,002
9.	Pangan.	50	Persentase ketersediaan cadangan pangan.	Jumlah cadangan pangan Pemerintah kabupaten / Kota ----- x 100 % Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota.	%	145.985 ton ----- x 100% 145.985 ton	100 (45,985 merupakan kelebihan cadangan pangan Kab. Jepara)
10.	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100 %.	%	62.454.825 M2 ----- x 100% 62.454.825 M2	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.	seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)			
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. $\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100 \%$	%	$\frac{0}{1} \times 100\%$	tdi
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) $\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan}} \times 100\%$	%	$\frac{62.454.825 \text{ M2}}{62.454.825 \text{ M2}} \times 100\%$	100
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente.	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; $\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform.}} \times 100 \%$	%	$\frac{0}{1} \times 100\%$	tdi
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah $\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah}}{\text{Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{1} \times 100\%$	tdi

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	%	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100
11.	Lingkungan Hidup.	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%) Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%).	%	IKLH = 58,22 IKA = 31,00 IKU = 85,54 IKTL = 54,44	IKLH = 58,22 IKA = 31,00 IKU = 85,54 IKTL = 54,44
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total Vol sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{84.569,38}{154.571,51} \times 100\%$	54,71
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan Pemeriksaan.}} \times 100 \%$	%	$\frac{12}{12} \times 100\%$	100
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	%	$\frac{933.475}{934.138} \times 100\%$	99,93

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100 \%$	%	$\frac{202.385}{330.861} \times 100\%$	61,17
		62	Kepemilikan Akta Kelahiran.	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 Tahun yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 18 tahun}} \times 100 \%$	%	$\frac{331.691}{337.898} \times 100\%$	98,16
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	%	$\frac{13}{25} \times 100\%$	52 (Kecamatan tidak termasuk)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	64	Persentase pengentasan desa tertinggal.	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri.	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100 \%$	%	$\frac{23}{81} \times 100\%$	28,40

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$.		2,04	2,04
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur.}} \times 100\%$		$\frac{145.296}{205.185} \times 100\%$	70,81
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur.}} \times 100\%$		$\frac{19.515}{205.185} \times 100\%$	9,511
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten/kota.	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).	Trayek / Lintas	$\frac{0,977 + 0,64}{2}$	0.81 trayek/ lintas
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota.	V/C ratio di jalan kabupaten/Kota	LoS	0,21	0,21
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	$\frac{\text{Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{33}{42} \times 100\%$	78,57

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik.	%	16 ----- x 100% 23	69,57
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten.	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya ----- x 100% Jumlah penduduk usia 15-64	%	813.679 ----- x 100% 864.234	94,15
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi.	%	175 ----- x 100% 685	25,55
		75	Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha.	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	%	3.729 ----- x 100% 77.683	4,80
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2023 - jumlah investasi tahun 2022) di kabupaten. ----- x 100%	%	8.928.971.312.243 - 9.585.327.105.644 ----- x 100%	-6,84

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah investasi tahun 2022 di kabupaten).		9.585.327.105.644.	
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten.}} \times 100.000$	%	$\frac{23.268}{282.762} \times 100\%$	8,23
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{95.197}{282.762} \times 100\%$	33,67
		79	Peningkatan prestasi olahraga.	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	medali	48	48 medali
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	%	$\frac{537}{645} \times 100\%$	83.26

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya.	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata.}} \times 100\%$	%	40 -----x 100% 40	100
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat.		$\text{TGM} = (\text{FM} + \text{DM} + \text{JBB} + \text{FAI} + \text{DAI}) / 5$ FM : Frekuensi Membaca DM : Durasi Membaca JBB : Jumlah Bahan Bacaan FAI : Frekuensi Akses Internet DAI : Durasi Akses Internet $\text{TGM} = \frac{61,51 + 59,17 + 58,37 + 69,09 + 63,12}{5} = 62,25$	62,25 Baik

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM).		$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1) + Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2)+ Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) + Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)+ Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)+ Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) + Jumlah Pemustaka (UPLM7) x 100 / 7 (0,4911+0,4183+0,0734 +0,3101+1,0000+0,8220 +1,0000) x 100 / 7 <u>411.49/7 = 58.78</u>	58.78 Sedang

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
24	Kearsipan.	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43.	$T = (a + i + s + j)/4.$	%	$T = \frac{67,77\% + 81,32\% + 100\% + 0,389}{4}$ $= 62,37$	62,37
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	%	$T = \frac{100\% + 0\% + 100\% + 100\% + 100\% + 0\%}{6}$ $= 66,67$	66,67
Urusan Pilihan.							
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten (sumber data: one data KKP).	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten $\frac{\text{Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten}}{\text{Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan}} \times 100$	%	59.040,925 ton ----- 100 % 58.315,647 ton	101,244

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun 2023} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2022})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2022}} \times 100\%$	%	$\frac{15.251 - 5.310}{5.310} \times 100\% = 9.941$	187.21
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten.	$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun 2023} - \text{Jumlah wisatawan tahun 2022})}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2022}} \times 100\%$	%	$\frac{1.964.135 - 1.787.208}{1.787.208} \times 100\% = 176.927$	9.90
		91	Tingkat hunian akomodasi.	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	%	$\frac{146.374}{387.265} \times 100\%$	37.80
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)}}{\text{Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)}} \times 100\%$	%	$\frac{1.693.329}{38.023.267} \times 100\%$	4,45
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.	$\frac{\text{Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2023}}{\text{Realisasi PAD Tahun 2023}} \times 100\%$	%	$\frac{21.274.384.283}{445.914.893.914} \times 100\%$	4,77

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton) ----- x 100% Luas Panen (ha).	Ton/ha	586.787,6 ton ----- x 100% 63.142,1Ha	9,29 ton/ha
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2023) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2022) ----- x 100 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2022)	%	29.553-27.165 ----- x 100% 27.165	8,79
28	Kehutanan.						Tidak Ada
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kota.	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin. ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi.		0 ---- x 100% 1	Tdi
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan. ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten.	%	84 ----- x 100% 84	100
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk.	Realisasi ----- x 100% RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).	%	19.369.572,97 ----- x100% 24.568.315	78,8

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku)	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten	%	3022 ----- x 100% 3022	100
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2023 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2022) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2023	%	21585-13136 ----- x 100% 21585	64,3
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	pencapaian Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal	%	1.(0 X20%) =0 2.(0 X20%) =0 3.(0 X20%) =0 4.(0 X20%) =0 5.(0 X20%) =0	Tdi Perda RPIK Masih Dalam Proses

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				sebesar 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 30\%) = 30\%$; Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 30\%) = 27\%$; jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 30\%) = 24\%$; dst 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 30\%) = 30\%$; Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 30\%) = 27\%$; jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 30\%) = 24\%$; dst 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan			

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 15\%) = 15\%$; Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 15\%) = 13,5\%$; jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 15\%) = 12\%$; dst 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 5%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 5\%) = 5\%$; Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 5\%) = 4,5\%$; jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 5\%) = 4\%$;			

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				dst 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ; jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ; dst			
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) bagi industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan. ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan.	%	10551 ----- x 100% 10551	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	%	0	0
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	%	0	0
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	- Keterkinian informasi industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0 – 6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7 – 12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) - Kelengkapan informasi industri meliputi - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	$=(1+2)$ $=(50\%+(10\%+10\%+10\%+10\%10\%))$	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				3. Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 +2).			
32	Transmigrasi				kk	surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	tdi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
33	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi) ----- x 100% Jumlah APBD (realisasi)	%	899.983.843.033 ----- x 100% 2.431.676.307.980	37,01
		2	Rasio PAD.	Jumlah PAD ----- x 100% Jumlah Pendapatan pada APBD	%	445.914.893.914 ----- x 100% 2.343.270.669.976	19,03

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.	Level	3,261	3,261
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP.	Level	3,1	3,1
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi) ----- x 100% Jumlah belanja APBD (realisasi)	%	1.825.803.682.286 ----- x 100% 2.431.676.307.980	75,08
		6	Opini Laporan Keuangan.	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir).	10 kali.	Bukti piagam WTP (tahun 2013– 2023)	WTP. (Tahun 2023 masih proses)
34	PENGADAAN	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023 ----- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023	%	0 ----- x100% 103	0
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif ----- x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode Kompetitif	%	4.587 ----- x 100% 5.850	78,41

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Rasio Belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{total belanja operasi dan modal}} \times 100\%$	%	$\frac{419.180.295.364,37}{706.442.199.426} \times 100\%$	59,33
		10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah PBJ yang menggunakan produk dalam negeri UMKM dan Koperasi Tahun (n) – Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri UMKN dan Koperasi tahun (n-1)}}{\text{Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri umkm dan koperasi}} \times 100\%$	%	$\frac{150.859.000.000,00}{398.245.000.000,00} \times 100\%$	37,88
35	KEPEGAWAIAN	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT Keatas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai}} \times 100\%$	%	$\frac{1.267}{2.051} \times 100\%$	61,77
		12	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	$\frac{\text{Jumlah Pegawai PNS Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah seluruh pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	%	$\frac{403}{2.051} \times 100\%$	19,65
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).}} \times 100\%$	%	$\frac{369}{403} \times 100\%$	91,56

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
36	MANAJEMEN KEUANGAN	14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD.	$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right] - 1 \times 100\%$	%	2.431.676.307.980 ----- - 1 x 100% 2.504.847.603.917	2,92
		15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.	$\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right] - 1 \times 100\%$	%	445.914.893.914 ----- - 1 x 100% 469.809.745.000	5,09
		16	Assets management.	Jumlah Asset Manajemen. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak).		7.767.526.944.102 Ya Ya Ya Ya Ya	
		17	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ----- X 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)	%	51.909.992.455 ----- x 100% 2.429.312.218.030	2,14
37	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units).	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. ----- X 100% Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	%	42 ----- x 100% 42	100

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda. ----- X 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	%	$\frac{12}{12} \times 100\%$	100

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT LPPD TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
1.	Pendidikan						
		Pendidikan PAUD					
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah PAUD terakreditasi	Orang	663	663
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah siswa PAUD yg mendapatkan Perlengkapan Dasar	Orang	35.959	35.959
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa)	Jumlah siswa PAUD yg bebas biaya pendidikan	Orang	290	290
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	3.263	3.263
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	4.146	4.146

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah pendidik PAUD yg memiliki ijazah S1 PAUD	Orang	2.750	2.750
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah PAUD yg memiliki ijazah S1 PAUD	Orang	865	865
		Pendidikan Dasar					
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Jumlah SD+SMP terakreditasi	Orang	578	578
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	Jumlah siswa SD yg mendapatkan Perlengkapan Dasar	Orang	127.476	127.476
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Jumlah siswa SMP yg mendapatkan Perlengkapan Dasar	Orang	57.871	57.871

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah siswa SD yg bebas biaya pendidikan	Orang	80.071	80.071
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah siswa SMP yg bebas biaya pendidikan	Orang	30.880	30.880
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	6.591	6.591
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	4.782	4.782
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	7.499	7.499
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	4.066	4.066
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	1.598	1.598
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.100	1.100
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	821	821
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	485	485

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat		Orang	4.914	4.914
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1.965	1.965
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah SD yg memiliki ijazah S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	396	396
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah SMP yg memiliki ijazah S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	90	90
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang SD yg memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	551	551

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Jumlah tenaga penunjang SMP yg memiliki ijazah SMA/ sederajat	Orang	294	294
		Pendidikan Kesetaraan					
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah PKBM terakreditasi	Lembaga	10	10
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah	Jumlah siswa Paket A+B+C yg mendapatkan Perlengkapan Dasar	Siswa	5.366	5.366
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah siswa paket A+B+C yg bebas biaya pendidikan	Siswa	340	340
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	225	225
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	144	144
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	134	134

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Jumlah Kepala Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah D-IV Atau S1, Sertifikat Pendidik Dan Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah		Orang	1	1
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	6	6
2	Kesehatan						
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan					
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai Standar.	Unit	28 Unit Rumah Sakit : 6 Puskesmas : 22	28 Unit Rumah Sakit : 6 Puskesmas : 22	Unit
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	6	6 unit RS
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia.			23.750 Paket Buku KIA : 20.557 OVM : 120 OVP: 120 ANC Kit: 111 Susu Bumil KEK : 2.842	23.750 Paket Buku KIA : 20.557 OVM : 120 OVP: 120 ANC Kit: 111 Susu Bumil KEK : 2.842

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Antenatal		Orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (rekap sarana operasional dan contoh foto)			231 paket PMT Ibu Nifas : 120 Bidang Kit : 111	231 paket PMT Ibu Nifas : 120 Bidang Kit : 111
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (dokter dan perawat)		Orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			27.729 Paket OVM : 120 OVP: 120 Buku KIA : 20.557 KN Kit : 110 Oksimeter : 22 Kertas Saring SHK : 1.700 Lancet SHK : 1.700 Alcohol Swab SHK : 1.700 Plastik Klip SHK : 1.700	27.729 Paket OVM : 120 OVP: 120 Buku KIA : 20.557 KN Kit : 110 Oksimeter : 22 Kertas Saring SHK : 1.700 Lancet SHK : 1.700 Alcohol Swab

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
							SHK : 1.700 Plastik Klip SHK : 1.700
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang	763 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			9.973 paket Posyandu : 1.133 unit Formula F 100 : 8.730 KN Kit : 110	9.973 paket Posyandu : 1.133 unit Formula F 100 : 8.730 KN Kit : 110
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Orang	6.515 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang Kader : 5.752 orang	6.515 orang Dokter : 204 orang Bidang : 559 orang Kader : 5.752 orang
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.			718 paket Hb Meter & Pen : 22 Strip Hb : 357 Lancet : 113 Alkohol Swab : 113	718 paket Hb Meter & Pen : 22 Strip Hb : 357 Lancet : 113

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Handscoon : 113	Alkohol Swab : 113 Handscoon : 113
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	1.101 orang Guru UKS SD/MI : 755 Guru UKS SMP/MTs : 210 Guru UKS SMA/MA : 136	1.101 orang Guru UKS SD/MI : 755 Guru UKS SMP/MTs : 210 Guru UKS SMA/MA : 136
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			45.282 paket BMHP Gula Darah : 3.110 BMHP IVA Test : 1.000 BMHP Profil Lipid : 6.322 BMHP Ca Colon : 10.000 BMHP EKG : 300 Rapid Duo HIV Sipilis : 24.550	45.282 paket BMHP Gula Darah : 3.110 BMHP IVA Test : 1.000 BMHP Profil Lipid : 6.322 BMHP Ca Colon : 10.000 BMHP EKG : 300 Rapid Duo HIV Sipilis : 24.550
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	1.092 orang Nakes terlatih pandu PTM : 46 Programmer PTM : 1.022	1.092 orang Nakes terlatih pandu PTM : 46 Programmer PTM : 1.022

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Nakes terlatih Pengendalian PPOK dan Asma : 24	Nakes terlatih Pengendalian PPOK dan Asma : 24
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			527 paket Posyandu Lansia : 313 Lansia Kit : 74 Buku Caregiver : 140	527 paket Posyandu Lansia : 313 Lansia Kit : 74 Buku Caregiver : 140
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	44 orang Dokter : 22 Prpgrammer Lansia : 22	44 orang Dokter : 22 Prpgrammer Lansia : 22
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia		181 paket posbindu kit	181 paket posbindu kit	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	46 orang nakes terlatih pandu PTM	46 orang nakes terlatih pandu PTM	Orang
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia		181 paket posbindu kit	181 paket posbindu kit	181 paket posbindu kit
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		22 orang programmer PTM	22 orang programmer PTM	22 orang programmer PTM
		Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			29 Buku	29 Buku
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	46 orang nakes terlatih keswa	46 orang nakes terlatih keswa
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia.			23.765 paket FDC kategori I : 1.700 FDC Anak : 275 POT SPOTUM : 12.550 Kaca Slide : 20 Reagen Zn : 20 Catridge TCM TBC : 9.200	23.765 paket FDC kategori I : 1.700 FDC Anak : 275 POT SPOTUM : 12.550 Kaca Slide : 20 Reagen Zn : 20 Catridge TCM TBC : 9.200
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	76 orang Dokter : 25 Perawat TBC : 25 Laborat TBC : 26	76 orang Dokter : 25 Perawat TBC : 25 Laborat TBC : 26

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia.			64.280 orang Kondom : 6.480 Lubrikan : 2.500 Rapid HIV 2 : 3.075 Rapid HIV 3 : 1.675 Rapid HIV ½ Sipilis : 24.550 Rapid Sipilis RPR : 3.000 Masker Bedah : 23.000	64.280 orang Kondom : 6.480 Lubrikan : 2.500 Rapid HIV 2 : 3.075 Rapid HIV 3 : 1.675 Rapid HIV ½ Sipilis : 24.550 Rapid HIV ½ Sipilis RPR : 3.000 Masker Bedah : 23.000
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	29 orang Dokter : 6 Perawat : 6 Rekam Medis : 6 Apoteker : 5 ATLM : 6 Bidan : 1	29 orang Dokter : 6 Perawat : 6 Rekam Medis : 6 Apoteker : 5 ATLM : 6 Bidan : 1
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.						
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab (ha).	Sudah cukup jelas	Ha	97	97
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab (m).	Sda	M	13.050	13.050

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)	Sda	Ha	700	700
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab (m)	Sda	M	2.040	2.040
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab	Ada/tidak	Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	Ada
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab	Ada/tidak	Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	Ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab	Jumlah	Jumlah	1. Bangunan perkuatan tebing : 7.400 meter	4

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						2. Tanggul sungai : 5040 meter 3. Pintu air : 9 Unit 4. Pompa air : 3 unit	
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten							
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (ha)	Sudah cukup jelas	Ha	97	97
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab (m)	Sda	M	13.050	13.050
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	Sda	Ha	700	700
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	Sda	M	2.040	2.040
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten	Ada/tidak	Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata	Ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten	Ada/tidak	Ada/Tidak	Keputusan Bupati Jepara Nomor 520/421 Tahun 2020 Tentang Rencana Pola Tanam Dan Tata Tanam Kabupaten Jepara Tahun 2020-2025	Ada
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	Jumlah	Jumlah	5. Bangunan perkuatan tebing : 7.400 meter 6. Tanggul sungai : 5040 meter 7. Pintu air : 9 Unit 4. Pompa air : 3 unit	4
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi					
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)	%	4.238,4 ----- x 100% 10.596	40

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dlm kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)	%	313.124,88 ----- x 100% 1.249.933	25,05
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik.	Panjang jaringan irigasi Tersier dlm kondisi baik (m) ----- x 100% Panjang jaringan irigasi Tersier (m)	%	4.143 ----- x 100% 13.810	30
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten					
		1	Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kab		Ada/Tidak	Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040	Ada
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten		Ada/Tidak	Dokumen Jakstrada berlaku Tahun 2020 – 2024	Ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kab penyelenggaraan SPAM		Ada/Tidak	1 PDAM	Ada
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	8 Desa	Ada
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	1 {Embung Kalimati (Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040)}	Ada
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	300.851	300.851
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	100	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T.		Rumah	300.951	300.951
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	210	210
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	210	210
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic.		Rumah	210	210
		7	Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ----- x 100 % Jumlah Rumah di wil pengembang SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	%	300.851 ----- X 100 300.851	100
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Jumlah lumpur tinjanya telah diolah di IPLT -----X100 Rumah di wilayah pengembangan SPALD S dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun>25 jiwa/Ha	%	210 ----- X 100 3000851	0,070

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T ----- x 100% rumah di wilayah pengembangan SPALD T	%	100 ----- X 100 300.851	0,033
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat ----- x 100% jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	%	300.851 ----- X 100 300.851	100
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia ----- x 100% jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	%	3 ---- X 100 3	100
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia ----- x 100% jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten/kota	%	14,25 ----- X 100 85,792	16,61
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambuungan rumah yang	%	100	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				tersambung dengan IPALD ----- x 100% jumlah rumah yang dilayani @dengan SPALD-T pada kab/kota		----- X 100 (2X50)	
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot ----- x 100% jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S	%	210 ----- X 100 300.851	0,070
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten					
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku -----X100 Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	%	52 ----- X 100 118	44,07
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	474	474

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada/tidak	Peraturan daerah kabupaten jepara nomor 26 tahun 2011	Ada
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada/tidak	Keputusan bupati jepara nomor 640/320	Ada
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Jumlah	Keputusan bupati jepara nomor 430/410 tahun 2018	36
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten		Jumlah	Perda 14/2018 perangkat daerah dan perbup 1/2018 UPTD	163
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten		Jumlah	Perda 14/2018 perangkat daerah dan perbup 1/2018 UPTD	163
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab. yang dipelihara/dirawat		Jumlah	Perda 14/2018 perangkat daerah dan perbup 1/2018 UPTD	163
		Tingkat kemantapan jalan					
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten			Nomor 620/295 Tahun 2023 Tentang	854,027

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
					Km	Penetapan Status Jalan Kabupaten Jepara	
		2	Panjang jalan yang dibangun		M	6.431,60	6.431,60
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	37,00	37,00
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		M	24.107,70	24.107,70
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	-	-
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau Direhabilitasi		M	17.676,10	17.676,10
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	81,90	81,90
		8	Panjang jalan yang dipelihara		M	28.071,95	28.071,95
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	44,90	44,90
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli					
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kab		Kali	Ada	1
		2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab		Orang	103	103
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten		Orang	27	27

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab yang aktif dengan data termutakhir.		Ada/tidak	SK Kepala Dinas DPUPR Nomor 061 Tahun 2022	Ada
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBD kabupaten		Ada/tidak	994 Paket	Ada
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN		Ada/tidak	9 Paket	Ada
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/tidak	244 Paket	Ada
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/tidak	1247 paket	Ada
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten		Ada/tidak	Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2021	Ada
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi		Ada/tidak	1	Ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.				
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/tidak	30	Ada
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ada/tidak	76	Ada
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		Ada/tidak	0	Tidak ada
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/tidak	0	Tidak ada
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/tidak	0	Tidak ada
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/tidak	0	Ada
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan		Ada/tidak	0	Tidak ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.				
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten		Jumlah	570	570
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten		Jumlah	0	0
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten		Jumlah	304	304
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		Jumlah	0	0
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Jumlah	0	0
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya.		Jumlah	0	0
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.		Jumlah	0	0
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya.		Jumlah	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.						
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		unit	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam.		Orang	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		unit	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		unit	Surat Keterangan	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban Bencana		Unit	Surat Keterangan	0
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang Terfasilitasi		orang	Nota Dinas Kepada Pj. Bupati Jepara, Permohonan Bansos TDD RTLH th 2023	15
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		ha	Surat Keterangan	0
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	Surat Keterangan	0
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	Surat Keterangan	0
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	Surat Keterangan	0
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	SK Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov Jawa Tengah NO 130/XI/2023 Tentang	6

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						PenerimaBansos Stimulan Material/Bahan Bangunan Pada Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah TA 2023	
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	Surat Keterangan	0
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	Surat Keterangan	0
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	Update Data Baseline Kawasan kumuh tahun 2023	64,56
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	Dok. Data Unit RTLH Bidang Permukiman TA 2023	1.375
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	Update Data Baseline Kawasan kumuh tahun 2023	3,17
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	Data Base Bappeda tahun 2022	365.673
		2	Jumlah unit PK RTLH		Rumah	Dok. Data Unit RTLH Bidang Permukiman TA	1.375

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						2023	
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	Dok. Data Unit RTLH Bidang Permukiman TA 2023	9.734
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun)		Rumah	Surat Keterangan	0
		5	Rasio rumah dan KK.	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100\%$	%	$\frac{421.975}{365.673} \times 100$	115,39 %
		6	Jumlah rumah pembangunan baru			Dok. Data Unit RTLH Tahun 2023	0
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	5
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan Lingkungan		Rumah	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	7
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	323

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	7
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi		Pengembang	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	7
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.		Pengembang	Dok. Data Bidang Perumahan Tahun 2023	34
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.						
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani.		Jumlah.	8	8
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan.		Orang	2.240	2.240
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda/Perkada	8	8
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Orang	3	3
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		SOP	5	5
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		Sarpras	Ada	Ada
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	%	1 ----- x 100% 1	100
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100% Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	864.234 ----- x 100% 864.234	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen RPB yg lengkap dan sudah disahkan	%	Tidak melaksanakan	Tdi
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah	%	Tidak melaksanakan	Tdi

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan}} \times 100\%$	%	$\frac{620}{129.287} \times 100\%$	0,05
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{620}{129.287} \times 100\%$	0,05
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{1.257.580}{1.257.580} \times 100\%$	100
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	%	$\frac{1.257.580}{1.257.580} \times 100\%$	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	%	Tidak Ada Penetapan status KLB	Tdi
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam utk setiap penetapan darurat bencana ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	%	6 ----- x 100% 6	100
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- x 100% Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	%	869 ----- x 100% 869	100
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- x 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	%	4.759 ----- x 100% 4.759	100
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten		Layanan	202	202
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	3	3
		3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian di kantor kecamatan		orang	26	26
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	0	0
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	14	14
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		orang	28	28
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.		Orang	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam Kebakaran.		kegiatan	0	0
6	SOSIAL.						
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		jenis	2	2
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Anak	1.380	1.380
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terbentuk		Unit	1	1
		4	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dijangkau		orang	1.380	1.380
		5	Jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Unit	4	4
		6	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Orang	1006	1006
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		shelter	1	1
		8	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang		Orang	25	25

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Orang	345	345
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.		paket	21	21
		11	jumlah paket perbekalan yang tersedia		paket	0	0
		12	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		orang	0	0
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah/shelter.		orang	0	0
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan		Orang	39	39
		15	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik , mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/ pusat kesejahteraan sosial		Orang	256	256
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat.		paket	3	3

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		17	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		orang	0	0
		18	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.		Orang	9	9
		19	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Orang	29	29
		20	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Orang	18	18
		21	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk		Orang	12	12
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten					
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan Makanan		Orang	159	159
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang		Orang	0	0
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang Dimiliki			0	0
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok Rentan		Paket	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	0	0
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang Tersedia		Orang	31	31
7	TENAGA KERJA						
		Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kab.		Ada/Tidak	Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Jepara Tahun 2021-2026	Ada
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		%	Data satkernas dan proyeksi RTKD	81,36
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		Jumlah	2	2
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun 2023 ----- x 100% keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster	%	20 ----- x 100% 40	50

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				pada tahun 2023			
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2023 ----- x 100% jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2023	%	5 ----- x 100% 9	56
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	Jumlah instruktur tahun 2023 ----- x 100% jumlah peserta pelatihan pada tahun 2023	%	9 ----- x 100% 319	2,82
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2023 ----- x 100% jumlah seluruh LPK pd th 2023	%	9 ----- x 100% 31	29
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2023 ----- x 100% jumlah LPK yang terdata pada tahun 2023	%	31 ----- x 100% 31	100
		6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	720 orang	720
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan ----- x 100% Jumlah orang yang dilatih	%	720 ----- x 100% 720	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				pada tahun 2023			
		8	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2023}}{\text{jumlah lulusan pada tahun 2023}} \times 100\%$	%	$\frac{66}{192} \times 100\%$	34
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2023}} \times 100\%$	%	$\frac{150}{720} \times 100\%$	21
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	%	$\frac{303}{303} \times 100\%$	100
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		orang	303 orang	303
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2023}}{\text{-----}} \times 100\%$	%	$\frac{5}{429} \times 100\%$	1,29

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				jumlah perusahaan pada th 2023			
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan Modal + pertumbuhan tenaga kerja).	%	5,17	5,17
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2022 ----- x 100% Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	%	160 ----- X 100% 429	37,30
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020 ----- x 100% Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh	%	12 ----- X 100% 24	50
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di Perusahaan		SP/SB	42	42
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan	%	80 ----- x 100%	47

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				skala Upah ----- x 100% Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		172	
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ----- x 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	%	1.175 ----- x 100% 1.653	71
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun 2023	%	97 ----- x 100% 429	23
		7	Jumlah mogok kerja		jumlah	3	3
		8	Jumlah penutupan perusahaan		jumlah	0	0
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		jumlah	0	0
		10	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		jumlah	0	0
		11	Jumlah perselisihan PHK		jumlah	51	51
		12	Jumlah Pekerja yang ter-PHK		Orang	292	292

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		jumlah	28	28
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang Diberdayakan		Ada/tidak	ada	ada
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$	%	$\frac{79}{79} \times 100\%$	100
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten					
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab		jumlah	12.457	12.457
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		orang	17.504	17.504
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		jumlah	45	45
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam Kab		orang	411	411
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	2	2
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		jumlah	0	0
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota.		jumlah	303	303

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER).		Orang	9.967	9.967
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI/CTKI}} \times 100\%$	%	303 ----- x 100% 303	100
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.		Orang	303	303
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan.	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	%	11 ----- x 100% 11	100
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$	%	303 ----- x 100% 303	100
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	%	20 ----- x 100% 20	100
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk.	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong}} \times 100\%$	%	0 ----- x 100% 0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				PMI/TKI.			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.						
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang telah dilatih PUG		Lembaga	43 OPD	43 OPD
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten.		Program/kegiatan	12 Program / 81 Kegiatan	12 Program / 81 Kegiatan
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab					
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Media Massa	3 Media massa	3 Media massa
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.		lembaga	39 lembaga	39 lembaga
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani.	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- x 100% jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten		10 -----x100% 10	100
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat Pelatihan		lembaga	22 (P2TP2A kab Jepara , Forum Anak Jepara (FAJAR) , Disdikpora ,	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Satpol PP dan Damkar Dishub, Disperkim, DPMPTSP, Disperindag, DPUPR, Bappeda, Diskominfo, Disparbud, Kesbangpol, DLH, Polres, Diskopukmnakertrans, Dinsospermades,BPBD, Diskarpus,Dinkes, Forum Genre Jepara, Jepara Volunteer)	
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD kab)		Lembaga	P2TP2A dan Forum Anak Jepara	2
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab yang mendapatkan pelatihan		organisasi	0	Tidak ada kegiatan
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kab yang sudah dilatih		Orang	0	Tidak ada kegiatan
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		lembaga	0	Tidak ada kegiatan

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten		Lembaga	0	Tidak ada kegiatan
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/ program	1 perda (No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda no. 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak) Dan Perbup Nomor 42 Tahun 2017 tentang SOP Penyelenggaraan Perlindungan anak dan perempuan (PPAP)	
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah Terstandardisasi		Lembaga	1 Lembaga (P2TP2A)	
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	%	$\frac{15}{15} \times 100\%$	100
9	Pangan.						

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase Ketersediaan Pangan					
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada/Tidak	Foto gudang dan cadangan pangan pemerintah	Ada
		2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	Foto penyerahan simbolis beras cadangan pangan pemerintah (CPP) pada daerah rawan pangan	Ada
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	Surat Keterangan Kepala Dinas terkait belum tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal di Kabupaten Jepara	Tdi
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	DPA Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ada
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	Foto cover buku Peta FSVA 2023	Ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Tertanganinya kerawanan pangan.	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Foto BAST dan simbolis penyerahan bantuan daerah rawan pangan	Ada
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan.	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Foto BAST dan penyerahan simbolis beras cadangan pangan pada daerah rawan pangan	Ada
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar.	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	Foto kegiatan/ hasil pengawasan keamanan pangan segar	Ada
10	Pertanahan.						
		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati / walikota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya). ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun.	%	67+0 ----- x 100% 67	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek.	$\frac{\text{Jumlah penerbitan sk penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absente}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform}} \times 100\%$	%	Suket Bag. Pemerintahan Dan BPN Kab. Jepara.	0
		3	SK Bupati /Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absente.	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek.}} \times 100\%$	%	Suket Bag. Pemerintahan Dan BPN Kab. Jepara	0
		4	Dokumen Izin membuka tanah	$\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + dokumen izin membuka tanah yang ditolak}}{\text{Jumlah dokumen izin}} \times 100\%$	%	Surat keterangan	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				membuka tanah yang dimohon dalam 1 Tahun			
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- x 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 th	%	130 ----- x 100% 167	77,84
11	Lingkungan Hidup						
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten					
		1	Hasil Perhitungan kabupaten terhadap : a) Indeks Kualitas Air,(IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			a) IKA = 31,00 b) IKU = 85,54 c) IKTL = 54,44	a) IKA = 31,00 b) IKU = 85,54 c) IKTL = 54,44
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten					
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab.	- Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah thd volume timbunan sampah - Tersedianya iformasi terkait kapasitas TPA thd volume timbunan sampah - Tersedianya informasi terkait		Di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 tentang tersedianya informasi terkait TPST TIDAK ADA. Adanya PDU dan TPS3R	Di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 tentang tersedianya informasi terkait TPST TIDAK ADA. Adanya PDU dan TPS3R

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan			
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten					
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten.	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten ----- x 100% jumlah usulan permohonan yang teregestrasi.	%	27 ----- 100% 27	100
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab.	Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100% Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin ingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab	%	2 ----- x 100% 16	12,5
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kab.	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda ----- x 100% Jumlah usulan MHA	%	0 ----- x 100% 0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada.	%	0 ----- x 100% 0	0
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- x 100% Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	%	0 ----- x 100% 0	0
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab yang Ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	%	16 ----- x 100% 16	100
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
		Perekaman KTP Elektronik					
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	%	8.804 ----- x 100% 8.807	99,97

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan	%	1.913 ----- x 100% 2.190	87,35
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan	%	9.494 ----- x 100% 9.494	100
		4	Penyajian data kependudukan.	Jumlah Penyajian data kependudukan skala kab dalam 1 tahun. ----- x 100% 2 semester	%	2 ----- x 100% 2	100
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
			Persentase Pengentasan Desa Tertinggal				
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		desa	11	11
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun Sebelumnya.		desa	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		lembaga	6	6
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan Pemberdayaan		desa	184	184
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
			TFR				
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada/Tidak	-	-
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun.	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	%	22,91	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	bi $ASFR_i = f \times k$	Per 1000	4,83%	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				<i>pi</i> ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun			
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE ----- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE	%	420 367 -----x100% 1.264.598	33,24
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Stakeholder	18	18
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ----- x 100% Jumlah faskes	%	48 -----x100% 60	80,00
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	Jumlah Peserta KB Aktif ----- x 100% Jumlah PUS	%	145.296 -----x100% 205.185	70,81

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Pemerintah Daerah kab yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		kelompok	69 Kelompok	69 Kelompok
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern) ----- x 100% jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	%	9.375 -----x100% 17.925	52,30
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		1	Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah	Jumlah desa yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kab ----- x 100% Jumlah desa dalam kab	%	58.577 -----x100% 119.757	48,91
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI ----- x 100% Jumlah Keluarga PBI	%	16 -----x100% 195	8,21
15	Perhubungan.						
		Rasio konektivitas					
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C.	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang	%	94 ----- x 100% 170	55,30

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				angkutan jalan Tipe C yang tersedia ----- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan			
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala.	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- x 100 % Jumlah kendaraan wajib uji	%	11,934 ----- x 100% 24,974	47,79
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kab, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.	Jumlah penetapan tariff lintas penyeberangan ----- x 100% Juml lintas penyebngdlm kab	%	5 ---- x 100% 5	100
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan kota.	%	689 ----- x 100% 19.745	35
16	Komunikasi dan Informatika.						

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100% Jumlah Perangkat Daerah.		$\frac{33}{42} \times 100\%$	78,57 %
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100% Jumlah Perangkat Daerah		$\frac{33}{42} \times 100\%$	78,57 %
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak)	Ada/tidak	ADA	Data dukung terlampir

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi						
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015) ----- x 100% Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pd Pemda	%	$\frac{33}{33} \times 100\%$	100
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	$\frac{42}{42} \times 100\%$	100

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Persentase perangkat daerah yang pengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ----- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah	%	$\frac{42}{42} \times 100\%$	100
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- x 100% Jumlah layanan	%	$\frac{314}{314} \times 100\%$	100
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik.	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- x 100% Jumlah layanan	%	$\frac{77}{314} \times 100\%$	24,52

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	%	$\frac{314}{314} \times 100\%$	100
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$	%	$\frac{313}{313} \times 100\%$	100
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100 (Kecamatan tidak termasuk)
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{26}{26} \times 100\%$	100 % (Kecamatan tidak

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja termasuk)
				----- x 100% Jumlah perangkat daerah			
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- x 100% Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	%	39 ----- x 100% 71	54,92
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	%	25 ----- x 100% 26	96,15 % (Kecamatan tidak dihitung)
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo ----- x 100% Jumlah ASN Pengelola TIK	100%	5 ----- x 100% 64	7,81 %
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government.		Ada/tidak	ADA	1. Peraturan Bupati Nomor50 Tahun 2019 Tentang Masterplan Smart City Kabupaten

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
							Jepara 2. Peraturan Bupati Nomor62 Tahun 2020 Tentang Penyelengga raan Sistem Pemerintaha nBerbasis Elektronik di Lingkungan Pemkab. Jepara 3. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pedoman TataKelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah					
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab	$\frac{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemda}} \times 100\%$	%	$\frac{125}{125} \times 100\%$	100 %
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\Sigma \text{ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemkab}} \times 100\%$	%	$\frac{14.744}{14.744} \times 100\%$	100 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP ----- x 100% Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik	%	1.753 ----- x 100% 1.753	100 %
17	Koperasi dan UKM						
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kab	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	%	5 ---- x 100% 523	0,96

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	1 ----- x 100% 1	100
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	51 ----- x 100% 685	7,45
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	%	51 ----- x 100% 277	18,41
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100%	%	166 ----- x 100% 685	24,23

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah koperasi yang ada			
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{545}{163.613} \times 100\%$	0,33
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{7}{685} \times 100\%$	1,02
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan.				Tidak diisi
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{685}{685} \times 100\%$	100
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{685} \times 100\%$	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	3 ----- x 100% 685	0,44
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	169 ----- x 100% 685	24,67
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab dalam 1 (satu) daerah kab/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	1 ----- x 100% 685	0,15
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha					
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- x 100% Jumlah wirausaha yang ada	%	3.729 ----- x 100% 77.683	4,80
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data	%	0 ----- x 100%	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				online (ODS) ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada		77.683	
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra.	Jumlah usaha mikro yang bermitra ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	223 ----- x 100% 77.683	0,29
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	%	206 ----- x 100% 77.477	0,27
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran ----- x 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	%	740 ----- x 100% 76.943	0,96
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihan ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	4.100 ----- x 100% 77.683	5,28

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	%	914 ----- x 100% 77.683	1,18
18	Penanaman Modal						
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten					
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Jumlah fasilitas/insentif di bidang peanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota yang bisa diberikan kepada investor	Ada/Tidak	1	1
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Ada/Tidak	10	10
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Jumlah laporan	4	4
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan	2	2
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan	104	104

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan	11	11
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi	812	812
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	Jumlah perizinan dan non perizinan	15.804	15.804
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi	8.928.971.312.243	8.928.971.312.243
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Jumlah aparatur	25	25
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan	753	753
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kab	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	Ada	17	17
19	Pemuda dan Olahraga						
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	200	200
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	200	200
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan	Orang	1.058	1.058
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah Pengelola Organisasi	Orang	958	958
		Peningkatan Prestasi Olahraga					
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih yang memiliki kompetensi.	Orang	63	63
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		kali	9	9
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
		1	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak	Ada/tidak	ADA	1. Jepara DalamAngka 2. PDRD 3. Statistik

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
							Sektoral Kab. Jepara
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang dilakukan	Ada/tidak	0	(data dukung terlampir)
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang dilakukan	Ada/tidak	239	(data dukung terlampir)
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah Survei Statistik Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Ada/tidak	0	(data dukung terlampir)
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Ada/tidak	239	(data dukung terlampir)
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	%	$\frac{91}{239} \times 100\%$	38,08
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	%	$\frac{95}{95} \times 100\%$	100
21	Persandian.						
		Tingkat keamanan informasi pemerintah					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan .	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----- x 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada	%	10 ----- x 100% 10	100 %
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah.	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- x 100% Jumlah SE yang ada.	%	314 ----- x 100% 314	100 %
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- x 100% Jumlah SE yang ada	%	314 ----- x 100% 314	100 %
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah titik teramankan ----- x 100% Jumlah titik pada PHKS	%	52 ----- x 100% 52	100 %
22	Kebudayaan						
		Terlestarikannya Cagar Budaya					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	obyek	32	32
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	obyek	7	7
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	Obyek	32	32
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	Tim	14	14
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	Obyek	5	5
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	obyek	3	3

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kota ke luar kota dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	Cagar Budaya	-	-
		8	Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	Cagar Budaya	-	-
		9	Pemanfaatan cagar budaya kab (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	Cagar Budaya	5	5
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	koleksi	612	612
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	Orang	30.114	30.114
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum		15	15
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	Tim	1	1
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	Tim	1	1
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Tim	-	-
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	orang	9	9

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	Orang	-	-
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB +Museum)	Unit	38	38
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	15	15
23	Perpustakaan						
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	%	620.975 ----- x 100% 1.264.598	49,10
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite ----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya	%	39.232 ----- x 100% 1.264.598	3,10
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di Wilayahnya	%	967 ----- x 100% 1.264.598	0,08

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100% Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)			
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- x 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	%	20 ----- x 100% 915	2,19
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		kali	Pelayanan Perpustakaan Keliling : 1.342 kali Lomba dalam rangka Minat Baca dan Lomba Perpustakaan : 3 kali Sosialisasi Gemar Membaca : 1 kali Jumlah Total : 1.346 kali	1.346
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya.		Jumlah	Surat Keterangan	0
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Jumlah Naskah kuno	Surat Keterangan	0
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di		Jumlah Budaya	214	214

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			wilayahnya (item)		etnis		
24	Kearsipan						
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dibagi jumlah seluruh arsip x 100%	%	$\frac{96.870}{142.937} \times 100$	67,77
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip dibagi Jumlah seluruh arsip inaktif kali 100%	%	$\frac{183.056}{225.113} \times 100$	81,32
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu Balik dibagi Jumlah seluruh arsip Statis kali 100%	%	$\frac{93.835}{93.835} \times 100$	100
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kota kali	%	$\frac{1.781}{462.885} \times 100$	0,38

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				100%			
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah	2.039	2.039
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Jumlah	0	0
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK di kabupaten		Jumlah	64	64
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK.		jumlah	4.087	4.087
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai dengan NSPK.		Jumlah	4	4
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab yang sesuai NSPK.		Jumlah	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
URUSAN PILIHAN							
25	Kelautan dan Perikanan.						
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)					
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		Orang/RT	339	339 RT
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional.	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional ----- X 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten	%	6 ---- x 100% 10	60%
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan		Jumlah.	41	41
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan).		orang	551	551

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi.		ekor	433.777.985	433.777.985
26	Pariwisata						
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan					
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		24	24
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		169	169
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	TUDP	2.394	2.394
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Orang	15.251	15.251
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Kegiatan	17	17
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten.	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Orang	-	-
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Industi	12	12

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi.	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$	%	$\frac{68}{1.445} \times 100 \%$	4,70
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor Kepariwisataan.	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	%	$\frac{310}{310} \times 100\%$	100
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha Masyarakat.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	30	30
27	Pertanian						
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun					
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Unit.	Cultivator : 4 Traktor Roda2 : 36 Pompa Air : 5 APPO : 3 Hand Sprayer : 10 Power Thresher : 3 JUT : 34RJIUT : 36 EMBUNG : 1 SUMUR DALAM : 4	128

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Prasaran pertanian yang digunakan		Unit	JUT : 36 RJIUT : 26 EMBUNG : 1 SUMUR DALAM: 4	67
		3	Penerbitan izin usaha pertanian.		dokumen	0	0
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- x 100% Jumlah prasarana yang dibangun.	%	67 ----- x 100% 67	100%
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kabupaten/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi ----- x 100% Jumlah usulan usaha pertanian	%	0 ----- x 100% 0	tdi
		6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yg ditanggulangi ----- x 100 Luas area yg terkena bencana Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan	%	1.723 ha ----- x 100% 1.733 ha.	99,42

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				bencana penyakit hewan menular.			
28	Kehutanan (tidak menyelenggarakan urusan kehutanan)						
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan. Tahura			Surat keterangan	Tdi
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			Surat keterangan	Tdi
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura.			Surat keterangan	Tdi
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			Surat keterangan	Tdi
29	ESDM (Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten)						
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab./kota		Surat keterangan	Tdi
30	Perdagangan						
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan.	Jumlah izin took swalayan yang di terbitkan < 5 hari kerja Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya	%	84 ----- x 100% 84	100 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				sudah lengkap dan benar			
		2	Persentase penerbitan TDG.	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}} \times 100\%$	%	$\frac{84}{84} \times 100\%$	100%
		3	persentase gudang yang tidak memiliki TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{31}{31} \times 100\%$	100%
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :				
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$	%	0	0 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlahpermohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri			
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	%	0	0%
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan	%	0	0 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				dari waralaba luar negeri			
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab.	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah ----- x 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer	%	0 ----- x 100% 0	0%
		6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu.	Jumlah SPKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam ----- x 100% Jumlah permohonan penerbitan SPKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	%	0	SPKA sudah menjadi kewenangan provinsi
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan	%	K= (a+b) x 100 = (0,5 + 0,5) x 100 = 100 %	100 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)			
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Jumlah prosentase komoditi ----- x 100% Jumlah komoditi	%	954,62 ----- x 100% 76	13 %
		9.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a / (b \times c) \times 100\%$ X = persentase jumlah pupuk yang disalurkan A= jumlah pupuk yang disalurkan B= target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (kp3) di tngkat kota sebesar (90% dar RDKK) C= rdkk (rencana definitive kebutuhan pokok)	%	a =19.369.572,97 b = 90% *24.568.315 =22.111.485,5 c = 24.111.483,5 $x = a / (b \times c) \times 100\%$ =19.369.572,97 / (22.111.493,5 x 24.568.315) x 100 % = 3,56 %	3,56 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		10.	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan.	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab kota	%	3022 ----- x 100% 3022	100%
		11.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- x 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	%	8 ----- x 100% 8	100%
31	Perindustrian						
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab.	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	0 ----- x 100 % 0	0
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					
		1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan iPersentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK: a. tercapainya nakah akademik (30%) b. tersusunnya draft Raperda RPIP (20%) c. Draft Raperda RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi kementerian perindustrian (25%) d. Persetujuan draf Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25 %) e. Penetapan Perda	%	a+b+c+d+e 30+20+0+0+0 = 50	50 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				RPIP (10%)			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	10551 ----- x 100% 10551	100 %
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil yang diterbitkan.	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	0 ----- x 1-00% 0	0
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten.	Jumlah data perusahaan industri kecil & perusahaan kawasan industri di kab di SIINas ----- x 100% Total populasi perusahaan industri besar & perusahaan kawasan industri di kab.	%	10551 ----- x 100% 10551	100 %
31	Transmigrasi.						
		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi. Penetapannya.	Kawasan	jumlah	surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Kalimantan Tengah	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya.	pemukiman	jumlah	surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	0
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.	Pemukiman	jumlah	surat keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor 475/1769 Tahun 2023 perihal Pengembalian Alokasi	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Penambahan kuota Kabupaten/Kota untuk Transmigrasi dengan tujuan penempatan di Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah	



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 130/35 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

BUPATI JEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusun LPPD, LKPJ, dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10 Tahun 2023);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 35 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Penyusun Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data dan dokumen pendukung dari semua Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Mengarahkan dan mengkoordinasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023; dan
- d. Menyusun buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 Februari 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



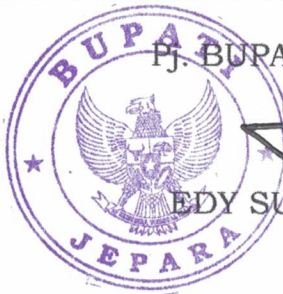
EDY SUPRIYANTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN BUKU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN
1.	Penanggung jawab	Pj. Bupati Jepara	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara	
5.	Anggota	➤ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara ➤ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jepara ➤ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Jepara ➤ Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara ➤ Staf Bagian Pemerintahan Setda Jepara ➤ Petugas Penyusun data pada Perangkat Daerah se- Kabupaten Jepara	Rapawi, S.So,I., MM Laily Nuraini, S,PSi Wilissawitri Dwiana Santhi, S.T., M.T Shavira Lazuardh Thalfah, S.,S 1. Lindayani 2. Sigit Wicaksono 3. Johan Arifin Etkisyan 4. Rizal Fahta Satu Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) orang petugas penyusun data

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA





BUPATI JEPARA

Jepara 11 Maret 2024

NOMOR : 131/0131

SIFAT : Penting.

LAMPIRAN : Buku LPPD.

PERIHAL : Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023.

K e p a d a

Yth. Menteri Dalam Negeri R.I.

Cq.: Gubernur Jawa Tengah

Di –

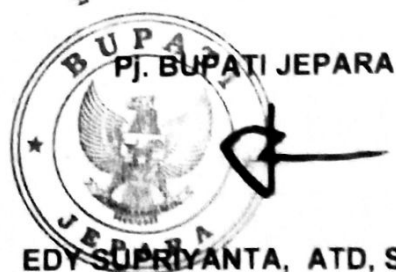
SEMARANG

Dengan ini disampaikan bahwa, dalam rangka melaksanakan amanat dan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait kewajiban Kepala Daerah menyampaikan *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)*, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 *pasal 69 ayat (1)* tersebut, penyampaian LPPD dijelaskan dalam pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa, *"Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/ Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun"*, kemudia diperjelas dalam ayat (3) *"LPPD Kabupaten disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir"*.

Berkenaan dengan hal dimaksud, bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023, guna sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan penilaian, perumusan kebijakan, serta pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum dan terima kasih.



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM